

Tanggal Efektif	:	8 Juni 2018
Masa Penawaran Umum	:	22, 25-28 Juni 2018
Tanggal Penjatahan	:	29 Juni 2018
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	3 Juli 2018
Tanggal Distribusi Efek Secara Elektronik	:	3 Juli 2018
Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia	:	4 Juli 2018

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI ATAS EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK. ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk

Bidang Usaha:

Jasa serta Konsultasi di bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi, Investasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Financial Center, Lantai 21

Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886

Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

Website : www.mncfinancialservices.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II MNC KAPITAL INDONESIA DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI BERKELANJUTAN II")

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN II MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018 DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini berjangka waktu 5 (lima) tahun, ditawarkan sebesar Rp188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2018 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 3 Juli 2023. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan kemudian.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS BERUPA GADAI ATAS SAHAM PERSEROAN MILIK PT MNC INVESTAMA TBK ("BHIT") DENGAN NILAI SEKURANG-KURANGNYA 150% (SERATUS LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI PADA SAAT TANGGAL EMISI DAN MENJAGA JAMINAN DENGAN NILAI SEBESAR 110% (SERATUS SEPULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI SELAMA JANGKA WAKTU OBLIGASI. APABILA NILAI JAMINAN KURANG DARI 110% (SERATUS SEPULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI MAKA PERSEROAN DIWAJIBKAN UNTUK MELAKUKAN TOP UP SEHINGGA JAMINAN TERCUKUPI MENJADI MINIMAL SEBESAR 150% (SERATUS LIMA PULUH PERSEN) DARI NILAI POKOK OBLIGASI.

HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENTIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*) TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS EFEK HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

idBBB (*Triple B*)

Pencatatan atas Obligasi yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek Indonesia

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



PT MNC SEKURITAS
(TERAFILIASI)

Penawaran Obligasi ini dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*)

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

PT MNC Kapital Indonesia Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Obligasi sehubungan dengan Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018” kepada Otoritas Jasa keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 20/MNCKI/DIR/III/2018 tanggal 29 Maret 2018, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UUPM”).

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018” dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek yang dibuat antara Perseroan dengan BEI No. SP-00003/BEI.PP2/04-2018 tanggal 23 April 2018. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi akan dibatalkan dan uang pemesanan pembelian Obligasi yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan Obligasi sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran data, kejujuran pendapat, keterangan dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap Pihak Terafiliasi tidak diperkenankan memberi penjelasan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yaitu PT MNC Sekuritas menjadi pihak yang terafiliasi langsung dengan Perseroan, sedangkan Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut serta dalam Penawaran Umum Obligasi ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Penjelasan mengenai definisi Afiliasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG SERTA PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURIDIKI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xiii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	19
III. PERNYATAAN UTANG	21
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	41
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	43
VI. FAKTOR RISIKO	53
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	59
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA	60
1. Riwayat Singkat Perseroan	60
2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan	62
3. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak	64
4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum	66
5. Pengurusan dan Pengawasan	67
6. Sumber Daya Manusia	81
7. Struktur Organisasi Perseroan	88
8. Keterangan Mengenai Entitas Anak yang Memiliki Kontribusi 10% (Sepuluh Persen) atau Lebih dari Total Aset, Total Liabilitas, atau Laba (Rugi) sebelum Pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak	89
9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak	96
10. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi	98
11. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak	99
12. Asuransi	101
13. Transaksi dengan Pihak Afiliasi	101
14. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Ketiga	102
15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak	104
16. Kegiatan Usaha	106
17. Strategi Perseroan	109
18. Penghargaan	114
19. Prospek Usaha	117
20. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance/ GCG</i>)	121
21. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (<i>Corporate Social Responsibility</i>)	121
22. Keunggulan Kompetitif	123

IX. PERPAJAKAN	126
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI	127
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	129
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	132
XIII. TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI	139
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI	143
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	145
XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK	193

DEFINISI DAN SINGKATAN

Kecuali ditentukan lain dalam Prospektus, istilah-istilah dengan huruf besar dalam Prospektus mempunyai arti sebagai berikut:

- | | |
|--|--|
| Afiliasi | : Berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM pasal 1 ayat 1 dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; b. hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut; c. hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang sama; d. hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut; e. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau f. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama. |
| Agen Jaminan | : Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dalam kapasitasnya sebagai Agen Jaminan (untuk kepentingan Pemegang Obligasi) dan pengganti-penggantinya. |
| Agen Pembayaran | : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI beserta para pengganti dan penerima haknya, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang telah ditunjuk Perseroan dengan perjanjian tertulis yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, serta denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan, dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran. |
| Akta Gadai Saham | : Berarti pengalihan saham untuk tujuan penjaminan yang dilakukan oleh Perseroan, Wali Amanat dan Agen Jaminan (untuk dan atas nama Pemegang Obligasi) sehubungan dengan penyediaan Jaminan, sebagaimana termaktub dalam Akta Gadai Saham yang akan ditandatangani selambat-lambatnya pada tanggal emisi. |
| Bank Kustodian | : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal. |
| Bapepam dan/atau Bapepam dan LK (sekarang telah menjadi OJK) | : Berarti Bapepam dan Lembaga Keuangan yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan ("DJLK"), sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 606/KMK.01/2005 tanggal 30-12-2005 (tiga puluh Desember dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 184/PMK.01/2010 tanggal 11-10-2010 (sebelas Oktober dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam |

dan LK ke OJK dan sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang No. 21 Tahun 2011 tentang OJK.

- BNRI : Berarti Berita Negara Republik Indonesia.
- Bunga Obligasi : Berarti bunga Obligasi per tahun yang harus dibayar oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
- BEI : Berarti PT Bursa Efek Indonesia atau pengganti atau penerima haknya dimana Obligasi dicatatkan yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM.
- Daftar Pemegang Rekening : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- Denda : Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar tingkat Bunga Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian sejak keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Dokumen Emisi : Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Gadai Saham, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI, Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek, Prospektus, Prospektus Ringkas dan Pernyataan Pendaftaran serta dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini yang disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
- DPS : Berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh BAE Perseroan.
- Efek : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang/kewajiban, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek.
- Efektif : Berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan Ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor: Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Atas dasar lewatnya waktu yaitu:

- (i) 45 (empat puluh lima) hari sejak Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam formulir Pernyataan Pendaftaran,
 - (ii) 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi, atau,
 - b. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
- Emisi : Berarti suatu Penawaran Umum Obligasi oleh Perseroan yang dilakukan untuk dijual dan diperdagangkan kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
- Entitas Anak : Berarti perusahaan-perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
- Force Majeure* : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, yang mempunyai akibat negatif terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
- Hari Bank : Berarti hari kerja bank dimana kantor pusat Bank Indonesia di Jakarta menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
- Hari Bursa : Berarti setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Hari Kalender : Semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan gregorius kalender tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- Hari Kerja : Berarti Hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
- IAPI : Berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
- Konfirmasi Tertulis : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.

Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSI ("KTUR")	: Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Obligasi ("RUPO") atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	: Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
Menkumham	: Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Obligasi	: Berarti Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018.
OJK atau Otoritas Jasa Keuangan	: Berarti lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-undang OJK) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, dimana OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari BAPEPAM dan/atau BAPEPAM dan LK dan/atau Bank Indonesia sesuai ketentuan pasal 55 Undang-Undang OJK, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
Pemegang Obligasi	: Berarti masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik efek di KSEI, yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek atau pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
Pemeringkat Efek	: Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia "Pefindo".
Pemerintah	: Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
Penawaran Awal	: Berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Obligasi yang akan ditawarkan dan perkiraan tingkat Bunga Obligasi.

Penawaran Umum	: Berarti kegiatan penawaran Obligasi, yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.
Pengakuan Utang	: Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang No. 4 tanggal 3 April 2018 <i>juncto</i> Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Pengakuan Utang No. 67 tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Penitipan Kolektif	: Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Efek	: Berarti pihak-pihak yang melaksanakan Penawaran Umum atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang telah memiliki Rekening Efek sesuai dengan ketentuan KSEI.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek	: Berarti PT MNC Sekuritas yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014	: Berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 08-12-2014 (delapan Desember dua ribu empat belas) tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2015	: Berarti Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2015 tanggal 03-11-2015 (tiga November dua ribu lima belas) tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015	: Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22-12-2015 (dua puluh dua Desember dua ribu lima belas) tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.

Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015	:	Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29-12-2015 (dua puluh sembilan Desember dua ribu lima belas) tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017	:	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14-03-2017 (empat belas Maret dua ribu tujuh belas) tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
Peraturan No. VI.C.3	:	Berarti Peraturan No.VI.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 01-08-2008 (satu Agustus dua ribu delapan) tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan antara Wali Amanat dengan Perseroan.
Peraturan No. VI.C.4	:	Berarti Peraturan No.VI.C.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2010 tanggal 06-09-2010 (enam September dua ribu sepuluh) tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.
Peraturan No.VIII.G.12	:	Berarti Peraturan Bapepam No.VIII.G.12, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004, tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus.
Peraturan No.IX.A.2	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009, tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.8	:	Berarti Peraturan Bapepam No.IX.A.8, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-41/PM/2000 tanggal 27 Oktober 2000 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan No.IX.C.11	:	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No.IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkat Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
Perjanjian Agen Pembayaran	:	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi No. 5 tanggal 3 April 2018 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI	:	Berarti Perjanjian Pendaftaran Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 di KSEI No. SP-021/PO/KSEI/0218 tanggal 3 April 2018 yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup oleh dan antara Perseroan dengan KSEI berikut perubahan-perubahannya

	dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek	: Berarti perjanjian antara Perseroan dengan Bursa Efek, sebagaimana ternyata dari perjanjian No. SP-00003/BEI.PP2/04-2018 tanggal 23 April 2018, yang dibuat di bawah tangan bermaterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 3 tanggal 3 April 2018 <i>juncto</i> Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 66 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek	: Berarti Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi	: Berarti perjanjian perwaliamanatan yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan Wali Amanat dengan syarat dan ketentuan yang dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 2 tertanggal 3 April 2018 <i>juncto</i> Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 65 tanggal 30 Mei 2018 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta berikut perubahan-perubahannya, dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan di kemudian hari.
Perjanjian Perwaliamanatan	: Berarti Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	: Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 sebagaimana termaktub dalam akta No. 1 tanggal 3 April 2018 <i>juncto</i> Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 sebagaimana termaktub dalam akta No. 64 tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang sah yang dibuat oleh Perseroan yang bersangkutan di kemudian hari.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> Peraturan No. IX.A.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam tanggal 27 Oktober 2000 No. Kep-42/PM/2000 berikut dokumen-dokumen yang diajukan oleh Perseroan kepada Ketua OJK sebelum melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan kepada masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017.
Perseroan	: Berarti PT MNC Kapital Indonesia Tbk, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

Pokok Obligasi	: Berarti seluruh jumlah pokok Obligasi yang akan dikeluarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah) dan jumlah pokok tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.
Prospektus	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi yang disusun oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 UUPM, Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017, dengan memperhatikan Peraturan Nomor IX.A.2.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran kecuali informasi mengenai penjaminan Emisi Efek, tingkat suku bunga Obligasi, atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf a Peraturan No.IX.A.8.
Prospektus Ringkas	: Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017.
Rekening Efek	: Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan Kontrak Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh Pemegang Obligasi.
RUPS	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
RUPO	: Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPSLB	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Satuan Pemindahbukuan	: Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya yaitu senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan Obligasi mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
Satuan Perdagangan	: Berarti satuan pemesanan pembelian/perdagangan Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya Rp 5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	: Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI dan diterbitkan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Suara	: Berarti hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi dalam RUPO sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal Emisi	: Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran hasil emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	: Berarti tanggal dimana seluruh jumlah Pokok Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran dana hasil emisi Obligasi kepada Perseroan yang telah disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang juga merupakan Tanggal Emisi.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	: Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran.
Utang	: Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya.
UUPM	: Berarti Undang-undang No. 8 tahun 1995, tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	: Berarti Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUWDP	: Berarti Undang-undang No. 3 Tahun 1982 tanggal 1 Februari 1982 tentang Wajb Daftar Perusahaan yang diumumkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3214 tahun 1982, Tambahan No. 3214.
Wali Amanat	: Berarti pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM yang pada saat ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan di Jakarta, atau pengganti haknya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

DAFTAR SINGKATAN

BCAP	:	Berarti Perseroan atau PT MNC Kapital Indonesia Tbk.
BDNP	:	Berarti PT Bandung Nusantara Propertindo
BMNCI	:	Berarti PT Bank MNC Internasional Tbk
JKNP	:	Berarti PT Jakarta Nusantara Propertindo
MDNP	:	Berarti PT Medan Nusantara Propertindo
MKNP	:	Berarti PT Makassar Nusantara Propertindo
MNCAI	:	Berarti PT MNC Asuransi Indonesia
MNCAM	:	Berarti PT MNC Asset Management
MNCF	:	Berarti PT MNC Finance
MNCGU	:	Berarti PT MNC Guna Usaha Indonesia
MNCL	:	Berarti PT MNC Life Assurance
MNCS	:	Berarti PT MNC Sekuritas
PBNP	:	Berarti PT Palembang Nusantara Propertindo
RINP	:	Berarti PT Riau Nusantara Propertindo
SBNP	:	Berarti PT Surabaya Nusantara Propertindo
SGNP	:	Berarti PT Semarang Nusantara Propertindo
YKNP	:	Berarti PT Yogya Nusantara Propertindo

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terperinci. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 100 tanggal 15 Juli 1999, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, sesuai dengan Akta Pendirian No. 100 tanggal 15 Juli 1999, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	40.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Bhakti Investama Tbk	9.999.000	9.999.000.000	99,99
- Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk.	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000.000	30.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0936639.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0937536 tanggal 5 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3513712.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 20 April 2017, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0128739 tanggal 20 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051311.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 April 2017.

2. KEGIATAN USAHA

Maksud dan tujuan Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.AHU-0936639.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0937536 tanggal 5 Juni 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3513712.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 adalah berusaha di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, dan pembangunan.

3. STRUKTUR PERMODALAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 20 April 2017, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, Perseroan meningkatkan modal ditempatkan dan disetornya dalam rangka Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Kepada Pemegang Saham Perseroan ("HMETD") dan Penerbitan saham baru, yaitu Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 sejumlah 483.268.841 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu) saham. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 20 April 2017, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. No. AHU-AH.01.03-0128739 tanggal 20 April 2017, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051311.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 April 2017 dan berdasarkan Laporan Kepemilikan Efek Mencapai 5% atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek per tanggal 31 Januari 2018.

Sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Januari 2018 dari PT BSR Indonesia adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	3.824.398.989	382.439.898.900	69,88
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	505.900.000	50.590.000.000	9,24
- HT Capital Investment Ltd.	389.815.162	38.981.516.200	7,12
- Masyarakat*	752.724.167	75.272.416.700	13,76
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.472.838.318	547.283.831.800	100,00
Saham dalam Portepel	9.527.161.682	952.716.168.200	-

*) kepemilikan saham di bawah 5%

4. ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak berdasarkan DPS masing-masing Entitas Anak tertanggal 31 Desember 2017.

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
1.	MNCS	Penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek	Jakarta	99,99	2004	Beroperasi	Langsung
2.	MNCAM	Jasa pengelolaan investasi	Jakarta	99,99	2003	Beroperasi	Langsung
3.	MNCF	Pembiayaan konsumen	Jakarta	99,99	2003	Beroperasi	Langsung
4.	MNCAI	Jasa asuransi umum	Jakarta	99,98	2011	Beroperasi	Langsung
5.	MNCL	Jasa asuransi jiwa	Jakarta	99,98	2010	Beroperasi	Langsung
6.	MNCGU	Sewa guna usaha	Jakarta	99,99	2014	Beroperasi	Langsung
7.	BMNCI	Jasa perbankan	Jakarta	41,43	2014	Beroperasi	Langsung
8.	BDNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
9.	JKNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
10.	MDNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Beroperasi	Langsung
11.	MKNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
12.	PBNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
13.	RINP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Beroperasi	Langsung
14.	SBNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
15.	SGNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
16	YKNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung

5. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI OBLIGASI YANG AKAN DITERBITKAN

a. Obligasi

Nama Obligasi

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018”.

Jumlah Pokok Obligasi, Jangka Waktu dan Tingkat Bunga

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah), dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp112.000.000.000 (seratus dua belas miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya.

Pembayaran Bunga Obligasi

Bunga Obligasi akan dibayarkan Perseroan setiap 3 (tiga) bulan pada tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 3 Oktober 2018, sedangkan pembayaran terakhir Bunga Obligasi akan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 3 Juli 2023.

Tingkat bunga Obligasi merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat, di mana 1 (satu) bulan dihitung 30 (tiga puluh) hari dan 1 (satu) tahun dihitung 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

Harga Penawaran

100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

Jatuh Tempo

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada tanggal jatuh tempo Obligasi yaitu pada tanggal 3 Juli 2023, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

Satuan Pemindahbukuan

Rp 1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham Perseroan milik PT MNC Investama Tbk dengan sekurang-kurangnya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi pada saat Tanggal Emisi dan menjaga jaminan dengan nilai sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selama jangka waktu Obligasi.

Pembelian Kembali Obligasi (*buy back*)

1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali (*buy back*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali (*buy back*) tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan Obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini mengenai Perpajakan.

Cara dan Tempat Pelunasan Pinjaman Pokok dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pinjaman Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sesuai dengan jadwal waktu pembayaran. Apabila tanggal pembayaran jatuh bukan pada Hari Bank, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bank berikutnya.

Hasil Pemeringkatan Obligasi

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-269/PEF-DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idBBB
(Triple B)

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat.

6. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang

berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat Wajar dalam semua hal yang material. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Jumlah Aset	19.883.263	22.216.019
Jumlah Liabilitas	14.255.743	15.810.740
Jumlah Ekuitas	5.627.520	6.405.279

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

dalam jutaan Rupiah

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Jumlah Pendapatan	2.386.245	2.287.344
Jumlah Beban	3.366.964	2.345.139
Laba (rugi) sebelum pajak	(980.719)	(57.795)
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(737.629)	(38.941)
Penghasilan (beban) komprehensif lain setelah pajak	(41.478)	(61.602)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	(779.107)	(100.543)
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada		
Pemilik entitas induk	(334.654)	(45.713)
Kepentingan non pengendali	(402.795)	6.772
Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada		
Pemilik entitas induk	(381.776)	(107.639)
Kepentingan non pengendali	(397.331)	7.096
Laba (rugi) bersih per saham dasar (dalam Rupiah penuh)	(61,25)	(9,22)
Laba (rugi) bersih per saham dilusian (dalam Rupiah penuh)	(61,25)	(9,22)

Rasio Keuangan

Keterangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Rasio Usaha (dalam %)		
Laba (rugi) Sebelum Pajak/ Jumlah Pendapatan	(41,10)	(2,53)
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Pendapatan	(14,02)	(1,99)
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Ekuitas	(5,95)	(0,71)
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk / Jumlah Aset	(1,68)	(0,21)
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset	12,00	10,30
Rasio Keuangan (dalam %)		
*Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	53,41	43,96
*Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	15,12	12,67
Rasio Pertumbuhan (dalam %)		
Jumlah Pendapatan	4,32	n.a
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	1794,22	n.a
Jumlah Aset	(10,50)	n.a
Jumlah Liabilitas	(9,84)	n.a
Jumlah Ekuitas	(12,14)	n.a

*Jumlah liabilitas setelah dikurangi dengan simpanan pihak ketiga, simpanan pihak berelasi, simpanan dari bank lain, utang bank dan institusi keuangan non-bank, utang AI-Musyarakah dan utang AI Mudharabah

7. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi, akan dipergunakan seluruhnya untuk :

1. Sejumlah Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) akan dipergunakan untuk pelunasan (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu pinjaman Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahun 2013 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 5 Juli 2018;
2. Sisa dana akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

8. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor.

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. Risiko sebagai perusahaan induk
2. Risiko persaingan
3. Risiko perekonomian
4. Risiko peraturan pemerintah

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN ENTITAS ANAK

- **Risiko Lini Usaha Jasa Perbankan**
 1. Risiko Kredit
 2. Risiko Pasar
 3. Risiko Operasional
 4. Risiko Likuiditas
 5. Risiko Hukum
 6. Risiko Stratejik
 7. Risiko Kepatuhan
 8. Risiko Reputasi
- **Risiko Lini Usaha Pembiayaan Konsumen**
 1. Risiko Pengurusan
 2. Risiko Tata Kelola
 3. Risiko Strategi
 4. Risiko Operasional
 5. Risiko Aset dan Liabilitas
 6. Risiko Pendanaan
 7. Risiko Pembiayaan
- **Risiko Lini Usaha Sewa Guna Usaha**
 1. Risiko kredit
 2. Risiko pasar
 3. Risiko likuiditas/pendanaan
 4. Risiko operasional
- **Risiko Lini Usaha Asuransi**
 1. Risiko klaim
 2. Risiko Pengelolaan dana
 3. Risiko operasional

- **Risiko Lini Usaha Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek**
 1. Risiko penghentian ijin usaha
 2. Risiko penjaminan emisi efek
 3. Risiko perdagangan efek
- **Risiko Lini Usaha Jasa Pengelolaan Investasi**
 1. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan
 2. Risiko likuiditas reksadana terbuka
 3. Risiko kredit
- **Risiko Lini Usaha Jasa Penyewaan Properti**
 1. Risiko keterbatasan lahan
 2. Risiko perubahan Pemerintahan, legalitas dan perizinan
 3. Risiko tuntutan hukum pihak ketiga

C. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko yang dihadapi Perseroan dapat dilihat pada Bab VI mengenai Faktor Risiko.

9. PROSPEK USAHA

a. Prospek usaha di bidang jasa perbankan

Populasi masyarakat menengah yang diproyeksikan terus meningkat merupakan target pasar utama BMNCI yang fokus pada bisnis *consumer* dan *retail* serta didukung segmen korporasi dan komersial. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu akan mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa.

Memasuki tahun 2018 merupakan tahun *focusing business* sesuai dengan program transformasi BMNCI yang telah dicanangkan. Untuk lebih meningkatkan penetrasi pasar utamanya di segmen *consumer*, BMNCI terus mengembangkan sejumlah produk unggulan yang didukung oleh jaringan distribusi berbasis teknologi digital.

b. Prospek usaha di bidang pembiayaan konsumen

Permintaan terhadap mobil dan rumah akan terus menguat karena membesarnya penduduk yang berada di golongan ekonomi berpendapatan kelas menengah yang mewakili lebih dari 50% penduduk di Indonesia. MNCF berfokus pada pembiayaan untuk *consumer* dengan mayoritas portofolio pembiayaan untuk rumah (*mortgage*) dan mobil bekas (*used car*). Segmen pembiayaan tersebut belum tersentuh dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

c. Prospek usaha di bidang sewa guna usaha

Dalam riset World Bank, pertumbuhan penduduk sebanyak 7 juta yang berpenghasilan menengah akan terus menjadi dasar perkembangan pasar untuk produk konstruksi maupun kesehatan. Untuk itu, prospek masa depan MNCGU akan sangat menjanjikan.

MNCGU berfokus pada klien korporasi dengan berkonsentrasi pada pembiayaan aset-aset seperti alat berat, mesin dan alat kesehatan untuk kalangan bisnis di Indonesia. Strategi MNCGU melalui diversifikasi produk pembiayaan di segmen alat kesehatan yang belum banyak pemainnya merupakan salah satu cara untuk

meraih potensi pasar dalam menambah segmen pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menargetkan pertumbuhan aset Rp 1 triliun pada 2018.

d. Prospek usaha di bidang asuransi

Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyatakan bahwa asuransi umum masih memiliki prospek pertumbuhan yang tinggi di tahun 2018. Misalnya asuransi properti akan terdorong oleh telah selesainya sejumlah proyek pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta.

Industri asuransi jiwa di Indonesia merupakan salah satu industri yang sangat menarik karena prospek pertumbuhan yang kuat yang didasari oleh rendahnya tingkat penetrasi dan masih tingginya jumlah penduduk berusia muda.

e. Prospek usaha di bidang jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek

Prospek usaha Perantara Pedagang Efek diekspektasikan memiliki peluang pertumbuhan yang lebih baik seiring dengan ekspektasi pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,07% di 2017 menjadi 5,1% - 5,3% di 2018.

Pertumbuhan ekonomi yang positif dan kondusif diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan nilai kapitalisasi Pasar Saham Indonesia (IHSG). Saat ini, IHSG terus mencatatkan momentum terbaiknya ke level 6.606 (+3,58% YTD) dimana nilai kapitalisasi mencapai Rp7.365 triliun per 1 Maret 2018. Bursa Efek Indonesia menargetkan nilai kapitalisasi bertumbuh dari Rp7.072 triliun di 2017 menjadi Rp10.000 triliun di 2019. Hal ini tentunya menjadi pendorong bagi peningkatan transaksi perdagangan harian rata-rata yang berdampak positif bagi bisnis pedagang perantara efek perusahaan sekuritas di Indonesia.

f. Prospek usaha di bidang jasa pengelolaan investasi

Reksa dana masih menjadi pilihan utama bagi investor individu sepanjang tahun 2017. Selain disebabkan oleh nilai investasi yang sangat terjangkau, banyaknya pilihan agen penjual juga menjadi pemacu meningkatnya minat masyarakat terhadap produk investasi ini. Kemudahan bertransaksi secara online pun semakin menambah daya tarik reksa dana. Faktor-faktor tersebut akan masih menjadi peminat investor untuk menginvestasikan dananya di reksadana akan semakin meningkat di tahun 2018.

g. Prospek usaha di bidang penyewaan properti

Trend harga properti yang selalu meningkat di berbagai daerah di Indonesia, terutama untuk daerah yang mulai berkembang di Indonesia (luar Jawa) menjadi peluang bagi Perseroan untuk meraup pundi pundi pendapatan dari penyewaan properti yang ditujukan bagi entitas anak yang bergerak di jasa keuangan. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi di tahun 2018 menjadi salah satu faktor yang meyakini bahwa pendapatan regional domestik bruto juga akan terdongkrak naik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan area perkantoran (*office space*) di daerah juga akan mengalami peningkatan.

10. OBLIGASI YANG TELAH DITERBITKAN PERSEROAN

No.	Nama Obligasi	Jumlah Obligasi	Peringkat	Tingkat Bunga	Tanggal Efektif	Periode Jatuh Tempo	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi yang masih terutang pada saat Prospektus ini diterbitkan
1.	Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013	Rp225.000.000.000	IdBBB	12,00%	28 Juni 2013	5 (lima) tahun	5 Juli 2018	Rp225.000.000.000

I. PENAWARAN UMUM



PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk

Bidang Usaha:

Jasa serta Konsultasi di bidang Bisnis, Manajemen dan Administrasi, Investasi

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

MNC Financial Center Lantai 21

Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta Pusat 10340

Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886

Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

Website : www.mncfinancialservices.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

OBLIGASI BERKELANJUTAN II MNC KAPITAL INDONESIA TAHAP I TAHUN 2018

**DENGAN JUMLAH POKOK SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR RP300.000.000.000,- (TIGA RATUS MILIAR RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai nominal, berjangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 3 Juli 2023. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam rangka penerbitan Obligasi, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("Pefindo") dengan peringkat:
idBBB (Triple B)

RISIKO UTAMA YANG DAPAT MENURUNKAN KINERJA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN ADALAH RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN DALAM BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI. RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI PADA UMUMNYA ADALAH SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

A. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi yang diterbitkan ini diberi nama “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018”.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan Perseroan dan didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui pemegang rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.

HARGA PENAWARAN

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*).

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya.

Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. Pembayaran bunga pertama Obligasi akan dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2018, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo akan dilakukan pada tanggal 3 Juli 2023.

Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan Jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

TATA CARA PEMBAYARAN POKOK DAN BUNGA OBLIGASI

Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Pembayaran Pokok Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sekali, terhitung sejak Tanggal Emisi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Bursa sesudahnya tanpa dikenakan Denda.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.

Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.

Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.

Pembayaran Bunga Obligasi yang terhutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

JADWAL PEMBAYARAN KUPON OBLIGASI

Jadwal pembayaran bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga ke	Tanggal Pembayaran Bunga	Bunga ke	Tanggal Pembayaran Bunga
1	3 Oktober 2018	11	3 April 2021
2	3 Januari 2019	12	3 Juli 2021
3	3 April 2019	13	3 Oktober 2021
4	3 Juli 2019	14	3 Januari 2022
5	3 Oktober 2019	15	3 April 2022
6	3 Januari 2020	16	3 Juli 2022
7	3 April 2020	17	3 Oktober 2022
8	3 Juli 2020	18	3 Januari 2023
9	3 Oktober 2020	19	3 April 2023
10	3 Januari 2021	20	3 Juli 2023

OBLIGASI MERUPAKAN BUKTI HUTANG

Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, semua Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berhutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.

PENDAFTARAN OBLIGASI DI KSEI

Obligasi didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti hutang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.

PENARIKAN OBLIGASI

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat Obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Obligasi di KSEI atas permintaan Perseroan atau Wali Amanat, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.

PENGALIHAN OBLIGASI

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah sesuai dengan daftar yang diberikan oleh Agen Pembayaran dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN OBLIGASI

Satuan Pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya. Satu Satuan Pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau Perjanjian yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

JAMINAN

Guna menjamin pembayaran dari seluruh jumlah uang yang oleh sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perseroan akan memberikan Jaminan kepada Pemegang Obligasi berupa gadai atas saham Perseroan yang dimiliki oleh PT MNC Investama Tbk. ("BHIT") dengan nilai, selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi, sekurang-kurangnya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi dan menjaga jaminan dengan nilai sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selama jangka waktu Obligasi.

Apabila selama jangka waktu Obligasi jaminan yang diberikan kurang dari 110% (seratus sepuluh persen), dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan berkewajiban untuk melakukan top up saham sehingga Jaminan tercukupi menjadi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi.

Penilaian yang dilakukan atas saham Perseroan yang digadaikan adalah berdasarkan valuasi dengan menggunakan nilai *closing price* saham Perseroan di hari sebelum ditandatanganinya Akta Gadai Saham.

Saham yang dijaminan adalah saham milik BHIT dalam Perseroan, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Biro Administrasi Saham PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan pada 1 (satu) Hari Kerja sebelum Akta Gadai Saham ditandatangani, mengenai Ringkasan Daftar Pemegang Saham Perseroan.

SANKSI

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliamanatan khususnya Pasal 7.3 Perjanjian Perwaliamanatan, maka Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa Denda sesuai Perjanjian Perwaliamanatan. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

Apabila Perseroan dinyatakan lalai berdasarkan Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dengan mana seluruh kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo, maka Perseroan berdasarkan Obligasi menjadi jatuh tempo maka Perseroan wajib untuk sekarang dan pada waktunya nanti memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk kepentingan Pemegang Obligasi mengeksekusi Jaminan dengan cara menjual, mengalihkan atau cara lain mengoperkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan apabila akan dilakukan dengan penjualan secara dibawah tangan, maka penjualan tersebut harus didahului dengan

kesepakatan antara Wali Amanat dan Perseroan, apabila kesepakatan tidak tercapai dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal keputusan RUPO yang memutuskan dilakukannya eksekusi atas Jaminan tersebut, maka Jaminan tersebut dapat dieksekusi oleh Wali Amanat.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terhutang. Jumlah denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp 1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PERSEROAN

- 1) Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal atau tindakan-tindakan sebagai berikut:
 - a. mengadakan merger atau akuisisi kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - b. mengadakan merger atau akuisisi yang menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan kecuali sepanjang dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut: semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*) dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi.
 - c. melakukan penjualan, pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam satu atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh atau sebagian besar aset kecuali:
 - i. dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - ii. penjualan, pengalihan atau pelepasan atas Aset baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, pengalihan atau pelepasan; dan
 - iii. dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam suatu perjanjian dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamatan.

Adapun yang dimaksud dengan sebagian besar Aset adalah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total aset per laporan keuangan terkonsolidasi Perseroan yang terakhir;

- “Aset” berarti seluruh aset konsolidasi Perseroan berdasarkan harga perolehan aset sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.
- d. mengubah kegiatan usaha utama Perseroan, kecuali dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan;
 - f. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak ketiga selain Entitas Anak (jika ada), kecuali dilakukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan tersebut atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usahanya atau sehubungan dengan pembangunan fasilitas usaha Perseroan, dimana jumlah pinjaman tersebut melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terkini yang telah diaudit, dengan memperhatikan ketentuan butir 3) huruf b, kecuali pinjaman kepada karyawan Perseroan, koperasi dan yayasan karyawan Perseroan, dan/atau Afiliasi/Entitas Anak (jika ada) serta PUKK (Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - g. menjaminkan dan/atau menggadaikan baik sebagian besar maupun seluruh aktiva dan/atau pendapatan Perseroan, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali:
 - (i) agunan atau jaminan yang telah ada sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (ii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - (iii) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan penjaminan atas fasilitas pinjaman baru dalam rangka menunjang kegiatan usaha Perseroan;
 - (iv) jaminan atau agunan yang diberikan atas hutang Perseroan yang digunakan untuk melunasi Obligasi ini;
 - (v) agunan atau jaminan yang timbul sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan posisi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aktiva yang sama.
 - h. memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee*) kepada pihak lain dengan ketentuan jumlah kumulatif keseluruhan dari nilai pemberian jaminan perusahaan tersebut setiap waktu tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari total ekuitas Perseroan, kecuali:
 - (i) jaminan perusahaan yang telah diberikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (ii) Jaminan perusahaan kepada Entitas Anak;
 - (iii) jaminan perusahaan yang diberikan kepada *supplier* Perseroan dan/atau Entitas Anak Perseroan, atau jaminan perusahaan tersebut diberikan dalam rangka kegiatan usaha atau penunjang kegiatan usaha Perseroan atau Entitas Anak;
 - (iv) kepada perusahaan afiliasi Perseroan;
 - (v) jaminan perusahaan tersebut dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar.
 - i. mengeluarkan obligasi baru atau instrumen utang lain yang sejenis dan/atau utang bank yang mempunyai tingkatan (*ranking*) lebih tinggi dari Obligasi dan pembayarannya didahulukan, dengan tetap memperhatikan ketentuan huruf g tersebut diatas.
- 2) Sebagaimana dimaksud dalam poin 1, persetujuan tertulis dari Wali Amanat diberikan dengan ketentuan :
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/ dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung tersebut tidak diberikan oleh Wali Amanat selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak permohonan persetujuan diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika persetujuan atau penolakan tersebut tidak diberikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) Hari Kerja terhitung sejak seluruh dokumen diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, maka dengan lewatnya waktu permohonan tersebut dianggap telah disetujui oleh Wali Amanat.
 - 3) Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan ongkos-ongkos lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri untuk menjaga dan/atau melakukan hal-hal sebagai berikut

- a. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian terkait lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dimana Perseroan merupakan pihak dalam perjanjian tersebut;
- b. menjaga rasio keuangan dan memelihara keadaan keuangan Perseroan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat, dengan ketentuan kondisi keuangan sebagai berikut:
 - i. *Debt to Equity Ratio*, yaitu perbandingan total Utang dengan total Modal tidak lebih dari: 2 : 1 (dua) berbanding (satu).
 - ii. *Coverage Ratio*, yaitu perbandingan antara EBITDA Konsolidasi dengan beban bunga pinjaman konsolidasian tidak kurang dari 1 : 1 (satu) berbanding (satu).
 “Utang” adalah total liabilitas per laporan keuangan konsolidasi setelah dikurangi dengan 1) simpanan pihak ketiga, 2) simpanan pihak berelasi, 3) simpanan dari bank lain, 4) utang bank dan institusi keuangan non-bank, 5) utang Al-Musyarakah, 6) utang Al-Mudharabah;
 “EBITDA Konsolidasi” adalah laba Perseroan dan Entitas Anak sebelum beban pajak konsolidasi ditambah biaya bunga ditambah depresiasi dan amortisasi dan Cadangan Kerugian dan Penurunan Nilai (CKPN);
 “Beban Bunga Pinjaman Konsolidasi” adalah beban bunga Perseroan dan Entitas Anak dengan tanpa memperhitungkan Entitas Anak yang diakuisisi (jika ada);
 “Modal” adalah total ekuitas per laporan keuangan konsolidasi;
 “Cadangan Kerugian dan Penurunan Nilai (CKPN)” adalah cadangan yang dibentuk oleh bank untuk menghadapi terjadinya risiko kerugian akibat penanaman dana dalam aktiva produktif.
- c. menjaga agar PT MNC Investama Tbk sebagai pengendali dari Perseroan selama jangka waktu Obligasi; “Pengendali” adalah (i) pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, baik langsung atau tidak langsung, atau (ii) pihak yang memiliki saham kurang dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan namun yang bersangkutan mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan, pengendalian dan/atau kebijakan Perseroan.
- d. Perseroan tidak akan menjaminkan Jaminan yang telah diberikan kepada Pemegang Obligasi kepada pihak manapun.
- e. menyetorkan jumlah uang untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang akan jatuh tempo yang harus sudah tersedia/efektif (*in good funds*) dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di rekening KSEI yang ditunjuk berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran. Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut diatas, Perseroan wajib untuk menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti pengiriman uang tersebut pada hari yang sama melalui faksimili atau surat elektronik (email);
- f. bila Perseroan lalai menyetorkan jumlah dana tersebut pada waktu sebagaimana diatur dalam huruf e diatas, maka atas kelalaian tersebut Perseroan dikenakan Denda atas jumlah yang wajib dibayar. Jumlah denda tersebut dihitung berdasarkan hari keterlambatan yang dihitung sejak tidak dibayarkannya dana tersebut.
 Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proposional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- g. memberikan jaminan kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan;
- h. memberikan jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan dengan nilai pada Tanggal Emisi sekurang-kurangnya sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai Pokok Obligasi yang terutang sejak ditandatanganinya perjanjian gadai saham yang akan ditandatangani oleh penjamin dan Wali Amanat selambat-lambatnya pada Tanggal Emisi dan menjaga Jaminan dengan nilai sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai Pokok Obligasi selama jangka waktu Obligasi.
- i. dalam hal nilai Jaminan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan kurang dari 110% (seratus sepuluh persen), maka Perseroan berkewajiban untuk melakukan top-up sehingga Jaminan tercukupi menjadi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dengan tata cara dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan.
- j. Apabila hasil pemeringkatan Obligasi mengalami penurunan sehingga hasil pemeringkatan menjadi dibawah idBBB- (*Triple B minus*) dari PT Pefindo atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian

Perwaliamanatan dan Peraturan Nomor IX.C.11, maka Perseroan berkewajiban menambah Jaminan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Pokok Obligasi yang terutang untuk setiap penurunan satu notch hasil pemeringkatan dibawah idBBB- (*Triple B minus*) .

Penambahan Jaminan tersebut harus dipenuhi dalam jangka waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan dari Wali Amanat mengenai adanya kewajiban penambahan Jaminan. Syarat-syarat dan ketentuan mengenai penambahan dan/atau pengikatan Jaminan tunduk pada ketentuan huruf i dan Pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan.

Apabila hasil pemeringkatan kembali ke minimal idBBB (*Triple B*) dari PT Pefindo atau peringkat lain yang setara yang diberikan oleh lembaga atau perusahaan pemeringkat lain maka dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari Pemeringkat, Perseroan berhak mengubah nilai Jaminan sehingga nilai Jaminan menjadi seperti semula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.1 Perjanjian Perwaliamanatan;

- k. menjalankan usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan perdagangan sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku;
- l. memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- m. segera memberikan kepada Wali Amanat keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan hal lain-lain.
- n. segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis paling lambat dalam waktu bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan triwulanan terdekat dalam hal terjadinya hal-hal sebagai berikut:
 - (i) membuat pinjaman baru (dengan bunga) baik yang dilakukan oleh Perseroan kecuali untuk kegiatan operasional perusahaan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rasio keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
 - (ii) setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh penting dan/atau buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - (iii) setiap perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perubahan pemegang saham utama Perseroan, diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen-dokumen keputusan rapat umum pemegang saham Perseroan atas perubahan tersebut, setelah akta-akta/dokumen-dokumen tersebut diterima oleh Perseroan; dan
 - (iv) Perkara pidana, perdata, administrasi dan perburuan yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan
- o. membayar kewajiban pajak Perseroan atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- p. menyerahkan kepada Wali Amanat:
 - (i) laporan keuangan tahunan Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Perseroan yang terdaftar di OJK dalam waktu yang bersamaan pada saat dilaporkannya laporan keuangan tahunan Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek, dengan memperhatikan ketentuan Pasar Modal yang berlaku;
 - (ii) laporan rasio keuangan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam huruf b beserta uraian penjelasannya dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diterimanya permintaan dari Wali Amanat baik melalui surat tertulis maupun surat elektronik;
 - (iii) laporan-laporan keuangan internal triwulanan (*unaudited*) Perseroan;
 - (iv) laporan-laporan lain yang harus disampaikan kepada OJK dan/atau Bursa Efek dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja setelah disampaikannya laporan-laporan tersebut oleh Perseroan kepada OJK dan/atau Bursa Efek;
 - (v) salinan resmi akta Perjanjian Perwaliamanatan dan akta-akta lainnya yang dibuat sehubungan dengan Emisi Obligasi ini;
 - (vi) data-data dan keterangan-keterangan lain yang sewaktu-waktu diminta secara tertulis oleh Wali Amanat mengenai jalannya usaha, keadaan keuangan, aktiva Perseroan dan data-data lain sepanjang hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan tugas Wali Amanat yang telah ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku; dan

- (vii) setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut;
- q. memelihara harta kekayaannya agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa;
 - r. segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat setelah menyadari terjadinya keadaan atau kejadian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan yang dapat menimbulkan kelalaian atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan;
 - s. memberi ijin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat dengan pemberitahuan tertulis 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelumnya selama jam kerja Perseroan, untuk memasuki gedung-gedung yang dimiliki atau dikuasai Perseroan pada saat jam kerja Perseroan dan untuk melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dengan memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - t. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan dari pemerintah serta perijinan-perijinan penting dengan pihak lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sebagaimana dari waktu ke waktu disyaratkan oleh hukum yang berlaku;
 - u. menerbitkan dan menyerahkan Sertipikat Jumbo Obligasi kepada KSEI, untuk kepentingan Pemegang Obligasi sebagai bukti pencatatan dalam Daftar Pemegang Rekening dan menyampaikan fotokopi Sertipikat Jumbo Obligasi dengan tanda terima dari KSEI tersebut kepada Wali Amanat;
 - v. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan Nomor IX.C.11, yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan, yaitu antara lain:
 - (i). Pemeringkatan Tahunan
 - i. Perseroan wajib menyampaikan pemeringkatan tahunan atas Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.
 - ii. Dalam hal peringkat Obligasi yang diperoleh berbeda dari peringkat sebelumnya, Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat tahunan yang diperoleh; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai penyebab perubahan peringkat.
 - (ii). Pemeringkatan Karena Terdapat Fakta Material/Kejadian Penting
 - i. Dalam hal Pemeringkat menerbitkan peringkat baru maka Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada masyarakat paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat baru tersebut, mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. peringkat baru; dan
 - b. penjelasan singkat mengenai faktor-faktor penyebab terbitnya peringkat baru.
 - ii. Masa berlaku peringkat baru adalah sampai dengan akhir periode peringkat tahunan.
 - (iii). Pemeringkatan Obligasi Dalam Penawaran Umum Berkelanjutan.
 - i. Perseroan yang menerbitkan Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014 wajib memperoleh peringkat yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan yang direncanakan.
 - ii. Peringkat tahunan dan peringkat baru wajib mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Berkelanjutan sepanjang:
 - a. periode Penawaran Umum Berkelanjutan masih berlaku; dan
 - b. Perseroan tidak dalam keadaan kondisi dilarang untuk melaksanakan penawaran Obligasi tahap berikutnya dalam periode Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK Nomor 36/POJK.04/2014.
 - (iv). Pemeringkatan Ulang
 - i. Dalam hal Perseroan menerima hasil pemeringkatan ulang dari Pemeringkat terkait dengan peringkat Obligasi selain karena hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf v angka (i) butir i

dan angka (ii) butir i, maka Perseroan wajib menyampaikan hasil pemeringkatan ulang dimaksud kepada OJK dan Wali Amanat paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

- ii. Dalam hal peringkat yang diterima sebagaimana dimaksud dalam butir i berbeda dari peringkat sebelumnya, maka Perseroan wajib mengumumkan kepada masyarakat paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau laman (*website*) Bursa Efek paling lama akhir hari kerja ke-2 (dua) setelah diterimanya peringkat dimaksud.

atau melakukan pemeringkatan sesuai dengan peraturan OJK, apabila ada perubahan terhadap Peraturan Nomor IX.C.11.

KELALAIAN PERSEROAN

- a. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :

- 1) Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- 2) Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Dokumen Emisi (selain yang disebutkan pada butir 1); atau
- 3) Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
- 4) Apabila keterangan-keterangan dan jaminan-jaminan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
- 5) Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 50% (lima puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir, yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan;
- 6) Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
- 7) Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*).

- b. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:

- 1) Huruf a butir 1) tentang kelalaian Perseroan dalam Prospektus ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;
- 2) Huruf a butir 2) sampai dengan 7) tentang kelalaian Perseroan dalam Prospektus ini dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukan oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaian tersebut.

Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan-alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi termasuk namun tidak terbatas untuk memutuskan agar dilakukan penagihan kepada Perseroan.

c. Apabila:

- 1) pihak yang berwenang secara hukum menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
- 2) Perseroan dibubarkan karena sebab apapun berdasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- 3) Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit berdasarkan keputusan yang telah berkekuatan hukum tetap; atau
- 4) adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang; atau
- 5) Menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*stand still*).

maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, tanggungan dan ongkos lain apapun yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- 1) pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- 2) pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- 3) pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan untuk sebagian atau seluruh Obligasi.
- 4) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- 5) pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- 6) pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada Pihak yang tidak terafiliasi;
- 7) rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
- 8) pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- 9) rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir 7) dan butir 8), paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;

- f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- 10) Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
 - 11) Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
 - 12) Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 9) dengan ketentuan:
 - a. jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode satu tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
 - 13) Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a) jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 14) Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan, maka pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin;
 - 15) Dalam hal terdapat lebih dari satu Obligasi yang tidak dijamin, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut;
 - 16) Dalam hal terdapat jaminan atas seluruh Obligasi, maka pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
 - 17) Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan, mengakibatkan:
 - a) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 1) RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a) Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi bersifat utang mengenai perubahan jangka waktu, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking fund*) dan dengan memperhatikan Peraturan Nomor: VI.C.4;
 - b) Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/ atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/ atau untuk menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian menurut Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c) Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;

- d) Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam Peraturan Nomor VI.C.4; dan
 - e) Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- 2) RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
- a) Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
 - b) Perseroan;
 - c) Wali Amanat; atau
 - d) OJK.
- 3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) poin a), poin b), dan poin d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO .
- 4) Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
- 5) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
- a) Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b) Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c) Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d) Panggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO ;
 - (2) agenda RUPO
 - (3) pihak yang mengajukan usulan RUPO
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO ; dan
 - (5) kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e) RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
- 6) Tata cara RUPO ;
- a) Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.

- b) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c) Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d) Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/ dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.
 - e) Setiap Obligasi sebesar Rp 1,00 (satu rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - f) Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditanda tangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g) Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/ atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h) Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat.
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i) RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j) RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k) Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l) Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO .
- 7) Dengan memperhatikan ketentuan dalam butir 6) huruf g, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a) Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.

- (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua.
 - (c). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (d). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (e). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b) RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1). dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO .
 - (2). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua.
 - (3). RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (4). dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga.
 - (5). RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.

- 8) Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan pemanggilan RUPO, biaya Notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
- 9) Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
- 10) Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
- 11) Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
- 12) Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/ atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
- 13) Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
- 14) Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di Pasar Modal tersebut yang berlaku.

PENYISIHAN DANA PELUNASAN POKOK OBLIGASI

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana pelunasan Pokok Obligasi dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil emisi sesuai rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi.

PERPAJAKAN

Diuraikan dalam Bab IX mengenai Perpajakan dalam Prospektus ini.

HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo. Berdasarkan surat Pefindo No. RC-269/PEF-DIR/III/2018 tanggal 12 Maret 2018, hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang (Obligasi) Perseroan adalah:

idBBB
(Triple B)

Hasil Pemeringkatan ini berlaku untuk periode 12 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019.

Obligor dengan peringkat idBBB memiliki kemampuan yang memadai dibanding obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangannya. Walau demikian, kemampuan obligor mungkin akan terpengaruh oleh perubahan keadaan dan kondisi ekonomi yang kurang baik.

Faktor-faktor yang mendukung peringkat adalah:

- **Permodalan yang kuat.** Pefindo memandang BCAP memiliki profil permodalan yang kuat, dan diharapkan dapat mempertahankan rasio utang terhadap ekuitas (*debt to equity*, DER) sebesar 1,9x dalam jangka waktu dekat hingga menengah. Pertumbuhan utang baru BCAP dan anak usahanya dikompensasikan dengan dengan peningkatan ekuitas melalui serangkaian suntikan modal dan penerbitan saham baru (*right issue*). Secara historis, BCAP memiliki DER (konsolidasi) yang relatif konservatif dan stabil sebesar 2,0x-2,5x. Dari level Induk saja, Perseroan dapat mempertahankan permodalan di level yang sangat kuat dengan DER di bawah 0,2x selama tahun-tahun yang ditinjau. Pefindo juga memandang bahwa anak usaha BCAP yang bergerak di industri perbankan, pembiayaan, dan asuransi dapat mempertahankan indikator permodalannya di level moderat hingga kuat dalam jangka waktu dekat hingga menengah.
- **Likuiditas dan fleksibilitas finansial yang memadai.** Pefindo memandang BCAP memiliki posisi likuiditas yang memadai dan dapat bertahan dalam jangka menengah. BCAP dapat menjaga rata-rata rasio aset likuid terhadap total kewajiban (*liquid assets/total liabilities*) di atas 123% selama periode pemantauan, dan Pefindo berharap hal ini akan bertahan dalam jangka waktu dekat hingga menengah. Melalui anak usahanya, BCAP juga memperoleh fasilitas pendanaan dari bank dan lembaga keuangan dengan sisa fasilitas kredit yang tersedia sebesar Rp1,5 triliun pada akhir tahun 2017. Dengan didukung oleh sejumlah perusahaan yang besar dan memiliki reputasi yang baik di dalam grup, BCAP memiliki akses ke pasar modal untuk memperkuat permodalan anak usahanya melalui serangkaian penawaran umum perdana (*initial public offerings*, IPO), *right issue*, atau penerbitan utang.

Faktor-faktor yang membatasi peringkat adalah:

- **Akses tidak langsung terhadap arus kas operasional anak-anak usaha.** Meskipun memiliki arus kas yang memadai dari anak usaha utamanya, BCAP sebagai perusahaan induk non-operasional memiliki akses tidak langsung terhadap arus kas operasional anak usahanya. Meskipun BCAP memiliki kontrol penuh atas anak usaha utamanya, di mana BCAP mempunyai kepemilikan hampir 100% atas anak usaha tersebut (kecuali untuk MNC Bank), dalam pandangan kami, kreditur Perseroan memiliki prioritas lebih rendah dalam hal klaim atas arus kas operasional anak-anak Perseroan dibandingkan dengan para kreditur anak-anak Perseroan yang ada saat ini dan yang akan datang. Dari level Induk perusahaan saja, status BCAP sebagai perusahaan induk non-operasional tercermin dari kemampuan terbatas dalam menghasilkan arus kas operasi dibandingkan dengan kewajiban keuangannya, oleh karena itu BCAP akan terus membutuhkan kontribusi dividen yang besar dan stabil dari anak usahanya untuk mempertahankan kapasitas keuangannya.
- **Implementasi strategi sinergi grup yang belum kuat.** Kami berpandangan bahwa dalam mencapai posisi pasar yang substansial dan berkelanjutan masih menjadi tantangan yang signifikan bagi BCAP. Kami juga memandang bahwa perbaikan menyeluruh pada anak-anak usaha dan strategi untuk bersinergi akan membutuhkan waktu yang lama untuk berkembang, dikarenakan kompleksitas dalam mengatur sejumlah anak usaha dari berbagai industri, ditengah lingkungan yang kompetitif dan penuh regulasi. Walaupun manajemen telah memulai proyek untuk mengembangkan *database* grup, namun hasil nyata masih belum terlihat, mengingat proyek ini masih berada pada tahap awal. Sebagian besar potensi sinergi antara grup MNC jasa keuangan, media, dan properti masih belum dimanfaatkan. Masing-masing anak usaha belum memiliki posisi pasar yang kuat, terutama MNC Bank dan MNC Life Assurance, yang menghadapi kesulitan karena saat ini kedua perusahaan tersebut masih mencari komposisi produk yang tepat untuk memperbaiki kinerja profitabilitas yang masih negatif.
- **Risiko integrasi bisnis baru.** Kami berpandangan bahwa proses konsolidasi MNC Bank ke dalam grup masih berjalan. MNC Bank memberikan kontribusi yang signifikan kepada BCAP, yaitu 48,1% terhadap total aset BCAP dan 16,0% terhadap total ekuitas di tahun 2017. Tahun 2017 merupakan tahun yang sulit bagi Bank karena kenaikan rasio kredit bermasalah gross (*gross non-performing loans*, *gross NPL*) menjadi 7,2% dari 2,8% di akhir tahun 2016, hal ini mengakibatkan tingginya beban pencadangan sebesar Rp840 miliar, selain itu, hal ini juga menyebabkan kerugian setelah pajak sebesar Rp685,2 miliar dari Rp9,3 miliar di akhir tahun 2016. Meskipun manajemen tetap yakin akan mencapai persentase pemulihan aset bermasalah yang tinggi, kemungkinan besar proses pemulihan ini akan berjalan secara bertahap dan memerlukan waktu. Bank juga akan melakukan investasi yang cukup besar untuk meningkatkan sistem IT dan infrastruktur untuk mengembangkan segmen konsumen dan kegiatan transaksional perbankan, serta mendapatkan dana murah dari giro dan tabungan (CASA), yang berkontribusi masing-masing sebesar 16,2% dan 15,7% dari total dana pihak ketiga MNC Bank di akhir tahun 2017 dan 2016.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Pefindo, baik langsung maupun tidak langsung sesuai dengan yang didefinisikan dalam UUPM. Sesuai dengan Peraturan No. IX.C.11 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. KEP-712/BL/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pemeringkatan Atas Efek Bersifat Utang, Perseroan wajib menyampaikan Peringkat Tahunan atas Obligasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait dengan Obligasi yang diterbitkan.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
Divisi Investment Services
Gedung BRI II Lt.30
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 250 0124, 575 8144
Faks. (021) 251 0316, 575 2444

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII dalam Prospektus ini mengenai Keterangan Mengenai Wali Amanat

PERWALIAMANATAN

Penerbitan Obligasi ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan "Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 2 tanggal 3 April 2018 *juncto* Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 65 tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk yang bertindak selaku Wali Amanat.

PROSEDUR PEMESANAN

Prosedur Pemesanan Pembelian Obligasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan dan Pembelian Obligasi dalam Prospektus ini.

B. PERSYARATAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014:

1. Telah menjadi emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun;
2. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dimana pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun ke - 2 (kedua) sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
3. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tanggal 29 Maret 2018 dan surat pernyataan yang dibuat oleh Akuntan No. 525/GN/FD/KPS/III/18 tanggal 3 April 2018.
4. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik yang dikeluarkan oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk:

1. Sejumlah Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) akan dipergunakan untuk pelunasan (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu pinjaman Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahun 2013 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 5 Juli 2018.
2. Sisa dana akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

Berikut adalah uraian singkat mengenai utang Perseroan yang akan dilunasi dengan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi:

Pinjaman obligasi Perseroan tahun 2013

Sifat Hubungan Afiliasi dengan Kreditur	: Tidak ada
Jumlah Obligasi yang akan dibayarkan	: Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah)
Tingkat bunga	: 12,0%
Penggunaan pinjaman dari Obligasi yang akan dilunasi	: Pelunasan hutang dan penyertaan modal
Prosedur dan persyaratan pelunasan	: Perseroan akan menyetorkan dana (<i>in good fund</i>) yang diperlukan untuk pelunasan pokok obligasi tersebut yang jatuh tempo kepada agen pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut dan menyerahkan kepada wali amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada tanggal pelunasan pokok obligasi tersebut.

Apabila dana hasil Penawaran Umum yang diperoleh Perseroan tidak mencukupi, maka Perseroan menggunakan sumber dana yang diperoleh melalui kas internal dan/atau pinjaman bank untuk membiayai rencana penggunaan dana tersebut.

Pelaksanaan penggunaan dana hasil Penawaran Umum akan mengikuti peraturan yang berlaku di pasar modal.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala kepada OJK dan para pemegang Obligasi melalui Wali Amanat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi telah direalisasikan Otoritas Jasa Keuangan serta dipertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan secara berkala setiap tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015. Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan ditempatkan dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Apabila penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi ini akan diubah, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPO dengan mengemukakan rencana dan alasan beserta pertimbangan dan perubahan penggunaan dana tersebut. Perubahan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari RUPO sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015. Selanjutnya Perseroan melaporkan hasil RUPO kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai Peraturan OJK Nomor 9/POJK.04/2017, total biaya (belum termasuk perpajakan yang berlaku) yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan emisi Penawaran Umum Obligasi ini kurang lebih setara dengan 0,81% (nol koma delapan satu persen) dari nilai emisi yang meliputi:

1. Biaya jasa untuk penjamin emisi efek: 0,30% (nol koma tiga nol persen) yang terdiri dari:
Biaya jasa penjamin pelaksana emisi (*management fee*) sebesar 0,15% (nol koma satu lima persen), penjaminan emisi (*underwriting fee*) sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen), dan penjualan (*selling fee*) sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh lima persen).
2. Biaya jasa untuk lembaga penunjang pasar modal: 0,13% (nol koma satu tiga persen), yang terdiri dari:

- a. Biaya jasa Wali Amanat: 0,09% (nol koma nol sembilan persen);
- b. Biaya jasa Pemeringkat Efek: 0,04% (nol koma nol empat persen).
3. Biaya jasa untuk profesi penunjang pasar modal: 0,22% (nol koma dua dua persen), yang terdiri dari:
 - a. Biaya jasa Konsultan Hukum 0,10% (nol koma satu nol persen);
 - b. Biaya jasa Notaris: 0,02% (nol koma nol dua persen);
 - c. Biaya jasa Akuntan Publik: 0,10% (nol koma satu nol persen);
4. Biaya Pernyataan Pendaftaran, Pendaftaran dan Pencatatan Efek: 0,12% (nol koma satu dua persen), yang terdiri dari:
 - a. Biaya KSEI: 0,01% (nol koma nol satu persen);
 - b. Biaya BEI: 0,03% (nol koma nol tiga persen);
 - c. Biaya OJK: 0,08% (nol koma nol delapan persen).
5. Biaya lain-Lain (percetakan, iklan, public expose dan lain-lain): 0,06% (nol koma nol enam persen).

Penggunaan dana hasil emisi Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, telah digunakan seluruhnya sebagaimana telah disampaikan dalam pelaporan penggunaan dana kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam surat Perseroan No. 111/MNC-KI/DIR/X/13 tanggal 9 Oktober 2013.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya pada tanggal 31 Desember 2017, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat tanpa modifikasi serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016.

Per tanggal 31 Desember 2017, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya sebesar Rp14.255.743 juta dengan rincian sebagai berikut :

(dalam jutaan Rupiah)

LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Simpanan	
Pihak berelasi	533.534
Pihak ketiga	8.443.515
Simpanan dari bank lain	197.257
Liabilitas segera	39.585
Utang kepada Lembaga Kliring dan penjaminan perusahaan efek Indonesia	172.534
Utang nasabah	782.331
Utang reasuransi	114.733
Utang pajak	27.056
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi	512.277
Liabilitas Institusi Keuangan - bank	1.972.323
Liabilitas Institusi Keuangan - non bank	30.406
Utang Al-Musyarakah	556.018
Utang Al-Mudharabah	105.067
Utang obligasi	224.502
Medium term notes	69.706
Utang sewa pembiayaan	47.394
Liabilitas imbalan kerja	73.595
Liabilitas lain-lain	353.910
JUMLAH LIABILITAS	14.255.743

1. Simpanan

Nilai simpanan per 31 Desember 2017 sebesar Rp8.977.049 juta yang terdiri atas simpanan ke pihak berelasi sebesar Rp533.534 juta dan pihak ketiga sebesar Rp8.443.515 juta. Berikut ini adalah rincian Simpanan Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pihak Berelasi	Pihak Ketiga	Jumlah
Giro	321.750	490.174	811.924
Tabungan	15.881	591.080	606.961
Deposito Berjangka	195.903	7.362.261	7.558.164
Jumlah	533.534	8.443.515	8.977.049

2. Simpanan dari bank lain

Simpanan dari bank lain per 31 Desember 2017 sebesar Rp197.257 juta. Berikut ini adalah rincian simpanan dari bank lain Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Pihak ketiga	
Giro	120.208
Tabungan	51.999
Deposito berjangka	25.050
Call Money	-
Jumlah	197.257

Jangka waktu *call money* masing-masing 4 sampai dengan 7 hari.

3. Utang kepada Lembaga Kliring dan penjaminan perusahaan efek Indonesia

Utang kepada Lembaga Kliring dan penjaminan perusahaan efek Indonesia per 31 Desember 2017 sebesar Rp172.534 juta. Berikut ini adalah rincian utang kepada Lembaga Kliring dan penjaminan perusahaan efek Indonesia Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Deposito	120.208
Piutang dari KPEI	51.999
Jumlah	244.084
Utang kepada KPEI	172.534

4. Utang nasabah

Utang nasabah per 31 Desember 2017 seluruhnya berasal dari pihak ketiga sebesar Rp782.331 juta. Berikut ini adalah rincian utang nasabah Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Simpanan dan utang nasabah	704.118
Uang muka dan angsuran	55.951
Utang dealer	5.094
Premi diterima dimuka	17.168
Jumlah	782.331

5. Utang reasuransi

Utang reasuransi per 31 Desember 2017 sebesar Rp114.733 juta. Berikut ini adalah rincian utang reasuransi Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Perseroan	
Harta benda	16.150
Satelite	2.254
Penerbangan	-
Kendaraan bermotor	-
Rekayasa	1.629
Jiwa dan kesehatan	18.024
Aneka	76.676
Jumlah	114.733

6. Utang pajak

Utang pajak per 31 Desember 2017 sebesar Rp27.056 juta. Berikut ini adalah rincian utang pajak Perseroan per 31 Desember 2017.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 21	4.216
Pasal 23	1.280
Pasal 25	569
Pasal 26	88
Pasal 29	4.134
Pasal 4 ayat 2	10.302
Transaksi Perdagangan Saham	5.504
Pajak Pertambahan Nilai - Bersih	963
Jumlah	27.056

7. Liabilitas kontrak asuransi dan investasi

Liabilitas kontrak investasi dan asuransi Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp512.277 juta. Berikut ini adalah rincian liabilitas kontrak investasi dan asuransi Perseroan per 31 Desember 2017.

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Liabilitas kontrak asuransi	
PT MNC Life Assurance	158.357
PT MNC Asuransi Indonesia	247.584
Subjumlah	405.941
Liabilitas kontrak investasi Estimasi klaim sendiri	106.336
Jumlah	512.277

Liabilitas kontrak asuransi untuk PT MNC Life Assurance adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Estimasi klaim bruto	123.197
Premi yang belum merupakan pendapatan bruto	35.160
Jumlah	158.357

Liabilitas kontrak asuransi untuk PT MNC Asuransi Indonesia adalah sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Estimasi klaim bruto	72.889
Cadangan premi bruto	30.679
Premi yang belum merupakan pendapatan bruto	144.006
Jumlah	247.584

8. Liabilitas institusi keuangan - bank

Liabilitas institusi keuangan - bank Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp1.972.323 juta. Berikut ini adalah rincian liabilitas institusi keuangan - bank Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Pihak Ketiga	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	350.571
PT Bank Victoria International Tbk	282.600
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	257.038
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	208.454
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	133.436
PT Bank Ganesha Tbk	105.478
PT Bank Capital Indonesia Tbk	83.888
PT Bank Panin Tbk	79.051
PT Bank ICBC Indonesia Tbk	73.449
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	72.426
PT Bank Nusa Parahyangan Tbk	72.386
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	64.844
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	54.237
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	53.465
PT Bank CTBC Indonesia Tbk	29.759
PT Bank Sinarmas Tbk	20.000
PT Bank Andara Tbk	15.150
PT Bank INA Perdana Tbk	4.685
PT Bank Harda Internasional Tbk	-
PT Bank Jasa Jakarta Tbk	-
PT Bank Mayora Tbk	11.405
Jumlah	1.972.323

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan konsumen yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	165.000	-	7.880	31-Mei-19	12,00% - 14,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap
	60.000	-	1.489	20-Des-19	10,50% - 11,50%	
	310.000	660	40.778	02-Sep-19	11,00% - 13,00%	
	500.000	26.076	219.016	27-Des-19	11,00% - 13,00%	
	500.000	60.131	143.493	08-Jun-20	10,00% - 12,00%	
	500.000	263.704	83.897	24-Jun-19	10,00% - 13,00%	
	Total	350.571	496.553			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 10 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2%. Sedangkan, pembatasan untuk MNCGU adalah harus mendapat persetujuan untuk (i) rasio utang ke modal maksimal 8 kali dan (ii) maksimal NPL lebih dari 90 hari dikenakan 2%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Victoria International Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Victoria	50.000	13.686	29.959	22-Des-20	13,50%	Piutang pembiayaan
	100.000	32.513	71.168	15-Apr-21	13%	

International Tbk	50.000	11.937	26.129	15-Des-19	13,50%	konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%
	50.000	11.553	49.765	17-Jun-21	12%	
	72.000	55.200	71.612	13-Okt-21	13%	
	128.000	127.700	128.000	13-Okt-21	13%	
	50.000	11.553	-	09-Sep-21	12%	
Total		264.142	376.633			

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan konsumen yang diperoleh dari PT Bank Victoria International Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

(dalam jutaan rupiah)						
Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Victoria International Tbk	10.000	6.667	-	15-Apr-19	12,75%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%
	3.000	2.125	-	23-Mei-19	12,75%	
	10.000	8.055	-	24-Mei-19	13,00%	
	2.000	1.611	-	30-Mei-19	13,00%	
Total		18.458	-			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* sebesar 8 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2%. Sedangkan kepada MNCGU dengan pembatasan yang perlu mendapatkan persetujuan antara lain: (i) perubahan pemegang saham, (ii) pembayaran dividen lebih dari 50% laba neto dan (iii) pembubaran atau likuidasi entitas.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

(dalam jutaan Rupiah)						
Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Rakyat Indonesia (Perseroan) Tbk	150.000	67.667	123.099	27-Jan-21	11,50% - 12,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100%
	200.000	160.299	-	20-Apr-21	11,25%- 12,50%	
	29.280	29.072	26.224	14-Okt-30	9,00%	
	Total	257.038	149.323			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali dengan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3%.

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	10.032	-	5.352	14-Des-17	7,80% - 14%	Piutang pembiayaan sebesar 100%
	4.053	1.536	2.879	17-Des-18	13,50%	
	17.151	6.499	12.184	21-Des-18	13,50%	
	2.660	1.086	1.958	13-Jan-19	13,50%	
	7.461	3.046	5.491	19-Jan-19	13,50%	
	4.135	389	2.546	11-Feb-19	13,50%	
	3.066	1.341	2.334	11-Feb-19	13,50%	

1.329	186	872	08-Mar-19	13,50%
1.544	719	1.214	29-Mar-19	13,50%
1.595	369	1.173	04-Mei-19	13,50%
1.417	797		10-Mei-20	13,50%
1.691	391	1.244	31-Mei-19	13,50%
2.582	1.491	2.282	25-Jul-19	13,50%
928		556	25-Jul-19	13,50%
5.090	3.078	4.620	24-Agust-19	13,50%
4.235	1.540	3.606	29-Agust-19	13,50%
3.514	2.125	3.189	30-Agust-19	13,50%
2.291	932	2.037	05-Sep-19	13,50%
3.217	1.308	2.860	05-Sep-19	13,50%
2.202	1.356		14-Feb-20	13,50%
1.417	1.115		30-Mar-20	13,50%
942	463	907	28-Nop-20	13,50%
6.568	4.495	6.419	28-Nop-20	13,50%
2.242	1.824		25-Jul-20	13,50%
Total	36.086	63.723		

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	100.000	72.368	83.444	29-Jun-22	12%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105%

MNCS memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	100.000	100.000		29-Mei-18	9,00% - 10,00%	Penempatan deposito

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan *gearing ratio* maksimal 9 kali, maksimal NPL 90 hari 3%. Sedangkan untuk MNCGU, *gearing ratio* utang terhadap modal adalah maksimal 9 kali dan pembatasan harus mendapatkan persetujuan antara lain: (i) penjaminan bagi pihak ketiga; (ii) menjadi *holding* atas Perusahaan baru ke dalam Perusahaan lain yang membawa penurunan kondisi keuangan dan kemampuan membayar pada debitur.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	50.000	-	20.288	16-Okt-18	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%
	100.000	52.487	68.853	09-Sep-19	12,75% - 13,00%	
	100.000	69.576	52.920	27-Nop-20	12,25% - 12,50%	
Total		122.063	142.061			

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	5.450		1.503	15-Jun-17	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%
	8.230	1.612	4.528	15-Jun-18	13,50%	
	4.640	952	2.674	28-Jun-18	13,50%	
	2.380	1.241	1.987	09-Mei-19	13,25%	
	2.060	1.074	1.721	17-Mei-19	13,25%	
	1.923	1.003	1.606	19-Mei-19	13,25%	
	1.665	869	1.391	23-Mei-19	13,25%	
	2.100	484	1.544	24-Mei-18	13,25%	
	3.912	902	2.876	31-Mei-18	13,25%	
	1.353	706	1.130	31-Mei-19	13,25%	
	1.643	902	1.412	02-Jun-19	13,25%	
	2.964	1628	2.548	21-Jun-19	13,25%	
Total		11.373	24.920			

Fasilitas diberikan kepada MNCF dengan *gearing ratio* maksimal 9 kali. Sedangkan untuk MNCGU dengan pembatasan adalah rasio utang terhadap modal maksimal 9 kali, dan kovenan negatif harus mendapatkan persetujuan: (i) untuk merger dan akuisisi, (ii) merubah bisnis perusahaan dan (iii) mengumumkan perusahaan bangkrut.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Ganesha Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Ganesha Tbk	35.000	25.553	30.825	31-Mar-21	13%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
	15.000	15.000	-	20-Des-23	12%	
Total		40.553	30.825			

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Ganesha Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Ganesha Tbk	10.000	4.925	8.100	31-Mar-19	13%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
	15.000	15.000	-	31-Des-20	-	
	45.000	45.000	-	18-Apr-18	-	
Total		64.925	8.100			

Fasilitas yang diberikan MNCF dengan maksimal *gearing ratio* sebesar 10 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 5%. Sedangkan untuk MNCGU dengan pembatasan adalah (i) rasio utang terhadap modal maksimal 9 kali, (ii) maksimal NPF dari 90 hari dikenakan 5% dan (iii) maksimal penghapusan 3%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Capital Indonesia Tbk	100.000	74.288	141	25-Des-18	14,00%	Piutang pembiayaan sebesar 110%

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Capital Indonesia Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Capital Indonesia Tbk	10.000	-	10.000	22-Jan-17	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 110%
	5.000	3.400	-	08-Feb-18	13,50%	
	10.000	6.200	-	23-Feb-18	13,50%	
Total		9.600	10.000			

Fasilitas diberikan kepada MNCF dengan *gearing ratio* maksimal 10 kali. Sedangkan untuk MNCGU dengan kovenan negatif harus mendapatkan persetujuan: (i) untuk merger dan akuisisi dan (ii) merubah bisnis perusahaan.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Panin Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Panin Tbk	100.000	79.051		17-Jul-20	10,5%-11,5%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2,5%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank ICBC Indonesia Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT ICBC Indonesia Tbk	100.000	73.449	74.868	23-Des-21	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan sebesar 120% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	50.000	39.715		21-Feb-22	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan sebesar 110% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%
	50.000	32.711	47.478	25-Agu-19	12,00%	
Total		72.426	47.478			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	30.000	23.857	-	14-Mar-21	12%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%
	50.000	48.529	-	27-Okt-21	11%	
Total		72.386				

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 10 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3,5%.

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	10.215	5.107	8.513	29-Jun-19	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%
	3.055	1.528	2.546	30-Jun-19	13,00%	
	5.730	3.024	4.934	28-Jul-19	13,00%	
	1.476	861	1.353	28-Sep-19	13,00%	
	8.721	5.087	7.994	28-Sep-19	13,00%	
	5.148	3.003	4.719	29-Sep-19	13,00%	
	5.655	3.456	5.341	11-Okt-19	13,00%	
	10.000	8.333		21-Jun-20	12,50%	
	10.000	8.333		21-Jun-20	12,50%	
	10.000	8.611		28-Jul-20	12,50%	
	10.000	8.611		31-Jul-20	12,50%	
	5.000	4.445		16-Agu-20	12,50%	
	5.000	4.445		16-Agu-20	12,50%	
Total		64.844	35.400			

Fasilitas diberikan kepada MNCGU dengan pembatasan adalah: (i) rasio lancar minimal 1 kali, (ii) maksimal NPF 90 hari dikenakan 3% dan kovenan negatif harus mendapatkan persetujuan: (i) untuk merger dan akuisisi; (ii) pembayaran dividen berakhir 50% dan (iii) mengumumkan perusahaan bangkrut.

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	402	248	381	26-Okt-19	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
	4.723	2.977	4.489	26-Okt-19	12,50%	
	6.900	4.459	6.724	08-Nop-19	12,50%	
	4.630	3.049	4.516	11-Nop-19	12,50%	
	4.835	3.319	4.835	07-Des-19	12,50%	
	3.510	2.410	3.510	20-Des-19	12,50%	
	5.000	4.641		28-Sep-20	12,50%	
	7.000	6.481		28-Sep-20	12,50%	
	7.500	7.141		28-Sep-20	12,50%	
	2.000	1.904		12-Sep-20	12,50%	
	3.000	2.855		27-Sep-20	12,50%	
	11.500	10.946		30-Sep-20	12,50%	
	4.000	3.807		18-Sep-20	12,50%	
Total		54.237	24.455			

Fasilitas diberikan kepada MNCGU dengan pembatasan adalah: (i) rasio utang terhadap modal maksimal 8 kali dan (ii) maksimal NPF 90 hari dikenakan 3%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	35.000	2.332	3.093	19-Agust-21	15,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	1.273	181	839	29-Mar-19	15,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%
	3.787	1.048	2.937	17-Jun-19	14,00%	
					7,8% -	
	581	-	414	22-Jun-19	15,00%	
					7,8% -	
	30.000	-	30.000	22-Jun-19	15,00%	
	7.236	7.236	-	19-Jan-18	13,50%	
	1.294	1.294	-	24-Jan-18	13,50%	
	4.132	4.132	-	24-Jan-18	13,75%	
	2.595	2.595	-	24-Jan-18	13,75%	
	4.000	4.000	-	24-Jan-18	13,75%	
	1.500	1.500	-	07-Feb-18	13,50%	
	21.882	21.882	-	19-Mar-18	13,50%	
	2.366	2.366	-	21-Feb-18	13,50%	
	4.900	4.900	-	21-Feb-18	13,50%	
Total		51.134	34.190			

Fasilitas diberikan kepada MNCF dengan *gearing ratio* maksimal 10 kali, maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%, maksimal NPL 60 hari dikenakan 4% dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3%. Sedangkan untuk MNCGU dengan pembatasan adalah: (i) rasio utang terhadap modal maksimal 8 kali, (ii) maksimal NPF 90 hari dikenakan 3%, (iii) ROE minimal dikenakan 1% dan kovenan negatif harus mendapatkan persetujuan: (i) untuk merger dan akuisisi; (ii) belanja modal lebih dari 50% dari total aset; (iii) mengumumkan perusahaan bangkrut dan (iv) merubah bisnis perusahaan.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank CTBC Indonesia Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank CTBC Indonesia Tbk	45.000	29.759	44.453	14-Agu-21	10,5%-10,625%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110% dan aset tetap

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali.

MNCS memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Sinarmas Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Sinarmas Tbk	20.000	20.000		31-Jan-18	9,00% - 10,00%	-

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Andara Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Andara Tbk	20.000	15.150	19.242	11-Okt-21	12% - 12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali dan maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%, maksimal NPL 60 hari dikenakan 4% dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3%.

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank INA Perdana Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank INA Perdana Tbk	230	-	122	11-Nop-17	13,75%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
	355	-	173	08-Okt-17	14,00%	
	1.650	608	1.187	11-Jan-18	14,00%	
	183	52	122	03-Agu-18	14,00%	
	2.100	549	1.280	05-Agu-18	14,50%	
	715	200	466	20-Agu-18	14,00%	
	223	67	157	25-Des-18	14,00%	

1.430	436	949	20-Sep-18	14,00%
4.934	1.436	3.129	25-Sep-18	14,00%
681	219	450	01-Okt-18	14,00%
1.175	396	813	03-Okt-18	14,00%
1.209	407	837	08-Okt-18	14,00%
789	315	589	25-Des-18	14,00%
2.230	-	75	06-Jan-17	13,50%
2.500	-	493	30-Jun-17	14,00%
1.050	-	462	20-Sep-17	13,75%
3.209	-	1.309	22-Sep-17	13,75%
Total	4.685	12.613		

Fasilitas diberikan kepada MNCGU dengan pembatasan adalah rasio utang terhadap modal maksimal 10 kali dan kovenan negatif harus mendapatkan persetujuan: (i) perubahan pemegang saham, (ii) untuk merger dan akuisisi.

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Harda International Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Harda International Tbk	1.264	-	1.123	01-Agu-17	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan
	1.727	-	1.727	01-Sep-18	13,50%	
Total		-	2.850			

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Jasa Jakarta Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Jasa Jakarta Tbk	268	-	17	21-Feb-17	10,05%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)
	97	-	6	24-Feb-17	10,94%	
	207	-	33	26-Mei-17	10,94%	
	3.793	-	599	26-Mei-17	10,94%	
	330	-	72	07-Jul-17	10,06%	
	320	-	69	14-Jul-17	10,06%	
	1.000	-	217	19-Jul-17	10,06%	
	1.148	-	317	15-Sep-17	9,72%	
		-	1.330			

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Mayora Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Mayora Tbk	20.000	11.405		11-Des-22	11,00%	Piutang Pembiayaan konsumen Sebesar 100%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali.

9. Liabilitas institusi keuangan – non bank

Liabilitas institusi keuangan – non bank Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp30.406 juta. Berikut ini adalah rincian liabilitas institusi keuangan – non bank Perseroan per 31 Desember 2017.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diperoleh dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

(dalam jutaan Rupiah)						
Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk	50.000	6.498	7.238	15-Jan-18	10,85% - 11,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%
	35.000	15.544	22.369	19-Des-20	11% - 11,88%	
	10.000	-	2.998	28-Feb-20	9,00% - 9,25%	
	100.000	8.364	10.585	31-Mei-20	9,00% - 9,25%	
Total		30.406	43.190			

10. Utang Al-Musyarakah

Utang Al-Musyarakah Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp556.018 juta. Berikut ini adalah rincian utang Al-Musyarakah Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Pihak Ketiga		
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk		328.094
PT Bank BNI Syariah Tbk		67.074
PT Bank Syariah Mandiri Tbk		63.562
PT Bank BCA Syariah Tbk		44.049
PT Bank BRI Syariah Tbk		23.894
PT Bank Victoria Syariah Tbk		22.450
PT Bank Maybank Syariah Tbk		6.085
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tbk		-
Jumlah		556.018

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Muamalat Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	93.000	15.925	14.077	04-Apr-20	11,50% - 13,00%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah atas Motor dan Mobil, serta Alat Berat masing-masing sebesar 110% & 120%
	223.000	-	6.828	16-Jul-18	11,25%	Piutang pembiayaan sebesar 100%
	178.295	115.079	101.727	12-Mei-21	11,00% - 12,00%	Piutang pembiayaan sebesar 100%
	200.000	197.900	155.000	28-Sep-21	11,00% - 12,00%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah atas Motor dan Mobil, serta Alat Berat masing-

masing sebesar 110% & 120%

Total 328.904 277.632

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank BNI Syariah Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank BNI Syariah Tbk	100.000	67.074	57.490	17-Nop-19	11,00%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah sebesar 105%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 10 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	19.000	-	19.000	22-Jun-17	11,00%	Investasi terkait syariah mandiri sebesar 95%
	100.000	63.562	94.456	11-Nop-20	11,00%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah sebesar 100%
Total		63.562	113.456			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank BCA Syariah Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank BCA Syariah Tbk	60.000	44.049	57.839	24-Nop-21	11,50% - 14,50%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah sebesar 110%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 10 kali dan maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank BRI Syariah Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank BRI Syariah Tbk	50.000	4.386	14.980	01-Des-20	11,00% - 13,50%	

80.000	2.835	-	17-Apr-22	12,00%	Fidusia piutang
				12,00% -	nasabah sebesar
150.000	16.673	56.903	25-Nop-19	13,00%	minimal 105%
Total	23.894	71.883			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 10 kali dan maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Victoria Syariah Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Victoria Syariah Tbk	25.000	9.950	13.932	03-Mar-20	12,00%-14,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%
	50.000	-	1.546	09-Sep-22	11,50%	
	15.000	12.500		03-Dec-23	11,50%	
Total		22.450	15.478			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 9 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 5%.

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Maybank Syariah Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Maybank Syariah Tbk	50.000	6.085	19.882	25-Dec-19	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 8 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2,5%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas		Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
	Rupiah	US\$	2017	2016			
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tbk	-	7.500.000	-	31.155	15-Jul-18	6,20%	Fidusia piutang sewa pembiayaan sebesar minimal 110%
	75.000	-	-	18.083	15-Jul-19	10,00%	
	100.000	2.500.000	-	11.574	15-Jul-19	10,00%	
Total	175.000	10.000.000	-	60.812			

Maksimal *gearing ratio* 6 kali dan maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%.

11. Utang Al-Mudharabah

Utang Al-Mudharabah Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp105.067 juta. Berikut ini adalah rincian utang Al-Musyarakah Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Pihak Ketiga	
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	56.384
PT Bank Sinarmas Tbk – unit Syariah	33.191
PT Bank Jateng Syariah Tbk	15.492
PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk	-
Jumlah	105.067

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	100.000	56.384	-	15-Mar-21	11,50%-14,00%	Piutang pembiayaan Al- Murabahah sebesar 100%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal *gearing ratio* 10 kali.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Sinarmas Tbk- Unit Syariah, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Sinarmas Tbk-Unit Syariah	100.000	-	27.788	11-Nop-20	11,50% - 12%	Piutang pembiayaan Al- Murabahah sebesar 105%
	100.000	-	22.659	22-Mei-20	11%	Piutang pembiayaan Al- Murabahah sebesar 110%
	50.000	9.851	16.749	20-Mar-21	14,00%	Piutang pembiayaan Al- Murabahah sebesar 110%
	100.000	23.340	39.680	26-Nop-21	13%-13,50%	Piutang pembiayaan Al- Murabahah sebesar 110%
Total		33.191	106.876			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal NPL 90 hari dikenakan 4%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Jateng Syariah Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Jateng Syariah Tbk	40.000	15.492	31.822	07-Apr-21	11,50%	Piutang pembiayaan Al- Murabahah sebesar 105%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal NPL 30 hari dan 90 hari masing-masing dikenakan 4% dan 2%.

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Jabar Syariah Tbk, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Bank	Jumlah Fasilitas	Saldo Terutang		Tanggal Jatuh Tempo	Tingkat Suku Bunga	Jaminan
		2017	2016			
PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk	100.000	-	1.618	19-Apr-19	12,00%	Piutang pembiayaan Al-Murabahah sebesar 100%
	85.000	-	138	10-Okt-20	11,00%	
Total		-	1.756			

12. Utang obligasi

Utang obligasi Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp224.502 juta. Berikut ini adalah rincian utang obligasi Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Utang Obligasi	
Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia	225.000
Dikurangi biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(498)
Jumlah	224.502

Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia

Pada tanggal 28 Juni 2013, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya NO. S-203/D.04/2013 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp500.000 juta. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perusahaan menerbitkan Obligasi berkelanjutan I MNC kapital Indonesia tahap I Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar 12% per tahun dengan pokok obligasi maksimal sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2013, dengan pokok Obligasi sebesar Rp 225.000 juta.

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan obligasi, Perseroan harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, (1) memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 2:1, (2) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman minimal 1,5:1 dan (3) menjaga saham Perseroan dikendalikan atau Perseroan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% oleh PT MNC Investama Tbk (dahulu PT Bhakti Investama Tbk) selama jangka waktu obligasi.

13. Medium Term Notes

Medium Term Notes Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp69.706 juta. Berikut ini adalah rincian Medium Term Notes Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

<u>Medium Term Notes</u>	
MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri A	21.000
Dikurangi biaya emisi MTN yang belum diamortisasi	(343)
MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri B	50.000
Dikurangi biaya emisi MTN yang belum diamortisasi	(951)
Jumlah	69.706

MTN

Pada 24 Agustus 2017, MNCGU menerbitkan Medium Term Notes (MTN) Seri A dan B, masing-masing sebesar Rp21.000 juta dan Rp50.000 juta dengan tingkat bunga 10,75% dan 11,00% per tahun. Jangka waktu MTN adalah

370 hari dan 18 bulan, jatuh tempo 7 September 2018 dan 28 Februari 2019, dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, pihak ketiga, sebagai agen jaminan dan agen pemantau.

MTN dijamin dengan piutang usaha sebesar 100% dan Jaminan Perusahaan (Corporate Guarantee) dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai induk perusahaan. Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, No. RC-609/PEF-DIR/VII/2017, peringkat MTN MNCGU adalah idBBBcg (Triple B, *Corporate Guarantee*) untuk periode 13 Juli 2017 sampai dengan 1 Mei 2018.

Pembayaran bunga MTN dilakukan setiap Triwulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 28 November 2017, sedangkan pembayaran bunga MTN terakhir adalah pada tanggal 27 Februari 2019.

14. Utang sewa pembiayaan

Utang sewa pembiayaan Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 47.394 juta. PT MNC Finance (MNCF) dan PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGU), Perusahaan anak, memperoleh pinjaman untuk membeli kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Pihak Ketiga	
PT Toyota Astra Finance	44.895
PT BCA Finance	1.750
PT Mandiri Tunas Finance	749
Jumlah	47.394

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGU dan MNCF dari PT Toyota Astra Finance berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 11 November 2020. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 10,00%-12,00% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp44.895 juta dan Rp15.478 juta.

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGU dari PT BCA Finance berjangka waktu 39 bulan sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan 29 Desember 2017. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 13,40% - 14,89% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 1.750 juta dan Rp 2.186 juta. Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGU dari PT Mandiri Tunas Finance berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2020. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 10,00% per tahun.

15. Liabilitas imbalan pasca kerja

Liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp73.595 juta. Berikut ini adalah rincian liabilitas imbalan pasca kerja Perseroan per 31 Desember 2017.

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari liabilitas terkait dengan imbalan kerja selain pensiun iuran pasti adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Imbalan pasca-kerja	71.748
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.847
Jumlah	73.595

16. Liabilitas lain-lain

Liabilitas lain-lain Perseroan per 31 Desember 2017 sebesar Rp353.910 juta. Berikut ini adalah rincian liabilitas lain-lain Perseroan per 31 Desember 2017.

(dalam jutaan Rupiah)

Liabilitas surat berharga repo	140.000
Biaya yang masih harus dibayar	116.107
Bunga yang masih harus dibayar	
Simpanan	33.275
Simpanan dari bank lain	6
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	9.443
Utang klaim	15.434
Pendapatan diterima dimuka	14.412
Liabilitas akseptasi	1.522
Liabilitas derivatif	95
Liabilitas lainnya	23.615
Jumlah	353.910

Pada tahun 2017, Kelompok Usaha melakukan perjanjian membeli kembali efek dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Tanggal Mulai	Nilai Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo
24 November 2016	40.000	16%	19 Februari 2018
25 Januari 2017	50.000	16%	18 Januari 2018
8 November 2017	50.000	13%	8 Mei 2018
Jumlah	140.000		

KOMITMEN DAN KONTINJENSI

(dalam jutaan Rupiah)

Komitmen	
Tagihan Komitmen Pembelian berjangka valuta asing	181.731
Liabilitas Komitmen Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(420.381)
L/C yang <i>irrevocable</i> dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	(1.333)
Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan	(181.795)
Jumlah Liabilitas Komitmen	(603.509)
Jumlah Liabilitas Komitmen-bersih	(421.778)
Kontinjensi	
Tagihan Kontinjensi	
Bank Garansi	8.141
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	122.308
Jumlah tagihan kontinjensi	130.449
Liabilitas Kontinjensi	
Bank garansi	(11.533)
Stand-by L/C	(8.141)
Jumlah tagihan kontinjensi	(19.674)
Jumlah tagihan Kontinjensi-Bersih	110.775
Lainnya	
Kredit hapus buku	992.388

TIDAK ADA PINJAMAN YANG DITERIMA OLEH PERSEROAN DAN/ATAU ENTITAS ANAK YANG MATERIAL DAN/ATAU UNTUK KEPENTINGAN YANG MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

SELURUH LIABILITAS KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA PER TANGGAL 31 DESEMBER 2017 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN DARI TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATAKAN-PEMBATAKAN YANG DAPAT MERUGIKAN KEPENTINGAN PEMEGANG SAHAM (*NEGATIVE COVENANT*).

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2017 SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDA

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya, yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini serta dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat tanpa modifikasi serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Jumlah Aset	19.883.263	22.216.019
Jumlah Liabilitas	14.255.743	15.810.740
Jumlah Ekuitas	5.627.520	6.405.279
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	19.883.263	22.216.019

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Jumlah pendapatan	2.386.245	2.287.344
Jumlah beban	3.366.964	2.345.139
Laba (rugi) sebelum pajak	(980.719)	(57.795)
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(737.629)	(38.941)
Jumlah laba (rugi) komprehensif tahun berjalan	(779.107)	(100.543)
Laba (Rugi) Bersih Yang Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	(334.654)	(45.713)
Kepentingan Non-Pengendali	(402.975)	6.772
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	(737.629)	(38.941)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Yang Diatribusikan Kepada:		
Pemilik Entitas Induk	(381.776)	(107.639)
Kepentingan Non-Pengendali	(397.331)	7.096
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	(779.107)	(100.543)
Laba (Rugi) Per Saham Dasar (dalam Rupiah penuh)	(61,25)	(9,22)
Laba (Rugi) Per Saham Dilusian (dalam Rupiah penuh)	(61,25)	(9,22)

Rasio Keuangan

Keterangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Rasio Usaha (dalam %)		
Laba (Rugi) Sebelum Pajak/Jumlah Pendapatan	(41,10)	(2,53)
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Jumlah Pendapatan	(14,02)	(1,99)
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Jumlah Ekuitas	(5,95)	(0,71)
Laba (rugi) bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Jumlah Aset	(1,68)	(0,21)
Jumlah Pendapatan/Jumlah Aset	(12,00)	10,30
Rasio Keuangan (dalam %)		
*Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	53,41	43,96
*Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	15,12	12,67
Rasio Pertumbuhan (dalam %)		
Jumlah Pendapatan	4,32	n.a
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	1794,22	n.a
Jumlah Aset	(10,50)	n.a
Jumlah Liabilitas	(9,84)	n.a
Jumlah Ekuitas	(12,14)	n.a

*Jumlah liabilitas setelah dikurangi dengan simpanan pihak ketiga, simpanan pihak berelasi, simpanan dari bank lain, utang bank dan institusi keuangan non-bank, utang Al-Musyarakah dan utang Al Mudharabah

Rasio Keuangan di Perjanjian Kredit Atau Liabilitas Lainnya dan Pemenuhannya

Keterangan	Persyaratan keuangan	Pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
		2017	2016
Pinjaman terhadap Ekuitas	Kurang dari 2x*	0,53x	0,44x
EBITDA terhadap <i>Interest Expense</i>	Lebih dari 1x*	3,93x	6,51x

*Persyaratan keuangan mengikuti perjanjian perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam Bab ini harus dibaca bersama-sama dengan "Ikhtisar Data Keuangan Penting" dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan di Bab ini menyajikan analisis dan pembahasan manajemen yang angka-angkanya diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang tercantum dalam Prospektus ini dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat tanpa modifikasi serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

PT MNC Kapital Indonesia Tbk ("**Perseroan**") didirikan dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk berdasarkan Akta Notaris dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, No. 100 tanggal 15 Juli 1999. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097. Berdasarkan akta No. 23 tanggal 7 Nopember 2012 nama Entitas diubah menjadi PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan No.AHU62954.AH.01.02. 2012 tanggal 7 Desember 2012. Entitas induk adalah PT MNC Investama Tbk.

Perseroan berlokasi di kantor pusat MNC Financial Center, lantai 21, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340, Indonesia. Perseroan mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tanggal 19 Mei 2000.

Perbandingan Kinerja Keuangan Perseroan

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp2.386.245 juta pada tahun 2017 atau naik 4,32% dibandingkan pada tahun 2016. Seperti di tahun-tahun sebelumnya pendapatan dari lini perbankan berkontribusi terbesar terhadap pendapatan Perseroan yaitu sebesar 46,8% dengan mengacu pada pendapatan pada tahun 2017.

Perseroan membukukan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp737.629 juta pada tahun 2017 terutama karena adanya cadangan penurunan nilai yang cukup besar pada lini perbankan entitas anak. Perseroan meyakini adanya perbaikan kinerja keuangan terutama pada entitas anak bidang perbankan seiring dengan strategi utama penanganan kredit bermasalah yang diimbangi dengan manajemen risiko yang handal.

Potensi peningkatan kinerja Perseroan masih besar di tahun-tahun mendatang, yang dikontribusikan oleh beragam jenis pendapatan dari jasa keuangan antara lain sektor perbankan, pembiayaan, asuransi dan pasar modal, yang meliputi pendapatan bunga dan dividen, pembiayaan dan sewa operasi, premi, murabahah dan musyarakah, sewa Al-Ijarah, manajemen investasi dan komisi perantara pedagang efek.

Prospek kinerja sektor jasa keuangan masih sangat besar seiring dengan perluasan pangsa pasar, peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli konsumen dan semakin meningkatnya aktivitas perdagangan pasar modal.

Langkah-Langkah yang Dilakukan Perseroan Untuk Memperbaiki dan Meningkatkan Kinerja

Strategi umum Perseroan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan kinerja entitas anak sinergi antar entitas anak antara lain melalui *cross selling product* dan kegiatan pemasaran bersama.
- Mengadakan kerjasama bisnis antara perusahaan-perusahaan dibawah MNC Financial Services dengan perusahaan terafiliasi dibawah MNC Media.
- Memelihara pertumbuhan jangka panjang melalui kombinasi dari pertumbuhan *organic* dan akuisisi dari kegiatan usaha baru.
- Integrasi dan standarisasi kantor-kantor Entitas Anak di beberapa kota besar termasuk Surabaya, Denpasar-Bali, Pekanbaru, dan Medan.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kegiatan Usaha dan Hasil Operasi Perseroan dan Entitas Anak

Dalam melakukan kegiatan operasional dan bisnis, Perseroan menyadari bahwa aspek risiko merupakan aspek terpenting dan wajib diperhitungkan dengan seksama. Risiko dapat berupa risiko yang berada dibawah kendali maupun risiko yang berada diluar kendali Perseroan. Risiko harus dapat dikelola secara terintegrasi dan berkesinambungan. Seringkali kinerja bisnis mengalami tekanan, sebagai akibat risiko tidak diperhatikan dan diperhitungkan dengan matang. Oleh karena itu, risiko wajib diperhitungkan dan dipetakan jauh sebelum risiko berdampak negatif terhadap kegiatan bisnis Perseroan. Potensi kerugian disebabkan karena risiko yang terjadi harus dapat dikendalikan agar kegiatan bisnis Perseroan dapat berjalan dengan baik. Kerugian yang mungkin timbul dalam pengelolaan usaha dapat bersumber dari internal maupun eksternal Perseroan.

Berikut ini adalah faktor-faktor yang dapat secara signifikan mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak.

A. Faktor Perekonomian

Kinerja Perseroan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesehatan ekonomi dalam negeri secara keseluruhan. Apabila terjadinya perubahan ekonomi yang kurang menguntungkan, seperti penurunan Produk Domestik Bruto, depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga yang tinggi dan penurunan kinerja pasar modal, hal ini akan menurunkan laba Perseroan.

B. Faktor Peraturan Pemerintah

Mengingat kegiatan usaha Perseroan berhubungan dengan kepentingan umum, Pemerintah dapat senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif bagi Perseroan. Perubahan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan usaha di bidang perbankan, pembiayaan, asuransi, perantara perdagangan efek dan pengelolaan investasi akan mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan investasi di kelompok jasa keuangan.

C. Faktor Persaingan Usaha

Faktor kompetisi yaitu faktor yang berkaitan dengan kompetisi persaingan usaha di bidang industri pembiayaan, perasuransian, perantara perdagangan efek dan pengelolaan investasi yaitu dengan adanya ancaman dari pendatang baru yang memiliki jaringan yang lebih kuat dan besar, sehingga berani memberikan tarif bunga/premi/*trading fee/ subscription fee* yang lebih rendah. Hal ini dapat berdampak pada penurunan pendapatan Perseroan.

D. Faktor Kredit

Faktor kredit timbul dari faktor kegagalan dari *counterparty* atas liabilitas kontraktual yang mengakibatkan kerugian keuangan kepada Perseroan. Perseroan memiliki kebijakan untuk memastikan bahwa perdagangan dengan nasabah yang mempunyai catatan kredit yang baik. Divisi kredit menetapkan batas kredit dan tingkat jaminan untuk klien.

Eksposur faktor kredit Perseroan berkaitan dengan kegiatan *broker* saham terasosiasi pada posisi kontraktual nasabah yang muncul pada saat perdagangan. Dengan demikian, Perseroan memerlukan jaminan untuk mengurangi faktor tersebut. Jenis instrumen diterima Perseroan atas jaminan tersebut dapat berupa kas dan efek yang tercatat di bursa. Konsentrasi faktor kredit yang signifikan terhadap laporan keuangan Perseroan berasal dari piutang nasabah lebih dari 30 hari. Perseroan mempunyai eksposur terhadap nasabah-nasabah yang memiliki piutang yang telah jatuh tempo lebih dari 30 hari tersebut dan atas piutang tersebut, Perseroan telah menerima jaminan yang memadai.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dalam tahun berjalan, Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan standar baru, sejumlah amandemen PSAK yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan dari Ikatan Akuntan Indonesia yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada 1 Januari 2017.

Penerapan standar dan amandemen berikut tidak memiliki pengaruh signifikan atas pengungkapan atau jumlah yang dicatat di dalam laporan keuangan konsolidasian pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya:

- Amandemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan
- Amandemen PSAK 3: Laporan Keuangan Interim
- Amandemen PSAK 24: Imbalan Kerja
- Amandemen PSAK 58: Aset Tidak Lancar yang dimiliki untuk dijual dan Operasi yang dihentikan
- Amandemen PSAK 60: Instrumen Keuangan
- Amandemen ISAK 31: Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi

Pada tahun 2015, Perseroan menerapkan PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja.

PSAK 24 (revisi 2013), Imbalan Kerja

Amandemen terhadap PSAK 24 atas akuntansi program imbalan pasti dan pesangon. Perubahan paling signifikan terkait akuntansi atas perubahan dalam kewajiban manfaat pasti dan aset program. Amandemen mensyaratkan pengakuan perubahan dalam kewajiban imbalan pasti dan nilai wajar aset program ketika amandemen terjadi, dan karenanya menghapus pendekatan koridor yang diijinkan berdasarkan PSAK 24 versi sebelumnya dan mempercepat pengakuan biaya jasa lalu. Amandemen tersebut mensyaratkan seluruh keuntungan dan kerugian aktuarial diakui segera melalui penghasilan komprehensif lain agar supaya aset atau liabilitas pensiun bersih diakui dalam laporan posisi keuangan mencerminkan jumlah keseluruhan dari defisit atau surplus program. Selanjutnya, biaya bunga dan imbal hasil aset program yang digunakan dalam PSAK 24 versi sebelumnya digantikan dengan nilai "bunga neto" berdasarkan PSAK 24 (revisi 2013) yang dihitung dengan mengalikan tingkat diskonto dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto.

Perubahan ini berdampak pada jumlah yang diakui dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya, PSAK 24 (revisi 2013) memperkenalkan perubahan tertentu dalam penyajian biaya manfaat pensiun termasuk pengungkapan yang lebih luas. Ketentuan transisi yang spesifik berlaku untuk penerapan pertama kali atas PSAK 24 (revisi 2013). Perseroan menerapkan ketentuan transisi yang relevan dan menyajikan kembali jumlah-jumlah komparatif atas dasar retrospektif.

Tidak terdapat dampak kuantitatif signifikan yang ditimbulkan dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut terhadap kinerja keuangan Perseroan.

4. Kinerja Segmen Operasi

Perseroan membagi segmen operasinya menjadi 7 bagian, yaitu perbankan, investasi, asuransi, penjaminan dan perantara perdagangan efek, pengelolaan investasi, lembaga pembiayaan dan *real estate*. Berikut ini adalah kinerja dari masing-masing segmen operasi Perseroan tersebut yang mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan

pendapat tanpa modifikasian serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016.

Pendapatan Bersih

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016	
	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)
Perbankan	1.125.327	46,8%	1.059.529	46,4%
Investasi	23.640	1%	70.537	3%
Asuransi	344.575	14,3%	360.376	15,7%
Penjaminan dan perantara perdagangan efek	121.577	5,1%	140.991	6,1%
Pengelolaan investasi	31.627	1,3%	35.804	1,5%
Lembaga pembiayaan	756.169	31,5%	623.686	27,3%
Real estate	70	0,0%	536	0,0%
Total Sebelum Eliminasi	2.402.985	100,00%	2.283.229	100,00%

Hasil Segmen

(dalam jutaan Rupiah)

Deskripsi	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			
	2017		2016	
	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)	Nilai (Rp)	Kontribusi (%)
Perbankan	(213.831)	-210,2%	702.069	82,6%
Investasi	(28.179)	-27,7%	(20.291)	-2,4%
Asuransi	(59.085)	-58,1%	(63.800)	-7,5%
Penjaminan dan perantara perdagangan efek	21.560	21,2%	(39.403)	-4,6%
Pengelolaan investasi	427	0,4%	(19.870)	-2,3%
Lembaga pembiayaan	380.915	374,5%	291.801	34,2%
Real estate	(97)	-0,1%	393	0,0%
Total Sebelum Eliminasi	101.710	100,00%	850.081	100,00%

5. Analisis Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

Analisis Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat tanpa modifikasian serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat tanpa modifikasian. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
JUMLAH PENDAPATAN	2.386.245	2.287.344
JUMLAH BEBAN	3.366.964	2.345.139
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	(980.719)	(57.795)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK - BERSIH	243.090	18.854
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	(737.629)	(38.941)

Penghasilan (beban) komprehensif lain setelah pajak	(41.478)	(61.602)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	(779.107)	(100.543)

Berikut ini adalah perbandingan laba rugi komprehensif konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Pendapatan

Perseroan membukukan pendapatan sebesar Rp2.386.245 juta atau meningkat sebesar Rp98.901 juta atau sebesar 4,3% dibandingkan pendapatan tahun 2016 sebesar Rp2.287.344 juta. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya pendapatan pembiayaan dan sewa operasi sebesar Rp181.477 juta atau 39% dari sebelumnya Rp465.543 juta menjadi Rp647.020 juta. Pendapatan tersebut merupakan kontribusi dari entitas anak MNCF dan MNCGU. Selain itu, terdapat pula kenaikan jasa manajer investasi dan komisi perantara pedagang efek masing-masing Rp3.156 juta dan Rp 2.496 juta atau 14,3% dan 5,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Beban Langsung

Beban langsung konsolidasian meningkat 43,6% di tahun 2017 menjadi Rp3.366.964 juta dari Rp2.345.139 juta di tahun 2016. Beban yang jauh lebih tinggi di 2017 terutama diakibatkan oleh naiknya beban penurunan nilai sebesar Rp806.224 juta atau 959% dari tahun sebelumnya.

Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi untuk tahun 2017 meningkat sebesar 16,0% dari Rp997.940 juta di tahun 2016 menjadi Rp1.158.072 juta. Peningkatan beban umum dan administrasi ini terutama diakibatkan oleh meningkatnya beban gaji dan tunjangan sebesar Rp45.345 juta atau 9,56% dari tahun sebelumnya, hal ini disebabkan oleh naiknya jumlah karyawan. Selain itu terdapat kenaikan untuk beban perbaikan dan pemeliharaan serta beban lain-lain atas pengembangan bisnis kartu kredit masing-masing sebesar Rp47.074 juta dan Rp83.181 juta atau 282,9% dan 54,9%.

Penurunan Nilai

Penurunan nilai Perseroan meningkat signifikan sebesar Rp806.224 juta menjadi sebesar Rp890.291 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya hanya sebesar Rp84.067 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh beban penurunan nilai BMNCI yang meningkat Rp810.298 juta atau 2.712% dari tahun sebelumnya.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Rugi bersih tahun berjalan meningkat sebesar Rp698.688 juta dari sebesar Rp38.941 juta pada tahun 2016 menjadi sebesar Rp737.629 juta pada tahun 2017. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penurunan nilai pada entitas anak sebesar Rp806.224 juta.

Penghasilan (Beban) Komprehensif Lain Setelah Pajak

Beban Komprehensif Lain Setelah Pajak Perseroan menurun sebesar Rp20.124 juta menjadi sebesar Rp41.478 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp61.602 juta pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya rugi perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual dan beban kewajiban imbalan pasti masing-masing sebesar Rp 18.646 juta dan Rp1.478 juta.

Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan

Rugi Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan meningkat sebesar Rp678.564 juta atau sebesar 674,9% menjadi sebesar Rp779.107 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp100.543 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan dari rugi tahun berjalan dan adanya beban komprehensif lain setelah pajak.

6. Analisis Posisi Keuangan Konsolidasian

Analisis Posisi Keuangan Konsolidasian berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat tanpa modifikasi

serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Per tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Jumlah Aset	19.883.263	22.216.019
Jumlah Liabilitas	14.255.743	15.810.740
Jumlah Ekuitas	5.627.520	6.405.279

Berikut ini adalah perbandingan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Aset

Jumlah aset Perseroan per 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp 19.883.263 juta atau menurun sebesar Rp2.332.756 juta atau sebesar 10,5% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar Rp22.216.019 juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan atas kas dan setara kas, piutang nasabah, efek-efek, kredit-bersih, piutang murabahah-bersih dan aset Al-Ijarah.

Penurunan signifikan kas setara kas sebesar Rp1.464.807 juta yang sebelumnya Rp3.245.481 juta pada tanggal 31 Desember 2017 menjadi Rp1.780.674 juta pada tanggal 31 Desember 2016 disebabkan oleh menurunnya penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp762.124 juta dan *call money* sebesar Rp495.143 juta dari BMNCI. Penurunan piutang nasabah per tanggal 31 Desember 2017 sebesar Rp402.437 juta menjadi Rp811.042 juta dari sebelumnya Rp1.213.479, hal ini disebabkan menurunnya jumlah transaksi nasabah MNCS di akhir tahun. Penurunan kredit-bersih sebesar Rp1.138.098 juta atau 14,5% dari tahun sebelumnya disebabkan meningkatnya jumlah cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp278.595 juta.

Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan per 31 Desember 2017 adalah Rp14.255.743 juta atau turun sebesar Rp1.554.997 juta atau sebesar 9,8% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2016 sebesar Rp15.810.740 juta. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan simpanan, simpanan dari bank lain dan utang nasabah masing-masing sebesar Rp1.198.775 juta, Rp310.059 juta dan Rp366.355 juta atau 11,8%, 61,1% dan 31,9%.

Liabilitas di level Perseroan tanpa entitas anak yaitu berupa utang obligasi dengan tingkat suku bunga tetap selama umur obligasi sehingga Perseroan tidak menghadapi risiko perubahan tingkat suku bunga selama umur obligasi tersebut.

Per tanggal 31 Desember 2017, jumlah bunga terutang yang dimiliki oleh Perseroan adalah sebesar Rp9.443 juta.

Ekuitas

Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp5.627.520 juta atau turun sebesar Rp777.759 juta atau sebesar 12,1% dari posisi pada 31 Desember 2016 sebesar Rp6.405.279 juta. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnya rugi bersih tahun berjalan dan adanya rugi komprehensif tahun berjalan.

7. Analisis Arus Kas Konsolidasian

Analisis Arus Kas Konsolidasian berikut ini mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta Catatan atas Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang dilampirkan dalam Prospektus ini untuk tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat tanpa modifikasi serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi. Audit dilaksanakan sesuai dengan

Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	(1.736.211)	(1.018.231)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	228.408	(1.174.183)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	42.996	1.755.287
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	(1.464.807)	(437.127)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun	3.245.481	3.682.608
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun	1.780.674	3.245.481

Berikut ini adalah perbandingan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perseroan mencatat kas bersih yang digunakan untuk aktivitas operasi sebesar Rp1.736.211 juta pada tahun 2017 terutama disebabkan oleh penurunan simpanan. Sementara arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi pada tahun 2016 sebesar Rp 1.018.231 juta, terutama disebabkan oleh penurunan kredit.

Aktivitas operasi yang melibatkan arus kas antara lain penerimaan dari bunga, provisi, komisi kredit, penjualan portofolio efek, nasabah, premi, klaim reasuransi, komisi perantara perdagangan efek, pendapatan manajer investasi, jasa penasehat keuangan; pembayaran untuk karyawan, bunga, hadiah, provisi, komisi dana, perolehan portofolio efek, pemasok, pajak penghasilan; penurunan (kenaikan) aset operasi untuk efek-efek, tagihan derivatif, penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, aset lain-lain dan kredit; kenaikan (penurunan) liabilitas operasi untuk simpanan, liabilitas lain-lain, liabilitas segera, simpanan dari bank lain dan liabilitas derivatif.

Arus Kas untuk Aktivitas Investasi

Perseroan mencatatkan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp228.408 juta pada tahun 2017 terutama dihasilkan dari pencairan investasi sebesar Rp286.457 juta dan penjualan aset tetap sebesar Rp7.571 juta. Sementara tahun 2016, Perseroan menggunakan arus kas dari aktivitas investasi sebesar Rp1.174.183 juta.

Aktivitas investasi yang melibatkan arus kas antara lain penerimaan dari penjualan aset tetap, penjualan aset Al-ljarah, dividen; perolehan aset tetap, penambahan aset Al-ljarah dan pencairan (penempatan) investasi.

Arus Kas untuk Aktivitas Pendanaan

Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp42.996 juta pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp1.755.287 juta, terutama digunakan untuk pembayaran pinjaman terkait perkembangan usaha pembiayaan dari entitas anak MNCF dan MNCGU.

Aktivitas pendanaan yang melibatkan arus kas antara lain penerimaan dari pinjaman, setoran modal saham, penerbitan *medium term notes*, penjualan saham yang diperoleh kembali dan pembayaran untuk pelunasan utang obligasi dan *medium term notes*, pinjaman pada pihak ketiga, bunga.

8. Likuiditas dan Solvabilitas

Perseroan membagi sumber likuiditas menjadi likuiditas internal dan eksternal. Sumber internal likuiditas Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset keuangan, dividen dari Entitas Anak, penjualan *treasury stock* dan penjualan saham Entitas Anak, sedangkan sumber eksternal likuiditas Perseroan adalah pinjaman bank atau lembaga keuangan lainnya, obligasi dan MTN. Dalam memenuhi kewajiban yang jatuh tempo, Perseroan terutama mengandalkan likuiditas internal sedangkan sumber likuiditas eksternal Perseroan yang paling utama adalah utang bank jangka pendek dan jangka panjang.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan oleh Perseroan adalah kas dan setara kas dan aset keuangan lancar perusahaan, dividen dari Entitas Anak, penjualan *treasury stock*, penjualan saham Entitas Anak.

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Perseroan memiliki modal kerja yang cukup.

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset Perseroan. Solvabilitas diukur dengan membandingkan antara jumlah liabilitas terhadap jumlah aset. Tingkat solvabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar 71,70% dan 71,17%.

9. Imbal hasil ekuitas dan imbal hasil investasi

Imbal Hasil Ekuitas

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dari perbandingan laba tahun berjalan terhadap jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut adalah sebesar -13,11% dan -0,61%.

Imbal Hasil Investasi

Imbal hasil investasi menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih dari aktiva yang dimiliki Perseroan, diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan total aset. Tingkat imbal hasil investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 berturut-turut adalah sebesar -3,71% dan -0,18%.

10. Belanja Modal (*Capital Expenditure*)

Pada tahun 2017, belanja modal Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp101.210 juta. Belanja modal Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Perseroan dan Entitas Anak	101.210	73.742

Pembelian aset tetap yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2017 dan 2016 berturut-turut adalah sebesar Rp101.210 juta dan Rp73.742 juta. Pembelian aset tetap secara umum dibiayai oleh pinjaman dari bank/lembaga keuangan lainnya karena sebagian besar aset tetap tersebut adalah aset sewa operasi. Perseroan tidak melakukan transaksi lindung nilai karena tidak adanya sumber dana pembelian aset tetap dalam mata uang asing. Seluruh belanja modal yang dilakukan Perseroan dan Entitas Anak mencakup kota Jakarta, Semarang, Bandung dan Surabaya. Aset tetap yang dibeli oleh Perseroan dan Entitas Anak terutama berupa kendaraan, peralatan dan perlengkapan kantor yang tujuannya untuk meningkatkan kinerja kegiatan operasional.

Dalam melakukan belanja modal, Perseroan dan Entitas Anak telah mempertimbangkan fungsi dan tujuan belanja modal tersebut. Pembelian aset tetap yang dilakukan adalah untuk meningkatkan pendapatan Perseroan dan Entitas Anak.

11. Manajemen Risiko Keuangan

Pengelolaan risiko di Perseroan dan Entitas Anak mencakup seluruh jenis risiko dari semua aktivitas fungsional Perseroan dan Entitas Anak berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan pengelolaan risikonya. Untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis, Perseroan dan Entitas Anak secara terus menerus melakukan evaluasi secara berkala, mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko entitas terpadu dan struktur pengendalian internal yang komprehensif,

agar dapat memberikan informasi secara dini mengenai terdapatnya potensi risiko kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalisasi dampak risiko tersebut. Kerangka manajemen risiko entitas terpadu tersebut dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas-batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas fungsional.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan dan Entitas Anak adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga ekuitas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

Direksi Perseroan dan Entitas Anak menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini:

A. Risiko Suku Bunga

Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas dimana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba setelah pajak. Perseroan dan Entitas Anak memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan dari kreditur yang menawarkan suku bunga yang paling menguntungkan Perseroan dan Entitas Anak. Persetujuan dari Direksi dan Komisaris harus diperoleh sebelum Perseroan dan Entitas Anak menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola eksposur risiko suku bunga.

B. Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perseroan dan Entitas Anak mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing mata uang.

C. Risiko Harga Ekuitas

Investasi jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak terutama terdiri dari investasi minoritas dalam ekuitas Entitas swasta Indonesia. Sehubungan dengan Entitas Indonesia dimana Perseroan dan Entitas Anak memiliki investasi, kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak tersebut kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia.

D. Risiko Kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan dan Entitas Anak. Risiko kredit Perseroan dan Entitas Anak terutama melekat pada rekening bank, setara kas, piutang nasabah, deposito yang dijadikan sebagai jaminan pada Lembaga Kliring dan Penjamin Efek Indonesia, piutang pembiayaan, kredit, piutang pembiayaan murabahah, premi dan aset reasuransi. Perseroan dan Entitas Anak menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya, sedangkan piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Perseroan dan Entitas Anak dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen secara tahunan.

Risiko kredit adalah risiko bahwa Perseroan dan Entitas Anak akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Perseroan dan Entitas Anak mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

E. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Perseroan dan Entitas Anak menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Perseroan dan Entitas Anak pada periode laporan keuangan 31 Desember 2017 memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Perseroan dan Entitas Anak memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Perseroan dan Entitas Anak dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Perseroan dan Entitas Anak juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo hutang jangka panjang mereka.

12. Manajemen Risiko Permodalan

Perseroan dan Entitas Anak berupaya untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan usaha mereka, termasuk mempertahankan rasio modal yang sehat dan peringkat kredit yang kuat, dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Beberapa instrumen utang Perseroan dan Entitas Anak memiliki pembatasan tertentu yang menentukan rasio *leverage* maksimum (*maximum leverage ratios*). Perseroan dan Entitas Anak telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditentukan secara eksternal.

Pihak manajemen melakukan pengawasan modal dengan menggunakan beberapa pengukuran *leverage* keuangan seperti rasio hutang terhadap ekuitas. Perseroan dan Entitas Anak terus mengelola pembatasan utang dan struktur modal. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rasio utang terhadap ekuitas konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

	<i>(dalam jutaan Rupiah, kecuali gearing ratio)</i>	
	31 Desember 2017	31 Desember 2016
Pinjaman	12.179.722	13.498.697
Kas dan Bank	1.780.674	3.245.481
Pinjaman – Bersih	10.399.048	10.253.216
Ekuitas	5.627.520	6.405.279
Gearing ratio	185%	160%

TIDAK ADA PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN ENTITAS ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN.

TIDAK ADA KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS YANG DILAPORKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG TELAH DIAUDIT AKUNTAN PUBLIK TERAKHIR.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak menghadapi risiko yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan dan Entitas Anak apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Selain itu, Efek yang diterbitkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini juga memiliki risiko investasi bagi investor. Beberapa potensi risiko di bawah ini dapat mempengaruhi usaha serta laba yang dihasilkan Perseroan, yang diurutkan berdasarkan bobot dari yang tertinggi hingga bobot yang terendah sebagai berikut:

A. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN PERSEROAN

1. Risiko sebagai perusahaan induk (Risiko Utama)

Sebagai perusahaan induk, Perseroan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap kegiatan dan pendapatan usaha dari Entitas Anak. Kontribusi pendapatan usaha Entitas Anak kepada Perseroan selama 3 tahun terakhir tercatat sebesar 99,9%. Tidak terdapat jaminan bahwa Entitas Anak milik Perseroan akan selalu memberi kontribusi laba secara berkesinambungan. Apabila kegiatan usaha Entitas Anak mengalami penurunan, maka akan berpengaruh pada kinerja dan prospek Perseroan.

2. Risiko persaingan

Seiring dengan membaiknya keadaan perekonomian di Indonesia, sektor jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek, pembiayaan maupun pengelolaan dana semakin banyak diminati oleh para investor. Hal ini menyebabkan banyaknya perusahaan sejenis yang beroperasi dan memperebutkan pangsa pasar sehingga menimbulkan tingkat persaingan yang ketat antar perusahaan sejenis sehingga dapat mengakibatkan menurunnya tingkat pendapatan Perseroan.

3. Risiko perekonomian

Kinerja Perseroan sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dalam negeri secara keseluruhan. Apabila terjadinya perubahan ekonomi yang kurang menguntungkan, seperti penurunan Produk Domestik Bruto, depresiasi Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, tingkat suku bunga yang tinggi dan penurunan kinerja pasar modal, hal ini akan menurunkan laba Perseroan dan atau Entitas Anak Perseroan yang berdampak ke Perseroan.

4. Risiko peraturan pemerintah

Mengingat kegiatan usaha Perseroan berhubungan dengan kepentingan umum, Pemerintah dapat senantiasa melakukan pengawasan secara ketat melalui berbagai peraturan. Munculnya peraturan – peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat menimbulkan dampak negatif bagi Perseroan. Perubahan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan usaha di perusahaan sekuritas, asuransi, pembiayaan dan pengelolaan dana akan mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan investasi di kelompok jasa keuangan.

B. RISIKO USAHA YANG BERKAITAN DENGAN ENTITAS ANAK

• Risiko Lini Usaha Perbankan

1. Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko kerugian akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya. Termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat kegagalan debitur, risiko Kredit akibat terkonsentrasinya penyediaan dana (risiko konsentrasi kredit), risiko kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) dan risiko kredit akibat *country risk*. Risiko kredit berasal dari berbagai kegiatan usaha BMNCI, termasuk pemberian kredit, penempatan pada bank lain, pembelian efek, dan aktivitas *trading* lainnya. Risiko kredit juga berasal dari kegiatan *settlement* dan kliring, serta dari komitmen dan kontinjensi dari pihak lain.

2. Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif, akibat perubahan dan fluktuasi secara keseluruhan dari kondisi pasar. Risiko pasar dapat berasal dari posisi *trading book* maupun *banking book*. Portofolio dari *trading book* terdiri dari semua instrumen keuangan yang dimiliki bank untuk periode jangka pendek dalam rangka memfasilitasi kegiatan perdagangan untuk mendapatkan keuntungan, atau untuk lindung nilai terhadap berbagai jenis risiko. Sedangkan *banking book* terdiri dari semua portofolio yang bukan bagian dari *trading book*.

3. Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional BMNCI. Risiko ini melekat dalam semua proses bisnis, kegiatan operasional, sistem dan produk Bank, dari mulai kantor pusat sampai kantor kas. Kegagalan mengelola risiko operasional dapat menyebabkan kerugian keuangan, keselamatan karyawan dan reputasi BMNCI.

4. Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah akibat ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank. Tujuan utama Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas adalah untuk meminimalkan kemungkinan ketidakmampuan Bank dalam memperoleh sumber pendanaan arus kas.

5. Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya kontrak atau pengikatan agunan yang tidak sempurna.

6. Risiko Strategik

Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Ketidakmampuan BMNCI dalam melakukan penyusunan strategi yang tepat dapat menimbulkan kegagalan bisnis BMNCI di masa yang akan datang. Risiko ini juga mencakup kemampuan BMNCI dalam mengembangkan daya saing dan menciptakan keunggulan kompetitif BMNCI di tengah kompetisi perbankan yang semakin ketat.

7. Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sumber dari risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum. Kegagalan dalam mengelola risiko kepatuhan dapat menyebabkan BMNCI terkena sanksi dan denda dari regulator atau penurunan reputasi.

8. Risiko Reputasi

Risiko reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap BMNCI. Risiko ini melekat dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh BMNCI. Kegagalan BMNCI dalam menjaga reputasinya di mata masyarakat dapat menimbulkan pandangan maupun persepsi negatif masyarakat terhadap BMNCI.

- **Risiko Lini Usaha Pembiayaan Konsumen**

1. Risiko Pengurusan

Risiko kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat kegagalan perusahaan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi.

2. Risiko Tata Kelola

Potensi kegagalan dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan.

3. Risiko Strategi

Potensi kegagalan perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan akibat ketidaklayakan atau kegagalan dalam melakukan perencanaan, penetapan dan pelaksanaan strategi, pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dan/atau kurang responsifnya perusahaan terhadap perubahan eksternal.

4. Risiko Operasional

Potensi kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya sebagai akibat ketidaklayakan atau kegagalan proses internal, manusia, sistem teknologi informasi, dan/atau adanya kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan perusahaan.

5. Risiko Aset dan Liabilitas

Risiko yang terjadi karena adanya potensi kegagalan dalam pengelolaan aset dan pengelolaan liabilitas pembiayaan konsumen. Tujuannya mengidentifikasi, menilai dan mengukur risiko aset dan liabilitas serta menilai kecukupan pengendalian manajemen dalam mengelola risiko.

6. Risiko Pendanaan

Risiko pendanaan dapat timbul jika MNCF mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber dana baik berupa pinjaman maupun berupa pembiayaan bersama. Kesulitan mendapatkan sumber pendanaan eksternal ini dapat mempengaruhi perkembangan usaha MNCF dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen. Selain jumlah pendanaan, hal-hal lain yang menentukan adalah jangka waktu pendanaan dan tingkat bunga. Lebih lanjut, ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana dengan jangka waktu pembiayaan maupun tingkat bunga yang diperoleh dengan tingkat bunga yang dibebankan ke konsumen dapat berakibat kepada ketidaksesuaian arus kas yang selanjutnya akan mempengaruhi perkembangan Perseroan secara negatif.

7. Risiko Pembiayaan

Risiko ini dapat terjadi jika konsumen/debitur mengalami kesulitan dalam membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini timbul jika struktur kredit, kelayakan konsumen dan piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran angsuran dari konsumen yang dapat menurunkan pendapatan MNCF.

• Risiko Lini Usaha Sewa Guna Usaha

1. Risiko kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak ketiga tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Perseroan dihadapkan pada risiko kredit dari kegiatan operasi dan dari aktivitas pendanaan, termasuk deposito pada bank dan instrumen keuangan lainnya.

2. Risiko pasar

Risiko pasar adalah risiko bahwa nilai wajar dari arus kas masa depan pada sebuah instrumen keuangan yang akan berfluktuasi karena perubahan harga pasar. Perseroan terekspos pada risiko pasar yaitu risiko suku bunga. Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar.

3. Risiko likuiditas/pendanaan

Risiko likuiditas (juga dikenal sebagai risiko pendanaan) adalah risiko dimana entitas akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan

instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan entitas untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

4. Risiko operasional

Risiko operasional bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti kekurangan dan kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem maupun hal-hal lain yang dapat berdampak pada operasional Perseroan.

- **Risiko Lini Usaha Asuransi**

1. Risiko klaim

Klaim yang muncul saat beberapa klaim diajukan hampir pada saat yang bersamaan dalam jumlah yang signifikan sehingga menekan arus kas Perusahaan dan dapat mengakibatkan kerugian yang substansial, sehingga dapat mengganggu kelangsungan usaha Perusahaan.

2. Risiko pengelolaan dana

Dalam pengelolaan dana yaitu risiko yang berkaitan dengan ketidakpastian dan perubahan situasi ekonomi global, sehingga mengakibatkan ketidakpastian politik dan makro ekonomi Indonesia dan faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keamanan investasi Perusahaan, sehingga menimbulkan ketidakpastian pendapatan hasil investasi Perusahaan.

3. Risiko operasional

Dalam mengembangkan usahanya harus diimbangi dengan kemampuan menganalisa pasar dan mengantisipasi kebutuhan sebagian besar masyarakat. Dalam hal ini kedekatan dengan pelanggan, penyedia sumber data statistik yang cepat dan akurat serta kehandalan Sumber Daya Manusia dalam mengantisipasi kebutuhan pasar akan sangat mempengaruhi kelancaran operasional perusahaan. Apabila terjadi hambatan dalam operasional akan menghambat proses pelayanan kepada para pelanggan dan selanjutnya akan mengurangi daya saing yang pada akhirnya sangat berdampak pada kemampuan memproduksi premi sebagai pendapatan utama perusahaan.

- **Risiko Lini Usaha Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek**

1. Risiko terkait penghentian izin usaha

Dalam menjalankan usahanya MNCS berpedoman pada peraturan yang berlaku, baik yang dikeluarkan langsung oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai badan Pemerintah yang ditunjuk untuk mengatur dan melakukan pengawasan atas kegiatan pasar modal maupun oleh ketentuan perundangan yang berlaku berdasarkan Undang-undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995, serta ketentuan-ketentuan lainnya yang mengatur perusahaan efek, termasuk yang dikeluarkan oleh Bursa Efek, Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI). Adanya kegagalan atau kelalaian dalam memenuhi ketentuan-ketentuan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, memungkinkan penghentian sementara atau pencabutan salah satu izin usaha MNCS sehingga akan mengakibatkan menurunnya pendapatan Perseroan.

2. Risiko penjaminan emisi efek

Salah satu kegiatan usaha MNCS adalah menjamin emisi efek. Apabila efek yang dijamin MNCS tidak dapat terjual habis maka MNCS diwajibkan untuk membeli efek yang tidak terjual tersebut dan sebagian dana MNCS menjadi terikat sehingga dapat mengganggu likuiditas dan jika harga efek tersebut mengalami penurunan harga, maka dapat mengakibatkan turunnya penghasilan Perseroan.

3. Risiko perdagangan efek

Usaha di bidang perdagangan efek sifatnya berfluktuasi, yang mengakibatkan pendapatan MNCS berfluktuasi tergantung pada keadaan Pasar Modal, kurs Rupiah, tingkat bunga umum, situasi politik dan volume perdagangan. Dengan Kondisi tersebut apabila MNCS kurang dapat mengantisipasi situasi dengan baik, akan mempengaruhi pendapatan Perseroan secara negatif.

- **Risiko Lini Usaha Jasa Pengelolaan Investasi**

1. **Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan**

Pendapatan Risiko ini dapat terjadi akibat fluktuasi harga efek (risiko pasar) termasuk berkurangnya nilai unit penyertaan yang disebabkan pertumbuhan harga efek dalam portofolio reksa dana lebih rendah dari besarnya biaya pembelian dan biaya penjualan kembali dan dapat menyebabkan penurunan terhadap NAB reksadana yang dikelola.

2. **Risiko likuiditas reksadana terbuka**

Risiko likuiditas dapat terjadi apabila terdapat penjualan kembali unit penyertaan secara serentak oleh pemegang unit penyertaan, sehingga manajer investasi tidak dapat dengan segera menyediakan uang tunai untuk membayar penjualan kembali unit penyertaan tersebut, antara lain, karena:

- Keadaan likuiditas reksa dana yang kurang baik.
- Buruknya kondisi ekonomi sehingga berpengaruh terhadap kinerja efek.
- Keadaan darurat.

Hal tersebut akan berdampak negatif terhadap kelangsungan usaha MNCAM apabila seluruh nasabah menarik dana mereka secara serentak.

3. **Risiko Kredit**

Risiko kredit dapat timbul jika perusahaan yang menerbitkan efek dan instrument pasar uang tidak mampu membayar jumlah pokok hutang dan/atau bunga yang tertunggak. Hal ini akan mempengaruhi hasil investasi reksa dana secara negatif.

- **Risiko Lini Usaha Penyewaan Properti**

1. **Risiko keterbatasan lahan**

Dari 9 (sembilan) entitas anak bidang penyewaan properti, terdapat 7 (tujuh) entitas anak yang belum beroperasi yakni BDNP, JKNP, MKNP, PBNP, SBNP, SGNP dan YKNP. Belum beroperasinya 7 (tujuh) entitas anak tersebut terutama karena belum ditemukannya lahan/tanah yang sesuai sebagai sasaran pembangunan *Integrated Financial Services*. Tidak ada jaminan 7 (tujuh) entitas anak ini mampu untuk menemukan tanah yang sesuai dalam waktu cepat. Kegagalan dan/atau penundaan dalam menemukan tanah yang sesuai akan berdampak pada berkurangnya pendapatan yang diterima oleh Perseroan melalui entitas anak bidang penyewaan properti ini.

2. **Risiko perubahan Pemerintahan, legalitas dan perizinan**

Bagi entitas anak yang bergerak di bidang penyewaan properti, legalitas dan perizinan merupakan faktor penting bagi keberhasilan pembangunan properti yang disewakan tersebut. Kegiatan usaha penyewaan properti dapat dipengaruhi oleh perubahan perundang-undangan maupun peraturan Pemerintah terkait dengan kepemilikan dan pengembangan properti, yang mana dapat memberikan dampak material yang merugikan terhadap kegiatan usaha penyewaan properti.

3. **Risiko tuntutan hukum pihak ketiga**

Tuntutan hukum dapat terjadi sewaktu-waktu baik atas properti yang telah berdiri dan beroperasi, maupun atas properti yang sedang dikembangkan terkait dengan pemilikan dan status tanah yang menjadi lokasi bangunan properti didirikan. Tuntutan dari pihak ketiga dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan bisnis entitas anak di bidang properti.

C. RISIKO INVESTASI YANG BERKAITAN DENGAN OBLIGASI

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

1. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
2. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta Pokok Obligasi pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan dan Entitas Anak.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERSEBUT TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAKNYA.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Sampai dengan tanggal prospektus ini diterbitkan dan hingga Efektifnya Pernyataan Pendaftaran, terdapat kejadian penting dan signifikan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 30 April 2018 atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat tanpa modifikasi serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016. Kejadian penting dan signifikan tersebut yaitu:

Susunan manajemen Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 31 Mei 2018 yang mana Akta Rapat Umum Pemegang Saham tersebut masih dalam pengurusan. Adapun susunan manajemen Perseroan terakhir adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap	: Nelson Tampubolon
Komisaris Independen	
Komisaris	: Darma Putra Wati
Komisaris	: Tien
Komisaris	: Mashudi Hamka
Komisaris	: Henry Suparman
Komisaris Independen	: Benny Mokalu

Direksi

Direktur Utama	: Wito Mailoa
Direktur	: Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	: Natalia Purnama
Direktur Independen	: Mahjudin

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK, KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN, DAN PROSPEK USAHA

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Perseroan didirikan di Jakarta berdasarkan Akta No. 100 tanggal 15 Juli 1999, dibuat dihadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000 serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097.

Susunan pemegang saham Perseroan pada saat pendirian, sesuai dengan Akta Pendirian No. 100 tanggal 15 Juli 1999, adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	40.000.000	40.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT Bhakti Investama Tbk	9.999.000	9.999.000.000	99,99
- Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk.	1.000	1.000.000	0,01
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000.000	10.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	30.000.000	30.000.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei 2015, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0936639.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, diterima oleh Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0937536 tanggal 5 Juni 2015 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3513712.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015 juncto Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 20 April 2017, dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0128739 tanggal 20 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051311.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 April 2017.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, dan pembangunan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha, yakni sebagai berikut:

- Menjalankan usaha-usaha bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa bidang hukum dan pajak sebagai berikut: Periklanan dan reklame, serta promosi dan pemasaran, Hiburan, promosi, agency, manajemen dan produksi, jasa persewaan mesin dan peralatan, jasa komputer dan kegiatan yang terkait, jasa pendidikan, instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral, pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan, rekreasi, dan kawasan berikat, konsultasi bidang bisnis, manajemen dan administrasi, konsultasi manajemen dan administrasi, jasa pengembangan bisnis dan manajemen, konsultasi arsitek, landscape, design dan interior, konsultasi teknik engineering, konsultasi manajemen sumber daya manusia, konsultasi pelatihan dan keterampilan, menjalankan usaha dalam bidang jasa investasi;
- Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, meliputi perdagangan pada umumnya, diantaranya import dan ekspor, perdagangan besar lokal, bertindak sebagai grosir, supplier, leveransier, dan commission house, distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan; perdagangan

- yang berhubungan dengan usaha real estat dan properti, penjualan mobil dan sepeda motor, perdagangan komputer dan alat elektronika, perdagangan alat transmisi telekomunikasi;
- Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, meliputi perindustrian pada umumnya, diantaranya Industri makanan dan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil), Industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage), industri tekstil, industri pakaian jadi, industri meuble, industri mesin-mesin, industri peralatan rumah tangga, industri kayu dan barang anyaman, industri daur ulang, industri kerajinan tangan;
 - Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan pada umumnya, diantaranya ekspedisi dan pergudangan, angkutan penumpang;
 - Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian pada umumnya, diantaranya argoindustri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan, pekebunan tanaman pangan, kehutanan;
 - Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan (developer) pada umumnya, diantaranya bertindak sebagai pengembang, pemborong pada umumnya, pembangunan gedung dan konstruksi, jembatan, jalan, taman, dan sebagainya, pemasangan instalasi-instalasi, pengembangan wilayah pemukiman;
 - Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Berikut ini adalah Penyertaan Perseroan pada Entitas Anak berdasarkan DPS masing-masing Entitas Anak tertanggal 31 Desember 2017.

No	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Domisili	Presentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Penyertaan Melalui
1.	MNCS	Penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek	Jakarta	99,99	2004	Beroperasi	Langsung
2.	MNCAM	Jasa pengelolaan investasi	Jakarta	99,99	2003	Beroperasi	Langsung
3.	MNCF	Pembiayaan konsumen	Jakarta	99,99	2003	Beroperasi	Langsung
4.	MNCAI	Jasa asuransi umum	Jakarta	99,98	2011	Beroperasi	Langsung
5.	MNCL	Jasa asuransi jiwa	Jakarta	99,98	2010	Beroperasi	Langsung
6.	MNCGU	Sewa guna usaha	Jakarta	99,99	2014	Beroperasi	Langsung
7.	BMNCI	Jasa perbankan	Jakarta	41,43	2014	Beroperasi	Langsung
8.	BDNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
9.	JKNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
10.	MDNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Beroperasi	Langsung
11.	MKNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
12.	PBNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
13.	RINP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Beroperasi	Langsung
14.	SBNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
15.	SGNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung
16.	YKNP	Penyewaan properti	Jakarta	99,92	2016	Belum Beroperasi	Langsung

Berikut adalah beberapa kejadian penting Perseroan sejak awal berdiri sampai dengan tahun 2017.

Tahun	Kejadian Penting
1999	Perseroan berdiri di Jakarta pada tanggal 15 Juli
2001	Penawaran umum perdana saham Perseroan (IPO)
2003	Perseroan menjadi perusahaan induk bidang jasa keuangan PT Bhakti Asset Management dan PT Bhakti Finance menjadi entitas anak Perseroan
2004	PT Bhakti Securities didirikan.
2010	Perseroan mengakuisisi PT UOB Life Sun Assurance dan berganti nama menjadi PT MNC Life Assurance (MNC Life).

Tahun	Kejadian Penting
2011	Perseroan mengakuisisi PT Jamindo General Insurance dan berganti nama menjadi PT MNC Asuransi Indonesia (MNC Insurance). PT Bhakti Asset Management, PT Bhakti Finance dan PT Bhakti Securities masing-masing berganti nama menjadi PT MNC Asset Management, PT MNC Finance dan PT MNC Securities.
2012	Perseroan berganti nama menjadi PT MNC Kapital Indonesia Tbk.
2013	Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I sebesar Rp225 miliar dengan tenor 5 tahun untuk memperkuat modal kerja entitas anak.
2014	Perseroan melakukan penawaran terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) sebanyak 2.615.276.045 lembar saham dengan total nilai Rp2,35 triliun. Perseroan mengakuisisi saham PT Bank ICB Bumiputera Tbk dan menjadi pemegang saham pengendali. PT Bank ICB Bumiputera Tbk kemudian berganti nama menjadi Bank MNC Internasional Tbk. Perseroan mengakuisisi sebanyak 99,99% persen milik PT Indo Finance Perkasa dan berganti nama menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia.
2015	The Company melakukan penawaran terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) yang kedua sebanyak 551.474.960 lembar saham dengan total nilai Rp827,21 miliar.
2016	Tujuh lini usaha dibawah kontrol Perseroan membangun fondasi infrastruktur yang lebih cepat dan berinvestasi pada banyak area penting. Perseroan memperoleh dana dari eksekusi waran sejumlah Rp824,3 miliar.
2017	Peresmian Integrated Financial Services di Surabaya, Pekanbaru dan Medan. Penandatanganan MoU antara Perseroan dengan Bank Riau Kepri, dan Bank Banten dan Bank Sumut. Perseroan meraih penghargaan dari Finance Asia.

2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berikut ini adalah perubahan dalam struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 2 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran.

Tahun 2016

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 29 April 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0045176 tanggal 29 April 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0054634.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 29 April 2016.

Peningkatan modal tanpa HMETD melalui Pelaksanaan program hak opsi manajemen dan karyawan untuk memiliki saham Perseroan (*Management dan Employee Stock Option Program – MESOP*) Tahap III periode tanggal 1 sampai 8 April 2006 sejumlah 56.400 saham sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	2.990.445.993	299.044.599.300	63,77
- HT Capital Investment Ltd.	389.815.162	38.981.516.200	8,31
- Masyarakat*	1.309.180.305	130.918.030.500	27,92
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.689.441.460	468.944.146.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.310.558.540	1.031.055.854.000	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 12 tanggal 2 Juni 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0055023 tanggal 3 Juni 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0069781.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 3 Juni 2016.

Peningkatan modal tanpa HMETD melalui pelaksanaan program hak opsi manajemen dan karyawan untuk memiliki saham Perseroan (*Management dan Employee Stock Option Program – MESOP*) Tahap III periode tanggal 9 April 2016 sampai 4 Mei 2016 sejumlah 1.636.400 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu empat ratus) saham sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	2.990.445.993	299.044.599.300	63,75
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	505.900.000	50.590.000.000	10,78
- HT Capital Investment Ltd.	389.815.162	38.981.516.200	8,31
- Masyarakat*	804.916.705	80.491.670.500	17,16
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.691.077.860	469.107.786.000	100,00
Saham dalam Portepel	10.863.937.800	1.026.393.780.000	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.49 tanggal 22 September 2016, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0083430 tanggal 26 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0112490.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 26 September 2016.

Peningkatan modal tanpa HMETD dan dalam rangka HMETD melalui (i) Pelaksanaan program hak opsi manajemen dan karyawan untuk memiliki saham Perseroan (*Management dan Employee Stock Option Program – MESOP*) sejumlah 33.400 (tiga puluh tiga ribu empat ratus) saham, (ii) Pelaksanaan Waran Seri I, sejumlah 66.250.738 (enam puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tujuh ratus tiga puluh delapan) saham, (iii) Penambahan Modal Tanpa HMETD tanggal 1 Juni 2016 sejumlah 232.207.479 (dua ratus tiga puluh dua juta dua ratus tujuh ribu empat ratus tujuh puluh Sembilan) saham, sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	3.281.536.800	328.153.680.000	65,77
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	505.900.000	50.590.000.000	10,14
- HT Capital Investment Ltd.	389.815.162	38.981.516.200	7,81
- Masyarakat*	812.317.515	81.231.751.500	16,28
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.989.569.477	498.956.947.700	100,00
Saham dalam Portepel	10.010.430.523	1.001.043.052.300	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Tahun 2017

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.94 tanggal 20 April 2017, dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-

AH.01.03-0128739 tanggal 20 April 2017 dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051311.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 April 2017.

Peningkatan modal dalam rangka HMETD melalui Pelaksanaan Waran Seri I sampai dengan tanggal 7 Oktober 2016 sejumlah 483.268.841 (empat ratus delapan puluh tiga juta dua ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh satu) saham, sehingga setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilaksanakan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	3.764.495.789	376.449.578.900	68,79
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	505.900.000	50.590.000.000	9,24
- HT Capital Investment Ltd.	389.815.162	38.981.516.200	7,12
- Masyarakat*	812.627.367	81.262.736.700,00	14,85
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.472.838.318	547.283.831.800	100,00
Saham dalam Portepel	9.527.161.682	952.716.168.200	

*) kepemilikan saham di bawah 5%

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham tertanggal 31 Januari 2018 dari PT BSR Indonesia susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- PT MNC Investama Tbk	3.824.398.989	382.439.898.900	69,88
- UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	505.900.000	50.590.000.000	9,24
- HT Capital Investment Ltd.	389.815.162	38.981.516.200	7,12
- Masyarakat*	752.724.167	75.272.416.700	13,76
Jumlah modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.472.838.318	547.283.831.800	100,00
Saham dalam Portepel	9.527.161.682	952.716.168.200	-

*) kepemilikan saham di bawah 5%

3. Perizinan yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

Berikut merupakan perizinan operasional yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak untuk menjalankan kegiatan usahanya:

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
Perseroan		
1.	Surat Keterangan Domisili	No. 796/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2016 tanggal 21 November 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih
2.	Tanda Daftar Perusahaan	No. 09.05.1.74.43134 tanggal 7 September 2017 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
3.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar	No. 325/24.1PB.7/31.71/-1.824.27/e/2017 tanggal 4 Agustus 2017 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
Entitas Anak		
4.	Surat Keterangan Domisili MNCAI	No.191/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2017 tanggal 21 Maret 2017 dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih
5.	Tanda Daftar Perusahaan MNCAI	No. 09.05.1.65.72789 tanggal 16 Desember 2013
6.	Izin Usaha sebagai Perusahaan Asuransi MNCAI	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-118/KM.10/2012 tanggal 2 Maret 2012
7.	Surat Keterangan Domisili RINP	No.593/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2016 tanggal 31 Agustus 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
8.	Tanda Daftar Perusahaan RINP	No.09.05.1.68.89938 tanggal 20 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
9.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	No.150/24.1PK/31.71.06/-1.824.27/e/2018 tanggal 9 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng
10.	Surat Keterangan Domisili MNCF	No. 5/27.1BU.1/31.71.06.1005/-071.562/e/2016 tanggal 15 Agustus 2016, oleh Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
11.	Tanda Daftar Perusahaan MNCF	No. 09.05.1.65.27299 tanggal 23 September 2014, oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Perdagangan wilayah Kotamadya Jakarta Pusat
12.	Izin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan MNCF	Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.KEP-64/KM.10/2011 tanggal 14 Januari 2011
13.	Surat Keterangan Domisili MNCS	No. 209/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2017 tanggal 30 Maret 2017 oleh Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Kebon Sirih
14.	Tanda Daftar Perusahaan MNCS	No.09.05.1.66.48681 tanggal 12 Juni 2017
15.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) MNCS	No. KEP-03/PM/PEE/2004 oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia Badan Pengawas Pasar Modal tanggal 26 Mei 2004
16.	Persetujuan Anggota Bursa Efek MNCS	No. SPAB 235/JATS/BEJ.ANG/06-2004 oleh PT Bursa Efek Jakarta pada tanggal 1 Juni 2004
17.	Surat Keterangan Domisili MDNP	No. 595/27.1/31.71.06.1005/-1.624.2/2016 tanggal 05 Agustus 2016, oleh Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
18.	Tanda Daftar Perusahaan MDNP	No.09.05.1.68.89908 tanggal 15 September 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
19.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	No. 149/24.1PK./31.71.06/-1.824.27/e/2016 tanggal 09 September 2016, oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng
20.	Surat Keterangan Domisili YKNP	No. 16/27.1BU.1/31.71.06.1005/-071.582/e/2016 tanggal 22 November 2016, oleh Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
21.	Tanda Daftar Perusahaan YKNP	No.09.05.1.68.90256 tanggal 08 Desember 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
22.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	No. 72/24.1PK./31.71.06/-1.824.27/e/2016 tanggal 24 November 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng
23.	Surat Keterangan Domisili JKNP	No. 15/27.1BU.1/31.71.06.1005/-071.562/e/2016 tanggal 22 November 2016, oleh Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
24.	Tanda Daftar Perusahaan JKNP	No.09.05.1.68.90245 tanggal 09 Desember 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
25.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	No. 71/24.1PK./31.71.06/-1.824.27/e/2016 tanggal 24 November 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng
26.	Surat Keterangan Domisili MKNP	No. 598/27.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2016 tanggal 31 Agustus 2016, oleh Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
27.	Tanda Daftar Perusahaan MKNP	No.09.05.1.68.89935 tanggal 19 September 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
28.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	No. 147/24.1PK./31.71.06/-1.824.27/e/2016 tanggal 09 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng
29.	Surat Keterangan Domisili PLNP	No. 17/27.1BU/31.71.06.1005/-17.562./e/2016 tanggal 22 November 2016, oleh Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
30.	Tanda Daftar Perusahaan PLNP	No.09.05.1.68.90257 tanggal 09 Desember 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
31.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	No. 74/24.1PK./31.71.06/-1.824.27/e/2016 tanggal 24 November 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng
32.	Surat Keterangan Domisili SBNP	No. 18/27.1BU/31.71.06.1005/-17.562./e/2016 tanggal 22 November 2016, oleh Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
33.	Tanda Daftar Perusahaan SBNP	No.09.05.1.68.90641 tanggal 08 Desember 2016 oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
34.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	No. 73/24.1PK./31.71.06/-1.824.27/e/2016 tanggal 24 November 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng
35.	Surat Keterangan Domisili MNCAM	Surat Keterangan Domisili Badan Usaha No 624/27.1.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2016 tanggal 9 September 2016, dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat

No.	Jenis Perizinan	Nomor/Tanggal Penerbitan Izin/Instansi Penerbit
36.	Tanda Daftar Perusahaan MNCAM	Tanda Daftar Perusahaan No. 09.05.1.66.43359 tanggal 10 Juni 2015 dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Kota Jakarta Pusat
37.	Surat Izin Wakil Penjamin Emisi MNCAM	Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. KEP-02/PM/IP/PEE/2002 tanggal 23 Januari 2002 tentang Pemberian Izin Wakil Penjamin Emisi Efek kepada Suwito Haryatno Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-3079/PM.212/KPJ-WPPE/2016 tentang Perpanjangan Izin Wakil Perantara Pedagang Efek kepada Stien Maria Schouten
38.	Surat Keterangan Domisili BDNP	Surat Keterangan Domisili Perusahaan No. 596/27.1/31.71.06.1005/-1.824.2/2016 tanggal 31 Agustus 2016, dikeluarkan oleh Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat
39.	Tanda Daftar Perusahaan BDNP	TDP No.09.05.1.68.89934 tanggal 19 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat
40.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil	SIUP Kecil No. 148/24.1PK/31.71.06/-1.824.27/e/2016 tanggal 09 September 2016, dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Menteng

4. Keterangan Singkat Mengenai Pemegang Saham Perseroan Berbentuk Badan Hukum

Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum adalah sebagai berikut ini:

PT MNC Investama Tbk (“MNC Investama”)

Riwayat Singkat

PT MNC Investama Tbk. (“MNC Investama”) semula bernama PT Bhakti Investama, didirikan pada tanggal 2 Nopember 1989, berdasarkan Akta No. 22 tanggal 2 November 1989, sebagaimana diubah dengan Akta No.193 tanggal 15 Nopember 1989, keduanya dibuat dihadapan Soetjipto, SH, Notaris di Surabaya, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10673.HT.01.01-TH.89 tanggal 22 November 1989 dan didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah No. 1850/1989 tanggal 19 Desember 1989, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 2 Maret 1990, Tambahan No. 813.

Anggaran Dasar MNC Investama telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir diubah seluruhnya untuk disesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana dimuat dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 96 tanggal 23 April 2009, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH, pengganti dari Sutjipto, SH, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-41700.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 26 Agustus 2009 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.15 tanggal 19 Pebruari 2010, Tambahan No. 1760, dan juga Anggaran Dasar MNC Investama telah diubah dan disesuaikan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.60 tanggal 21 Mei 2015, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0943949 tanggal 19 Juni 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3522229.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 19 Juni 2015. Perubahan Anggaran Dasar terakhir kali yaitu pada Pasal 4 sebagaimana dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.88 tanggal 26 Mei 2017, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0143302 tanggal 7 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0072774.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017.

MNC Investama bergerak di bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pertambangan, pertanian, pengangkutan dan pembangunan sebagaimana dimuat dalam Anggaran Dasarnya.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.100 tanggal 23 Juni 2017, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0154591 tanggal 20 Juli 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0088762.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 20 Juli 2017, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MNC Investama yang menduduki jabatannya sampai tanggal Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Komisaris

Komisaris Utama	: Hary Tanoesoedibjo
Komisaris	: Liliana Tanaja
Komisaris	: Angela Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris	: Valencia Herliani Tanoesoedibjo
Komisaris Independen	: Darpito Pudyastungkoro
Komisaris Independen	: Kardinal Alamsyah Karim

Direksi

Direktur Utama	: Darma Putra Wati
Wakil Direktur Utama sekaligus	
Direktur Independen	: Susanty Tjandra Sanusi
Direktur	: Tien
Direktur	: Natalia Purnama
Direktur	: Jiohan Sebastian
Direktur	: Henry Suparman

Permodalan

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.88 tanggal 26 Mei 2017, dibuat di hadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0143302 tanggal 7 Juni 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0072774.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 7 Juni 2017, serta berdasarkan Laporan Kepemilikan Saham MNC Investama per tanggal 31 Januari 2018 dari PT. BSR Indonesia, susunan permodalan dan kepemilikan saham MNC Investama adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Saham	Rupiah	%
Modal Dasar	115.000.000.000	11.500.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
HT Investment Development Ltd	13.199.078.138	1.319.907.813.800	27,47
Smart Empire Group Ltd	6.025.697.879	602.569.787.900	12,54
PT Bhakti Panjiwira	5.113.807.112	511.380.711.200	10,64
UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd	2.842.553.000	284.255.300.000	5,91
Masyarakat	20.875.914.238	2.087.591.423.800	43,44
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	48.057.050.367	4.805.705.036.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	66.942.949.633	6.694.294.963.300	

5. Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada saat penyampaian Prospektus final adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No.101 tanggal 23 Juni 2017, dibuat dihadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0150409 tanggal 6 Juli 2017 dan telah Didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-

0082727.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 6 Juli 2017 jo. Surat Perseroan kepada OJK Nomor No. 067/MNCKI/DIR/XI/2017 tanggal 3 November 2017 perihal Keterbukaan Informasi Permohonan Pengunduran Diri Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk. bahwa Gregorius Andrew Andryanto Haswin pada tanggal 1 November 2017 telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Direktur Utama dan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (9) maka pengunduran diri Gregorius Andrew Andryanto Haswin menjadi efektif terhitung sejak tanggal 29 Januari 2018 yang mana hal ini telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat Perseroan No. 006/MNCKI/DIR/I/2018 tanggal 29 Januari 2018 perihal Laporan Pengunduran Diri Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk., susunan manajemen Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Darma Putra Wati
Komisaris	: Tien
Komisaris Independen	: Wina Armada Sukardi

Direksi

Direktur Utama	: Gregorius Andrew Andryanto Haswin
Direktur	: Wito Mailoa
Direktur	: Totok Sugiharto
Direktur	: Mashudi Hamka
Direktur Independen	: Mahjudin

Susunan manajemen Perseroan diatas telah mengalami perubahan sebagaimana diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tanggal 31 Mei 2018 yang mana Akta Rapat Umum Pemegang Saham tersebut masih dalam pengurusan. Adapun susunan manajemen Perseroan terakhir adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Komisaris Utama merangkap	: Nelson Tampubolon
Komisaris Independen	
Komisaris	: Darma Putra Wati
Komisaris	: Tien
Komisaris	: Mashudi Hamka
Komisaris	: Henry Suparman
Komisaris Independen	: Benny Mokalu

Direksi

Direktur Utama	: Wito Mailoa
Direktur	: Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	: Natalia Purnama
Direktur Independen	: Mahjudin

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Nelson Tampubolon

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Lahir di Balige pada 12 Januari 1954. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan sejak 31 Mei 2018.

Sebelumnya beliau menjabat Anggota Dewan Komisiner ex. Officio OJK di Lembaga Penjamin Simpanan sejak tahun 2014-2017, Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan sejak tahun 2012-2017, Direktur Direktorat Internasional Bank Indonesia sejak tahun 1982-2012 dan Staf Kantor Akuntan Publik, Bandung, Jawa Barat sejak tahun 1977-1980.



Darma Putra Wati

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 51 tahun. Lahir di Medan pada 29 April 1966. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 31 Mei 2018, selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT MNC Investama Tbk sejak September 2016.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Project Consultant Service Engineering, Inc. sejak tahun 1989-1990, Research Analyst PT Sun Hung Kai Securities Indonesia sejak tahun 1990-1991, Financial Plannning Executive PT Bumi Raya Utama Group sejak tahun 1991-1997, Chief Financial Officer PT Marga Mandalasakti sejak tahun 1997-1998, Direktur Keuangan PT Kurnia Kapuas Utama Tbk sejak tahun 1998-1999, Wakil Direktur Utama PT Marga Mandalasakti sejak tahun 1999-2001, Direktur Utama PT Marga Mandalasakti sejak tahun 2001-2008, Direktur PT MNC Investama Tbk sejak tahun 2008-2014, Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk sejak tahun 2008-2016, Komisaris PT MNC Finance sejak tahun 2008-2017, Komisaris PT MNC Sekuritas 2009-2017, Wakil Direktur Utama PT MNC Investama Tbk sejak tahun 2014-2016, Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016 – Mei 2018.

Beliau memperoleh gelar sarjana jurusan Finance Minor – Computer Science dari Oregon State University, Amerika Serikat pada tahun 1988 dan gelar MBA di bidang Finance dari the University of Minnesota, Amerika Serikat pada tahun 1990.

**Tien**

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 47 tahun. Lahir di Medan, 8 Februari 1971. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2016, selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur PT MNC Investama Tbk sejak tahun 2014.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Manager Corporate Finance PT Bhakti Investama Tbk (sekarang MNC Investama Tbk) sejak tahun 1997-2000, Manager Corporate Finance PT Bhakti Capital Indonesia (sekarang MNC Kapital Indonesia Tbk) sejak tahun 2000-2003, Direktur PT Bhakti Capital Indonesia Tbk sejak tahun 2003-2004, Direktur MNC Securities sejak tahun 2004-2014, dan Direktur PT MNC Investama Tbk dari 2014-sekarang.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Tarumanegara, Jakarta pada tahun 1993.

**Mashudi Hamka**

Komisaris

Warga Negara Jepang, 47 tahun. Lahir di Jakarta pada 6 Februari 1971. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 31 Mei 2018. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Chief Technical Officer MNC Group dan Chief Operating Officer MNC Innovation Center sejak tahun 2017.

Sebelumnya beliau bekerja sebagai Bancassurance Manager Aetna Life sejak tahun 1994-1995, Director of Sales Nihon Libertec Tokyo sejak tahun 1998-2000, Director of Sales Dimension Data Japan sejak tahun 2000-2008, Head of Client Office sampai Direktur PT AXA Technology Services Indonesia sejak tahun 2008-2013, Chief Operating Officer sampai dengan Chief Executive Officer PT Dimension Data Indonesia sejak tahun 2013-2015, Direktur Perseroan sejak tahun 2015-Mei 2018.

Beliau memperoleh gelar bidang Business Management dari Regent Business College, Sydney Australia pada tahun 1991 dan Master of Business Administration dari Temple University, Pennsylvania pada tahun 2002.



Henry Suparman

Komisaris

Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Lahir di Jakarta pada 31 Juli 1973. Beliau menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak 31 Mei 2018. Selain itu, beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT BSR Indonesia sejak Desember 2017, Direktur Utama PT MNC Aladin Indonesia sejak Agustus 2017, Direktur Utama PT Media Nusantara Informasi Entertainment sejak Juni 2017, Direktur Utama PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk sejak April 2016, Direktur Utama PT MNC Networks sejak tahun 2017, Komisaris PT Media Nusantara Press sejak tahun 2016, Direktur PT MNC Investama Tbk sejak tahun 2014, Komisaris PT MNC Televisi Networks sejak tahun 2014, Komisaris PT Media Nusantara Informasi sejak tahun 2014, Komisaris Utama PT Manado Nusantara Informasi sejak tahun 2014, Komisaris Utama PT Manado Nusantara Percetakan sejak tahun 2014, Komisaris PT Media Nusantara Distribusi sejak tahun 2014, Komisaris PT MNI Publishing sejak tahun 2012.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Komisaris PT Indonesia Transport & Infrastructure Tbk sejak tahun 2014-April 2016, Komisaris Utama PT Media Nusantara Press sejak tahun 2014–2016, Komisaris PT MNC Networks sejak tahun 2013-2016, Wakil Komisaris Utama PT Media Nusantara Informasi dan Direktur Utama PT Sun Televisi Networks sejak tahun 2013-2014, Wakil Direktur Utama PT Media Nusantara Informasi sejak tahun 2012-2013, Direktur PT Media Nusantara Distribusi dan Co-Head Sindo Group/Radio/Advertising Agency in MNC Media sejak tahun 2011-2014, Wakil Direktur Utama PT Sun Televisi Networks sejak tahun 2010-2013, Direktur Utama PT MNI Global sejak tahun 2010-2011, Direktur PT Media Nusantara Press dan Direktur Hikmat Makna Aksara sejak tahun 2009-2014, Direktur PT Media Nusantara Informasi sejak tahun 2009-2012, Direktur PT MNI Global dan Komisaris PT Cross Media International sejak tahun 2009-2010, Corporate Secretary dan Investor Relation Manager PT MNC Investama Tbk sejak tahun 2007-2009, Corporate Finance Manager PT MNC Sekuritas sejak tahun 2005-2007 dan Corporate Banking Relationship Manager PT Bank Central Asia Tbk sejak tahun 1997-2005.

Beliau memperoleh gelar sarjana jurusan Teknik Industri dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1996.



Benny Mokalu

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 58 tahun. Lahir di Kupang pada 23 Juli 1959. Beliau menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 31 Mei 2018.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Staf Ahli KAPOLRI sejak tahun 2015-2017, Kapolda Bali sejak tahun 2013–2015, Kapolda Bengkulu sejak tahun 2012-2013, Wakil Direktur III/KOR dan WCC Bareskrim POLRI sejak tahun 2007-2010, Direktur SAMAPTA Polda Sumatera Utara sejak tahun 2006-2007, Wakil Direktur RESKRIM Polda Nusa Tenggara Barat sejak tahun 2002-2006, Kasat Serse Ek Ditserse Polda

Metro Jaya sejak tahun 2000-2002, Kabag Serse Tipikor Ditserse Polda Sumatera Selatan sejak tahun 1999-2000, Sedit Log Polda Timor-Timur sejak tahun 1998-1999, Wakapolres Sumedang Polda Jawa Barat sejak tahun 1994-1998, KA KPPP Tanjung Emas Poltabes Semarang sejak tahun 1986-1994, PA Staf Polda Jawa Tengah sejak tahun 1985-1986.

Beliau menempuh pendidikan di AKABRI Kepolisian pada tahun 1985, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 1994, Sekolah Staf dan Pimpinan Kepolisian (SESPIMPOL) pada tahun 1998, Sekolah Staf dan Pimpinan Administrasi Tingkat Tinggi (SESPATI) pada tahun 2009.

Direksi



Wito Mailoa

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Lahir di Manado, 4 November 1969. Beliau menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 31 Mei 2018. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Komisaris Utama PT MNC Asset Management sejak tahun 2016.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Manager Pau Tan Information Exchange, USA sejak tahun 1993 – 1995, *Head Equity Sales* PT Harumdana Securities sejak tahun 1995 – 1998, Vice President PT Sigma Batara Securities sejak tahun 1998 – 1999, Associate Direktur PT Indoverse Securities sejak tahun 1999 – 2000, Direktur Retail Equity & Business Management PT CIMB-GK Securities Indonesia sejak tahun 2001 – 2008, Direktur Bisnis dan Management PT OSK Nusantara Securities Indonesia sejak tahun 2008 – 2009, Direktur Utama PT MNC Securities sejak tahun 2009 – 2013, Direktur Independen Perseroan pada tahun 2013-2016, Direktur Perseroan pada tahun 2016-Mei 2018.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Science MIS dari San Diego State University, Amerika Serikat tahun 1991 dan MBA Finance dari University Pomona, Amerika Serikat tahun 1993.



Jessica Herliani Tanoesoedibjo

Direktur

Warga Negara Indonesia, 23 tahun. Lahir di Jakarta pada 15 Juni 1994. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 31 Mei 2018. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Wakil Koordinator MNC STIE & STKIP, Jakarta sejak April 2018.

Beliau memperoleh gelar Bachelor of Commerce dari University of New South Wales, Sydney pada tahun 2012, Master of International Trade & Commerce Law dari Macquarie University, Sydney pada tahun 2014, Master of Arts in Biblical & Theological Studies dan Master of Arts in Education dari Biola University, Los Angeles masing-masing pada tahun 2015 dan 2018.



Natalia Purnama
Direktur

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Lahir di Jakarta pada 2 Desember 1971. Beliau menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 31 Mei 2018. Selain itu beliau juga menjabat sebagai Direktur di PT MNC Investama Tbk sejak tahun 2014.

Sebelumnya beliau menjabat sebagai Senior Vice President, Treasury and Corporate Finance Group CEO Office PT MNC Investama Tbk sejak tahun 2012-2014, Vice President, Treasury and Corporate Finance Group CEO Office PT MNC Investama Tbk sejak tahun 2011-2012, Senior Manager, Treasury and Corporate Finance Group CEO Office PT MNC Investama Tbk sejak 2010-2011, Manager Investment Banking PT MNC Sekuritas sejak 2007-2010, Assistant Manager Corporate Finance PT MNC Sekuritas sejak 2004-2007, Assistant Manager Corporate Finance PT MNC Kapital Indonesia Tbk sejak 2001-2004, Senior Officer Corporate Finance PT MNC Kapital Indonesia Tbk sejak 2000-2001, Senior Officer Corporate Finance PT MNC Investama Tbk sejak 1997-2000, Research Analyst PT MNC Investama Tbk sejak 1996-1997, Operation Officer Data Analyst PT HSBC Securities Indonesia sejak 1995-1996.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Trisakti, Jakarta pada tahun 1995.



Mahjudin
Direktur Independen

Warga Negara Indonesia, 46 tahun. Lahir di Palembang pada 5 Juli 1971. Beliau menjabat sebagai Direktur Independen Perseroan sejak tahun 2016.

Sebelumnya beliau bekerja sebagai Broker di PT Lumbung Persada Khatulistiwa sejak tahun 1993-1994, Sales di Astra International Isuzu sejak tahun 1994-1995, Credit Marketing Officer sampai General Manager Operation PT Arthacakra Multifinance (Nisso Iwai Group) sejak tahun 1995-2004, General Manager di PT U Finance Indonesia (BTMU) sejak tahun 2004-2007, General Manager of Marketing & Collection sampai menjadi Director of Marketing di PT SMS Finance sejak tahun 2007-2016, dan Direktur di PT MNC Finance sejak Juli 2016-September 2016.

Beliau memperoleh gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Kristen Indonesia pada tahun 1994.

Komite Remunerasi memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas gaji dan tunjangan bagi Direksi Perseroan, serta besarnya honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan

Tidak ada sifat hubungan kekeluargaan di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham Perseroan yang belum diungkapkan pada Prospektus.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang disyaratkan oleh OJK, lingkup tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan secara umum maupun usaha Perseroan dan memberi nasihat kepada Direksi.
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 1, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada butir 4 setiap akhir tahun buku.

Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2017, Dewan Komisaris mengadakan 6 (enam) kali rapat dengan Direksi sesuai dengan tugas pengawasan dan pemantauan pengelolaan Perseroan. Rapat-rapat tersebut dijadwalkan sebelum atau pada awal tahun, dan sebelum setiap rapat, materi dan makalah rapat telah disampaikan kepada anggota Dewan Komisaris setidaknya lima hari kerja sebelumnya untuk memberikan kesempatan mengkaji. Sebelum setiap rapat, Dewan Komisaris mengadakan rapat tertutup terpisah, tanpa kehadiran Direksi.

Tingkat kehadiran pada tahun 2017

Nama	Tingkat kehadiran/Jumlah rapat Komisaris tahun 2017
Darma Putra	100%
Tien	100%
Wina Armada Sukardi	100%

Pelatihan untuk Dewan Komisaris

Nama	Tingkat kehadiran/Jumlah pelatihan Komisaris tahun 2017
Darma Putra	6
Tien	6
Wina Armada Sukardi	3

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Direksi mengurus kekayaan Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direksi dalam pelaksanaan tugasnya wajib mematuhi ketentuan-ketentuan dalam hukum Perseroan, peraturan Pasar Modal yang berlaku dan peraturan-peraturan lain terkait dengan kegiatan Perseroan.

Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi Perseroan yang meliputi Tugas Umum, Tugas *Corporate Governance*, Tugas Pengembangan Sumber Daya, Tugas *Risk Management*, serta penerapan fungsi kepatuhan.

Tugas Umum

1. Menyusun, mengimplementasikan dan mengkomunikasikan visi, misi dan Rencana Strategis Perusahaan yang meliputi Rencana Bisnis dan Rencana Korporasi.

2. Menyusun struktur organisasi Perusahaan yang disesuaikan dengan Rencana Strategis Perusahaan, termasuk di dalamnya adalah satuan kerja dan komite.
3. Menyusun Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Mengelola Perusahaan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
5. Mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan kecuali apabila kondisi-kondisi berikut berlaku:
 - a. Terjadi perkara dihadapan pengadilan antara Perusahaan dengan anggota Direksi yang bersangkutan; atau
 - b. Anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai benturan kepentingan dengan Perusahaan.
6. Wajib menyelenggarakan Rapat Direksi Perusahaan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dengan waktu yang memadai.
7. Wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
8. Menyenggarakan RUPS tahunan selambatnya 6 (enam) bulan sejak ditutupnya tahun buku Perseroan dan menyelenggarakan RUPS lainnya sesuai dengan keperluan Perusahaan dan turut serta memastikan bahwa usul-usul pemegang saham telah diangkat sebagai mata agenda RUPS terutama apabila mata agenda terkait dianggap berhubungan langsung dengan kepentingan Perusahaan dan telah diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh pemegang saham yang mewakili minimum 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh pemegang saham dengan hak suara yang sah.
9. Menyenggarakan RUPS LB apabila diperlukan.
10. Mengumumkan waktu pembayaran dividen kepada para pemegang saham.
11. Bertindak selaku likuidator jika dalam keputusan RUPS atau penetapan likuidasi Perusahaan tidak menunjuk likuidator.
12. Menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham (DPS) dan Daftar Khusus dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
13. Direksi dapat menunjuk dan memberi wewenang kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata-usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham.
14. Memberikan semua data/informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu apabila diperlukan oleh Dewan Komisaris.
15. Menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi kepada pemegang saham melalui RUPS.
16. Menyampaikan pertanggungjawaban atas kepengurusan Perseroan berupa laporan keuangan, laporan kegiatan Perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG.

Tugas terkait dengan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Menyusun kerangka kerja dan struktur atau kebijakan kebijakan terkait pelaksanaan Good Corporate Governance serta mengevaluasinya secara minimal satu kali dalam satu tahun.
2. Mensosialisasikan dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam setiap kegiatan usaha dan seluruh jenjang organisasi Perseroan.
3. Memiliki kewajiban untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan secara terus menerus dalam rangka mengelola Perusahaan secara profesional.
4. Mengungkapkan informasi/issue penting yang relevan kepada para pemegang saham, dan pelaku pasar terkait dalam rangka menerapkan tata kelola perusahaan yang transparan.
5. Memastikan Perusahaan telah menyampaikan laporan laporan sebagaimana diwajibkan oleh OJK, Bursa Efek Indonesia maupun regulator lainnya.

Tugas terkait pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

1. Menyusun dan menerapkan kebijakan sumber daya manusia secara lengkap.
2. Meningkatkan kinerja pengelolaan Perusahaan dengan memperluas pengetahuan dan keahlian seluruh karyawan Perseroan pada seluruh jenjang organisasi yang dapat diaktualisasikan melalui penyelesaian permasalahan secara efektif dan pencapaian hasil yang sesuai dengan ekspektasi pemangku kepentingan.

3. Mengedepankan budaya pembelajaran secara berkala pada seluruh jenjang organisasi guna meningkatkan pengetahuan yang menunjang operasional Perusahaan. Budaya pembelajaran tersebut dapat diaktualisasikan melalui peningkatan tingkat perolehan sertifikasi atau program pelatihan guna mengembangkan kapasitas individu.

Tugas terkait dengan penerapan Manajemen Risiko atau *Risk Management*

1. Membentuk fungsi yang menjalankan manajemen risiko yang independen dari operasi Perusahaan.
2. Membentuk Komite Manajemen Risiko.
3. Menyusun kebijakan dan strategi manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif dengan memperhitungkan limit risiko secara keseluruhan untuk setiap jenis risiko yang relevan dengan Perusahaan dan Entitas Anaknya, serta tingkat dan batas toleransi risiko sehubungan dengan kapasitas permodalan.
4. Melaksanakan kebijakan manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil oleh Perusahaan secara keseluruhan.
5. Menyusun dan menentukan mekanisme persetujuan transaksi, terutama yang melampaui batasan limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan di Perusahaan dan Entitas Anak.
6. Mengembangkan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi.
7. Memastikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk pengelolaan dan pengendalian risiko sudah memadai.
8. Menetapkan struktur organisasi yang meliputi tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang berlaku pada setiap jenjang jabatan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko di Perseroan.
9. Memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan manajemen risiko.
10. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah menindaklanjuti seluruh risiko Perusahaan yang material beserta dampak yang ditimbulkan dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Dewan Komisaris secara berkala.
11. Melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan:
 - a. Keakuratan metodologi penilaian risiko;
 - b. Kecukupan implementasi sistem informasi manajemen; dan
 - c. Ketepatan kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko.
12. Mengevaluasi dan memperbaharui kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko dengan frekuensi yang disesuaikan dengan perubahan faktor-faktor yang memberikan pengaruh secara signifikan terhadap keberlangsungan kegiatan usaha Perusahaan, eksposur risiko, dan profil risiko.
13. Melakukan kajian risiko untuk setiap pengambilan keputusan strategis serta hal-hal terkait pengeluaran maupun penyediaan dana besar.
14. Menjadi panutan dalam penerapan; manajemen risiko, prinsip-prinsip GCG, nilai-nilai Perseroan serta etika dan integritas.
15. Menyusun dan melaksanakan sistem pengendalian intern yang handal dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi, pengelolaan aset, kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan serta penyusunan laporan keuangan. Sistem pengendalian intern ini meliputi pengendalian intern yang dilakukan secara manual maupun yang dilakukan secara terotomatisasi dan dilakukan pengujian secara periodik.
16. Menyusun kebijakan, pedoman atau standar operasi dan prosedur (SOP) untuk operasional rutin perusahaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan mekanisme check and balance.
17. Mensosialisasikan dan memutakhirkan kebijakan, pedoman atau Standar Operasi dan Prosedur (SOP) untuk operasional rutin Perusahaan seluruh karyawan secara periodik.

Tugas terkait dengan penerapan fungsi kepatuhan

1. Memastikan bahwa pemilihan dan pelantikan serta tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Membentuk fungsi yang menjalankan Kepatuhan yang independen dari operasi Perusahaan dengan personil dan sistem manajemen informasi yang memadai.
3. Memantau serta menyetujui kebijakan kepatuhan Perusahaan secara formal mengenai fungsi penerapan kepatuhan yang efektif.
4. Mengkomunikasikan seluruh komponen penerapan kepatuhan Perseroan yaitu kebijakan, pedoman, sistem, dan prosedur ke seluruh jenjang organisasi terkait.

- Memastikan bahwa Perseroan telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan tugas Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan dan laporan yang diperlukan lainnya kepada OJK atau pihak terkait, dimana cakupan laporan-laporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.

Tugas terkait dengan pelaksanaan audit

- Membentuk Satuan Kerja Audit Intern (Unit Audit Internal) yang independen dari operasi Perusahaan dan memiliki jalur pelaporan ke Direktur Utama dan jalur komunikasi ke Komite Audit serta memiliki personil yang berkualitas.
- Menindaklanjuti hasil audit baik dilakukan oleh Unit Audit Internal, auditor eksternal maupun audit dari regulator.
- Memastikan bahwa telah terdapat penerapan tindakan perbaikan yang memadai atas penyimpangan atau kendala dan hambatan dalam kegiatan usaha Perusahaan yang diidentifikasi oleh Unit Audit Internal, auditor ekstern dan regulator.
- Memastikan bahwa laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit internal Perusahaan telah tersedia untuk RUPS.

Tugas terkait dengan keterbukaan informasi

Sesuai dengan Peraturan OJK dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, maka sekurang-kurangnya Direksi melakukan keterbukaan informasi sebagai berikut.

- Kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor di Perseroan, bank dan perusahaan lain yang berkedudukan di Republik Indonesia maupun di luar negeri.
- Hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali Perseroan.
- Ada atau tidak ada benturan kepentingan serta intervensi Pemilik Perusahaan dalam pelaksanaan operasional Perseroan.
- Remunerasi dan fasilitas lain yang diterima oleh Perseroan.
- Kepemilikan *shares option* yang mencakup informasi sebagai berikut:
 - Kebijakan pengalokasian *shares option*;
 - Jumlah saham yang sebelumnya telah dimiliki oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris sebelum menerima *shares option*;
 - Jumlah *shares option* yang diberikan;
 - Jumlah *shares option* yang telah dieksekusi sampai dengan akhir periode pelaporan;
 - Harga *shares option* yang diberikan; dan
 - Jangka waktu atau masa berlaku eksekusi *shares option*.

Rapat dan Kehadiran Direksi

Direksi mengadakan 16 kali rapat pada tahun 2017 termasuk rapat-rapat operasional. Direksi juga menghadiri rapat dengan Dewan Komisaris dan komite-komite.

Daftar Kehadiran dan rapat anggota Direksi selama 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Tingkat kehadiran/Jumlah rapat Direksi tahun 2017
Wito Mailoa	14
Totok Sugiharto	15
Mashudi Hamka	12
Mahjudin	12

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi untuk Anggota Direksi

Nama	Pelatihan yang diikuti tahun 2017
Wito Mailoa	6
Totok Sugiharto	6
Mashudi Hamka	6
Mahjudin	6

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Besarnya Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017, 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp325 juta, Rp300 juta, dan Rp568 juta untuk Dewan Komisaris dan sebesar Rp12.270 juta, Rp8.200 juta, dan Rp8.373 juta untuk Direksi.

Komite Audit

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015, Dewan Komisaris Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.001/BCAP/LGL/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Wina Armada Sukardi
Anggota : Jenny Tajuw
Anggota : Rosaline Sri Asri

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan di Perseroan, Komite Audit mengemban sejumlah tanggung jawab. Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan, pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Laporan atau informasi keuangan.
Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Audit Internal
Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh manajemen/Direksi atas temuan auditor internal.
3. Audit Eksternal
 - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan auditor eksternal yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan *fee*.
 - b. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya
4. Manajemen risiko dan Pengendalian internal
Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Manajemen/Direksi.
5. Peraturan perundang-undangan
Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
6. Pengaduan
Menelaah pengaduan yang diterima Perseroan berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
7. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
8. Kerahasiaan
Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Wewenang Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya Perseroan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan Publik terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Rapat Komite Audit

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Piagam Komite Audit Perseroan, rapat Komite Audit dilaksanakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Seluruh rapat dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Daftar Kehadiran dan rapat anggota Komite Audit selama 2017 adalah sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Tingkat Kehadiran (%)
Wina Armada Sukardi	4	4	100
Jenny Tajuw	4	4	100
Rosaline Sri Asri S.	4	4	100

Berikut disajikan keterangan singkat mengenai Anggota Komite Audit Perseroan:

Wina Armada Sukardi

Ketua

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1985. Gelar MBA/MM di bidang Business Administration Management diperolehnya pada tahun 1992, dari Sekolah Tinggi Manajemen Newport Indonesia. Kemudian, pada tahun 2012 meraih gelar Master Hukum dari Fakultas Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Nasional. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Pengalaman kerja beliau antara lain sebagai Direktur Utama pada: PT Majulah Kita Semua, PT Arilam Sakti Mulia, PT Pers Demokrasi Indonesia, PT Prada Brana, serta sebagai Direktur pada: PT Pers Indonesia Merdeka, PT Mitra Matra Media, dan PT Warudo Internasional. Selain itu, beliau pernah menjadi pengajar/dosen pada beberapa institusi seperti Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara, Lembaga Pendidikan Pers Dr. Soetomo, dan Sekolah Jurnalisme Indonesia. Karir di bidang jurnalistik, yaitu sebagai Pemimpin Umum/Pemimpin redaksi Harian Merdeka, Redaktur Senior Harian Neraca, Pemimpin Redaksi Majalah Matra. Beliau juga merupakan salah satu pendiri dari Jakarta Lawyers Club yang saat ini telah berganti nama menjadi Indonesia Lawyers Club.

Jenny Tajuw

Anggota Komite

Warga Negara Indonesia, menyelesaikan pendidikan strata satu pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia pada tahun 1985. Menjabat sebagai Direktur PT Prima Permata Nusantara (2015 - sekarang), General Manager - Compliance Audit PT MNC Sky Vision Tbk (2009 - 2015), Senior Sales Manager PT MNC Sky Vision Tbk (2005 - 2009), Manager Internal Control PT MNC Sky Vision Tbk (2002 - 2005), Manager Operational PT MNC Sky Vision Tbk (1998 - 2002).

Rosaline Sri Asri S.

Anggota Komite

Warga Negara Indonesia, memperoleh gelar sarjana di bidang ekonomi di Universitas Jendral Soedirman Purwokerto pada tahun 1989. Menjabat sebagai Direktur PT Prima Permata Nusantara sejak September 2016, Head of Finance PT Global Mediacom Tbk (Januari 2013 - Agustus 2016), Head of Finance PT Media Nusantara Citra Tbk (Februari 2009 - Desember 2012), Head of Finance PT MNC Investama Tbk (Juli 1997 - Januari 2009), Head of Operasional PT Bank Haga (April 1989 - Juni 1997).

Internal Audit

Perseroan memiliki Unit Audit Internal sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Perseroan telah mengangkat Chandra Helena Marpaung selaku Kepala Unit Audit Internal terhitung sejak tanggal 20 Desember 2013 sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 754/DIR/MNCKI/XII/2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal PT MNC Kapital Indonesia Tbk tertanggal 20 Desember 2013.

Unit Audit Internal bertugas memberikan pandangan, keyakinan (*assurance*) dan konsultasi yang bersifat independen dan obyektif, dengan tujuan untuk meningkatkan nilai dan memperbaiki operasional Perseroan, melalui pendekatan yang sistematis, dengan cara mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan proses GCG Perseroan dan unit-unit usaha.

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal

Sesuai dengan Piagam Unit Audit Internal Perseroan, secara garis besar tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal antara lain:

1. Menyusun serta melaksanakan rencana audit internal tahunan.
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan.
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan kegiatan lainnya.
4. Memberi saran perbaikan dan informasi yang objektif mengenai kegiatan yang diperiksa pada seluruh tingkat manajemen.
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
6. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan.
7. Bekerja sama dengan Komite Audit dan mendukung pelaksanaan tugas Komite Audit.
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu Audit Internal.
9. Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi ("Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014") Perseroan telah memiliki fungsi remunerasi dan nominasi yang di jalankan oleh Komite Manajemen Risiko Usaha dan GCG sebagaimana ditegaskan dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 September 2017.

Fungsi Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

- Memberikan rekomendasi mengenai komposisi jabatan anggota Dewan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi dan Remunerasi.
- Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang disampaikan melalui RUPS.
- Memberikan rekomendasi mengenai kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolak ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi.
- Memberikan rekomendasi mengenai program pengembangan kemampuan anggota Dewan Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sesuai dengan dengan Keputusan Dewan Komisaris tanggal 4 September 2017 adalah sebagai berikut: adalah sebagai berikut:

Ketua : Wina Armada Sukardi
Anggota : Darma Putra Wati
Anggota : Susanty Tjandra Sanusi

Masa jabatan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan adalah 5 tahun yaitu sampai dengan tanggal 3 Juni 2021.

Sekretaris Perusahaan

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.04/2014 Tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014"), Perseroan melalui Surat

Keputusan Direksi No. 302/MNCK-AH/Dirut/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan telah mengangkat Deisy Christina sebagai Sekretaris Perusahaan.

Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memastikan tercapainya peningkatan citra perusahaan melalui pengelolaan komunikasi dengan pihak internal dan eksternal perusahaan, mengadministrasikan dokumen perusahaan, membina hubungan antar lembaga, melakukan pemenuhan kewajiban perusahaan sebagai perusahaan terbuka berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, dan menjamin ketersediaan informasi kepada *stakeholders*. Sekretaris perusahaan menggunakan berbagai macam media informasi demi tercapainya informasi kepada pihak lainnya dengan menggunakan media surat kabar, buletin internal, web perusahaan (www.mncfinancialservices.com), serta media lainnya yang dianggap sesuai.

Berikut adalah riwayat singkat pejabat Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, pada tahun 2002. Menjabat sebagai Senior Manager Department Legal di Perseroan sejak 1 Oktober 2014 sampai saat ini dan diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 302/MNCK-AH/Dirut/VII/ 2017 tanggal 11 Juli 2017.

Sekretaris Perusahaan

PT MNC Kapital Indonesia Tbk
MNC Financial Center Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta Pusat 10340
Telepon: (021) 2970-9700, Faksimili: (021) 3983-6886
Email : corsec.mncfinancialservices@mncgroup.com

6. Sumber Daya Manusia

Selama tahun 2017, Direktorat Sumber Daya Manusia melakukan pengkajian desain organisasi secara menyeluruh baik di induk perusahaan maupun unit usaha, pembenahan kebijakan SDM, pengembangan kompetensi SDM, integrasi sistem operasional SDM sampai dengan internalisasi kembali budaya organisasi.

Perseroan percaya bahwa melalui SDM yang unggul, budaya perusahaan dan tata-kelola perusahaan yang mampu mengakomodasi perubahan cepat yang senantiasa terjadi di dunia bisnis, dapat mempertahankan dan meningkatkan keunggulan kompetitif Perseroan.

Untuk itu Perseroan meninjau kembali fundamental budaya perusahaan dan merancang ulang nilai-nilai budaya tersebut dengan menitikberatkan pada visi, kualitas, kecepatan, progresif dan kerja keras dalam semua aspek tata kelola perusahaan. Perseroan menyadari bahwa kekayaan intelektual adalah mesin penggerak utama dari bisnis Perseroan. Karena pentingnya hal tersebut, Perseroan selalu mengintegrasikan pengembangan SDM sebagai bagian tak terpisahkan dari strategi bisnis Perseroan.

Pengembangan Organisasi

Perseroan juga telah menerapkan manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompetensi (*Competency Based Human Resource Management*), dengan menggunakan kompetensi perilaku (*Behavior Competency*) baru yang diturunkan dari nilai-nilai (*values*), visi, serta misi Perusahaan yang telah diperbaharui. Kompetensi inilah yang menjadi salah satu basis untuk mengidentifikasi talenta-talenta yang memiliki potensi (*Talent Identification*), dan dapat juga dikenali dari hasil kinerjanya (*performance*) agar selanjutnya dapat dilakukan proses *Talent Mapping* untuk memastikan bahwa talenta ini akan ditempatkan pada posisi-posisi yang tepat, terutama pada posisi kunci (*key position*).

Selain itu survei budaya juga telah diselenggarakan, *Organization Culture Health Index* (OCHI), yang melibatkan seluruh karyawan. Survei ini merupakan bagian program pengenalan budaya baru perusahaan dan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan konsultan ACT Consulting (salah satu unit usaha *ESQ Leadership Center*) untuk memastikan anonimitas dan independensi hasil. Pengukuran budaya ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui tingkat kesehatan budaya kerja di Organisasi
 2. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat kinerja di Organisasi
 3. Mengetahui harapan karyawan terhadap budaya kerja di Organisasi saat ini
 4. Melakukan analisa terhadap nilai-nilai di Organisasi
 5. Mengetahui tingkat kenyamanan bekerja di Organisasi
- Hasil dari pengukuran budaya ini menjadi salah satu acuan untuk program pengembangan organisasi.

Pengembangan SDM

Tahun 2017, Perseroan berfokus pada program pengembangan kepemimpinan melalui *Executive Leadership Program* serta program *future leader* dalam program MNC Academy Program (MAP).

Executive Leadership Program mengusung tema “*One Spirit, Key Towards Our Dreams*” merupakan sebuah program pengembangan yang diikuti oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi (sebagai executive successor) di MNC Kapital Indonesia dan entitasnya. Program ini bertujuan untuk membangun semangat kebersamaan untuk kesuksesan bersama di MNC Group. Program ini diikuti oleh total 103 peserta (MNC Group), difasilitasi oleh ESQ Leadership Center dan diadakan selama 2 hari pada tanggal 18-19 Februari 2017 di Lido Lakes Resort & Conference, Sukabumi.

MNC Academy Program (MAP) sebagai program yang mempersiapkan pemimpin di masa depan (*future leader*) di MNC Kapital Indonesia, telah berjalan sebanyak 2 batch pada tahun 2017 dan total kadet (MT) yang dibina dalam kedua batch tersebut adalah sebanyak 20 orang. Program MAP berdurasi 13 bulan, yang terdiri dari 1 bulan program training di dalam kelas (*In Class Program*), 6 bulan masa penugasan pertama (*Job Assignment 1*), dan 6 bulan masa penugasan kedua (*Job Assignment 2*). Pada program *in class training*, setiap kadet dibekali dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam menjalankan *Job Assignment* seperti: *Orientasi MNC Investama, Training Presentation Skill, Problem Solving (8 steps method), Business Model, Risk Awareness, Introduction to IT Solution: Facing Digital Era, dan Introduction to Project Management*. Pada masa penugasan (*Job Assignment 1 & 2*) setiap kadet MAP diberikan tanggung jawab mengelola proyek inovasi ataupun improvement yang berdampak langsung kepada bisnis di tiap-tiap Unit Bisnis. Pada bulan Desember 2017 yang lalu 10 kadet MAP batch 1 telah dinyatakan lulus dan telah ditempatkan di unit bisnis terpilih yaitu MNC Investama (1 orang), MNC Bank (2 orang), MNC Asuransi Indonesia (4 orang), MNC Guna Usaha Indonesia (2 orang), dan MNC Finance (1 orang).

Biaya SDM yang telah dikeluarkan terkait dengan pengembangan SDM selama 2017 adalah sebesar Rp.1.609.892.839,00.

Rencana pengembangan SDM tahun 2018 berfokus pada *Organization Readiness* dengan menjalankan program-program yang memastikan proses transisi (suksesi) dalam organisasi dapat berlangsung dengan lancar. Infrastruktur SDM yang dibutuhkan dalam program suksesi ini adalah *talent pool, career development (career path & managerial development program)*.

- Budaya sebagai fondasi organisasi masih menjadi salah satu sasaran program di 2018. Pembangunan Budaya Perusahaan (*Company Culture*) yang menyeluruh bertujuan agar setiap individu karyawan memiliki kebanggaan dan semangat yang sama dalam menjadi bagian dari MNC Group. Untuk semakin memperluas pengenalan dan pemahaman budaya baru di MNC Group, di tahun 2018 akan dilaksanakan aktivitas-aktivitas untuk semakin memperdalam pemahaman akan budaya.
- Sistem dan Kebijakan perusahaan dalam pengembangan SDM terus dilengkapi dan diperbaiki untuk menunjang program pengembangan SDM.
 - Pengukuran Produktivitas merupakan sistem baru yang akan mulai dibuat dalam lingkup MNC Group, untuk mengukur produktivitas dari level organisasi hingga departemen.
 - Pelaksanaan program analisa - evaluasi jabatan di 2018 bertujuan untuk mengkaji kembali kesesuaian gambaran pekerjaan dan sistem pembobotan serta tingkat jabatan di MNC Group.
 - Untuk melengkapi Kamus Kompetensi Inti, tahun 2018 akan mulai disusun Kompetensi Teknis.
- Sebagai bentuk dukungan terhadap pembangunan budaya perbaikan terus menerus (*continuous improvement*) dalam lingkup MNC Group, MNC Kapital beserta entitasnya ikut mempromosikan dan berpartisipasi dalam kompetisi inovasi. Inovasi tersebut bertajuk MNC Rising Innovation Challenge (MNC

RICH), yang diselenggarakan setiap tahun oleh MNC Group. Program ini diselenggarakan dengan tujuan untuk memberi penghargaan terhadap karyawan yang memiliki ide-ide atau saran perbaikan yang memiliki dampak positif bagi proses kerja maupun hasil kerja dari masing-masing Perusahaan dalam MNC Group dan entitasnya. Tahun 2018, MNC RICH akan menambahkan 1 kategori ide perbaikan yang bersinergi antar entitas dalam MNC Group. Diharapkan dengan adanya kompetisi ini, juga dapat meningkatkan produktivitas masing-masing Perusahaan, melalui penggunaan metode baru, penggunaan waktu yang lebih efektif, penciptaan produk baru, sinergi antar unit usaha, hingga penggunaan biaya yang lebih efisien.

Program Pengembangan Supervisor: sebagai salah satu bentuk komitmen dalam pengembangan SDM, Divisi OPD menyelenggarakan program pembekalan untuk mempersiapkan karyawan MNC Group agar dapat mengisi posisi yang lebih tinggi. Program ini merupakan bagian dari MNC Development Program (MDP). *Supervisor Development Program* bertujuan mempersiapkan talent internal yang berada di level Officer untuk menjabat pada jabatan struktural Supervisor di masa yang akan datang. Program ini selain berperan dalam proses pengembangan individu juga merupakan pra-syarat promosi menuju level Supervisor dan standarisasi kompetensi dan keterampilan.

Manajemen rekrutmen yang terintegrasi

Perencanaan Karyawan

- I. Perencanaan karyawan yang mencakup penyusunan struktur organisasi, uraian jabatan dan persyaratan dari tiap-tiap jabatan ditentukan oleh Direksi atau Pejabat yang ditunjuk.
- II. Perencanaan karyawan berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan oleh perusahaan yang termasuk di dalamnya visi, misi, sasaran dan program kerja perusahaan.
- III. Perencanaan karyawan menjadi salah satu dasar untuk:
 - a. Perencanaan karyawan baru
 - b. Penempatan karyawan atau pemindahan karyawan
 - c. Pemberian promosi kepada karyawan.

Penerimaan Karyawan

1. Perusahaan dalam melaksanakan penerimaan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan sebagaimana tercantum dalam anggaran tahunan yang telah disetujui.
2. Dalam pengisian lowongan jabatan tertentu, perusahaan akan memberikan prioritas kepada karyawan perusahaan yang dinilai memenuhi persyaratan jabatan. Apabila dinilai tidak ada yang memenuhi persyaratan, perusahaan akan melakukan penerimaan dengan calon yang berasal dari luar perusahaan.
3. Struktur organisasi, uraian pekerjaan dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon pekerja ditentukan dan diatur oleh Perseroan.

Syarat Penerimaan Karyawan

1. Sebelum diterima sebagai karyawan, seorang calon karyawan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi karyawan.
2. Setiap calon karyawan wajib mengikuti prosedur seleksi yang telah ditetapkan dan dinyatakan lulus dalam seleksi (wawancara dan tes) yang diadakan serta pemeriksaan kesehatan oleh tim medis kesehatan atau yang ditunjuk.
3. Untuk karyawan tetap, bersedia menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan Pasal 60 UU No. 13 Tahun 2003. Dalam masa percobaan kedua belah pihak dapat memutuskan hubungan kerjanya setiap waktu tanpa ada konsekuensi apapun.
4. Apabila masa percobaan telah dilaksanakan dengan memuaskan dan memenuhi persyaratan perusahaan, maka perusahaan dan calon karyawan akan mengadakan hubungan kerja. Dalam hal ini karyawan yang bersangkutan akan menerima Surat Pengangkatan. Masa kerja karyawan yang bersangkutan akan dihitung sejak hari pertama masa percobaan.
5. Masa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu harus dijalani oleh kedua belah pihak (pihak perusahaan dan pihak karyawan) secara konsekuen sampai berakhirnya masa perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian kerja kecuali salah satu pihak melakukan pelanggaran berat atau karena dalam keadaan memaksa (force majeure) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
6. Penempatan karyawan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan dan kualifikasi karyawan tersebut.

Skema/Alur Proses Rekrutmen

Mulai → Man Power Planning → Pencarian Kandidat → Seleksi Kandidat → Pengecekan Referensi & Tes Kesehatan → Pengajuan Offering → Penandatanganan Perjanjian Kerja → Persiapan Karyawan Baru → Karyawan baru Masuk → Selesai

Sistem Remunerasi

Perseroan secara terus menerus memperbaiki pemberian kompensasi dan *benefits* kepada seluruh karyawan di seluruh level sesuai dengan kinerja organisasi, individu dan/atau disesuaikan dengan praktek di industri. Untuk memenuhi kesejahteraan karyawan serta sebagai bentuk apresiasi bagi yang berprestasi, Perseroan senantiasa mengkaji paket remunerasi yang disediakan bagi karyawan agar mampu menyesuaikan dengan standar industri dan peraturan persyaratan ketenagakerjaan yang berlaku. Perseroan memberikan paket remunerasi yang kompetitif bagi seluruh karyawan yang terdiri dari:

- Gaji pokok dan berbagai tunjangan sesuai dengan jabatan.
- Di antara tunjangan yang diberikan adalah Tunjangan Hari Raya (THR), BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dana pensiun dalam bentuk program pensiun iuran pasti, asuransi jiwa serta jaminan perawatan kesehatan (rawat inap dan rawat jalan, perawatan gigi, maternity, dan kacamata).
- Perseroan juga memberikan bonus dan insentif atas dasar kinerja perusahaan serta performa masing-masing karyawan dan unit bisnisnya.
- Paket Umroh ke Tanah Suci bagi karyawan Muslim dan Paket Ibadah ke *Holy Land* bagi karyawan Kristiani yang diberikan kepada karyawan yang memenuhi kriteria yang ditentukan oleh Perseroan.
- Program kepemilikan saham bagi manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program/MESOP*).

Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan juga menyadari perlunya menciptakan mekanisme yang efektif untuk membangun motivasi di setiap individu di lingkungan perusahaan agar terdorong untuk berkreasi dan meningkatkan produktivitasnya. Dalam hal ini, Perseroan memperhatikan faktor-faktor yang memberikan kepuasan bagi karyawan, seperti penghargaan terhadap prestasi kerja, pengakuan dan kemajuan personal. Sementara itu, Perseroan juga dituntut untuk memperhatikan faktor yang mendukung pencapaian kepuasan karyawan, seperti pemberian gaji, tunjangan yang memadai, keamanan kerja dan lingkungan kerja yang kondusif.

Upaya peningkatan kompetensi para karyawan diadakan berbagai pelatihan baik secara *in house* maupun *public* yang disesuaikan dengan bidang tugas masing-masing. Perseroan juga membentuk *Talent Inventory System* yang merupakan fasilitas pengembangan potensi karyawan melalui rotasi kerja yang memberikan kesempatan pada mereka untuk bekerja di bidang yang diminatinya atau sesuai keahliannya. Rotasi kerja ini diharapkan juga akan semakin mengasah kemampuan dan pengalaman karyawan untuk mempersiapkan mereka ke jenjang karir yang lebih tinggi.

Integrated HRIS and HR Reporting

Human Resources Information System (HRIS) yang terintegrasi dengan seluruh unit bisnis telah diimplementasikan di tahun 2017. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan HR ke unit bisnis dan ke karyawan serta meningkatkan kinerja manajemen HR. Dengan telah diimplementasikannya *Human Resources Information System* (HRIS) yang terintegrasi tersebut maka kedepannya HR akan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih maksimal baik dari segi *HR Administrative & Operation*, *HR Strategic* dan *Managerial*. HRIS dapat mengakomodir kebutuhan karyawan seperti pengajuan cuti dan pembaharuan data pribadi dengan bertransaksi di aplikasi tersebut.

Employee Communications/Events

Perseroan secara berkala telah mengadakan berbagai kegiatan, hal tersebut bertujuan untuk lebih mensinergikan kerjasama antar karyawan di setiap unit bisnis. Adapun kegiatan yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- *Manager Forum* yang diadakan setiap 4 bulan sekali
- *Executive Talk*
- Pelaksanaan CSR

- Perayaan HUT MNC Group
- MNC Rising Innovation Challenge

Serikat Pekerja

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja.

Asuransi Jiwa

Karyawan Perseroan dan Entitas Anak diikutsertakan dalam program asuransi kesehatan pada PT MNC Life Assurance dan Program Asuransi Jiwa dan Kecelakaan Diri pada PT MNC Life Assurance yang sampai dengan tanggal Prospektus ini masih berlaku.

Perseroan juga mengikutsertakan karyawan dalam program Jamsostek berdasarkan Sertifikat Kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja No. 01BJ6008 tanggal 20 Pebruari 2001, ditandatangani oleh Direksi PT Jamsostek (Persero).

Koperasi

Perseroan memiliki koperasi bernama Koperasi Bimantara Group yang melayani kegiatan seperti penjualan barang konsumsi, simpan pinjam serta layanan lainnya kepada karyawan Perseroan. Manajemen Koperasi Bimantara Group ditunjuk langsung oleh Dewan Pembina Koperasi. Pengurus Koperasi Bimantara Group dipilih setiap lima (5) tahun sekali pada Rapat Anggota Tahunan.

Perjanjian Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan, Direksi, atau Dewan Komisaris

Berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diadakan sebelumnya, para pemegang saham menyetujui Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan, Direksi dan Dewan Komisaris (EMSOP). EMSOP diberikan kepada karyawan kunci Perseroan dan Entitas Anak. Dalam perjanjian disebutkan bahwa Perseroan bermaksud untuk memberikan hak opsi kepada Peserta untuk menukar dan membeli sejumlah saham Perseroan dengan jumlah, harga, dan tata cara yang disebutkan dalam Perjanjian dan Peserta yang bermaksud untuk menerima hak opsi tersebut harus menukarnya sesuai dengan tata cara yang disebutkan dalam Perjanjian.

Komposisi Karyawan

Total karyawan Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2017 berjumlah 2.726 orang, terdiri dari 1.864 orang karyawan tetap dan 862 orang karyawan tidak tetap. Komposisi karyawan menurut jenjang jabatan, tingkat pendidikan, jenjang usia, status karyawan, aktivitas utama dan lokasi pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2017 adalah sebagai berikut.

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Des 2016		31 Des 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Direksi	6	8,45%	4	6,25%
Wakil Direktur	0	0,00%	0	0,00%
Manajer (Manajer - EVP)	14	19,72%	14	21,88%
Asst. Manajer/Supervisor	38	53,52%	37	57,81%
Staff	11	15,49%	8	12,50%
Non Staff	2	2,82%	1	1,56%
Total	71	100,00%	64	100,00%
Entitas Anak				
Direksi	32	1,25%	27	1,01%
Wakil Direktur	0	0,00%	0	0,00%
Manajer (Manajer - EVP)	398	15,57%	422	15,85%
Asst. Manajer/Supervisor	438	17,13%	418	15,70%
Staff	1.679	65,66%	1.786	67,09%
Non Staff	10	0,39%	9	0,34%
Total	2.557	100,00%	2.662	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Tingkat Pendidikan

Keterangan	31 Des 2016		31 Des 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
S3/Doctor	1	1,41%	1	1,56%
S2/Postgraduate	9	12,68%	8	12,50%
S1/Undergraduate	49	69,01%	45	70,31%
Diploma/Diploma	8	11,27%	8	12,50%
Non Akademi/Non-Academic	4	5,63%	2	3,13%
Total	71	100,00%	64	100,00%
Entitas Anak				
S3/Doctor	1	0,04%	2	0,08%
S2/Postgraduate	75	2,93%	85	3,19%
S1/Undergraduate	1.798	70,32%	1.862	69,95%
Diploma/Diploma	460	17,99%	464	17,43%
Non Akademi/Non-Academic	223	8,72%	249	9,35%
Total	2.557	100,00%	2.662	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Des 2016		31 Des 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
<25	15	21,13%	10	15,63%
25-34	26	36,62%	28	43,75%
35-44	17	23,94%	15	23,44%
45-50	10	14,08%	9	14,06%
>50	3	4,23%	2	3,13%
Total	71	100,00%	64	100,00%
Entitas Anak				
<25	267	10,44%	266	9,99%
25-34	1.181	46,19%	1.198	45,00%
35-44	739	28,90%	831	31,22%
45-50	272	10,64%	268	10,07%
>50	98	3,83%	99	3,72%
Total	2.557	100,00%	2.662	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Status Karyawan

Keterangan	31 Des 2016		31 Des 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Tetap	52	73,24%	52	81,25%
Tidak Tetap	19	26,76%	12	18,75%
Total	71	100,00%	64	100,00%
Entitas Anak				
Tetap	1.854	72,51%	1.812	68,07%
Tidak Tetap	703	27,49%	850	31,93%
Total	2.557	100,00%	2.662	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Aktivitas Utama Perseroan

Keterangan	31 Des 2016		31 Des 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Investasi	71	100,00%	64	100,00%

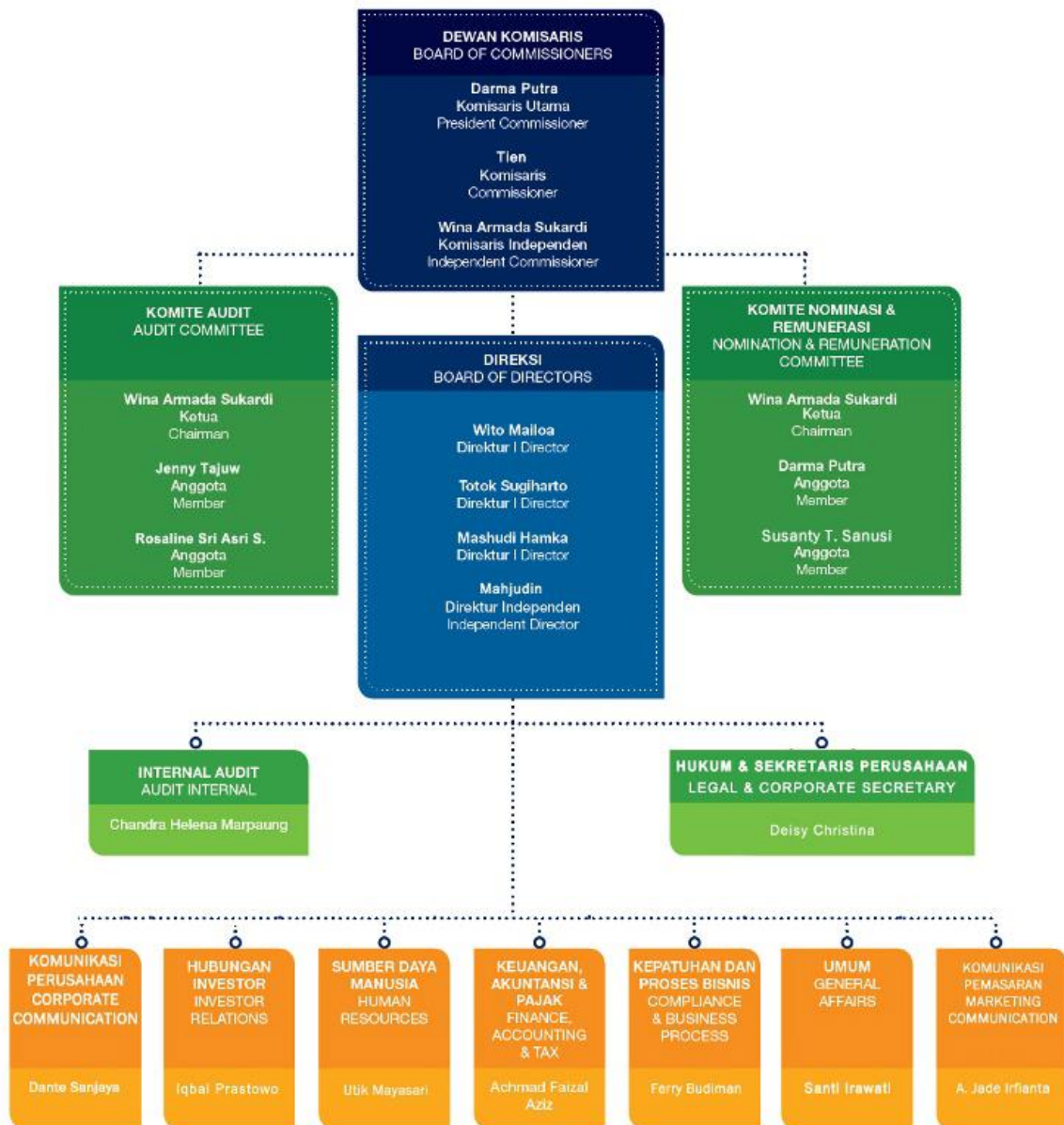
Total		100,00%		100,00%
Entitas Anak				
Jasa perbankan	1.053	41,18%	1.095	41,13%
Jasa asuransi umum	226	8,84%	268	10,07%
Jasa asuransi jiwa	162	6,34%	124	4,66%
Jasa pembiayaan konsumen	751	29,37%	759	28,51%
Jasa sewa guna usaha	97	3,79%	130	4,88%
Jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek	202	7,90%	210	7,89%
Jasa pengelolaan investasi	66	2,58%	76	2,85%
Total	2.557	100,00%	2.662	100,00%

Komposisi Karyawan Perseroan dan Entitas Anak Menurut Lokasi Perseroan

Keterangan	31 Des 2016		31 Des 2017	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Perseroan				
Kantor Pusat	71	100,00%	64	100,00%
Total	71	100,00%	64	100,00%
Entitas Anak				
Kantor Pusat	1.274	49,82%	1.216	45,68%
Kantor Regional	1.283	50,18%	1.446	54,32%
Total	2.557	100,00%	2.662	100,00%

Hingga Prospektus ini diterbitkan, Perseroan mempekerjakan tenaga kerja asing yaitu Mashudi Hamka selaku Direktur Perseroan dengan nomor KITAS 2C21AL0204-R yang berlaku sampai dengan 30 Juni 2018.

7. Struktur Organisasi Perseroan



8. Keterangan Mengenai Entitas Anak yang Memiliki Kontribusi 10% (Sepuluh Persen) atau Lebih dari Total Aset, Total Liabilitas, atau Laba (Rugi) sebelum Pajak dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak

i. PT Bank MNC Internasional Tbk ("BMNCI")

a. Riwayat Singkat

BMNCI pada awalnya didirikan dengan nama PT Bank Bumiputera Indonesia, berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian No. 49 tanggal 31 Juli 1989, dibuat di hadapan Ny. Sri Rahayu, ada waktu itu Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-7223-HT.01.01-Th'89 tanggal 9 Agustus 1989, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 692/Not./1989/PN.JKT.SEL. tanggal 24 Agustus 1989 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 75 tanggal 19 September 1989, Tambahan No. 1917/1989. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan No. 7 tanggal 17 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH, LL.M, notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya tertanggal 26 Mei 2009 No. AHU-22959.AH.01.02.Tahun 2009 dan telah dicatat di dalam Daftar Perseroan No. AHU.0029405.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 56 tambahan No. 18380/2009 tanggal 14 Juli 2009, nama PT Bank Bumiputera Indonesia Tbk diubah menjadi PT Bank ICB Bumiputera Tbk. Selanjutnya berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 48 tanggal 21 April 2014 yang dibuat oleh Aryanti Artisari, SH, M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan Jo akta No. 57 tanggal 16 Juli 2014 dibuat dihadapan Notaris Aryanti Artisari, SH, Mkn, tersebut yang telah mendapat Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-06038.40.20.2014 tanggal 24 Juli 2014, nama PT Bank ICB Bumiputera Tbk diubah menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk.

Perubahan Anggaran Dasar terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar MNCBANK No. 64 tanggal 20 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0205497 tanggal 27 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165465.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017.

b. Kegiatan Usaha

Ruang lingkup kegiatan usaha BMNCI adalah bergerak di bidang jasa perbankan (bank umum), BMNCI memperoleh izin untuk beroperasi sebagai Bank Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 10/KMK.013/1990 tanggal 4 Januari 1990, berdasarkan Surat Keputusan Direksi BI No. 22/1147/UPPS/PSbD tanggal 20 Januari 1990, sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia no.11/45/KEP.GBI/2009 tanggal 11 September 2009 dan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan no.18/KDK.03/2014 tanggal 15 Oktober 2014. BMNCI telah mendapatkan ijin dari Bank Indonesia sebagai Bank Devisa sebagaimana ternyata dalam Keputusan Direksi BI No. 30/146/KEP/DIR tanggal 5 Desember 1997 tentang Penunjukan Perseroan sebagai Bank Devisa. BMNCI memperoleh status sebagai Bank Persepsi dan Bank Devisa Persepsi Kas Negara untuk menerima setoran-setoran pajak dan bukan pajak berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. S-485/MK.03/1998 tanggal 8 September 1998.

c. Struktur Modal

Berdasarkan Akta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar MNCBANK No. 64 tanggal 20 Desember 2017, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

sebagaimana ternyata dalam dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0205497 tanggal 27 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165465.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, struktur permodalan BMNCI adalah sebagai berikut :

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp.100 per-saham)	%
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	8.809.678.241	880.967.824.100	41,43
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100	12,48
Masyarakat (kepemilikan kurang dari 5%)	9.797.420.225	979.742.022.500	46,09
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	21.261.473.347	2.126.147.334.700	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	38.738.526.653	3.873.852.665.300	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 01 September 2016, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0077217 tanggal 02 September 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103051.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 02 September 2016 Jo. Surat BMNCI No. 392/MNCB/DIR/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 Perihal Pengunduran Sdr. Benny Helman sebagai Direksi BMNCI, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BMNCI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden komisaris merangkap Komisaris Independen	: Eko Budi Supriyanto
Komisaris	: Purnadi Harjono
Komisaris Independen	: Ir. Rusli Witjahjono

Dewan Direksi

Presiden Direktur	: Benny Purnomo
Direktur	: Nerfita Primasari
Direktur Independen	: Raden Widiatmo Bunarto
Direktur Fungsi Kepatuhan	: Chisca Mirawati

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari BMNCI untuk tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Jumlah Aset	10.706.094	13.057.549
Jumlah Liabilitas	9.453.546	11.197.144
Jumlah Ekuitas	1.252.548	1.860.405

Perbandingan 31 Desember 2017 dan 2016

Jumlah Aset

Jumlah aset BMNCI pada 31 Desember 2017 tercatat sebesar Rp10.706.094 juta atau menurun sebesar 18,01% dari Rp13.057.549 juta pada 31 Desember 2016. Penurunan aset terutama disebabkan oleh

penurunan pemberian kredit sebesar 11% dan penurunan penempatan dana kepada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar 44%. Penurunan ini sebagai akibat dari menurunnya portofolio simpanan pihak ketiga sehingga agar *loan and funding ratio* bisa tetap terjaga sesuai ketentuan OJK, BMNCI juga harus menyesuaikan portofolio kredit dan penempatan dana kepada Bank Indonesia dan Bank Lain.

Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas BMNCI pada 31 Desember 2017 adalah Rp9.453.546 juta atau turun sebesar 15,57% dibandingkan dengan Rp11.197.144 juta pada 31 Desember 2016. Penurunan liabilitas terutama disebabkan oleh penurunan tabungan, deposito berjangka dan giro masing-masing sebesar 6,30%, 13,26% dan 11,82%. Penurunan simpanan tersebut sejalan dengan usaha BMNCI untuk menurunkan biaya dana dengan menurunkan suku bunga simpanan.

Jumlah Ekuitas

Jumlah Ekuitas BMNCI pada 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp1.252.548 juta atau turun sebesar 32,67% dari Rp1.860.405 juta pada 31 Desember 2016. Penurunan ini disebabkan oleh saldo defisit BMNCI meningkat dari minus Rp191.742 juta menjadi minus Rp876.935 juta dan hal ini juga sebagai akibat dari BMNCI membukukan rugi cukup besar pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan bunga	1.021.547	1.060.551
Beban bunga	656.070	673.671
Pendapatan operasional lain	115.399	125.415
Beban kerugian penurunan nilai	840.176	29.879
Beban operasional lain	536.912	409.632
Laba (rugi) operasional	(917.000)	52.758
Laba (rugi) sebelum pajak	(906.070)	13.135
Laba (rugi) bersih tahun berjalan	(685.193)	9.349

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga BMNCI menurun sebesar Rp39.004 juta atau sebesar 3,68% menjadi sebesar Rp1.021.547 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp1.060.551 juta pada tahun 2016. Penurunan tersebut terutama karena penurunan pendapatan bunga pada kredit sebesar Rp15.275 juta atau 2% dan bunga dari penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain sebesar Rp13.092 juta atau 18%. Penurunan pendapatan tersebut diatas sebagai akibat dari penurunan portofolio kredit dan penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain.

Beban Bunga

Beban bunga BMNCI menurun sebesar Rp17.601 juta atau sebesar 2,61% menjadi sebesar Rp656.070 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp673.671 juta pada tahun 2016. Penurunan ini sebagai akibat dari penurunan portofolio simpanan pihak ketiga dan penurunan suku bunga simpanan, sehingga beban bunga turun sebesar Rp19.876 juta atau 3%.

Pendapatan operasional lain

Pendapatan operasional lain BMNCI menurun sebesar Rp10.016 juta atau sebesar 7,99% menjadi sebesar Rp115.399 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp125.415 juta pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh penerimaan kembali dari kredit yang menurun sebesar Rp29.282 juta atau 90% pada tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

Beban kerugian penurunan nilai

Beban kerugian penurunan nilai BMNCI meningkat signifikan sebesar Rp810.297 juta atau sebesar 2711,93% menjadi sebesar Rp840.176 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp29.879 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh BMNCI yang membentuk cadangan kerugian yang besar pada tahun 2017 sebagai antisipasi menurunnya kualitas kredit yang dialami debitur dari dampak perekonomian yang belum tumbuh optimal.

Beban operasional lain

Beban operasional lain BMNCI meningkat sebesar Rp127.280 juta atau sebesar 31,07% menjadi sebesar Rp536.912 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp409.632 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan biaya akuisisi kartu kredit dan biaya-biaya terkait dengan pengembangan infrastruktur yang berbasis *digital banking* untuk mendukung pelayanan nasabah.

Laba (rugi) operasional

BMNCI mencatatkan rugi operasional sebesar Rp917.000 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya laba operasional sebesar Rp52.758 juta pada tahun 2016. Rugi operasional tahun 2017 ini disebabkan oleh pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup besar ditahun 2017 untuk mengantisipasi menurunnya kualitas kredit yang dialami debitur.

Laba(rugi) Sebelum Pajak

BMNCI mencatatkan rugi sebelum pajak sebesar Rp906.070 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya laba sebelum pajak sebesar Rp13.135 juta pada tahun 2016. Rugi sebelum pajak ini disebabkan oleh pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup besar ditahun 2017 untuk mengantisipasi menurunnya kualitas kredit yang dialami debitur.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

BMNCI mencatatkan rugi bersih tahun berjalan sebesar Rp685.193 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya laba bersih tahun berjalan sebesar Rp9.349 juta pada tahun 2016. Rugi bersih tahun berjalan ini disebabkan oleh pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai yang cukup besar ditahun 2017 untuk mengantisipasi menurunnya kualitas kredit yang dialami debitur.

ii. PT MNC Finance (“MNCF”)

a. Riwayat Singkat

MNCF berkedudukan di Jakarta adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku di Republik Indonesia. MNCF didirikan pertama kali dengan nama “PT Citra International Finance & Investment Corporation” berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas MNCF No. 64, tanggal 14 Nopember 1989, dibuat di hadapan Maria Lidwina Indriani Soepojo, S.H., Notaris di Jakarta. Akta tersebut telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11044.HT.01.01.TH.89, tanggal 5 Desember 1989, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai UUWDP dengan TDP di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di bawah No.1031/Not/89/PN.JKT.SEL pada tanggal 12 Desember 1989, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 11, tanggal 6 Pebruari 1990, Tambahan No. 456.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar, No. 48 tanggal 10 Nopember 2003, dibuat dihadapan Aulia Taufani S.H., pengganti dari Sutjipto S.H., Notaris di Jakarta, PT Citra International Finance & Investment Corporation berubah nama menjadi “PT Bhakti Finance”. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C-29072 HT.01.04.TH.2003, tanggal 15 Desember 2003 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat dibawah No.0944/RUB.02.09/IV/2004 tanggal 27 April 2004 dan diumumkan dalam Tambahan No. 4915, Berita Negara Republik Indonesia No. 42, tanggal 25 Mei 2004.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MNCF No. 05 tanggal 10 Desember 2010, dibuat di hadapan Meiylene Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta, PT Bhakti Finance menjadi “PT MNC Finance”. Akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-59293.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan UUPT dengan No. AHU-0091843.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 20 Desember 2010, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan sesuai dengan UUWDP dengan TDP No. 09.05.1.65.27233 dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kopearsi Usaha Mikro Kecil dan menengah dan Perdagangan Kota Administrasi Jakarta Pusat a.n. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Propinsi DKI Jakarta di bawah No. 12913/RUB.09-05/XI/2009 tanggal 11 Pebruari 2011.

Anggaran Dasar MNCF terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT MNC Finance No. 15 tanggal 18 Desember 2017 (**“Akta No. 15 tanggal 18 Desember 2017”**), dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjadja, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0202415 tanggal 19 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161361.AH.01.11 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017.

b. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah investasi di bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank.

c. Struktur Modal

Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MNC Finance No. 36 tanggal 23 Desember 2015 (**“Akta No. 36 tanggal 23 Desember 2015”**), dibuat dihadapan Gamal Wahidin, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0949023.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam

Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0991957 tanggal 29 Desember 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3599301.AH.01.11 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCF adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp1.000.000 per saham)	%
Modal Dasar	1.900.000	1.900.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
- Perseroan	475.993	475.993.000.000	99,998
- Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	7	7.000.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	476.000	476.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.424.000	1.424.000.000.000	

d. Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT MNC Finance No. 15 tanggal 18 Desember 2017 ("**Akta No. 15 tanggal 18 Desember 2017**"), dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0202416 tanggal 19 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161361.AH.01.11 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris dan Direksi MNCF adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Totok Sugiharto
 Komisaris Independen : Alex Tangyong

Direksi

Direktur Utama : Suhendra Lie
 Direktur : Erwin Sugianto
 Direktur : Tjahjo Watjono
 Direktur : Suryadi

e. Ikhtisar Data Keuangan

Berikut ini adalah ikhtisar data keuangan penting dari MNCF untuk tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 serta tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut.

Neraca

Keterangan	31 Desember	
	2017	2016
Jumlah Aset	2.980.013	3.092.864
Jumlah Liabilitas	2.336.199	2.470.936
Jumlah Ekuitas	643.814	621.928

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Jumlah Aset

Aset MNCF menurun sebesar Rp112.851 juta atau sebesar 3,65% menjadi sebesar Rp2.980.013 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp3.092.864 juta pada tahun 2016. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pergeseran dari pembiayaan *non channeling* menjadi *channeling*. Walaupun secara *asset manage*, MNCF membukukan kenaikan aset sebesar 2,44% pada tahun 2017 jika dibandingkan tahun 2016.

Jumlah Liabilitas

Liabilitas MNCF menurun sebesar Rp134.737 juta atau sebesar 5,45% menjadi sebesar Rp2.336.199 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp2.470.936 juta pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh pergeseran dari pembiayaan *non channeling* menjadi *channeling*.

Jumlah Ekuitas

Ekuitas MNCF meningkat sebesar Rp21.886 juta atau sebesar 3,52% menjadi sebesar Rp643.814 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp621.928 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp3.756 juta pada tahun 2017.

Laporan Laba-Rugi

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2017	2016
Pendapatan	640.088	568.827
Beban Langsung	609.825	544.190
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	30.263	24.637
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan	22.791	19.035

Perbandingan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

Pendapatan

Pendapatan MNCF meningkat sebesar Rp71.261 juta atau sebesar 12,53% menjadi sebesar Rp640.088 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp568.827 juta pada tahun 2016. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya pendapatan bunga dari pembiayaan sebesar Rp102,9 miliar atau 26,45% dibandingkan tahun 2016, seiring dengan tambahan pembiayaan baru di tahun 2017.

Beban Langsung

Beban langsung MNCF meningkat sebesar Rp65.635 juta atau sebesar 12,06% menjadi sebesar Rp609.825 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp544.190 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh meningkatnya beban bunga pinjaman dari pembiayaan sebesar Rp59,19 miliar atau 26,9% dibandingkan tahun 2016, seiring dengan penambahan pembiayaan baru di tahun 2017.

Laba (Rugi) Sebelum Pajak

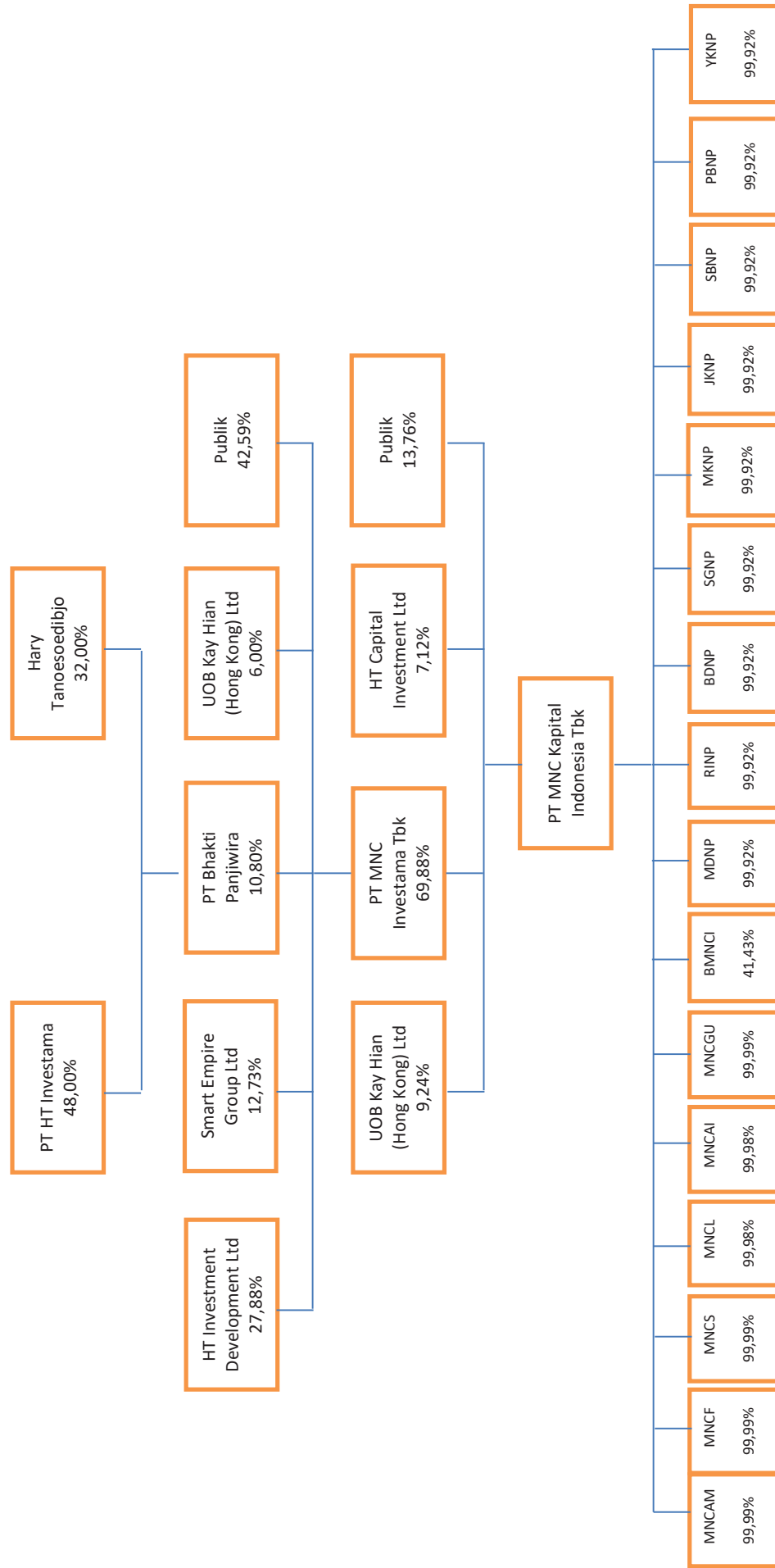
Laba sebelum pajak MNCF meningkat sebesar Rp5.626 juta atau sebesar 22,84% menjadi sebesar Rp30.263 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp24.637 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan total pendapatan sebesar 12,53% diikuti dengan efisiensi beban langsung.

Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan MNCF meningkat sebesar Rp3.756 juta atau sebesar 19,73% menjadi sebesar Rp22.791 juta pada tahun 2017 dari sebelumnya sebesar Rp19.035 juta pada tahun 2016. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pendapatan dan efisiensi beban langsung.

9. Hubungan Kepemilikan, Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak

Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Entitas Anak Per 31 Maret 2018



* UOB Kay Hian (Hongkong) Ltd adalah kustodian yang tidak bisa dikonfirmasi mengenai kepemilikan individu.

** Individu yang menjadi pengendali Perseroan adalah Hary Tanoesoedibjo.

Hubungan Afiliasi Pengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak

Per 28 Februari 2018

Dewan Komisaris dan Dewan Direksi	Perseroan	BMNCI	MNCS	MNCAM	MNCGU	MNCF	MNCL	MNCAI	MDNP	RINP	BDNP	SGNP	MKNP	JKNP	SBNP	PBNP	YKNP
Darma Putra Wati	KU													K	K	K	K
Tien	K																
Wina Armada Sukardi	KI																
Wito Mailoa	D			KU					K	K	K	K	K	D	D	D	D
Totok Sugiharto	D			K	K	K	K	KU	D	D	D	D	D				
Mashudi Hamka	D																
Mahjudin	DI																
Sylvy Setiawan								DU									
Suherman Budi Darmawan								D									
Rinawati								D									
Andre Franklin Sahelangi								D									
Kushindarto								KI									
Suhendra Lie						DU											
Erwin Sugianto						D											
Tjahjo Watjono						D											
Suryadi						D											
Alex Tangyong						KI											
Susy Meilina			DU														
Dadang Suryanto			D														
Fifi Virgantria			D														
Marlina			D														
Hary Tanoesoedibjo			KU														
Christ Soepontjo			K														
A. Wisnu Handoyono			K														
Frery Kojongian				DU													
Yong Julia				D													
Suwito Haryatno				D													
Febriyani Sjoftan				D													
Stien Maria Schouten				K													
Benny Purnomo		DU															
Nerfita Primasari		D															
Widiatama Bunarto		DI															
Chisca Mirawati		D															
Purnadi Harjono		K															
Eko Budi Supriyanto		KU/KI															
Rusli Witjahjono		KI															
Ogan Irfan Darmawulan							D										
Yonatan							D										
Bima Aranta							KU/KI										
Bambang Prayogo							KI										
Ageng Purwanto					DU												
Yusnandi Liauw					D												
Meita Lilisari					D												
Ir. Paulus Cholot janala					D												
Erdie Suriaherdadi Manan					KI												

Keterangan :

Perseroan	: PT MNC Kapital Indonesia Tbk
BMNCI	: PT Bank MNC Internasional Tbk
MNCS	: PT MNC Sekuritas
MNCAM	: PT MNC Asset Management
MNCGU	: PT MNC Guna Usaha Indonesia
MNCF	: PT MNC Finance
MNCL	: PT MNC Life Assurance
MNCAI	: PT MNC Asuransi Indonesia
MDNP	: Medan Nusantara Propertindo
RINP	: Riau Nusantara Propertindo
BDNP	: Bandung Nusantara Propertindo
SGNP	: Semarang Nusantara Propertindo
MKNP	: Makassar Nusantara Propertindo
JKNP	: Jakarta Nusantara Propertindo
SBNP	: Surabaya Nusantara Propertindo
PBNP	: Palembang Nusantara Propertindo
YKNP	: Yogya Nusantara Propertindo
KU	: Komisaris Utama
WKU	: Wakil Direktur Utama
KI	: Komisaris Independen
K	: Komisaris
DU	: Direktur Utama
DI	: Direktur Independen
D	: Direktur

10. Hak Kekayaan Intelektual dan Lisensi

Perseroan dan Entitas Anak telah mendaftarkan sejumlah hak kekayaan intelektual yang terdiri dari merek dagang dan hak cipta di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Merek
Perseroan	- Seni Logo : MNC Financial Services, No. Pendaftaran : 059036, berlaku 50 tahun sejak tanggal 16 Desember 2011; - Permohonan No. J002012004349/IDM000433758 tanggal 18 September 2017 untuk MNC Financial Services + Logo
MNCAI	- Seni Logo : MNC Insurance, No. Pendaftaran : C00201200504, berlaku 50 tahun sejak tanggal 31 Januari 2012; - Permohonan No. J002016051148 tanggal 7 Oktober 2016 untuk MNC Family Care + Logo; - Permohonan No. J002016051143 tanggal 7 Oktober 2016 untuk MNC Home Express + Logo; - Permohonan No. J002016051145 tanggal 7 Oktober 2016 untuk MNC Totalcare + Logo; - Permohonan No. J002016051149 tanggal 7 Oktober 2016 untuk MNC Travel Express + Logo
MNCF	- Permohonan No. J002015057257 tanggal 11 Desember 2015 untuk MNC Finance Your Credit Partner + Logo - Permohonan No. Kredit No. J002016041770 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit dan kata Bang Kredit - Permohonan No. J002016041772 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit Idul Fitri Versi 1 dan bang Kredit - Permohonan No. J002016041775 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit Idul Adha Versi 1 dan bang Kredit. - Permohonan No. J002016041769 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit Santa Claus dan bang Kredit. - Permohonan No. J002016041768 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit dan kata bang Kredit. - Permohonan No. J002016041771 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit dan kata bang Kredit. - Permohonan No. J002016041773 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit dan kata bang Kredit - Permohonan No. J002016041774 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit dan kata bang Kredit. - Permohonan No. J002016041777 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit dan kata bang Kredit. - Permohonan No. J002016041779 tanggal 05 September 2016 untuk icon Bang Kredit Mobile Gak Pake Ribet dan kata bang Kredit.
MNCAM	- Permohonan No. IDM000386155 tanggal 11 Mei 2011 untuk MNC Dana Syariah + Logo; - Permohonan No. J002011001556 tanggal 14 Januari 2011 untuk MNC Dana lancar + Logo; - Permohonan No. J002011001548 tanggal 14 Januari 2011 untuk MNC Dana likuid + Logo; - Permohonan No. J002011001549 tanggal 14 Januari 2011 untuk MNC Dana Muamalah + Logo; - Permohonan No. J002011001554 tanggal 14 Januari 2011 untuk MNC Asset Management + Logo; - Permohonan No. J002011001553 tanggal 14 Januari 2011 untuk MNC Dana ekuitas + Logo; - Permohonan No. J002011001550 tanggal 14 Januari 2011 untuk MNC Dana kombinasi + Logo

MNCL	- Seni Lukis Karakter : MNCLA, No. Pendaftaran : 059529, berlaku 50 tahun sejak tanggal 10 Januari 2011; - Seni Logo : MCLA, No. Pendaftaran: 062073, berlaku 10 tahun sejak tanggal 20 Februari 2012; - Sertifikat Merek : MCLA dan Logo, No Pendaftaran : IDM0003396587, berlaku 10 tahun sejak tanggal 12 November 2010; - Sertifikat Merek : MNCLA, No Pendaftaran: IDM000373116, berlaku 10 tahun sejak tanggal 9 Maret 2011
------	--

11. Keterangan Tentang Aset Tetap Perseroan dan Entitas Anak

Perseroan melalui Entitas Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya telah memiliki beberapa bidang tanah dan bangunan dengan sah, antara lain sebagai berikut:

Keterangan	Lokasi	No. Sertifikat dan Surat Ukur	Tahun Perolehan	Masa Berlaku Hak	Luas (m2)	Pemegang Hak
Tanah dan bangunan	Kel. Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau	SHGB No.1041; No.01703/Sidomulyo Timur/2016 tanggal 24 Agustus 2016	2016	20/10/2046	167	RINP
Tanah dan bangunan	Kel. Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau	SHGB No. 1042; No.01705/Sidomulyo Timur/2016 tanggal 24 Agustus 2016	2016	20/10/2046	172	RINP
Tanah dan bangunan	Kel. Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau	SHGB No. 1043; No.01704/Sidomulyo Timur/2016 tanggal 24 Agustus 2016	2016	20/10/2046	170	RINP
Tanah dan bangunan	Kel. Sidomulyo Timur, Pekanbaru, Riau	SHGB No. 1044; No.01702/Sidomulyo Timur/2016 tanggal 24 Agustus 2016	2016	20/10/2046	192	RINP
Tanah dan bangunan	Kapt. Maulana Lubis Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah	SHM No.01732 & Surat Ukur No. 00251/Petisah Tengah/2016 (Berdasarkan Cover Note Syafil Warman, S.H., Notaris PPAT di Medan No. 128/Not/SWH/III/2018 bahwa sertipikat Hak Milik No. 01732 atas nama The Yek Yong sedang dalam proses penurunan hak menjadi SHGB)	2016	-	656	MDNP
Tanah dan bangunan	Kel. Harapan Mulya, Kec.Medan Satриа, Bekasi (Grand Mall Bekasi, Jl.Jenderal Sudirman No.1)	SHGB No.725 & Surat Ukur No. 38/Harapan Mulya/2000	2004	24 September 2027	72	MNCF
Tanah dan bangunan	Kel. Sindangsari, Kec.Bogor timur (Jl.Raya Wangun No.401A Rt.005/02)	SHGB No.35& Surat Ukur No. 68/Sindangsari/2004	2005	21 Maret 2035	74	MNCF
Tanah dan bangunan	Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Malang (Jl.Letjend.Sutoyo No.121)	SHGB No.340 & Surat Ukur No. 00701/Lowokwaru/2004	2006	Sampai dengan 30 tahun sejak penerbitan	161	MNCF

Keterangan	Lokasi	No. Sertifikat dan Surat Ukur	Tahun Perolehan	Masa Berlaku Hak	Luas (m2)	Pemegang Hak
Tanah dan bangunan	Kel. Lowokwaru, Kec. Lowokwaru, Malang (Jl.Letjend.Sutoyo No.121 A)	SHGB No.341 Surat Ukur No. 00701/Lowokwaru/2004	2006	Sampai dengan 30 tahun sejak penerbitan	148	MNCF
Tanah dan bangunan	Kec. Gedangan, Desa Sawotratap, Sidoarjo (Komp.Ruko Gateway Blok B No.15, Raya Waru)	SHGB No.348 Surat Ukur No. 278/16.14/2003	2004	4 Januari 2027	75	MNCF
Tanah dan bangunan	Jl. Sutera Niaga II No. 2, Kec. Serpong, Kab. Tangerang	SHGB No.0090 Surat Ukur No. 64/Pakulonan/2001	2004	19 Oktober 2024	80	MNCF
Tanah dan bangunan	Jalan Abdul Muis No. 36 C, Petojo Selatan	SHGB No.2586 Surat Ukur No. 0059 /2004	2005	6 Januari 2035	46	MNCF
Tanah dan bangunan	Kel. Petojo Selatan, Kec. Gambir, Jakarta Pusat	SHGB No.2626 Surat Ukur No. 00063/2005	2006	30 Oktober 2035	107	MNCF
Tanah dan bangunan	Jalan Abdul Muis No. 36 C, Petojo Selatan	SHGB No.1782 Surat Ukur No. 162 /1994	2004	30 Agustus 2037	43	MNCF
Tanah dan bangunan	Jalan Abdul Muis No. 36 N, Petojo Selatan	SHGB No.2589 Surat Ukur No. 00010 /2008	2008	23 Januari 2035	79	MNCF
Tanah dan bangunan	Jalan Abdul Muis No. 36 D, Petojo Selatan	SHGB No.526 Surat Ukur No. 459/1979	2004	30 Agustus 2037	88	MNCF
Tanah dan bangunan	Jalan Abdul Muis No. 36 E-F, Petojo Selatan	SHGB No.525 Surat Ukur No. 458/1979	2004	30 Agustus 2037	198	MNCF
Tanah	Kel. Harapan Mulya, Kec. Bekasi Selatan, Bekasi, Jawa Bara.	SHGB No.241 Surat Ukur No. 12612/1997	2011	24 Oktober 2033	71	MNCF
Tanah dan bangunan	Sumur Batu, Kec. Teluk Betung Utara, Bandar Lampung (Jl.Pangeran Diponegoro No.119)	SHGB No.48/SB Surat Ukur No. 4278 /1995	2012	27 Desember 2031	423	MNCF
Tanah	Jati Baru, Kec. Padang Timur, Padang, Sumatera Utara (Jl. Mangunsarkoro No.3 F-G)	SHGB No.45 Surat Ukur No. 00488 /2010	2011	17 Oktober 2041	124	MNCF
Tanah dan bangunan	Jl.Nangka No303 E, Kel.Wonorejo, Kec. Sukajadi, Pekanbaru, Propinsi Riau	SHGB No.143 Surat Ukur No. 990 /1991	2011	12 Januari 2030	106	MNCF
Tanah	Kemasan, Kota Kediri, Jawa Timur (Jl.Joyoboyo No.60)	SHGB No. 313 Surat Ukur No. 35/Kemasan/2006	2006	4 Maret 2026	119	MNCF
Tanah dan bangunan	Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara (Jl. Letda Sujono No.140)	SHGB No. 4194 Surat Ukur No. 2889/MedanEstate/2012	2012	11 April 2032	72	MNCF

Keterangan	Lokasi	No. Sertifikat dan Surat Ukur	Tahun Perolehan	Masa Berlaku Hak	Luas (m2)	Pemegang Hak
Tanah dan bangunan	Desa Sukorejo, Kec. Bojonegoro, Kab. Bojonegoro, Jawa Timur (Jl. Veteran Kav. 9 Ruko Central District Business Bojonegoro)	SHGB No.124 Surat Ukur No. 869/Sukorejo/2010	2012	28 Maret 2042	73	MNCF

Total nilai buku aset tetap yang dimiliki oleh Perseroan dan Entitas Anak per 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp47.961.379.443.

12. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan miliknya berupa benda-benda tidak bergerak maupun benda-benda bergerak yang penting bagi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya pada beberapa perusahaan asuransi pihak ketiga dengan jumlah yang memadai.

Jenis Asuransi & Obyek Pertanggungan	Nomor Polis	Jangka Waktu	Jumlah Pertanggungan (Rupiah)	Tertanggung	Penanggung
Asuransi Kendaraan Bermotor untuk 1 Unit Toyota Harrier 2.0 ADLS Tahun 2015	10.03.02.15.0 6.0.01.005	18 Juni 2015 s/d 18 Juni 2018	581.250.000,- (untuk tahun ketiga)	PT MNC Finance qq PT Bhakti Capital Indonesia Tbk.	PT MNC Asuransi Indonesia
Asuransi Kendaraan Bermotor untuk 1 Unit BMW 520i AT Tahun 2013	10.03.02.17.0 9.0.00959	30 September 2017 s/d 30 September 2018	575.000.000,-	PT MNC Kapital Indonesia Tbk.	PT MNC Asuransi Indonesia
Asuransi Kendaraan Bermotor untuk 1 Unit Pajero Sport Dakar Tahun 2010	10.03.02.14.0 3.0.01549	31 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2018	408.000.000,-	PT MNC Investama Tbk.	PT MNC Asuransi Indonesia
Asuransi Kendaraan Bermotor untuk 1 Unit Lexus ES 250 A/T Tahun 2014	10.03.02.14.0 6.0.01143	31 Agustus 2017 s/d 31 Agustus 2018	815.000.000,-	PT MNC Investama Tbk.	PT MNC Asuransi Indonesia
Asuransi Kendaraan Bermotor untuk 1 Unit Nissan X-Trail Tahun 2013	10.03.02.15.0 3.0.01018	Dalam masa perpanjangan	250.000.000,- (untuk tahun ketiga)	PT MNC Finance qq PT MNC Kapital Indonesia Tbk.	PT MNC Asuransi Indonesia

Perseroan memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan asuransi (penanggung) tersebut di atas yaitu hubungan kepemilikan sebagai perusahaan pengendali. Jumlah pertanggungan tersebut telah memadai untuk menutupi kerugian yang terjadi atas objek yang dipertanggungkan.

13. Transaksi dengan Pihak Afiliasi

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak Afiliasi. Transaksi-transaksi tersebut telah dilaksanakan dengan syarat wajar dan kondisi yang sama sebagaimana bila dilaksanakan dengan pihak ketiga. Transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan	Masa Berlaku	Nilai (Rp)	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Sewa Ruang MNC Financial Centre No. MNCL-MNCKI-LA-22F/F/230216 tanggal 23 Februari 2016	Perseroan dan PT MNC Land Tbk	Kepemilikan	1 Oktober 2015 s/d 30 September 2021	1.685.016.000,- untuk uang sewa selama periode sewa dan 786.340.800,- untuk biaya pelayanan	Sewa-menyewa ruangan yang terletak di lantai 22 dengan luas 156,02 m2, yang terletak dalam bangunan/gedung yang bernama "MNC Financial Centre"

No.	Perjanjian	Para Pihak	Sifat Hubungan	Masa Berlaku	Nilai (Rp)	Deskripsi Singkat
					selama periode sewa	
2.	Perjanjian Sewa Ruang MNC Financial Center No.MNCL-MCAM-LA-9F-10F/230715 tanggal 23 Juli 2015 jo. Amandemen Kesatu Terhadap Perjanjian Sewa Ruang Lantai 20, 21, Ground Floor dan Sharing Area di Gedung MNC Financial Center No.MNCL-MNCKI-AMD1-20F-21F-GF/301116 tanggal 30 November 2016	Perseroan dan PT MNC Land Tbk	Kepemilikan	1 Januari 2015 s/d 31 Desember 2020.	Rp.150.000,- per m2 per bulan, belum termasuk PPN dan untuk Ground Floor 300.000,- per m2 per bulan Dan biaya 150.000,- per m2 per bulan 70.000,- per m2 per bulan.	Perjanjian Sewa Ruang MNC Financial Center No.MNCL-MCAM-LA-9F-10F/230715 tanggal 23 Juli 2015 jo. Amandemen Kesatu Terhadap Perjanjian Sewa Ruang Lantai 20, 21, Ground Floor dan Sharing Area di Gedung MNC Financial Center No.MNCL-MNCKI-AMD1-20F-21F-GF/301116 tanggal 30 November 2016
3.	Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.10217210200215 tanggal 7 Desember 2017	Perseroan dan PT MNC Finance	Kepemilikan	7 Desember 2017 s/d 7 November 2020.	Nilai Pembiayaan 262.500.000,- dengan nilai angsuran 8.998.000,- per bulan	Pembiayaan 1 (satu) unit Nissan X-Trail 2.5 CVT Tahun 2017 dengan Nomor Rangka MHBFB3CFICHJ012387 dan Nomor Mesin QR25024697M
4.	Perjanjian Kerjasama Payroll No.182/BBP/KS-Payroll/VIII/2014 tanggal 7 Agustus 2014 jo. Perubahan dan Penegasan Kembali Perjanjian Kerjasama Payroll No.177/MB-MKI/KS/Add/X/17 tanggal 17 Oktober 2017	Perseroan dan PT Bank MNC Internasional Tbk.	Kepemilikan	25 Februari 2016 s/d 25 Februari 2020	Atas jasa Payroll tersebut, Bank tidak akan mengenakan biaya apapun kepada Perusahaan dan Bank tidak akan mengenakan biaya pada saat Karyawan melakukan transaksi tarik tunai di ATM Bersama	Bank memberikan jasa Payroll kepada Perusahaan dan Perusahaan setuju untuk menggunakan produk jasa Payroll dari Bank, di mana berdasarkan Surat Kuasa Mendebet, Perusahaan memberikan kuasa, wewenang, dan hak kepada Bank pada Tanggal Penggajian untuk mendebet Rekening Perusahaan sebesar total gaji seluruh Karyawan dan menggunakan dan tersebut untuk keperluan Payroll dan mengkreditkan ke dalam Rekening Tabungan sesuai data yang diterima dari Perusahaan

Transaksi tersebut di atas merupakan transaksi yang sifatnya operasional dan bertujuan untuk menunjang kegiatan operasional dari Entitas Anak. Tidak terdapat pembatasan yang berlaku sehubungan dengan transaksi-transaksi tersebut di atas. Perjanjian dengan pihak afiliasi dilakukan dengan wajar seperti apabila dilakukan dengan pihak ketiga.

Dalam menjalankan kegiatan usaha, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tidak memiliki kepentingan dalam perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

14. Perjanjian-Perjanjian dengan Pihak Ketiga

Berikut ini merupakan perjanjian antara Perseroan dan Entitas Anak dengan pihak ketiga yang dianggap penting oleh Perseroan:

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
1.	Perjanjian Sewa Mesin Fotocopy No.039/RTL/SG-PJ/11/16 tanggal 3 November 2016 jo. Addendum I Perjanjian Sewa Mesin Fotocopy No.153/RTL/SGPJ-MF/11/17	- PT Prismaco Jaya Indonesia - Perseroan	3 November 2017 s/d 3 November 2018	Sewa-Menyewa Mesin Fotocopy merek Samsung model SL-X4250LX Serial Number 07S7B1BH700001W

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
2.	Perjanjian Kerjasama Pengendalian Pest Control Antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan PT Sonyi Berdikari Jaya tanggal 1 November 2017	- Perseroan PT Sonyi Berdikari Jaya	1 November 2017 s/d 31 Oktober 2018	Pekerjaan pengendalian Hama yaitu upaya pengendalian populasi Hama agar tidak menimbulkan gangguan bagi manusia, menciptakan lingkungan yang higienis dan mencegah kerusakan fisik bangunan dan isinya akibat keberadaan Hama yang hanya boleh dilaksanakan oleh tenaga ahli atau pengawas bersertifikat resmi dari Pemerintah yang akan dilaksanakan sesuai dengan acuan yang telah disepakati bersama oleh Para Pihak.
3.	Perjanjian Pemberian Fasilitas Pinjaman Program KPR No. 043/PP/SMF-MNCF/VII/2017	- Sarana Multigriya Finansial & PT MNC Finance	15 tahun terhitung sejak tanggal pencairan fasilitas pinjaman	Tujuan penggunaan fasilitas pinjaman adalah untuk refinancing KPR SMF yang telah disalurkan Pihak Kedua berdasarkan persyaratan yang telah disepakati.
4.	Perjanjian Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi (Kendaraan) No. 068/MNCL-OPL/01/17	- PT MNC GUI & PT MNC Finance	36 bulan sejak tanggal 3 Januari 2017	MNC Finance menyewa kendaraan dengan sewa guna usaha tanpa hak opsi atas dari MNC GUI.
5.	Perjanjian Pembelian System Remote Trading Untuk Pengembangan Brokerage Office System No. 024/PK/MNCSec-Comp/IV/2016	- PT MNC Sekuritas & PT Mitra Nilai Indonesia	sejak tanggal ditandatangani nya Perjanjian s/d berakhirnya Priode Garansi dan ditandatangani nya BAST Final.	MNCS setuju untuk membeli System Remote Trading dari Mitra Nilai Indonesia untuk menunjang kegiatan operasional MNCS.
6.	Perjanjian Penggunaan Jaringan Terpadu Pasar Modal (JTPM) No. 034/PK/MNCSek-Comp/VI/2017	- PT Link Net Tbk & PT MNC Sekuritas	2 tahun sejak ditandatangani nya Berita Acara Akseptasi Pekerjaan dan akan selalu diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama setelah berakhirnya jangka waktu perjanjian.	Melakukan instalasi dan konfigurasi atas Perangkat dan jaringan untuk pengguna JTPM sesuai dengan spesifikasi dan system requirement JTPM.
7.	Perjanjian Kerjasama Penyediaan Perangkat Lunak, tanggal 17 Oktober 2017	- PT MNC Sekuritas & PT Teknologi Indonesia	3 (tiga) tahun sejak tanggal perjanjian dan otomatis diperpanjang untuk jangka waktu yang sama.	Penggunaan perangkat lunak yang mana MNC Sekuritas sepakat untuk membayar biaya-biaya penggunaan perangkat lunak kepada PT Teknologi Indonesia
8.	Perjanjian Penunjukan Agen Penjual Dan Kerjasama Pemasaran Reksa Dana No. 018/PK/MNCSek-Comp/I/2018	- PT Mega Asset Managemnt & PT MNC Sekuritas	3 (tiga) tahun terhitung efektif sejak tanggal; 25 Januari 2018 s/d tanggal 24 Januari 2021	Mega Asset menunjuk MNCS sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana non eksklusif dalam melakukan kegiatan pemasaran dan penjualan Reksa Dana kepada Nasabah.

No.	Perjanjian	Para Pihak	Masa Berlaku	Deskripsi Singkat
9.	Perjanjian Kerjasama Pemberian Lisensi Perangkat Lunak Reksadana Online No: 003/MNCAM/LGL/VII/2015 tanggal 1 Juli 2015,	- PT MNC Asset Management PT Praisindo Teknologi	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 3 Juni 2016 dan akan terus berlaku selama Client menggunakan dan memanfaatkan Software yang dilisensikan.	Prasindo memberikan lisensi untuk menggunakan Software yang dilisensikan dan dokumentasi yang menyertainya untuk penggunaan internal Client di lokasi kantor-kantor Client.
10.	Akta Perjanjian Suplensi Kredit Modal Kerja No.11 tanggal 30 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan Sri Budi Lestariningsih, S.H., Notaris di Jakarta.	- MNCGUI & PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	Berlaku selama 3 (tiga) tahun.	MNCGUI menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja Multifinance dengan sifat Revolving dalam rangka untuk Pembiayaan Kosumen.
11.	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. 27 tanggal 16 Oktober 2015 yang dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjaja, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.	- MNCGUI & PT Bank Jtrust Indonesia Tbk	Berlaku selama 48 (empat puluh delapan) bulan, yaitu sampai dengan 16 Oktober 2019.	MNCGUI menerima Fasilitas Kredit <i>Executing Multifinance</i>
12.	Akta Perjanjian KRedit Pinjaman Angsuran II (PA II) No. 384 tanggal 29 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Otty Hari Chandra Ubayani, S.H., Notaris di Jakarta.	- MNCGUI & PT Bank Victoria International Tbk	Dalam masa perpanjangan	MNCGUI menerima Fasilitas Kredit <i>Fixed loan Line Limit Non Revolving (Uncommitted)</i> .

Tidak ada pembatasan dari perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga diatas yang dapat merugikan pemegang Obligasi.

15. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Serta Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Anak

Sampai pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak sedang menghadapi perkara. Sedangkan, Entitas Anak Perseroan saat ini sedang menghadapi perkara-perkara sebagai berikut :

Keterangan Perkara MNCF:

1. Nomor 21/SK/PTUN-SRG tanggal gugatan 19 Desember 2016 di PTUN Serang antara Diddy Hermawan selaku Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan MNCF sebagai Pihak Intervensi selaku Tergugat.
2. Nomor 53/Pdt.G/2017.PN. Kwg tanggal gugatan 25 September 2017 di Pengadilan Negeri Karawang antara Olah selaku Penggugat dan MNCF selaku Tergugat.
3. Nomor 310/PDT.G/2018/PA.Krw tanggal gugatan 22 Januari 2018 di Pengadilan Agama Karawang antara Ade Komar selaku Penggugat melawan MNCF selaku Tergugat.
4. Nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Bjm tanggal gugatan 18 Desember 2017 di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara Muhammad Husni Mubarak selaku Penggugat melawan MNCF selaku Tergugat.

Keterangan Perkara BMNCI:

1. Nomor 65/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 16 September 2015 di PN Niaga Jakarta Pusat antara BMNCI selaku Pemohon PKPU dengan KPI dan Prof. Dr. Masngudi selaku Termohon Pailit.
2. Nomor 42/Pdt.Sus.PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 14 April 2016 di PN Niaga Jakarta Pusat antara BMNCI selaku Pemohon PKPU dengan PT Boengsu Djaya dan Ratna Dewi selaku Termohon Pailit.

3. Nomor 104/Pdt.G/2017/PN.Unr tanggal 16 Oktober 2017 di PN Semarang dimana BMNCI sebagai Tergugat I.
4. Nomor 470/Pdt.G/2017/PN.Smg tanggal 01 November 2017 di PN Semarang dimana BMNCI selaku Tergugat II.
5. Nomor 385/Pdt.G/2017/PN.Mks tanggal 28 November 2017 di PN Makassar dimana BMNCI sebagai Pelawan.
6. Nomor 497/Pdt.Bth/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 26 September 2017 di PN Jakarta Utara dimana BMNCI sebagai Terbantah II.
7. Nomor 960/Pdt.G/2017/PN.Tng tanggal 18 Desember 2017 di PN Tangerang dimana BMNCI sebagai Turut Tergugat
8. Nomor 175/Pdt.G/2015/PN.Bib tanggal 26 Oktober 2015 di PN Bale Bandung dimana BMNCI sebagai Tergugat I.
9. Nomor 365/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 18 Agustus 2015 di PN Jakarta Pusat dimana BMNCI sebagai Tergugat/Terbanding
10. Nomor 350/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 13 September 2016 di PN Bandung dimana BMNCI sebagai Turut Tergugat V/Turut Terbanding V
11. Nomor 672/Pdt.G/2016/PN.Mdn tanggal 24 November 2016 di PN Medan dimana BMNCI sebagai Tergugat I/Terbanding I.
12. Nomor 253/Pdt.G/2017/PN.JKT.Pst tanggal 09 Mei 2017 di PN Jakarta Pusat dimana BMNCI sebagai Tergugat/Terbanding.
13. Nomor 686/Pdt/2016/PT.DKI tanggal 22 Februari 2017 Jo. No. 779/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel tanggal 18 November 2014 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dimana BMNCI sebagai Tergugat I/Terbanding I/ Termohon Kasasi I.
14. Nomor 141/Pdt/2017/PT.Smg tanggal 8 Mei 2017 Jo. Nomor 41/Pdt.G/2016/PN.Smg tanggal 02 Februari 2016 di PT Semarang dimana BMNCI sebagai Tergugat II/Terbanding II/Turut Termohon Kasasi II.
15. Nomor 25/Pdt/2017/PT.Sby tanggal 23 Februari 2017 Jo. Nomor 752/Pdt.G/2015/PN.Sby tanggal 5 April 2016 di PT Surabaya dimana BMNCI sebagai Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II.
16. Nomor 249/Pdt/2017/PT.BDG tanggal 11 Juli 2017 Jo. Nomor 191/Pdt.G/2016.Bdg tanggal 12 Mei 2016 di PT Bandung dimana BMNCI sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.
17. Nomor 287/Pdt/2017/PT.BDG tanggal 2 Agustus 2017 Jo. Nomor 313/Pdt.G/2016/PN.Bdg tanggal 18 Agustus 2016 di PT Bandung dimana BMNCI sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.
18. Nomor 51/Pdt/2017/PT.JMB tanggal 5 Oktober 2017 Jo. Nomor 100/Pdt.G/2016/PN.Jmb tanggal 24 Agustus 2016 di PT Jambi dimana BMNCI sebagai Penggugat.
19. Nomor 438/Pdt/2016/PT.SMG tanggal 14 Desember 2016 Jo. Nomor 512/Pdt.G/2015/PN.Smg tanggal 02 Februari 2016 di PT Semarang dimana BMNCI sebagai Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.
20. Nomor 729/K/Pdt/2015 tanggal 22 Juni 2015 Jo. No. 69 Pdt/2014/PT.MKS tanggal 20 Mei 2014 Jo. Nomor 348/Pdt.G/2012/PM.MKS tanggal 20 Desember 2012 di Mahkamah Agung dimana BMNCI sebagai Tergugat III/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali
21. Nomor 568/Pid/2017/PN.BDG tanggal 28 Desember 2017 di PN Semarang dimana BMNCI sebagai Pelapor.
22. Nomor 10/Pdt.G/2018/PN.Kds tanggal 31 Januari 2018 di PN Kudus dimana BMNCI selaku Tergugat II.
23. Nomor 32/Pdt.G/2018/PN.Yyk tanggal 12 Februari 2018 di PN Yogyakarta dimana BMNCI selaku Tergugat.
24. Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Sby tanggal 12 Februari 2018 di PN Surabaya dimana BMNCI selaku Tergugat I.
25. Nomor 38/Pdt.G/2018/PN.Bpp tanggal 8 Maret 2018 di PN Balikpapan dimana BMNCI selaku Tergugat.
26. Nomor 177/Pdt.G/2018/PN.Bdg tanggal 16 April 2018 di PN Bandung dimana BMNCI selaku Tergugat.

Selain dari yang disebutkan di atas pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat dalam suatu perkara baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha, harta kekayaan, dan rencana Penawaran Umum Obligasi Perseroan.

Apabila perkara-perkara yang dihadapi Perseroan dan Entitas Anak atau dari somasi pihak ketiga telah menjadi Perkara yang melibatkan Perseroan, pada akhirnya timbul putusan yang menyatakan bahwa Perseroan terbukti melakukan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi, Perseroan berkeyakinan bahwa hal tersebut tidak akan memberikan dampak negatif dan material pada keadaan keuangan Perseroan dan Entitas Anak maupun kelangsungan usaha Perseroan dan Entitas Anak secara rencana Penawaran Umum Obligasi ini.

16. Kegiatan Usaha

Mayoritas pendapatan Perseroan dikontribusikan oleh 2 lini bisnis utama. Jasa perbankan yang dikelola oleh BMNCI dan jasa pembiayaan konsumen dan sewa guna usaha yang dikelola oleh MNCF dan MNCGU, yang saat ini mengkontribusikan pendapatan masing-masing bagi Perseroan sebesar 46,8% dan 31,5% pada tahun 2017. Selain itu Perseroan juga memperoleh pendapatan dari jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek, pengelolaan investasi dan asuransi. Berikut adalah struktur Perseroan dan lini bisnis Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2017:



Berikut adalah klasifikasi lini usaha dibawah Perseroan, yaitu:

i. Jasa perbankan melalui BMNCI

Sebagai penyedia jasa intermediasi keuangan, maka aktivitas pemasaran BMNCI terdiri dari penghimpunan dana pihak ketiga dan penyaluran dana (kredit). Untuk meningkatkan dana pihak ketiga, khususnya tabungan dan giro, BMNCI akan melakukan program-program pemasaran yang akan disesuaikan dengan target segmen. Dalam hal ini, BMNCI akan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup MNC. Upaya peningkatan dana pihak ketiga lainnya dilakukan melalui peningkatan layanan kepada nasabah berupa layanan berbasis teknologi digital, diantaranya aplikasi *mobile banking*, pengembangan layanan *internet banking*, baik *personal* maupun *corporate (Cash Management System)*, dan jaringan debit yang bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah bagi nasabah dalam bentuk kemudahan transaksi seperti pembayaran tagihan, pembelian, dan lain-lain. Selain itu, BMNCI juga telah mengembangkan berbagai aplikasi berbasis digital yang memberikan kemudahan kepada nasabah untuk melakukan transaksi perbankan yaitu aplikasi penyacelengan, aplikasi punyakuartu, aplikasi punyaprumah dan aplikasi punyabenefit. BMNCI akan melakukan pengembangan ATM dengan cara menambah fitur-fitur ATM dan melakukan *co-branding* dengan pihak ketiga dan mengupayakan penggunaan kartu ATM yang mempunyai chip. Fitur *internet banking* secara bertahap akan disempurnakan dan ditambah sehingga makin memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. *Mobile banking* juga dapat membantu nasabah melakukan transaksi perbankan dengan mudah yaitu melalui telepon genggam. Selain itu, BMNCI akan melakukan program optimalisasi jaringan kantor cabang dengan cara relokasi, peningkatan status, dan penutupan kantor cabang. Untuk mendukung aktivitas penjualan di cabang, BMNCI juga akan menggunakan *direct sales*. Strategi pemasaran tersebut akan dilengkapi dengan aktifitas promosi dan iklan maupun pameran-pameran ditempat keramaian dan di acara-acara yang diadakan oleh Grup MNC. Selain itu di tahun 2018, BMNCI juga akan mengembangkan komunikasi pemasaran dengan media digital seperti facebook, twitter, Instagram, situs web dan lain-lain, disamping media komunikasi konvensional.

Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan BMNCI dalam bentuk fasilitas kredit modal kerja, kredit investasi maupun kredit konsumsi dengan memfokuskan pada peningkatan *low cost funding*. Melalui referensi dari kepala cabang dan juga referensi dari para nasabah, BMNCI secara bertahap mengembangkan usaha penyaluran kredit secara selektif. BMNCI mengedepankan aspek kehati-hatian dalam penyaluran dana guna menjaga *Non Performing Loan (NPL)* yang tetap rendah.

ii. Jasa pembiayaan konsumen melalui MNCF

MNCF bergerak di bidang jasa pembiayaan konsumen (*Consumer Financing*), MNCF menawarkan pembiayaan untuk produk-produk berupa mobil dan KPR serta pembiayaan melalui skema Sewa Guna Usaha untuk produk alat berat, multiguna dengan jaminan BPKB atau sertifikat dan Anjak Piutang untuk pembiayaan piutang pelanggan. Pembiayaan mobil saat ini mendominasi portofolio kredit perusahaan sebesar 57,94%, diikuti oleh multiguna sebesar 20,93%, KPR sebesar 20,81%, sewa guna usaha sebesar

0,32% dan sisanya adalah anjak piutang. Untuk memperkuat penyaluran pembiayaan perusahaan dan memperluas jaringan, MNCF bekerja sama dengan pihak institusi perbankan dan dealer. MNCF saat ini melayani nasabahnya melalui 59 kantor cabang yang tersebar di seluruh Indonesia, terutama Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.

iii. Jasa sewa guna usaha melalui MNCGU

MNCGU bergerak dalam bidang usaha jasa sewa guna usaha, yang meliputi pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK. Pembiayaan MNCGU menasar industri manufaktur, kesehatan, tambang, perkebunan, konstruksi, transportasi dan infrastruktur. MNCGU memasarkan jasa sewa operasi, sewa pembiayaan, anjak piutang, pembiayaan konsumen dan pembiayaan syariah.

iv. Jasa asuransi umum melalui MNCAI

Pada tanggal 20 Desember 2011, Perseroan menyelesaikan pembelian 99,9% saham PT Jamindo General Insurance (Jamindo). Didirikan pada tanggal 18 Agustus 1987 di Bogor, PT Jamindo General Insurance (dahulu PT Asuransi Jamindo Pusaka) menawarkan berbagai produk dan jasa asuransi umum bagi nasabah individu maupun untuk kepentingan komersial dengan memanfaatkan jalur distribusi keagenan dan broker di seluruh Indonesia.

Dengan ditandatanganinya Akte Jual Beli antara Perseroan dan Jamindo, Perseroan sejak itu resmi memiliki perusahaan asuransi umum yang kemudian diganti namanya menjadi MNCAI. Perubahan nama perusahaan ini merupakan bagian strategi *rebranding* yang sebelumnya telah diterapkan di keempat entitas anak Perseroan pada awal tahun 2011. Penguatan *brand* mengukuhkan integrasi layanan jasa keuangan yang diberikan Perseroan.

v. Jasa asuransi jiwa melalui MNCL

MNCL diakuisisi Perseroan pada tanggal 5 Nopember 2010. Setelah diakuisisi hingga saat prospektus ini diterbitkan, sejumlah 99,96% saham MNCL kini dimiliki oleh Perseroan. MNCL melayani jasa asuransi jiwa melalui sistem multi jalur distribusi dengan jaringan agen sebagai unit usaha utama, dilengkapi dengan jalur distribusi Agency, Group dan Alternate, serta meluncurkan jaringan distribusi baru, *mediassurance* yang memungkinkan pemasaran produk asuransi melalui media grup. Dua solusi utama yang ditawarkan MNCL adalah:

- *Wealth Protection*
Solusi ini menawarkan produk asuransi kesehatan dan medis, perlindungan kecelakaan dan penyakit kritis, dan asuransi jiwa seumur hidup untuk nasabah individu dan klien grup. Termasuk di produk asuransi ini adalah:
 - Produk asuransi tradisional, yang menyediakan perlindungan jiwa dan kesehatan dengan opsi tambahan perlindungan (*riders*)
 - Ritel/asuransi mikro, yang menawarkan perlindungan kecelakaan dengan biaya premi yang minimal
 - Produk asuransi jiwa seumur hidup, yang memberikan perlindungan jiwa dan sekaligus akumulasi nilai tunai
- *Wealth Accumulation*
Solusi ini menawarkan program perencanaan pendidikan, hari tua, tabungan dan investasi berdasarkan profil risiko nasabah dalam bentuk proteksi keuangan dan sekaligus investasi berimbang hasil menguntungkan.

Hingga akhir tahun 2017, MNCL memiliki 14 kantor pemasaran yang tersebar di seluruh Indonesia dan memiliki 725 tenaga pemasaran yang dilayani oleh 126 karyawan *back office*.

vi. Jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek melalui MNCS

Bidang jasa yang digeluti MNCS adalah jasa perantara perdagangan efek (instrumen ekuitas, instrumen utang, pembiayaan *margin* dan *online trading*), jasa penasihat keuangan, jasa penjamin emisi efek, serta

jasa riset. MNCS telah melakukan beberapa kegiatan korporasi yang menunjang kelangsungan bisnisnya, yaitu:

- Menyediakan *platform* yang memfasilitasi *online trading*, yaitu MNC Trade New dan MNC Trade Syariah, yang dapat diakses dengan mudah melalui berbagai perangkat, dengan sistem operasi Android maupun iOS.
- Mensosialisasikan investasi pasar modal ke berbagai kalangan melalui produk menabung saham MNC Gemesin (Gemar Menabung Saham Indonesia), hanya dengan Rp100.000,- atau kelipatannya per bulan.
- Mengikuti lelang Surat Berharga Negara dan melayani transaksi perdagangan Surat Utang Negara, seperti Obligasi Negara Ritel, Saving Bonds Ritel (SBR), Sukuk Negara Ritel (SUKRI), dan obligasi korporasi.
- Menyelenggarakan program Klinik Edukasi secara rutin untuk menambah jumlah nasabah ritel baru dan pengguna aplikasi *online trading* MNC Trade New.
- Menyelenggarakan program Klinik Riset secara rutin yaitu sesi konsultasi saham secara *one-on-one* antara nasabah MNC Sekuritas dengan Tim Riset MNC Sekuritas, sehingga nasabah dapat memperoleh kesempatan mengkonsultasikan portofolio sahamnya pada analis yang berkompeten di bidangnya.
- Menggelar kegiatan *Investor Gathering* secara rutin untuk memberikan *update* arah ekonomi, pasar saham, pasar surat utang, analisa sektoral dan rekomendasi saham pilihan bagi nasabah *existing*.
- Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dan edukasi ke sekolah, kampus, perusahaan, serta komunitas untuk menarik lebih banyak nasabah.

Saat ini, MNCS melayani nasabahnya melalui 108 *point of sales* (per 27 Februari 2018) yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Perusahaan masih berencana menambah *point of sales* agar dapat menjangkau segmen nasabah yang lebih luas.

vii. Jasa pengelolaan investasi melalui MNCAM

Bergerak di bidang jasa Pengelolaan investasi, MNCAM melayani berbagai produk investasi bagi para investor individu maupun institusi dengan target segmen nasabah ritel dan *high networth*. Produk investasi yang ditawarkan perusahaan berupa Kontrak Pengelolaan Dana (*Discretionary Account*) dan Reksa Dana, yaitu di antaranya MNC Dana Lancar, MNC Dana Likuid, MNC Dana Syariah, MNC Dana Kombinasi, MNC Dana Ekuitas, MNC Dana Dollar, MNC Dana Kombinasi Icon, MNC Dana Syariah Ekuitas, MNC Dana Syariah Kombinasi, MNC Dana Kombinasi Konsumen, MNC Dana Terproteksi III, MNC Dana Pendapatan Tetap II, Indeks MNC36, MNC Dana Terproteksi V, MNC Dana Saham, MNC Smart Equity Fund (d/h MNC Dana Saham II), MNC Dana Syariah Barokah, MNC Dana Terproteksi VIII, MNC Dana Terproteksi IX, MNC Dana SBN, MNC Dana Terproteksi X, MNC Dana Pendapatan Tetap III, MNC Dana Terproteksi XII, MNC Dana Terproteksi XI, MNC Dana Syariah Ekuitas II, MNC Dana Syariah Terproteksi, MNC Dana Pendapatan Tetap IV, MNC Dana Terproteksi XIII, MNC Dana Terproteksi XIV, RDPT MNC Dana Multisektor I, MNC Dana Terproteksi XV, MNC Dana Terproteksi XVI, MNC Dana Terproteksi XVII, MNC Dana Pendapatan Tetap V, MNC Dana Pasar Uang, MNC Dana Pasar Uang II, MNC Dana Terproteksi XIX, MNC Dana Terproteksi XVIII, MNC Dana Terproteksi XX, MNC Dana Terproteksi SERI 21, MNC Dana Terproteksi SERI 22, MNC Dana Terproteksi SERI 23, MNC Dana Terproteksi Dolar SERI 1, MNC Dana Terproteksi SERI 27.

Pada tahun 2018, MNCAM meluncurkan produk investasi baru, MNC Dana Terproteksi SERI 26 dan MNC Dana Terproteksi SERI 28 untuk memenuhi permintaan nasabah sekaligus juga sebagai upaya diversifikasi produk.

viii. Jasa penyewaan properti melalui MDNP dan RINP

Perseroan mulai melakukan penyertaan pada entitas bidang properti pada tahun 2016. Dari 9 (sembilan) entitas anak bidang properti, yang baru beroperasi adalah MDNP dan RINP. Properti yang dimiliki MDNP dan RINP yaitu bangunan *Integrated Financial Services* yang berlokasi di Medan dan Riau. Fungsi bangunan tersebut adalah untuk disewakan ke entitas anak bidang jasa keuangan dimana sampai dengan prospektus ini diterbitkan, target penyewa masih terbatas pada kalangan internal Perseroan dan Entitas Anak. Sistem penyewaannya adalah kantor cabang entitas anak Perseroan yang berlokasi di Medan dan Riau menyewa tempat/*space* yang telah disediakan oleh MDNP dan RINP. Entitas anak tersebut kemudian membayar biaya

sewanya ke MDNP dan RINP. Sewa para entitas anak tersebut di bangunan yang disediakan oleh MDNP dan RINP berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang nantinya.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, PERSEDIAAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN.

TIDAK ADA KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMPENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA DATANG.

17. Strategi Perseroan

Adapun strategi dan rencana Perseroan sebagai upaya mempercepat pengembangan Perseroan melalui:

1. Memperkuat struktur permodalan Perseroan untuk menunjang pertumbuhan bisnis dari Entitas Anak dan mendukung akuisisi perusahaan di industri jasa keuangan yang prospektif dalam rangka menjadi *“the most integrated financial services in Indonesia”*
2. Meningkatkan imbalan hasil investasi dari penempatan modal yang telah dilakukan baik di *holding* maupun entitas anak agar menghasilkan imbalan hasil yang lebih baik kepada pemegang saham.
3. Melanjutkan sinergi antar anak antara lain melalui *cross-selling product, sharing database management, system development, business process improvement* dan *insentive program* untuk kegiatan pemasaran bersama.
4. Melanjutkan rencana digitalisasi seluruh unit usaha *financial services* melalui *enhancement* sistem baru, menyelesaikan migrasi sistem anak perusahaan ke *Private Cloud, Disaster Recovery*, sentralisasi *contact center* dan pengembangan *front end digital system* sebagai fondasi untuk membangun *multi channel distribution (omni-channel)*.
5. Integrasi dan standarisasi kantor-kantor entitas anak di beberapa kota besar.

Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan bisnis dan peningkatan kinerja Perseroan, maka uraian terkait strategi pengembangan bisnis, Perseroan beserta Entitas Anak diuraikan sebagai berikut:

Strategi dalam jasa perbankan

Untuk mencapai pertumbuhan usaha dan proses operasional yang efektif dan efisien, BMNCI telah merumuskan strategi pengembangan usaha yang dibagi menjadi 3 tahap untuk kurun waktu tertentu, yaitu *Foundation Building Stage, Focusing Business Stage* dan *Sustainability Growth Stage*.

BMNCI memulai tahap *Focusing the Business Stage*. Pada tahap ini, BMNCI akan fokus untuk meningkatkan jumlah nasabah (*customer base*) dan nilai transaksi yang fokus kepada segmen *Consumer Banking (Consumer Lending dan Retail Funding)* dan *Small Medium Enterprises*, dengan segmen Komersial dan Korporasi sebagai segmen pendukung. Pada tahap ini juga akan memperkuat sinergi dengan MNC Grup.

Strategi pengembangan usaha yang akan dijalankan Bank untuk mendukung tercapainya target bisnis ditahun 2018 antara lain:

- Penambahan modal melalui proses *rights issue* di tahun 2017 guna memperkuat struktur permodalan Bank
- Mengembangkan produk dan jasa yang ditunjang dengan aplikasi *mobile banking* sebagai *“delivery platform”* transaksi dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- Membangun dan meningkatkan jumlah nasabah (*customer base*) *funding* dan *lending* melalui sinergi yang kuat dengan perusahaan, karyawan, rekanan serta nasabah yang berada didalam dan diluar Grup MNC. BMNCI akan merumuskan secara spesifik jaringan akuisisi, rencana komunikasi pemasaran, program dan event serta jaringan aktivasi yang akan digunakan untuk mengakuisisi nasabah sesuai dengan jenis produk. BMNCI juga akan mengembangkan komunikasi pemasaran dengan menggunakan media digital seperti facebook, instagram, twitter, situs web korporasi dan lainnya, disamping media komunikasi konvensional.

- Pengembangan dan pembaharuan infrastruktur yang dapat mendukung akuisisi dan layanan nasabah (*business block*) yang fokus pada pengembangan *platform* secara *end to end process*, serta pengembangan operasional bank (*support block*) yang dilakukan melalui proses otomasi dan digitalisasi.
- Jaringan Distribusi
 - a. Penataan dan pengembangan jaringan kantor (*branch network*).
 - b. Penambahan mesin ATM, EDC Mini ATM dan *Cash Deposit Machine* (CDM)
 - c. Pengembangan jaringan elektronik seperti *mobile banking*, *internet banking*, jaringan debit serta pengembangan aplikasi berbasis teknologi digital yang telah dikembangkan selama tahun 2017.
- Memperkuat tim *Task Force* untuk penanganan kredit bermasalah dengan melakukan pemantauan, penagihan, restrukturisasi, lelang dan penyelesaian kredit bermasalah secara berkala.
- Sumber daya manusia
 - a. melakukan evaluasi struktur organisasi dan pengembangan karyawan dilakukan secara berkesinambungan agar lebih fokus mendukung sasaran bisnis Bank.
 - b. Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan dan penugasan untuk meningkatkan kompetensi, memperbaiki proses bisnis dan meningkatkan kinerja Bank.
- Meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan tata kelola yang baik

Strategi dalam jasa pembiayaan konsumen

MNCF lebih memfokuskan pada 2 jenis pembiayaan *Consumer* yaitu beraset rumah dan otomotif. Di pembiayaan KPR, Perseroan fokus di pembiayaan Rumah Bekas, KPR *Primary*, Multiguna dengan jaminan sertifikat rumah. Sedangkan di pembiayaan otomotif, berupa pembiayaan kendaraan roda empat bekas, baik *passenger* maupun *commercial* serta multiguna dengan jaminan BPKB Mobil. Untuk kedepannya, MNCF akan fokus untuk mengembangkan pembiayaan multiguna dengan jaminan BPKB mobil dan sertifikat rumah karena prospek potensi pasar yang besar.

Untuk mencapai target maka ada sejumlah strategi dan program pemasaran serta operasional yang dijalankan antara lain:

1. *Networking*
Perluasan jaringan dengan terus menambah mitra bisnis yang memiliki potensi cukup baik sehingga dapat membantu meningkatkan *volume sales*.
2. *Program Loyalty*
MNCF memberikan program kepada mitra MNCF dalam bentuk insentif dan *reward* dalam bentuk lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan penjualan secara berkesinambungan di pasar yang bersaing secara kompetitif.
3. *Digital Marketing*
Sehubungan dengan perkembangan dunia maya yang cukup pesat dalam beberapa tahun ini, MNCF sedang mengembangkan strategi *Digital Marketing* untuk *direct selling* dengan memanfaatkan media sosial, *E-commerce*, *Financial Technology* dan media periklanan digital seperti: *Google Adwords/Google Adsences*. Dengan harapan dalam jangka panjang dapat memberikan kontribusi yang cukup signifikan dan dapat meminimalisir *marketing cost acquisition* dan *handling cost* sehingga calon debitur memperoleh proses yang cepat dan penawaran yang lebih kompetitif.
MNCF mengembangkan *mobile application*, sebagai alat bantu mempercepat digitalisasi proses atas pemasaran produk yang terus dikembangkan dalam mempermudah masyarakat untuk mendapatkan solusi pembiayaan dan proses yang cepat. Kemudahan pengajuan dan kecepatan proses merupakan faktor penting dalam kompetisi di bisnis pembiayaan.
4. *Customer Focus*
Perbaikan dan evaluasi terus-menerus untuk memberikan pelayanan yang cepat dan berkualitas sehingga dapat memberikan kepuasan terhadap pelanggan dengan mengembangkan dan memperbaiki berbagai proses kerja dan digitalisasi program.
5. *Cross Selling Product*
Perseroan tergabung dalam sebuah group besar dengan beberapa bisnis unit yang masing-masing memiliki database *customer*. Perusahaan saat ini bekerjasama dengan beberapa bisnis unit untuk melakukan *Cross Selling Product*. Debitur akan diberikan alternatif produk dari unit bisnis lain sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat mempermudah dan melengkapi kebutuhan *customer* dengan berbagai alternatif produk yang tersedia dengan baik.

6. **Perluasan Jaringan *Payment Point***
Dalam rangka mempermudah dan memberikan kenyamanan kepada debitur melakukan pembayaran angsuran, maka MNCF terus mengembangkan kerjasama dengan beberapa Bank, Kantor Pos, Alfamart, Indomart, Pegadaian, dan lain-lain.
7. **Perluasan Kerjasama Auto-Debet dengan Bank**
Memperluas kerjasama dengan bank rekanan (MNC Bank, Bank Mandiri, BNI, dan lain-lain) untuk memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran secara Auto-Debet.
8. ***Training* dan Evaluasi**
Program *training* untuk meningkatkan *skill* dan kompetensi sumber daya manusia, terus melakukan evaluasi secara berkala untuk perbaikan berkesinambungan.

Strategi dalam jasa sewa guna usaha

MNCGU menargetkan pembiayaan korporat dengan nilai pembiayaan yang lebih besar, sehingga mampu meningkatkan *average ticket size* pembiayaan di 2018. MNCGU juga akan melakukan kerjasama strategis dengan *supplier* alat berat, mesin, alat kesehatan dan truck sehingga mampu meningkatkan pembiayaan unit baru. Skema pembiayaan baru dengan konsep syariah Qardh dan Wakalah bil Ujrah (Anjak Piutang Syariah). Skema ini dijalankan untuk *memback-up* pembiayaan anjak piutang BPJS Kesehatan kepada Rumah Sakit peserta. Pembiayaan ini di awal akan menargetkan Rumah Sakit peserta BPJS di area Jabodetabek dengan potensi pembiayaan hingga Rp50 miliar/bulan (*revolving plafond*).

MNCGU memiliki strategi untuk mengembangkan usahanya antara lain:

1. **Peningkatan kantor selain kantor cabang (*point of sales*) menjadi kantor cabang**
Dalam rangka meningkatkan dan mendukung rencana bisnis Perseroan dimasa yang akan datang, serta mempertimbangkan peluang yang masih cukup besar disektor pembiayaan khususnya pembiayaan barang modal yang produktif, maka Perseroan merencanakan untuk membuka beberapa jaringan kantor pelayanan baik berupa kantor representatif maupun kantor cabang. Pada tahun 2017, Perseroan telah membuka jaringan kantor di daerah Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan.
2. **Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Operasional**
Perseroan juga akan melakukan penyempurnaan atas sistem dan prosedur operasional yang telah ada agar tercapai efisiensi dan efektifitas kerja yang lebih baik dimasa yang akan datang serta produktivitas karyawan dapat ditingkatkan.
3. **Pengembangan Teknologi**
Sejalan dengan strategi Perseroan untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen, Perseroan juga melakukan perubahan sistem teknologi informasi yang menyeluruh dan terintegrasi meliputi *software* dan *hardware* untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.
4. **Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia**
Perseroan menyadari bahwa kualitas pelayanan sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia. Perseroan menyadari arti penting sumber daya manusia sebagai aset yang berharga dan sebagai penggerak operasional Perseroan, maka sudah menjadi komitmen Perseroan secara berkesinambungan meningkatkan kemampuan dan kualitas karyawan melalui program pelatihan dan peningkatan kesejahteraan karyawan.
5. **Sinergi dengan Entitas Anak MNC Group**
Produk-produk gabungan dengan konsep "*one stop service*", perluasan jaringan dan potensi usaha berbasis konsumen dari MNC Group akan menciptakan sinergi usaha yang strategis.

Adapun strategi pemasaran yang diterapkan oleh MNCGU adalah sebagai berikut:

1. Membuka jaringan distribusi baru pada Daerah Pasar Utama yaitu Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Palembang, dan Medan.
2. Mengembangkan produk peralatan medis sebagai strategi diversifikasi produk yang sejalan dengan *brand association*.
3. Berpartisipasi dalam berbagai pameran perdagangan seperti *Machinery Exhibition* dan *Hospital Expo*.
4. Mengembangkan Jaringan bisnis.
5. Membentuk Unit Usaha Syariah.

Strategi dalam jasa asuransi umum

MNCAI memfokuskan strategi penjualan pada pengembangan saluran penjualan melalui *leasing* dan *dealer*, mengembangkan pemasaran di Internal MNC Group, mengembangkan bisnis melalui kemitraan *Co- Insurance*

yang potensial, mengembangkan penjualan asuransi perjalanan, optimalisasi skema kerjasama dengan *dealer-dealer* mitra usaha, melakukan penjajakan dan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan berbagai bank dan *multifinance*.

Untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya, secara umum, MNCAI telah mempersiapkan strategi pemasaran produk dan jasanya. Pada tahun 2016, strategi pemasaran produk asuransi MNCAI difokuskan pada konsep pemasaran langsung (*direct marketing*) yang ditunjang dengan kegiatan pemasaran yang tidak langsung (*indirect marketing*). Strategi pemasaran MNCAI tersebut dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemasaran Langsung (*Direct Marketing*)

Konsep pemasaran langsung merupakan upaya perusahaan dalam hal kegiatan pemasaran yang memberikan dampak langsung kepada nasabah. Konsep pemasaran ini diberlakukan untuk produk-produk unggulan MNCAI yaitu MNC *Total Care* untuk produk asuransi kendaraan bermotor, MNC *Family Care* untuk produk asuransi kecelakaan diri untuk keluarga, MNC *Travel Express* untuk asuransi perjalanan dan MNC *Home Express* untuk asuransi rumah tinggal. Dalam melaksanakan program *direct marketing* tersebut, langkah yang ditempuh MNCAI adalah sebagai berikut.

- Mengembangkan *system web base* MNCAI-net untuk pembelian asuransi secara *digital* melalui *website* www.mnc-insurance.com
- Melakukan kerjasama dengan tim *product and services development* serta tim *marketing* terkait program yang akan dilaksanakan
- Meningkatkan peran kantor cabang, kantor perwakilan *marketing* khususnya bagian MNC *Care (customer service)* sebagai sarana utama penjualan dan informasi produk kepada calon nasabah

2. Pemasaran Tidak Langsung

Kegiatan pemasaran tidak langsung dilakukan melalui media masa seperti televisi, radio, surat kabar serta kegiatan media sosial melalui akun resmi MNCAI di Facebook, Twitter dan Instagram. Informasi yang disampaikan melalui media massa tersebut mencakup produk yang dipasarkan, saluran distribusi pemasaran, program promo pemasaran langsung, serta laporan keuangan, dimana hal tersebut bertujuan untuk memperluas *brand image* perusahaan pada umumnya dan *branding* produk yang dipasarkan pada khususnya. Kegiatan media sosial dilakukan dengan metode informasi seputar tips yang berhubungan dengan produk yang dipasarkan serta sayembara berhadiah yang bertujuan untuk menciptakan interaksi langsung dua arah dengan calon nasabah maupun nasabah MNCAI melalui *platform social media*, sehingga perusahaan menjadi lebih relevan dan dekat dengan nasabah maupun masyarakat luas.

Dalam melaksanakan *indirect marketing* tersebut, langkah yang ditempuh MNCAI adalah sebagai berikut:

- Menerapkan standarisasi atas semua materi pemasaran MNCAI, antara lain melalui *marketing collateral* yang termasuk pembuatan brosur, *flyer*, *banner*, poster, umbul-umbul, serta *display ad*. Standarisasi berperan penting dalam pengenalan *branding (branding recognition)* MNCAI agar dapat dikenali dengan mudah oleh calon nasabah maupun nasabah. Standarisasi tersebut diterapkan untuk semua tampilan di luar dan di dalam jaringan kantor MNCAI.
- Mendesain penawaran dan proposisi nilai yang lebih menarik dan tepat sasaran terhadap segmen-segmen nasabah yang ingin ditargetkan. Upaya ini dilakukan dengan menganalisa data nasabah untuk menentukan jenis-jenis program yang lebih relevan, menarik, serta dapat menjawab kebutuhan dan keinginan calon nasabah maupun nasabah MNCAI.
- MNCAI juga memberikan layanan mudah untuk klaim bagi nasabah dalam bentuk mobile application yang diberi nama MNCi Apps. Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan kesetiaan nasabah dalam memilih MNCAI sebagai perusahaan jasa asuransi umum yang dapat diandalkan untuk kebutuhan perlindungan nasabah.
- Mengakomodasi kemudahan akses data bagi para mitra MNCAI, kami juga memberikan layanan mobile application untuk para mitra kami dengan nama MNCAI Agent.

Strategi dalam jasa asuransi jiwa

MNCL berfokus pada produk-produk unggulan dengan kategori *Personal Accident, Group Health, Traditional* untuk individu melalui *channel mix Agency & Non Agency*. MNCL juga akan mengembangkan fitur layanan berbasis *online* atau digital sekaligus memegang peranan penting dalam percepatan penetrasi pasar untuk produk-produk variatif dan kompetitif yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Strategi pemasaran MNCL dilakukan melalui jalur pemasaran *agency*, *bancassurance*, *employee benefit* dan juga melalui aplikasi *online system*. Dua solusi utama yang ditawarkan MNCL adalah:

1. *Wealth Protection*
Merupakan asuransi kesehatan dan medis, asuransi kecelakaan dan penyakit kritis, serta asuransi seumur hidup yang diperuntukkan bagi individu dan ataupun kelompok.
2. *Wealth accumulation*
Merupakan solusi untuk pendidikan, perencanaan, pensiun, tabungan dan investasi berdasarkan pada profil risiko dari klien, dalam bentuk perlindungan keuangan dan investasi dengan hasil yang menarik ditambah unit *link* pendanaan.

Di samping itu, Era *digital* telah merambah ke industri *Financial* dengan istilah *Fintech* atau *Financial Technology*, dimana setiap perusahaan jasa keuangan terus berlomba menyediakan layanan-layanan inovatif berbasis digital. Untuk itu MNCL pun turut mengembangkan fitur-fitur layanan digital nya, salah satunya adalah *iLucky* dan *eVoucher* yang merupakan aplikasi online untuk memudahkan nasabah membeli Polis Asuransi secara instan, tanpa proses yang panjang atau menunggu berhari-hari untuk penerbitan Polis. Nasabah dapat langsung menerima Polis di hari yang sama. Selain itu juga masih ada beberapa fitur layanan digital lainnya seperti:

1. *e-healthcare*, aplikasi yang dibuat khusus untuk peserta asuransi karyawan dapat mengetahui *benefit* asuransinya, proses klaim dan sebagainya.
2. *e-AJK*, yang merupakan aplikasi untuk mitra bank dalam permohonan asuransi jiwa kredit bagi nasabahnya.
3. *e-Agency*, aplikasi untuk para agent mendapat informasi terkini dari perusahaan.

Strategi dalam jasa penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek

Beberapa strategi yang komprehensif dan terencana menjadi kunci Perseroan dalam memenangkan kompetisi di industri:

1. Memperluas jaringan berupa point of sales di berbagai wilayah di Indonesia.
Menyadari bahwa perusahaan sekuritas perlu berperan aktif dalam meningkatkan pengenalan pasar modal bagi berbagai kalangan di berbagai wilayah, MNCS terus memperluas *point of sales*, terutama melalui peresmian Galeri Investasi baik konvensional maupun syariah di perguruan tinggi, sehingga dapat terus mendekatkan diri dengan masyarakat.
2. Menggelar kegiatan edukasi pasar modal bagi calon nasabah.
Seminar literasi keuangan dan pasar modal diselenggarakan bagi calon nasabah sehingga memperoleh pengenalan pasar modal dan pada akhirnya dapat diakuisisi sebagai nasabah. Kegiatan edukasi pasar modal diselenggarakan MNCS bukan hanya terbatas di kalangan usia dewasa, tetapi mulai masuk ke kalangan muda melalui sekolah-sekolah. Serta memperluas penetrasi produk MNC GEMESIN.
3. Penguatan kegiatan perantara pedagang efek hutang melalui penjualan Surat Berharga Negara.
Pada awal tahun 2018, MNCS resmi ditunjuk sebagai salah satu dari dua perusahaan sekuritas yang menjadi agen penjual Surat Berharga Negara yaitu Sukuk Ritel Tahun 2018 seri SR-010. Melalui jaringannya yang luas, MNCS melakukan penjualan hingga ke pelosok daerah. Divisi *Fixed Income* juga dengan aktif mengikuti lelang sebagai agen penjual Surat Berharga Negara setiap tahunnya.
4. Penguatan kegiatan *Investment Banking* melalui jasa penjamin emisi dalam transaksi *Initial Public Offering* (IPO) saham maupun jasa penjaminan dan *arranger* dalam transaksi obligasi dan Medium Term Notes (MTN), serta jasa-jasa *financial advisory*. Setelah sukses menjadi penjamin pelaksana emisi dalam penerbitan obligasi dan MTN beberapa tahun terakhir, MNCS juga mulai aktif berperan sebagai penjamin pelaksana emisi dalam transaksi IPO saham setelah sukses membantu PT Hartadinata Abadi Tbk melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017 lalu.
5. Pengembangan *platform* aplikasi baru pendukung transaksi saham nasabah.
Perseroan menyadari bahwa perkembangan teknologi harus dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan nasabah dalam bertransaksi saham, sehingga MNCS akan meluncurkan beberapa aplikasi dengan fitur canggih untuk membantu nasabah memaksimalkan keuntungan.
6. Meningkatkan interaksi dengan masyarakat melalui *social media*.
Edukasi dan inklusi pasar modal dapat menjangkau siapa pun dan dimana pun melalui keberadaan *social media*. Melalui *content* yang menarik dan bermanfaat, serta tentunya di-update secara berkala, *social media* MNCS berhasil menarik minat calon nasabah. Secara peringkat per Desember 2017, Facebook MNCS berhasil menempati peringkat teratas di antara perusahaan sekuritas. Instagram MNCS berhasil bertengger dalam peringkat 3 besar, sementara Twitter MNCS masuk dalam peringkat 5 besar.

Strategi dalam jasa pengelolaan investasi

MNCAM akan fokus untuk memperluas jaringan distribusi melalui perbankan, *business partner* dan mengoptimalkan pemasaran dan penjualan produk. Produk tersebut antara lain konvensional yang berfokus pada jenis pasar uang, pendapatan tetap dan ekuitas, termasuk reksa dana yang berbasis syariah, reksa dana terstruktur yang terdiri dari reksa dana terproteksi, dan penyertaan terbatas yang akan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah (jika ada), reksa dana yang unit penyertaannya dapat diperdagangkan di bursa efek yaitu ETF, dan Kontrak Pengelolaan Dana (KPD).

Untuk dapat meningkatkan pangsa pasarnya, secara umum, MNCAM telah mempersiapkan strategi pemasaran produk dan jasanya. Strategi pemasaran MNCAM diuraikan sebagai berikut:

1. Pemasaran produk MNCAM di tahun 2018 telah didukung oleh 6 kantor cabang yang berlokasi di Jakarta, Bogor, Bandung, Surabaya, Pekanbaru dan Medan.
2. Bekerjasama dengan pihak lain untuk memperluas jaringan distribusi, antara lain:
 - Divisi *Wealth Management* Bank BRI (salah satu bank milik negara terbesar)
 - *IPOP Fund (Platform on-line trading reksa dana pertama di Indonesia)*
 - *POEMS (Phillip Online Electronic Mart Systems)*
 - BAREKSA (Reksa Dana Online)
 - MNC Sekuritas
3. Saat ini mengelola produk unit link MNC Life yang bernama MNC Link.
4. Skema Auto debit dengan Bank BCA (bank swasta terbesar) dan Bank Mandiri.

Strategi dalam jasa penyewaan properti

Bagi entitas anak bidang penyewaan properti yang sudah beroperasi seperti MDNP dan RINP, berupaya untuk meningkatkan tingkat okupansi untuk tenan-tenan (penyewa) yang berasal dari entitas anak di bidang jasa keuangan. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, posisi tingkat okupansi properti yang disewakan milik MDNP dan RINP yaitu masing-masing sebesar 100%. Sedangkan, entitas anak bidang penyewaan properti yang belum beroperasi yaitu BDNP, JKNP, MKNP, PBNP, SBNP, SGNP dan YKNP, strategi yang diterapkan adalah mencari lahan/tanah dan gedung yang sesuai untuk pengembangan kantor cabang *Integrated Financial Services* dengan sumber penyewa berasal dari entitas anak bidang jasa keuangan yang membuka kantor cabangnya di kota Bandung, Jakarta, Makassar, Palembang, Surabaya, Semarang dan Yogyakarta.

18. Penghargaan

Penghargaan yang pernah diterima Perseroan dan Entitas Anak dalam kurun waktu 2015-2017 adalah sebagai berikut:

No	Penghargaan Tahun 2017	Kategori	Penyelenggara	Tanggal
PERSEROAN				
1	-			
BMNCI				
2	TOP CSR	Improvement	BusinessNews	5 April 2017
3	TOP CSR	Top Leader on Commitment	BusinessNews	5 April 2017
4	Digital Popular Brand	Yang Pertama Di Indonesia	Tras n Co Research	8 Juni 2017
5	Indonesia Digital Innovation Award fo Financial Industry	Digital Innovation untuk Kategori Bank BUKU II	Warta Ekonomi	16 Juni 2017
6	Anugrah Perbankan Indonesia	Best Bank Kategori Bank BUKU II	Economic Review & Perbanas Institute	23 Agustus 2017
7	Anugrah Perbankan Indonesia	Best CEO	Economic Review & Perbanas Institute	23 Agustus 2017
8	Property & Bank Award	Bank dengan Pertumbuhan KPR Terbaik	Aliansi Jurnalis Property	9 November 2017
9	Indonesia Best Banking Brand	Good Financial Performance untuk Private Foreign Exchange National Bank	Warta Ekonomi	29 November 2017
10	Indonesia Corporate Reputation Award	Top 6 Corporate Reputation Untuk Bank BUKU II	Warta Ekonomi	14 Desember 2017
MNCS				
11	Top Akuisisi Rekening Dana Nasabah (RDN)	Periode September – Desember 2016	Bank Central Asia (BCA)	19 Januari 2016

12	Mitra Galeri Investasi BEI Teraktif	Kategori Aktivitas Edukasi dan Pemerataan Informasi	PT Bursa Efek Indonesia	31 Januari 2017
13	Rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)	Kategori Perusahaan Sekuritas yang Membuka Cabang Terbanyak dalam Setahun yaitu 44 cabang baru sepanjang tahun 2016	Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)	3 Februari 2017
14	Peringkat II Digital Brand	Kategori Perusahaan Sekuritas	Majalah Infobank	30 Maret 2017
15	Asia-Pacific Stevie Awards 2017	Innovation in Customer Service Management, Planning & Practice – Financial Services Industries	Asia-Pacific Stevie Awards	2 Juni 2017
16	Galeri Investasi Terbaik 2017 (Galeri Investasi BEI – MNC Sekuritas STIE Kesatuan Bogor)	Kategori Penambahan Jumlah Rekening Efek Terbanyak	PT Bursa Efek Indonesia	15 November 2017

MNCAM

17	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik 2017 – Periode 1 tahun	Reksa Dana Pendapatan Tetap AUM > Rp 10 M – Rp 250 M	Majalah Investor-Infovesta	16 Mar 2017
18	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik 2017 – Periode 3 tahun	Reksa Dana Pendapatan Tetap AUM > Rp 10 M – Rp 250 M	Majalah Investor-Infovesta	16 Mar 2017
19	Best Islamic Fixed Income Fund 2017	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah	APRDI-Bloomberg	25 Apr 2017
20	Best Equity Fund	Reksa Dana Saham Rp 90 M <= AUM <= Rp 510 M	APRDI-Bloomberg	25 Apr 2017
21	Best Islamic Fixed Income Fund 2014 – 2016	Reksa Dana pendapatan Tetap Syariah	APRDI-Bloomberg	25 Apr 2017
22	Best Fixed Income Fund 2014 – 2016	Reksa Dana Pendapatan Tetap Rp 60 M = AUM = Rp 200 M	APRDI-Bloomberg	25 Apr 2017
23	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik 2017 – Periode 1 tahun	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah	Majalah Investor-Infovesta	22 Aug 2017
24	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik 2017 – Periode 3 tahun	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah	Majalah Investor-Infovesta	22 Aug 2017
25	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik 2017 – Periode 5 tahun	Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah	Majalah Investor-Infovesta	22 Aug 2017
26	Silver Champion of Best Fixed Income Fund - Lifetime Achievement 10 Years	Reksa Dana Pendapatan Tetap	Bareksa-Kontan	27 Sept 2017
27	Gold Champion of Best Money Market Fund - 3 Years	Reksa Dana Pasar Uang AUM Rp 25 M – Rp 500 M	Bareksa-Kontan	27 Sept 2017
28	Silver Champion of Best Fixed Income Fund - 1 Year	Reksa Dana Pendapatan Tetap AUM Rp 60 M – Rp 220 M	Bareksa-Kontan	27 Sept 2017
29	Silver Champion of Best Fixed Income Fund - 3 Years	Reksa Dana Pendapatan Tetap AUM Rp 75 M – Rp 200 M	Bareksa-Kontan	27 Sept 2017

MNCAI

30	3rd Best Insurance General Insurance 2017	Equitas 150-250 Miliar Rupiah	Majalah Media Asuransi	7 Juni 2017
31	Asuransi yang berpredikat “Sangat Bagus”	Kategori: Asuransi Umum Berpremi Bruto 250 Miliar sampai dengan di bawah 1 Triliun Rupiah	Majalah Infobank	20 Juli 2017

MNCGU

32	Perusahaan multifinance dengan predikat sangat bagus	Perusahaan pembiayaan dengan aset Rp500 miliar – Rp1 triliun	Infobank	14 September 2017
----	--	--	----------	-------------------

MNCL

33	Digital Brand Award	PT MNC Life Assurance meraih Peringkat Kedua Kategori “Digital Brand Institusi Keuangan – Perusahaan Asuransi Jiwa”	Majalah Infobank	30 Maret 2017
34	Insurance Consumer Choice Award 2017 di Jakarta	Top 5 Best Claim Service for Life Insurance Company	Majalah Warta Ekonomi	27 September 2017

MNCF

35	Perusahaan Pembiayaan dengan aset 1-5 Triliun	Peringkat “Bagus”	Majalah Infobank	Agustus 2017
----	---	-------------------	------------------	--------------

No	Penghargaan Tahun 2016	Kategori	Penyelenggara	Tanggal
----	------------------------	----------	---------------	---------

PERSEROAN

1	IDC's Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2017	Asia/Pacific's Leader in Risk Management Award in 2016	IDC Financial Insights	
BMNCI				
2	Indonesia Property and Bank Award (IPBA) 2016	Faithful and Friendly Financial Banking Partner	Aliansi Jurnalis Properti dan Keuangan (APJK)	18 Agustus 2016
MNCS				
3	Rekor MURI - "Penciptaan Investor Saham Terbanyak dalam Satu Perguruan Tinggi"	Peresmian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia	Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)	10 November
MNCAM				
4	Investor-Infovesta Best Mutual Fund Awards 2016	MNC Dana Kombinasi sebagai Reksa Dana Campuran Terbaik 2016 – Periode 5 Tahun dengan Tipe Moderat	Majalah Investor-Infovesta	3 Maret 2016
5	Best Syariah Awards 2016	MNC Dana Syariah sebagai Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik 2016 – Periode 5 tahun	Majalah Investor-Infovesta	10 Agustus 2016
6	Best Syariah Awards 2016	MNC Dana Syariah sebagai Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik 2016 – Periode 3 tahun	Majalah Investor	10 Agustus 2016
7	Best Syariah Awards 2016	MNC Dana Syariah sebagai Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik 2016 – Periode 1 tahun	Majalah Investor	10 Agustus 2016
MNCAI				
8	-			
MNCL				
9	1 st infobank Unit Link Awards 2016	MNC Life Assurance Aman IDR sebagai Unit Link yang berpredikat SANGAT BAGUS atas Kinerja Unit Link jenis Pendapatan Tetap Tahun 2015	Majalah Infobank	26 Februari 2016
10	1 st infobank Unit Link Awards 2016	MNC Life Assurance Aman IDR sebagai Unit Link yang berpredikat SANGAT BAGUS atas Kinerja Unit Link jenis Pendapatan Tetap Tahun 2015	Majalah Infobank	26 Februari 2016
11	1 st infobank Unit Link Awards 2016	MNC Life Assurance Aman IDR sebagai Unit Link yang berpredikat SANGAT BAGUS atas Kinerja Unit Link jenis Pendapatan Tetap Tahun 2015	Majalah Infobank	26 Februari 2016
12	5th Infobank Digital Brand of the Year 2016	Peringkat II <i>Digital Brand</i> Asuransi Jiwa	Majalah Infobank	5 April 2016
13	29th Top Agent Awards AAJI 2016	MNC Life Raih Tujuh Penghargaan Pada <i>Top Agent Award</i> (TAA) 2016 di Medan	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	11 Agustus 2016
MNCGU				
14	-			
MNCF				
15	12th Infobank Multifinance Awards 2016	Multifinance - Predikat Sangat Bagus	Majalah Infobank	29 September 2016

No	Penghargaan Tahun 2015	Kategori	Penyelenggara	Tanggal
PERSEROAN				
1	IDC's Financial Insights Innovation Awards (FIIA) 2017	Asia/Pacific's Leader in Risk Management Award in 2016	IDC Financial Insights	
BMNCI				
2	Indonesia Property and Bank Award (IPBA) 2016	Faithful and Friendly Financial Banking Partner	Aliansi Jurnalis Properti dan Keuangan (APJK)	18 Agustus 2016
MNCS				
3	Rekor MURI - "Penciptaan Investor Saham Terbanyak dalam Satu Perguruan Tinggi"	Peresmian Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia	Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)	10 November
4	Rekor MURI "Perusahaan Sekuritas yang Membuka Cabang Terbanyak dalam Setahun" di tahun 2016	Penghargaan Rekor MURI untuk MNC Securities	Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI)	
MNCAM				

5	Investor-Infovesta Best Mutual Fund Awards 2015	MNC Dana Ekuitas sebagai Reksa Dana Terbaik 2015 – Periode 5 Tahun untu Asset di Atas Rp 100 Miliar -1 Triliun	Majalah Investor-Infovesta	4 Maret 2015
6	Investor-Infovesta Best Mutual Fund Award 2015	MNC Dana Kombinasi sebagai Reksa Dana Campuran Terbaik 2015- Tipe Moderat Periode 5 tahun	Majalah Investor-Infovesta	4 Maret 2015
7	Investor-Infovesta Best Mutual Fund Award 2015	MNC Dana Kombinasi sebagai Reksa Dana Campuran Terbaik 2015 Tipe Moderat Periode 3 tahun	APRDI-Bloomberg	4 Maret 2015
8	Best Syariah 2015	MNC Dana Syariah memperoleh penghargaan sebagai Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik 2015 – Periode 5 tahun.	Majalah Investor	19 Agustus 2015
9	Best Syariah 2015	MNC Dana Syariah memperoleh penghargaan sebagai Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik 2015 – Periode 3 tahun.	Majalah Investor	19 Agustus 2015
10	Best Syariah 2015	MNC Dana Syariah memperoleh penghargaan sebagai Reksa Dana Pendapatan Tetap Syariah Terbaik 2015 – Periode 1 tahun.	Majalah Investor	19 Agustus 2015
MNCAI				
11	-			
MNCL				
14	Best Life Insurance 2015	MNC Life Assurance sebagai Best Life Insurance 2015 untuk perusahaan asuransi jiwa dengan ekuitas Rp 100-200 miliar	Majalah Media Asuransi	9 Juni 2015
15	1 st infobank Unit Link Awards 2016	MNC Life sebagai perusahaan asuransi jiwa dengan predikat “Sangat Bagus” pada kategori premi bruto Rp 250 miliar sampai dengan Rp 1 triliun	Majalah Infobank	3 Juli 2015
16	Top Agent Award Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (TAA AAJI) ke-28	agen penjual MNC Life meraih beberapa juara yakni Juara II Agent Top Premium, Juara IV Agent Top Policy dan Juara IV Top Agent of The Year.	Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)	20 Agustus 2015
MNCGU				
17	-			
MNCF				
18	Dukungan dalam Pembangunan dan Pengembangan Pasar Pembiayaan Sekunder Perumahan	MNC Finance memperoleh penghargaan atas dukungan MNC Finance dalam membangun mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan	PT Sarana Multigriya Finansial	18 Juli 2015
19	Infobank Multifinance Awards 2015	MNC Finance memperoleh Piala penghargaan atas Kinerja Keuangan “Sangat Bagus” 2010 – 2014	Majalah Infobank	29 September 2015
20	Piagam Multifinance	MNC Finance memperoleh piagam Multifinance Berpredikat “Sangat Bagus” atas Kinerja Keuangan selama Tahun 2014.	Majalah Infobank	29 September 2015

19. Prospek Usaha

Prospek Usaha di Bidang Perbankan

Pertumbuhan ekonomi diperkirakan masih akan positif pada 2018. Momen pemilihan kepala daerah (pilkada) dan pergerakan harga komoditas akan menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 diperkirakan pertumbuhan berkisar 5,1%-5,5%. Perbaikan ini ditopang dari faktor eksternal dan internal. Dimana dari sisi eksternal, perkiraan membaiknya kinerja ekonomi global diharapkan menjadi faktor kondusif yang mendorong penguatan ekonomi nasional. Dari sisi internal, terjaganya laju inflasi serta berbagai kebijakan yang telah diluncurkan diharapkan dapat menjadi faktor positif yang dapat mendorong penguatan permintaan domestik. Sedangkan untuk pertumbuhan intermediasi perbankan diproyeksikan tumbuh dikisaran 11-12%.

Dalam paparannya pada Kamis, 2 November 2017, Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, OJK memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2018 berkisar 5,2%-5,3% dengan inflasi 4%. Dari dua faktor tersebut, OJK memberi arahan pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) perbankan berkisar 10%-12%

Selain itu, pertumbuhan ekonomi sebagian besar didukung oleh konsumsi dan investasi sejalan dengan meningkatnya realisasi pengeluaran fiskal oleh pemerintah serta meningkatnya penyaluran kredit oleh perbankan maupun percepatan realisasi belanja pemerintah untuk mengimplementasikan proyek-proyek infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Akses Usaha Kecil dan Menengah terhadap permodalan dari perbankan akan semakin terbuka seiring kebijakan pemerintahan yang mendorong pertumbuhan segmen usaha ini karena terbukti mampu bertahan dalam kondisi krisis. Dengan kondisi ini, kredit dan dana pihak ketiga tetap mempunyai potensi untuk bertumbuh dan mampu menghasilkan pertumbuhan laba yang diharapkan.

Populasi masyarakat menengah yang diproyeksikan terus meningkat merupakan target pasar utama BMNCI yang fokus pada bisnis *consumer* dan *retail* serta didukung segmen korporasi dan komersial. Sejalan dengan perbaikan ekonomi, tingkat pendapatan masyarakat akan meningkat. Oleh karena itu akan mendorong peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa.

BMNCI berpandangan bahwa industri perbankan nasional ke depan tetap akan tumbuh yang didukung oleh pertumbuhan jumlah penduduk dengan usia produktif dan meningkatnya jumlah usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses permodalan dari perbankan.

Memasuki tahun 2018 merupakan tahun *focusing business* sesuai dengan program transformasi BMNCI yang telah dicanangkan. Untuk lebih meningkatkan penetrasi pasar utamanya di segmen *consumer*, BMNCI terus mengembangkan sejumlah produk unggulan yang didukung oleh teknologi berbasis digital.

Prospek Usaha di Bidang Pembiayaan Konsumen

Pertumbuhan piutang pembiayaan diperkirakan berada pada kisaran target pertumbuhan mencapai 7—10% hingga akhir 2017.

Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang ikhtisar kinerja perusahaan pembiayaan per Mei 2017 yang dikutip dari surat kabar Bisnis Indonesia menunjukkan piutang pembiayaan mencapai Rp401,8 triliun atau tumbuh 9,2% jika dibandingkan piutang pembiayaan pada periode yang sama tahun lalu yang mencapai Rp367,8 triliun.

Permintaan terhadap mobil dan rumah akan terus menguat karena membesarnya penduduk yang berada di golongan ekonomi berpendapatan kelas menengah yang mewakili lebih dari 50% penduduk di Indonesia. MNCF berfokus pada pembiayaan untuk *consumer* dengan mayoritas portofolio pembiayaan untuk rumah (*mortgage*) dan mobil bekas (*used car*). Segmen pembiayaan tersebut belum tersentuh dan memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi.

Prospek Usaha di Bidang Jasa Sewa Guna Usaha

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai secara umum pertumbuhan industri pembiayaan pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang lebih baik dibandingkan dengan kondisi tahun 2015 dan 2016.

Berdasarkan data OJK bulan September 2017/kuartal III 2017, total aset industri pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 7,73% (yoy) menjadi Rp468,11 triliun. Pada September 2016, total aset industri perusahaan pembiayaan tercatat Rp434,52 triliun, turun 2,19% dibandingkan periode sama tahun 2015 yang mencapai Rp444,27 triliun.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IGKNB) OJK Riswinandi mengatakan, piutang pembiayaan per September 2017 mencapai Rp410,84 triliun atau meningkat sebesar 8,63% (yoy) dengan kualitas piutang pembiayaan yang masih terjaga dengan baik.

Perkembangan industri pembiayaan di Indonesia dalam kurun 5 tahun mendatang diproyeksikan bertumbuh seiring dengan perkembangan dunia perbankan dan ritel. Dengan daya beli yang meningkat dari masyarakat atau pemerintah. Berdasarkan proyeksi dari OJK pada piutang pembiayaan aktual dan proyeksi pada 2017-2020, peningkatan pembiayaan masih diharapkan untuk meningkat dengan proyeksi pertumbuhan 5% sampai dengan tahun 2020.

Pertumbuhan pembiayaan ini juga didukung oleh *pull factor* seperti kenaikan belanja pemerintah pada sektor konstruksi (lebih dari 15% dari RAPBN 2017). Pada sektor pembiayaan peralatan kesehatan, industri kesehatan terus bertumbuh dengan total pengeluaran yang tumbuh sebanyak 222% selama 8 tahun terakhir.

Dalam riset World Bank, pertumbuhan penduduk sebanyak 7 juta yang berpenghasilan menengah akan terus menjadi dasar perkembangan pasar untuk produk konstruksi maupun kesehatan. Untuk itu, prospek masa depan MNCGU akan sangat menjanjikan.

MNCGU berfokus pada klien korporasi dengan berkonsentrasi pada pembiayaan aset-aset seperti alat berat, mesin dan alat kesehatan untuk kalangan bisnis di Indonesia. Strategi MNCGU melalui diversifikasi produk pembiayaan di segmen alat kesehatan yang belum banyak pemainnya merupakan salah satu cara untuk meraih potensi pasar dalam menambah segmen pembiayaan. Perusahaan pembiayaan menargetkan pertumbuhan aset Rp 1 triliun pada 2018.

Prospek Usaha di Bidang Asuransi

Pertumbuhan bisnis asuransi umum diyakini bisa lebih baik ketimbang capaian tahun ini. Dua lini bisnis utama, yakni asuransi properti dan asuransi kendaraan juga diramal masih akan jadi motor yang mendorong kinerja industri.

Menurut Dadang Sukresna, Ketua Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) kedua lini bisnis ini masih punya prospek pertumbuhan yang tinggi di tahun ini. Misalnya asuransi properti akan terdorong oleh telah selesainya sejumlah proyek pembangunan baik dari pemerintah maupun swasta.

Secara total, AAUI sendiri memperkirakan pertumbuhan premi di tahun 2018 bisa berada di kisaran 9% hingga 10% dari proyeksi premi sepanjang 2017 ini yang sebanyak Rp66,2 triliun.

Industri asuransi jiwa di Indonesia merupakan salah satu industri yang sangat menarik karena prospek pertumbuhan yang kuat yang didasari oleh rendahnya tingkat penetrasi dan masih tingginya jumlah penduduk berusia muda.

MNCL unit asuransi jiwa milik Perseroan merupakan hasil akuisisi terhadap *UOB Life* pada tahun 2010 dan saat ini menawarkan beraneka ragam perlindungan asuransi yang luas yang mencakup asuransi tradisional yang terdiri dari asuransi jiwa dan kesehatan serta produk yang terkait antara perlindungan asuransi dan investasi, seperti *unit linked* yang bekerja sama dengan MNCAM.

MNCL telah bertumbuh pesat dan merupakan salah satu unit bisnis yang tercepat pertumbuhannya di industrinya melalui penambahan yang pesat terhadap jumlah *sales force*, *bank assurances*, pembukaan kantor cabang di seluruh Indonesia dan penawaran produk-produk yang inovatif.

Industri asuransi umum di Indonesia menawarkan potensi pertumbuhan yang serupa dengan industri asuransi jiwa karena tingkat penetrasi yang rendah dan pertumbuhan yang kuat di sektor konsumen. MNCAI merupakan hasil akuisisi terhadap sebuah perusahaan asuransi umum yang berbasis *lokal* pada tahun 2011. Sejak akuisisi tersebut, pertumbuhan premi bruto MNCAI telah bertumbuh jauh lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan pada industri asuransi umum melalui penawaran produk asuransi umum yang beraneka ragam yang inovatif dengan berfokus pada klien ritel dan korporasi.

Prospek Usaha di Bidang Jasa Penjamin Emisi Efek dan Pedagang Perantara Efek

Pasar saham Indonesia terus melanjutkan momentum peningkatan terbaiknya, dimana IHSG berhasil ditutup menguat sebesar 19,99% YoY pada 29 Desember 2017 dengan mencatatkan rekor level tertinggi yaitu level 6.355 (*all time high*). Nilai kapitalisasi bursa saham Indonesia juga bertumbuh menjadi Rp7,073 triliun. Secara sektoral, sektor keuangan menjadi pendorong utama performa IHSG sepanjang 2017 dengan pertumbuhan sebesar 40,89%, diikuti oleh sektor industri dasar dengan pertumbuhan sebesar 28,23%.

Prospek usaha Perantara Pedagang Efek diekspektasikan memiliki peluang pertumbuhan yang lebih baik seiring dengan ekspektasi pemulihan pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,07% di 2017 menjadi 5,1% - 5,3% di 2018.

Pertumbuhan ekonomi yang positif dan kondusif diharapkan dapat menjadi pendorong peningkatan nilai kapitalisasi Pasar Saham Indonesia (IHSG). Saat ini, IHSG terus mencatatkan momentum terbaiknya ke level 6.606 (+3,58% YTD) dimana nilai kapitalisasi mencapai Rp7.365 triliun per 1 Maret 2018. Bursa Efek Indonesia menargetkan nilai kapitalisasi bertumbuh dari Rp7.072 triliun di 2017 menjadi Rp10.000 triliun di 2019. Hal ini tentunya menjadi pendorong bagi peningkatan transaksi perdagangan harian rata-rata yang berdampak positif bagi bisnis pedagang perantara efek perusahaan sekuritas di Indonesia.

Selain itu juga, peluang peningkatan bisnis perusahaan sekuritas berasal dari peningkatan aktivitas bisnis *Investment Banking* melalui *Initial Public Offering* (IPO). Terdapat potensi IPO minimal sebanyak 35 perusahaan di tahun 2018.

Meskipun demikian, bisnis perantara pedagang efek juga diproyeksikan menghadapi beberapa tantangan utama di 2018. Pengetatan likuiditas seiring peningkatan suku bunga acuan di Amerika Serikat masih menjadi ancaman yang dikhawatirkan dapat memicu potensi *capital outflow* di pasar Indonesia pada semester 1 tahun 2018. Selain itu juga, perebutan likuiditas dari pasar global juga diestimasikan meningkat seiring dengan rencana IPO Saudi Aramco yang nilainya diestimasikan mencapai USD1 triliun pada semester 2 tahun 2018.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2016 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), indeks literasi keuangan di industri pasar modal pada tahun 2016 naik menjadi 4,40% dari sebelumnya 3,79% pada tahun 2013. Meskipun mencatatkan kenaikan, indeks literasi pasar modal masih tergolong paling rendah dibandingkan indeks literasi industri jasa keuangan lainnya, seperti perbankan, perasuransian, pegadaian, lembaga pembiayaan, dana pensiun, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Artinya, masih banyak ruang untuk bertumbuh bagi industri pasar modal Indonesia. Kondisi dan peluang tersebut ditanggapi secara positif melalui langkah – langkah strategis MNCS.

Prospek Usaha di Bidang Jasa Pengelolaan Investasi

Reksa dana masih menjadi pilihan utama bagi investor individu sepanjang tahun 2017. Selain disebabkan oleh nilai investasi yang sangat terjangkau, banyaknya pilihan agen penjual juga menjadi pemacu meningkatnya minat masyarakat terhadap produk investasi ini. Kemudahan bertransaksi secara online pun semakin menambah daya tarik reksa dana. Faktor-faktor tersebut akan masih menjadi peminat investor untuk menginvestasikan dananya di reksadana akan semakin meningkat di tahun 2018.

Imbal hasil reksa dana sejak awal tahun 2017 tercatat cukup memuaskan. Mengikuti kinerja IHSG, Reksa Dana Saham secara rata-rata mampu memberikan imbal hasil di atas 10%, bahkan tidak sedikit produk yang membukukan kinerja mengungguli IHSG. Reksa Dana Pendapatan Tetap juga tercatat membukukan kinerja yang bagus, dimana berdasarkan Infovesta Fixed Income Fund Index per November 2017, sejak awal tahun lalu reksadana jenis ini sudah memberikan imbal hasil sebesar 9.62%. Sementara itu Reksa Dana Pasar Uang juga mencatatkan kinerja yang bagus dimana mampu menandingi tingkat bunga deposito di level sekitar 5% per tahun.

Indeks saham di tahun 2018 diproyeksikan akan bertumbuh secara moderat di level 10%, didorong oleh sektor perbankan dan *consumer goods* sebagai penggerak utama. Imbasnya, imbal hasil reksa dana saham juga diproyeksikan bertumbuh minimal sebesar 10% sepanjang tahun depan. Pada pasar surat utang negara, walaupun tidak setinggi tahun 2017, para analis meyakini bahwa instrumen ini akan tetap bertumbuh dengan baik seiring dengan trend *yield* yang menurun. Akibatnya reksa dana pendapatan tetap pun diprediksi akan mampu memberikan imbal hasil di level 8%-9% tahun depan.

MNCAM sebagai lembaga yang mengelola investasi produk reksadana, berkomitmen untuk memajukan industri reksa dana di Indonesia seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap investasi. MNCAM telah menerima berbagai penghargaan sebagai wujud nyata komitmennya untuk memberikan yang terbaik bagi para nasabahnya.

Prospek Usaha di Bidang Jasa Penyewaan Properti

Trend harga properti yang selalu meningkat di berbagai daerah di Indonesia, terutama untuk daerah yang mulai berkembang di Indonesia (luar Jawa) menjadi peluang bagi Perseroan untuk meraup pundi pundi pendapatan dari penyewaan properti yang ditujukan bagi entitas anak yang bergerak di jasa keuangan. Target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih tinggi di tahun 2018 menjadi salah satu faktor yang meyakini bahwa pendapatan regional domestik bruto juga akan terdorong naik. Hal tersebut mengindikasikan bahwa permintaan area perkantoran (*office space*) di daerah juga akan mengalami peningkatan. Tingkat permintaan *office space* terutama untuk tujuan sewa akan lebih menarik bagi penyewa (tenan) karena harga investasi yang lebih murah di awal dibandingkan dengan harus membeli area perkantoran serta menawarkan keleluasaan bagi tenan jika ingin berpindah area perkantoran. Fakta bahwa kantor cabang entitas anak Perseroan di bidang jasa keuangan tersebar di berbagai daerah di Indonesia menjadi peluang bagi Perseroan untuk menciptakan sinergi dan efisiensi operasional melalui jasa penyewaan properti yang ditawarkan oleh entitas anak lain Perseroan.

20. Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance/ GCG*)

Jajaran direksi dan manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan memandang penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau GCG (*Good Corporate Governance*) sebagai hal yang penting, karena GCG berfungsi sebagai pedoman agar segenap keputusan yang diambil dilandasi nilai-nilai moral yang tinggi dan sangat berintegritas, patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan dan kesadaran akan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) terhadap pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Selain itu, penerapan GCG juga merupakan salah satu faktor penting dalam pembentukan perusahaan modern dan profesional agar dapat memenangkan persaingan bisnis dalam era perekonomian globalisasi.

Di dalam penerapannya, prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kemandirian, disiplin dan kewajaran dikedepankan, demi peningkatan kinerja dan citra perusahaan. GCG dilengkapi *Code of Conduct*, yang berisi pedoman etika usaha dan etika kerja bagi pimpinan, karyawan dan *stakeholder* lainnya.

Perseroan beserta seluruh unit bisnisnya menjunjung tinggi dan berkomitmen penuh untuk menerapkan prinsip GCG dalam mengimplementasikan bisnis Perseroan. Perseroan berupaya untuk tetap terus mempertahankan dan menumbuhkan kepercayaan para investor kepada Perseroan melalui penyediaan informasi berbentuk laporan melalui media massa, laporan berkala, *public expose*, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui korespondensi langsung yang menganut prinsip keterbukaan, keakuratan dan akuntabilitas.

21. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility*)

MNC Group mendirikan lembaga sosial bernama Yayasan Jalinan Kasih dalam menampung dana pemirsa yang fokus dalam kegiatan sosial pendidikan dan kesehatan. Dalam kegiatan CSR, Yayasan Jalinan Kasih menggunakan nama MNC Peduli.

Selain menggunakan dana pemirsa, Perseroan juga melakukan berbagai kegiatan sosial baik yang dilakukan oleh Perseroan maupun grup unit-unit dibawah Perseroan. Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, maka kegiatannya pun disesuaikan dengan bidang usahanya. Kegiatan sosial dilakukan secara integrasi dengan unit-unit lain dibawah Perseroan dan Grup.

Pada tahun 2017, Perseroan atas namanya sendiri mengadakan kegiatan sosial diantaranya adalah:

- Bidang Sosial
 - MNC Peduli bekerja sama dengan Lotte Mart Indonesia untuk berbagai kegiatan sosial
 - Aksi Donor Darah “MNC Love Donation” di lingkungan Perseroan bekerjasama dengan PMI
 - 100 Kacamata Baca Gratis untuk anak-anak
 - MNC Peduli melalui Yayasan Jalinan Kasih melakukan berbagai aksi sosial

- Perseroan bersama unit bisnis dan para mitra melakukan penyaluran ratusan hewan Qurban
- Bidang Lingkungan
 - Bersih-bersih Sungai Ciliwung di Kawasan Ekoriparian, Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan
 - Kegiatan/upaya penghematan dalam menggunakan listrik dan air
 - Kegiatan/upaya penghematan kertas dalam mencetak dokumen
 - Penerapan hasil daur ulang air dari pendingin udara (*air conditioner*/AC) menjadi air bersih

Kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh unit grup jasa keuangan dibawah Perseroan secara integrasi dan sinergi dengan bisnis masing-masing unit usahanya, yaitu:

PT Bank MNC Internasional Tbk (BMNCI)

- Bidang pendidikan
 - Prospect For Global Financial Stability Lecture
 - Youth Collaboration Towards Action
 - Pengembangan Seni Anak Sejak Usia Dini di Sahid Festival
 - Indonesia Banking Outlook & Overview Lecture
 - Edukasi Literasi Finansial
 - Fun Schooling SDN 045
 - Bulan inklusi keuangan
 - Financial Day
 - Fun Schooling TK Eka Dhiyasa
- Bidang keagamaan
 - Perayaan Paskah Penyandang Difabel
 - Buka Puasa Bersama MNC Bank
 - Buka Puasa Bersama dan Santunan Anak Yatim IBI
 - Buka Puasa Bersama Group
 - Ibadah Natal Persekutuan Doa MNC Bank
- Bidang sosial
 - Donor Darah MNC "Let's Share The Love With Your Blood"
 - Sepuluh Ribu Mata
 - Sumbangan Hewan Kurban Idul Adha
 - 100 Kacamata Gratis
 - UNICEF Check Out for Children

PT MNC Finance (MNCF)

- Bidang Lingkungan
 - Peduli Ciliwung dalam rangka memperingati HUT MNC Group

PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGU)

- Bidang pendidikan:
 - Sumbangan 100 Kacamata Baca Gratis
 - Terima buku dari Siswa SMPN 27 Jakarta, SMPN 27 Duren Sawit Jakarta Timur
 - Bantuan buku bacaan anak kepada RPTRA Jeruk Manis, RPTRA Kebon Sirih
- Bidang keagamaan:
 - Penyaluran Hewan Qurban Idul Adha 1438 H
- Bidang Baksos:
 - MNC Bersih-bersih Ciliwung, Srengseng Sawah, Jakarta

PT MNC Asuransi Indonesia (MNCAI)

- Bidang keagamaan
 - Penyerahan Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha di Masjid Bimantara
 - Penyerahan Hewan Kurban Hari Raya Idul Adha MNC Kapital di Banten
- Bidang Baksos
 - Penyerahan bantuan kepada Yayasan Yatim Piatu Nurul Iman Jafariya

PT MNC Sekuritas (MNCS)

- Bidang keagamaan
 - Penyerahan sumbangan hewan qurban Idul Adha 1438 H

22. Keunggulan Kompetitif

Perseroan senantiasa dihadapkan pada persaingan dari perusahaan penyedia jasa keuangan lain dan berupaya untuk menciptakan keunggulan kompetitif dengan strategi jasa keuangan terpadu, yang menawarkan paket produk-produk keuangan secara terpadu kepada masyarakat. Dengan adanya dukungan kuat dari Grup MNC Media dalam mempromosikan “*brand awareness*” untuk setiap produk Perseroan sehingga akan memperkuat kepercayaan pelanggan dan menjangkau wilayah geografis yang luas. Perseroan juga membangun kerja sama dengan bank, dealer, nasabah institusi, agen asuransi, broker, investor lokal dan global untuk dapat bertumbuh dengan cepat.

Perseroan telah membangun sebuah jasa keuangan yang terintegrasi dan bergengsi yang dapat menyediakan jasa keuangan yang lengkap yang terdiri dari MNC Bank, MNC Life Assurance (asuransi jiwa), MNC Asuransi Indonesia (asuransi umum), MNC Finance dan MNC Guna Usaha Indonesia (jasa pembiayaan dan penyewaan), MNC Sekuritas (penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek) dan MNC Asset Management (pengelolaan investasi). Selain itu pula demi menciptakan jasa finansial yang terintegrasi di cabang-cabang usaha dan efisiensi diantara lini usaha, Perseroan membentuk entitas anak di bidang properti yang penyediaan jasanya hanya untuk kepentingan Perseroan dan Entitas Anak (internal). Sinergi di antara Entitas Anak di bawah Perseroan dan MNC Media akan membedakan produk dan jasa serta kinerja Perseroan dibandingkan pemain lainnya di industri jasa keuangan.

Lini usaha perbankan

BMNCI memainkan peran utama untuk menumbuhkan seluruh bisnis jasa keuangan Perseroan. Dengan hadirnya BMNCI maka Perseroan dapat menawarkan berbagai ragam produk dan jasa keuangan. BMNCI menargetkan pasar korporasi dan *consumer* untuk memobilisasi dana pihak ketiga dan utang. BMNCI akan berfokus pada basis transaksi perbankan termasuk kartu kredit, pengiriman uang, manajemen kas, gaji dan lain-lain. Dengan visi dan misi baru, BMNCI telah memulai transformasi di semua lini bisnis untuk mewujudkan ‘Bank Masa Depan’ dengan memberikan produk dan pelayanan perbankan yang dapat memuaskan seluruh segmen nasabah dengan berlandaskan teknologi terkini. Komitmen dan dukungan pemegang saham utama menjadi bekal dan kesempatan bagi BMNCI untuk bersinergi luas dengan MNC Grup, sehingga dalam menjalankan kegiatan bisnisnya, BMNCI dapat menjalin kerja sama dengan unit-unit usaha dibawah MNC Grup.

Lini usaha pembiayaan konsumen

Nama besar MNCF ini menjadi salah satu kelebihan di dunia pembiayaan otomotif, selain itu produk otomotif yang sangat bervariasi ini menjadi nilai tambah untuk MNCF, seperti *Used Car* dan *Express* menjadi pilihan konsumen menggunakan produk MNCF, juga ditambahnya program *digital maketing* semakin mendekatkan konsumen dengan MNCF.

Potensi di dunia pembiayaan roda empat baik *used car*/multiguna sangatlah tinggi khusus di negara-negara berkembang seperti di Indonesia dimana populasi penduduk lebih dari 200 juta dan mayoritas mobilisasi warga sangat tinggi, ini merupakan bukti bahwa kendaraan bermotor menjadi kebutuhan utama.

MNCF memiliki cabang hampir di semua kota besar seluruh di Indonesia dan beberapa kota atau kabupaten lainnya. Dengan banyaknya perusahaan pembiayaan saat ini, MNCF memiliki pasar tersendiri. MNCF juga memiliki jaringan pembayaran yang luas melalui kerjasama *payment point* dengan Indomaret, Alfamart, Kantor Pos dan lain-lain, sehingga memudahkan debitur dalam melakukan pembayaran. Hal ini juga merupakan komitmen dalam memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada mitra dan konsumen.

Lini usaha penyewaan

- Tim manajemen yang kuat dan solid yang telah berkecimpung di bidang jasa finansial selama lebih dari 10 tahun;
- Mendapat dukungan dan komitmen penuh dari MNC Corporation;
- Memiliki jaringan kerja dan jangkauan pasar yaitu cabang - cabang yang tersebar di Pulau Jawa, Sumatra, Sulawesi dan Kalimantan;

Lini usaha asuransi umum

- Memiliki network dan kantor cabang di seluruh Indonesia
- Layanan *Call Center* dan Mobil Derek 24 Jam
- Produk asuransi yang bervariasi
- Penjualan produk asuransi secara digital
- *Mobile Application* baik untuk produk B2B maupun B2C

Lini usaha asuransi jiwa

Lini usaha asuransi telah beroperasi sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang ini, telah membukukan total aset Rp481 miliar di akhir tahun 2017. Pengembangan layanan digital serta berfokus pada produk-produk yang menguntungkan bagi nasabah maupun mitra menjadi tolak ukur peningkatan pertumbuhan lini asuransi jiwa melalui MNCL. Dan juga terutama adalah dukungan dari MNC Group sendiri yang membuat MNCL semakin dikenal keberadaannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

- Pemasaran ritel yang mencakup pangsa pasar mulai dari usia 6 bulan – 74 tahun.
- Produk Hario Siaga pernah mendapat rekor MURI pada tahun 2014 untuk pencapaian kartu asuransi dengan peserta terbanyak.
- Produk Hario Siaga dapat langsung dibeli melalui transaksi *online* dengan alamat evoucher.mnclife.com dan juga telah disediakan aplikasi khusus untuk para mitra pemasaran Hario Siaga melalui ilucky.mnclife.com.
- Pengembangan layanan digital e-AJK untuk mempersingkat proses pengajuan AJK dari mitra ke MNCL
- MNCL berhasil meraih penghargaan *Best Claim Services* dari majalah Warta Ekonomi, sebagai salah satu perusahaan asuransi jiwa yang memberikan layanan klaim terbaik.

Lini usaha penjamin emisi efek dan pedagang perantara efek

- Menyediakan jasa sekuritas yang lengkap dengan didukung oleh beberapa divisi usaha *Equity* (Ritel & Institusi), *Fixed Income*, *Investment Banking*, dan *Research*.
- Memiliki *platform online trading* saham yang canggih yaitu MNC Trade New, yang memiliki fitur transaksi saham terbaik “Super Order” sehingga membantu nasabah dalam memaksimalkan *profit* dan meminimalisir potensi kerugian.
- Memiliki *platform online trading* saham berbasis syariah yaitu MNC Trade Syariah bagi para investor yang ingin bertransaksi saham sesuai dengan prinsip syariah. MNC Trade Syariah telah dievaluasi dan resmi mendapatkan sertifikat kesesuaian syariah dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dengan nomor 004.41.02/DSN-MUI/V/2016.
- Memiliki 103 *point of sales* yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia per Desember 2017, sehingga mudah dijangkau oleh calon nasabah maupun nasabah. Pada tahun 2017, MNC Sekuritas menerima penghargaan MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) atas pemecahan rekor sebagai perusahaan sekuritas yang membuka cabang terbanyak dalam setahun.
- Merupakan salah satu dari 32 perusahaan sekuritas yang memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) di atas angka Rp250 miliar, sehingga dapat memberikan fasilitas margin yang lebih baik bagi nasabah.
- Memiliki peringkat layak investasi (*investment grade*) idBBB+ (*Triple B Plus: Stable Outlook*) dari PEFINDO pada tahun 2017.

Lini usaha pengelolaan investasi

- Berkomitmen tinggi mendukung OJK dalam melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai Reksa Dana kepada masyarakat
- Berkomitmen dalam menciptakan produk-produk investasi reksa dana konvensional dan syariah untuk ditawarkan kepada nasabah dan calon nasabah.

- Berkomitmen memberikan imbal hasil optimal dengan pengelolaan risiko yang maksimal.
- Memberikan fasilitas atau layanan yang dapat mempermudah nasabah dalam beinvestasi seperti melalui Reksa Dana Online sehingga nasabah dapat bertransaksi dimana saja dan kapan saja.
- Memberikan kemudahan kepada nasabah dan calon nasabah dalam mengakses jasa keuangan, dengan menerapkan sistem paperless saat pembukaan akun Reksa Dana melalui Reksa Dana Online.
- Bersinergi dengan unit bisnis lain dalam MNC Grup untuk mengembangkan pangsa pasar bisnis

IX. PERPAJAKAN

1. Perpajakan Untuk Pemegang Obligasi

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Pebruari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final :

- a. atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ("BUT"); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi.
- b. atas diskonto Obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. atas diskonto Obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5,00% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020 dan 10,00% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan
- b. bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

2. Pemenuhan Perpajakan Oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan ("PPh"), Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"), dan Pajak Bumi dan Bangunan ("PBB"). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN, PENJUALAN MAUPUN PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Keterangan Penjaminan Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 3 tanggal 3 April 2018 *juncto* Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 66 tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada masyarakat Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dengan jumlah pokok Rp188.000.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah).

Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi. Selain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi beserta seluruh perubahannya yang merupakan bagian integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, tidak terdapat perjanjian lain yang dibuat antara Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta Penjamin Emisi Obligasi yang isinya bertentangan dengan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi tersebut beserta seluruh perubahannya.

Selanjutnya Penjamin Emisi Obligasi yang ikut serta dalam Penjaminan Emisi "Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018" telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.

Susunan Penjaminan Emisi Obligasi dalam rangka Penawaran "Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018" adalah sebagai berikut:

Penjamin Emisi Obligasi	Total Penjaminan (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi		
PT MNC Sekuritas (terafiliasi)	188.000.000.000	100
Jumlah	188.000.000.000	100

Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Kepastian mengenai jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang diterbitkan oleh Perseroan akan ditentukan selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Emisi dan akan diumumkan sedikitnya dalam 1 (satu) surat kabar harian nasional selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pencatatan Obligasi di PT Bursa Efek Indonesia. Apabila seluruh Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang dijamin dengan Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual seluruhnya, maka sisanya akan ditawarkan kembali dalam Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap II dan/atau tahap selanjutnya.

Tingkat bunga tetap yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini ditetapkan pada saat Penawaran Awal (*Bookbuilding*) dengan mengumpulkan lembar minat dari calon investor. Dalam lembar minat tersebut, calon investor telah menyampaikan indikasi tingkat bunga tetap yang diinginkan. Tingkat bunga tetap kemudian ditetapkan dengan melakukan pemetaan atas kompilasi lembar minat dari berbagai calon investor tersebut.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 adalah PT MNC Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimaksud dengan pihak terafiliasi adalah:

- I. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal.
- II. Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut.

- III. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama.
- IV. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut.
- V. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama.
- VI. Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Hubungan afiliasi yang dimaksud adalah hubungan pengendalian di mana PT MNC Sekuritas dan Perseroan dikendalikan oleh pihak yang sama.

Perseroan dengan PT MNC Sekuritas selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah pihak terafiliasi secara tidak langsung melalui kepemilikan saham oleh PT MNC Investama Tbk.

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Obligasi ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

Nexia International
18th Office Park Tower A, Lt.20
Jl. TB Simatupang Kav 18
Jakarta 12520

Akuntan Publik : Florus Daeli, SE, Ak., MM, CPA
No. STTD : 139/BL/STTD-AP/2011
Tanggal STTD : 2 Maret 2011
Asosiasi profesi : IAPI No. keanggotaan asosiasi profesi: D-45.170
Standar profesi : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan kerja : 008d/MNCKI/DIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018

Tugas Pokok : Untuk melaksanakan audit berdasarkan standar *auditing* yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

NOTARIS

Aulia Taufani, S.H.

Menara Sudirman Lantai 17 D
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta Selatan, 12190

No. STTD : 644/BL/STTD-N/2012
Tanggal STTD : 16 Mei 2012
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia dengan Nomor anggota 0060219710719
Pedoman Kerja : UU Nomor 30/2004 tentang jabatan Notaris
Surat Penunjukan : 008b/MNCKI/DIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam Penawaran Umum antara lain adalah menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek

KONSULTAN HUKUM

Jusuf Indradewa & Partners Legal Consultant

Menara BCA (Grand Indonesia)
Lantai 50
Jl. M.H. Thamrin No.1
Jakarta Pusat 10310

No STTD : STTD.KH-21/PM.22/2018 tanggal 13 Maret 2018
No Anggota HKHPM : 92036
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, yang diubah dengan Keputusan HKHPM No.Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No.01/Kep-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan HKHPM No.02/Kep-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.
Surat Penunjukan : 008a/MNCKI/DIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018
Tugas Pokok : Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum secara independen, sesuai dengan norma atau Standar Profesi dan kode etik konsultan hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atau fakta yang ada mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan atas Perseroan dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana ditentukan dalam UUPM.

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jl. Jend. Sudirman Kav. 44 – 46
Gedung BRI II Lantai 30
Divisi Investment Services

No. STTD : 08/STTD-WA/PM/1996
Tanggal STTD : 11 Juni 1996
Nomor Asosiasi : Surat Keterangan No. AWAI/03/12/2008 tanggal 17 Desember 2008
Pedoman Kerja : UU Nomor 8/1995 tentang Pasar Modal
Surat Penunjukan : 008c/MNCKI/DIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018

Tugas Pokok : Sebagai wakil Pemegang Obligasi untuk kepentingan baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat emisi obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam dan LK No. VI.C.3, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-309/BL/2008 tanggal 1 Agustus 2008 tentang Hubungan Kredit Dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat menyatakan hal-hal berikut ini:

- tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dan tidak akan memberikan kredit kepada Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah pokok Obligasi yang diwaliamanati selama menjadi Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018;

- tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan dengan tegas bahwa tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan emisi Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 telah ditandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 2 tanggal 3 April 2018 *juncto* Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 65 tanggal 30 Mei 2018, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat.

Dengan demikian yang berhak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan dan bertindak untuk dan atas nama Pemegang Obligasi dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. yang telah terdaftar di BAPEPAM dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Perseroan. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamanati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan peraturan BAPEPAM dan LK No. VI.C.3 tentang Hubungan Kredit dan Penjaminan Antara Wali Amanat Dengan Perseroan (Perseroan).

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.563-DIS/TCS/03/2018 tanggal 01 Maret 2018 sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 Peraturan Nomor VI.C.4 Tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

1. Umum

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden (Bank Penolong dan Tabungan bagi Priyayi Poerwokerto) atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Seiring dengan perubahan jaman dan perkembangan keadaan, maka Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. Setelah Indonesia merdeka, maka Pemerintah Republik Indonesia melakukan peleburan dan integrasi dari BRI, PT Bank Tani Nelayan Nederlansche Handel Mij (NMH) dengan bentuk Bank Koperasi Tani dan Nelayan disingkat BKTN berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu) No. 41 tahun 1960 tanggal 26 Oktober 1960. BKTN tersebut selanjutnya diubah namanya menjadi Bank Negara Indonesia Unit II berdasarkan penetapan Presiden Republik Indonesia No. 17 tahun 1965. Berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia No. 21 tahun 1968, maka Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rural ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia ("BRI").

BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia atau disingkat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992.

Anggaran Dasar BRI tersebut telah beberapa kali mengalami perubahan, dan perubahan Anggaran Dasar terakhir dimuat di Akta 54 tanggal 27-10-2017 (dua puluh tujuh Oktober dua ribu tujuh belas) yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan dicatat dalam *database* Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar BRI No. AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 03-11-2017 (tiga November dua ribu tujuh belas).

2. Permodalan Wali Amanat

Struktur permodalan Perseroan sejak tahun 2010 sampai dengan bulan Oktober 2017 tidak mengalami perubahan. Perubahan struktur permodalan Perseroan pada bulan Oktober 2017 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari semula Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima).

Perubahan struktur permodalan tersebut dimuat dalam Akta No.54 tanggal 27 Oktober 2017 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.

Berdasarkan Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 tersebut dan dengan susunan pemegang saham per tanggal 31 Desember 2017 berdasarkan Laporan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50,- per Saham		Persentase Kepemilikan Saham (%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)*	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	176.654.190.000	8.832.709.500.000	

*termasuk saham treasury sebanyak 1.108.590.000 saham

3. Pengurus dan Pengawasan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor: 25/PT-GP/Ket/III/2018 tanggal 22 Maret 2018 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

DIREKSI :

Direktur Utama	: Suprajarto
Direktur Mikro dan Kecil	: Priyastomo
Direktur Ritel dan Menengah	: Supari
Direktur Corporate Banking	: Kuswiyoto
Direktur Teknologi Informasi dan Operasi	: Indra Utoyo
Direktur Manajemen Risiko	: Mohammad Irfan
Direktur Keuangan	: Haru Koesmahargyo
Direktur Jaringan dan Layanan	: Osbal Saragi Rumahorbo
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto
Direktur Hubungan Kelembagaan	: Sis Apik Wijayanto

Direktur Konsumer : Handayani
Direktur Human Capital : Nyonya R. Sophia Alizsa

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama/
Komisaris Independen : Andrinof A. Chaniago.
Wakil Komisaris Utama : Gatot Trihargo.
Komisaris Independen : Mahmud.
Komisaris Independen : A. Fuad Rahmany.
Komisaris Independen : A. Sonny Keraf.
Komisaris Independen : Rofikoh Rokhim
Komisaris : Nicolaus Teguh Budi Harjanto.
Komisaris : Hadiyanto
Komisaris : Jeffry J. Wurangian.

4. Kegiatan Usaha

Pada tanggal 31 Desember 2017, BRI memiliki 5 (lima) Entitas Anak yang dimiliki secara langsung dengan kepemilikan di atas 50% dan dikonsolidasikan dalam laporan keuangan dimana BRI memiliki penyertaan saham, yaitu:

Nama Perusahaan	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
PT Bank BRI Syariah Tbk	Bank umum syariah	99,99%	2007	Beroperasi
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Bank umum swasta nasional	86,82%	2011	Beroperasi
BRI Remittance Company, Ltd	Perusahaan <i>Remittance</i>	100,00%	2011	Beroperasi
PT Asuransi BRI Life	Asuransi	91,00%	2015	Beroperasi
PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,00%	2016	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

1) Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

a. *Telecommunication*

- Obligasi Indosat VIII 2012
- Sukuk Ijarah Indosat V 2012
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap I 2014
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap I Tahun 2014
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap III Tahun 2015
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap IV Tahun 2016
- Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2017

b. *Financial Company*

- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap I 2012
- Obligasi Berkelanjutan II SMF Tahap II 2013
- Medium Term Notes ASF III Tahun 2015

- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap IV Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II ASF Tahap V Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap III Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III ASF Tahap IV Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap I Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap II Tahun 2015
- Obligasi Berkelanjutan II FIF Tahap III Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan III FIF Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Mandala Multifinance Tahap I 2015
- Medium Term Notes SAN Finance VII 2015
- Obligasi Berkelanjutan I SAN Finance Tahap III 2015
- Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II SAN Finance Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap II 2015
- Obligasi Berkelanjutan I TAFS Tahap III 2015
- Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II TAFS Tahap II Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap I Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap II Tahun 2016
- Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap III Tahun 2017
- Medium Term Notes Mizuho Balimor Finance I Tahun 2017
- Medium Term Notes (MTN) II Verena Multi Finance Tahun 2017

c. *Property & Construction*

- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap I 2013
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap II 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap III Tahun 2014
- Obligasi Berkelanjutan I APLN Tahap IV Tahun 2015
- Medium Term Notes Adhi Persada Properti I Tahun 2015
- Medium Term Notes Adhi Persada Properti IV Tahun 2017
- Medium Term Notes Wika Realty VI Tahun 2017
- Medium Term Notes Propernas Griya Utama I Tahun 2017
- Surat Berharga Investasi Jangka Pendek Riscon Realty I Tahun 2017

d. *Food & Beverage*

- Obligasi Berkelanjutan I Sumber Alfaria Trijaya Tahap II 2015
- Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Sumber Alfaria Trijaya Tahap II 2017
- Obligasi Fast Food Indonesia II Tahun 2016
- Medium Term Notes Nusantara Tri Bahari I Tahun 2017

e. *Entertainment*

- Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
- Obligasi Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2017
- Sukuk Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap I Tahun 2017
- Sukuk Berkelanjutan II Global Mediacom Tahap II Tahun 2017

f. *Bank*

- Sukuk Mudharabah BNI Syariah I Tahun 2015
- Obligasi VII Bank Nagari Tahun 2015
- Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015
- Obligasi Subordinasi IDR Bank KEB Hana I Tahun 2016
- Obligasi Subordinasi USD Bank KEB Hana I Tahun 2016

- Obligasi Berkelanjutan I BNI Tahap I Tahun 2017
- Medium Term Notes Syariah I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017
- Medium Term Notes Syariah Subordinasi I Bank Muamalat Indonesia Tahun 2017

g. Pharmacy

- Medium Term Notes I Phapros Tahun 2017

h. Mining

- MTN I J Resources Nusantara Tahun 2017
- MTN II J Resources Nusantara Tahun 2017
- MTN III J Resources Nusantara Tahun 2017

i. Transportation

- Obligasi I Express Transindo Utama 2014
- MTN I Astra Otoparts Tahun 2016

j. Shipping

- Obligasi APOL II Tahun 2008
- MTN Syariah Ijarah Apol II Tahun 2008

k. Asset-backed security

- EBA-SP SMF-Bank BTN 01 2015
- EBA-SP SMF-Bank Mandiri 01 2016
- EBA-SP SMF-Bank BTN 02 2016
- EBA SP SMF- Bank BTN 03 2017

2) Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

3) Jasa Agen Jaminan (*Security Agent*)

Fungsi Agen Jaminan adalah membantu Wali Amanat dalam pengawasan nilai jaminan Obligasi, mendaftarkan jaminan kepada Kantor Fidusia setempat dan memelihara dokumen jaminan obligasi dengan baik.

4) Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

a. *JasaTrust & Corporate Services* lainnya :

- *Jasa Agen Escrow*
- *Jasa Arranger Sindikasi*

b. *Custodian Services*

c. *Jasa Trustee*

d. DPLK BRI

5. Kantor Cabang BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2017, BRI telah memiliki kantor yang terdiri 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 468 kantor cabang, 610 kantor cabang pembantu, 992 kantor kas, 5.382 BRI unit, 2.536 Teras BRI, dan 638 Teras keliling BRI.

6. Perizinan BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPWB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa
- e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) BRI dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta No. 09.05.1.64.37895 tanggal 1 Maret 2016, masa berlaku ijin usaha sampai dengan 11 Februari 2021.

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

8. Penunjukan, penggantian dan berakhirnya tugas Wali Amanat

Berdasarkan Peraturan No. VI.C.4, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundangundangan Pasar Modal;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan No. VI.C.3; atau
 - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

9. Ikhtisar Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan BRI per 31 Desember 2015, 2016 dan 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian:

Neraca Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017 (audited)	2016 (audited)	2015 (audited)
Total aset	1.126.248.442	1.003.644.426	878.426.312
Total liabilitas	958.900.948	856.831.836	765.299.133
Total ekuitas	167.347.494	146.812.590	113.127.179

Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	2017 (audited)	2016 (audited)	2015 (audited)
Laba operasional	36.805.834	33.964.542	30.512.907
Laba sebelum pajak	37.022.157	33.973.770	32.494.018
Beban pajak	(7.977.823)	(7.745.779)	(7.083.230)
Laba tahun berjalan setelah pajak bersih	29.044.334	26.227.991	25.410.788

Rasio-Rasio Penting

(dalam %)

Uraian	2017	2016	2015
<i>Capital Adequate Ratio (CAR)</i>	22,84	22,69	20,39
<i>Return On Asset (ROA)</i>	3,54	3,67	3,99
<i>Return On Equity (ROE)</i>	19,73	21,80	29,05
<i>Net Interest Margin</i>	7,78	8,10	7,91
<i>Non Performing Loan Ratio (Gross)</i>	2,23	2,13	2,10

Alamat Wali Amanat
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk
 Divisi Investment Services
 Gedung BRI II Lt.30
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46
 Jakarta 10210 - Indonesia
 Tel. (021) 250 0124, 575 8144
 Faks. (021) 251 0316, 575 2444

XIII. TATA CARA PEMESANAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan perorangan Warga Negara Asing di manapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga atau badan usaha Indonesia ataupun asing di manapun mereka berkedudukan yang berhak membeli Obligasi sesuai dengan ketentuan-ketentuan yurisdiksi setempat, kecuali pembelian Obligasi tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan bursa efek yang berlaku di negara atau yurisdiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini dan pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh Pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi yang diajukan dengan menggunakan fotokopi formulir tersebut ataupun bentuk lainnya akan ditolak.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi dengan jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi akan dimulai tanggal 22 Juni 2018 pukul 10.00 WIB dan ditutup pada tanggal 28 Juni 2018 pukul 15.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi pada Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan kepada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI Nomor SP-021/PO/KSEI/0218 yang ditandatangani Perseroan dengan KSEI pada tanggal 3 April 2018. Dengan didaftarkannya Obligasi tersebut di KSEI, maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek selambat-lambatnya Tanggal Emisi.
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan atas Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran bunga, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran bunga maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran bunga serta pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas bunga adalah Pemegang Rekening yang memiliki Obligasi pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga (P-4).

- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan oleh KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi di Rekening Efek pada Hari Kerja ketiga sebelum pelaksanaan RUPO (R-3). Terhitung sejak R-3 sampai dengan berakhirnya RUPO, seluruh Obligasi di Rekening Efek di KSEI akan dibekukan sehingga tidak dapat dilakukan pemindahbukuan antar Rekening Efek. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada R-3 sampai dengan tanggal pelaksanaan RUPO akan diselesaikan oleh KSEI mulai hari pertama setelah berakhirnya RUPO.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan harus mengajukan FPPO selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi Obligasi yang ditunjuk. Pemesan dapat memperoleh Prospektus dan FPPO sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Penyebarluasan Prospektus Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi pada Prospektus ini.

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan dari FPPO yang telah ditandatangani sebagai Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Dalam melakukan penjatahan, Manager Penjatahan akan melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan Nomor IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum. Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Tanggal Penjatahan.

Manajer Penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan Oleh Akuntan Atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing sedangkan kebijakannya akan ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Perseroan. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan, maka untuk keperluan penjatahan yang mengajukan lebih dari satu FPPO akan diperlakukan sebagai satu pesanan. Tanggal akhir penjatahan adalah tanggal 29 Juni 2018.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Setelah menerima pemberitahuan hasil penjatahan Obligasi, pemesan harus segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di:

PT MNC Sekuritas
Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening: 1040004092222

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 2 Juli 2018 pukul 12:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Penyetoran dapat dilakukan langsung kepada Penjamin Emisi dengan pemberitahuan kepada Penjamin Pelaksana Emisi melalui Agen Penjualan tempat mengajukan pemesanan.

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi secara Elektronik

Pada Tanggal Emisi, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan Masa Penawaran Umum atau Pembatalan Penawaran Umum

Dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum dengan ketentuan terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan:

- a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
- b. Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Nomor IX.A.2.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
- c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

12. Pembatalan Pemesanan dan Pengembalian Uang Pemesanan

Bagi pemesan yang pesanannya ditolak seluruhnya atau dalam hal terjadinya pembatalan Penawaran Umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh Para Penjamin Emisi Obligasi ditempat dimana FPPO yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal akhir Penjataan atau tanggal diumumkannya pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan, denda untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) hari kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Pembayaran diberikan dengan menggunakan cek atas nama pemesan yang mengajukan FPPO, langsung oleh pemodal di kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau kantor yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Kantor Penjamin Emisi Obligasi atau kantor Agen Penjualan dimana FPPO diajukan dengan menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi. Bagi pemesanan Khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan oleh Perseroan.

13. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada Kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dibawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT MNC Sekuritas (Terafiliasi)

MNC Financial Center Lt. 14-16

Jl. Kebon Sirih No. 21-27

Jakarta 10340

Telepon: (021) 2980 3111

Faksimili: (021) 3983 6868

Website: www.mncsekuritas.id

Email: ib.mncs@mncgroup.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat Dari Segi Hukum atas Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Rekan.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No.: 028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Jakarta, 6 Juni 2018

Kepada Yang Terhormat :
PT MNC Kapital Indonesia Tbk
MNC Financial Center Lantai 21
Jl. Kebon Sirih No.21 - 27
Jakarta Pusat 10340.

**Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum terhadap PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Sehubungan Dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2018.**

Sehubungan dengan maksud PT MNC Kapital Indonesia (selanjutnya disebut “**Perseroan**”) suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Gedung MNC Financial Center Lantai 21, Jl. Kebon Sirih No.21-27 Jakarta Pusat untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah) dan bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi tersebut, PT MNC Kapital Indonesia Tbk akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 (“**Obligasi**”) dengan jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp300.000.000.000,- (tiga ratus miliar Rupiah). Obligasi ini ditawarkan sebesar Rp188.000.000.000 (seratus delapan puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*). Obligasi berjangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi yang akan diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan. Sisa dari jumlah Pokok Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp112.000.000.000,- (seratus dua belas miliar Rupiah) akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*). Obligasi ini telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) yaitu yaitu ^{id}**BBB** terhadap Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2018 MNC Kapital Indonesia, kami Kantor Konsultan Hukum Jusuf Indradewa & Partners sebagai konsultan hukum independen, dalam hal ini diwakili oleh Cecilia T.A. Sianawati, S.H., dengan STTD No.09/STTD-KH/PM/1992 jo. Nomor STTD.KH-21/PM.22/2018 tanggal 13 Maret 2018, telah ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Surat Penunjukan No.008/MNCKI/DIR/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 untuk melakukan Uji Tuntas Dari Segi Hukum (“**Uji Tuntas**”) dan memberikan Pendapat Dari Segi Hukum (“**Pendapat Hukum**”) mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan dan aspek hukum dari Penawaran Umum Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia khususnya mengenai Pasar

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Modal dan dengan berpedoman pada Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“**HKHMP**”) Lampiran Keputusan HKHPM No.Kep.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005, yang diubah dengan Keputusan HKHPM No.Kep.04/HKHPM/XI/2012 tanggal 6 Desember 2012, Keputusan HKHPM No.01/Kep-HKHPM/II/2014 tanggal 4 Februari 2014 dan Keputusan HKHPM No.02/KEP-HKHPM/V/2017 tanggal 30 Mei 2017.

Dalam memberikan Pendapat Hukum ini kami mendasarkan pada hasil Uji Tuntas sebagaimana tertuang dalam Addendum Laporan Uji Tuntas No. 003-ADD/CS-DS-YR-HN/II-H/IV/18 tanggal 30 April 2018 (“**Addendum Laporan Uji Tuntas**”) dan Tambahan I Addendum Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No. 017/CS-DS-YR-HN/II-H/V/18 tanggal 14 Mei 2018 (“**Tambahan I Addendum Laporan Uji Tuntas**”) dan Tambahan II Addendum Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No.025/CS-DS-YR-HN/II-H/V/18 tanggal 30 Mei 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Tambahan II Addendum Laporan Uji Tuntas**”) dan Tambahan III Addendum Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum No.027/CS-DS-YR-HN/II-H/VI/18 tanggal 6 Juni 2018 (untuk selanjutnya disebut sebagai “**Tambahan III Addendum Laporan Uji Tuntas**”)

Dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum ini maka Pendapat Hukum No.026/CS-DS-YR-HN/II-G/V/18 tanggal 30 Mei 2018 menjadi tidak berlaku lagi.

Asumsi dan Kualifikasi

Dalam menjalankan Uji Tuntas untuk kepentingan Pendapat Hukum ini kami menganggap dan mendasarkan pada asumsi-asumsi sebagai berikut :

- a. Dokumen-dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan apabila dokumen-dokumen tersebut dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya, maka fotokopi atau salinan tersebut adalah benar dan akurat serta sesuai dengan aslinya.
- b. Tanda tangan yang terdapat pada suatu dokumen, baik asli maupun fotokopinya atau salinannya, adalah tanda tangan otentik dari pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen itu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, pihak-pihak tersebut mempunyai dan telah memperoleh kewenangan untuk menandatangani dokumen tersebut.
- c. Dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, dan pernyataan-pernyataan, baik tertulis ataupun lisan, yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan atau pihak ketiga kepada kami adalah benar, akurat, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan material sampai dengan tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat Dari Segi Hukum ini.
- d. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian dengan Perseroan, atau para Pejabat Pemerintah yang mengeluarkan surat-surat keterangan atau perijinan kepada Perseroan, berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut.

Pendapat Hukum yang didasarkan pada Laporan Uji Tuntas diberikan dalam kerangka hukum Negara Republik Indonesia dan tidak berkenaan atau ditafsirkan menurut hukum atau yuridiksi negara lain dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut :

1. Pendapat Hukum dibuat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan.
2. Dalam hal terdapat kemungkinan mengenai adanya fakta-fakta, data-data, dokumen-dokumen atau informasi-informasi yang tidak kami ketahui tidak mengakibatkan Pendapat Hukum menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.
3. Pendapat Hukum secara tegas hanya meliputi aspek hukum yang disebutkan didalamnya dan tidak meliputi aspek-aspek lainnya yang mungkin secara implisit dianggap termasuk didalamnya.
4. Pendapat Hukum ditujukan semata-mata dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan tanggung jawab kami sebagai Konsultan Hukum independen atas Pendapat Hukum kami adalah terbatas pada dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap dokumen-dokumen, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan yang terdapat dalam Addendum Laporan Uji Tuntas, asumsi-asumsi dan kualifikasi-kualifikasi yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini dan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka dengan ini kami sampaikan Pendapat Hukum kami sebagai berikut :

1. Perseroan adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat didirikan dengan nama “**PT Bhakti Capital Indonesia**” berdasarkan Akta Pendirian No. 100 tanggal 15 Juli 1999, yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.C-16030 HT.01.01.TH.99 tanggal 6 September 1999, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan tanggal 31 Maret 2000 di bawah No. 270/BH 09.03/III/2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia di bawah No. 2097 (“**Akta Pendirian**”).

2. Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**Peraturan OJK No.32**”), Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei 2015 (“**Akta No.15 Tanggal 8 Mei 2015**”), dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusannya No.AHU-0936639.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015, telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No.AHU-AH.01.03-0937536 tanggal 5 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-3513712.AH.01.11.Tahun 2015 tanggal 5 Juni 2015.

Terakhir Anggaran Dasar Perseroan diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.9 tanggal 8 Mei 2018, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187884 tanggal 11 Mei 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066022.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018.

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “UUPT”) dan ketentuan-ketentuan dibidang Pasar Modal, termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan Bapepam-LK No.IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Namun demikian terdapat akta-akta perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya sudah efektif berlaku karena berdasarkan UUPT perubahan Anggaran Dasar mulai berlaku sejak diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar atau sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar. Terhadap belum diumumkannya Anggaran Dasar dalam Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahannya tersebut baik UUPT maupun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut.

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.15 tanggal 8 Mei 2015 (“**Akta No.15 Tanggal 8 Mei 2015**”), dibuat di hadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, maksud dan tujuan Perseroan ini adalah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, perindustrian, pengangkutan, pertanian, pembangunan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha-usaha bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa bidang hukum dan pajak, sebagai berikut :

- Periklanan dan reklame, serta promosi dan pemasaran;
 - Hiburan, promosi, agency, manajemen dan produksi;
 - Jasa persewaan mesin dan peralatannya;
 - Jasa komputer dan kegiatan yang terkait;
 - Jasa pendidikan;
 - Instalasi dan perawatan jaringan komputer dan peripheral;
 - Pengelolaan dan penyewaan gedung, perkantoran, taman hiburan, rekreasi, dan kawasan berikat;
 - Konsultasi bidang bisnis, manajemen, dan administrasi;
 - Konsultasi manajemen dan administrasi;
 - Jasa pengembangan bisnis dan manajemen;
 - Konsultasi arsitek, landscape, design dan interior;
 - Konsultasi teknik engineering;
 - Konsultasi manajemen sumber daya manusia;
 - Konsultasi pelatihan dan ketrampilan;
 - Menjalankan usaha dalam bidang jasa investasi.
- b. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perdagangan, meliputi perdagangan pada umumnya, diantaranya :
- Import dan ekspor;
 - Perdagangan besar lokal;
 - Bertindak sebagai grosir, supplier, leveransier, dan commission house;
 - Distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
 - Perdagangan yang berhubungan dengan usaha real estat dan property;
 - Penjualan mobil dan sepeda motor;
 - Perdagangan komputer dan alat elektronika;
 - Perdagangan alat transmisi telekomunikasi;
- c. Menjalankan usaha-usaha di bidang perindustrian, meliputi perindustrian pada umumnya, diantaranya :
- Industri makanan dan minuman dan pengalengan/pembotolan (amatil);
 - Industri pengolahan hasil perikanan (coldstorage);
 - Industri tekstil;
 - Industri pakaian jadi (garmen);
 - Industri meuble (furniture);
 - Industri mesin-mesin;
 - Industri peralatan rumah tangga;
 - Industri kayu (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman;
 - Industri daur ulang;
 - Industri kerajinan tangan.
- d. Menjalankan usaha-usaha di bidang pengangkutan pada umumnya, diantaranya:
- Ekspedisi dan pergudangan;
 - Angkutan penumpang.
- e. Menjalankan usaha-usaha di bidang pertanian pada umumnya, diantaranya :
- Argoindustri;

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

- Industri pertanian;
 - Peternakan;
 - Perikanan darat/laut dan pertambakan;
 - Perkebunan tanaman pangan;
 - Kehutanan.
- f. Menjalankan usaha-usaha di bidang pembangunan (developer) pada umumnya, diantaranya :
- Bertindak sebagai pengembang;
 - Pemborongan pada umumnya (general contractor);
 - Pembangunan gedung dan konstruksi, jembatan, jalan, taman, dan sebagainya;
 - Pemasangan instalasi-instalasi;
 - Pengembangan wilayah pemukiman.
- g. Mendirikan dan ikut serta dalam perusahaan-perusahaan dan badan hukum/badan usaha lain, baik didalam negeri maupun diluar negeri.

Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut diatas, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha lainnya yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

Kami berpendapat bahwa Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perijinan yang telah diperolehnya sehubungan dengan kegiatan usaha tersebut. Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

4. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No.9 tanggal 8 Mei 2018, dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0187884 tanggal 11 Mei 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0066022.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 11 Mei 2018 jo. Laporan Kepemilikan Efek Mencapai 5% Atau Lebih Dari Saham Yang Ditempatkan dan Disetor Penuh per 30 April 2018, yang dikeluarkan oleh PT BSR Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	15.000.000.000	1.500.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	5.488.661.103	548.866.110.300,00
Modal Disetor	5.488.661.103	548.866.110.300,00
Sisa Saham Dalam Portepel	9.511.338.897	951.133.889.700,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Investama Tbk	3.824.398.989	382.439.898.900,00	69,68
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd.	505.900.000	50.590.000.000,00	9,22
HT Capital Investment Ltd	389.815.162	38.981.516.200,00	7,10
Masyarakat (dibawah 5%)	768.546.952	76.854.695.200,00	14,00
Jumlah	5.488.661.103	548.866.110.300,00	100,00

Perseroan belum melakukan kewajiban untuk mengadakan dan menyimpan daftar khusus mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"). Perseroan sebagai perusahaan publik memiliki daftar kepemilikan saham Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Kepemilikan Saham Oleh Direksi dan Komisaris yang menjadi bagian dari Laporan Kepemilikan Efek Mencapai 5% atau Lebih yang diterbitkan oleh PT BSR Indonesia dan dari daftar tersebut tidak dapat diketahui mengenai kepemilikan saham oleh anggota keluarga Direksi dan Dewan Komisaris. Terhadap belum dilakukan pengadaan dan penyimpanan daftar khusus tersebut, UUPT tidak mengatur adanya sanksi atas hal tersebut akan tetapi Direksi Perseroan berkomitmen melalui Surat Pernyataan yang dibuat pada tanggal 11 Mei 2018 untuk segera melakukan kewajibannya untuk mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana yang diatur dalam Pasal 50 UUPT paling lambat sebelum Perseroan melaksanakan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap II.

Riwayat struktur permodalan Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir mengenai peningkatan modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tanggal 31 Mei 2018 yang tertuang dalam Resume RUPS Tahunan No. 01/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Aulia Taufani, S.H, Notaris di Jakarta, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

JUSUF INDRADEWA & PARTNERS

Legal Consultants

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama dan	
Komisaris Independen	: Nelson Tampubolon
Komisaris	: Darma Putra
Komisaris	: Tien
Komisaris	: Mashudi Hamka
Komisaris	: Henry Suparman
Komisaris Independen	: Benny Mokalu

Direksi :

Direktur Utama	: Wito Mailoa
Direktur	: Jessica Herliani Tanoesoedibjo
Direktur	: Natalia Purnama
Direktur Independen	: Mahjudin

Masa jabatan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang baru adalah mengikuti sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang sedang berlangsung, yaitu sampai dengan ditutupnya RUPS Tahunan pada tahun 2021.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, akta Berita Acara RUPS Tahunan dan/atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat terkait dengan perubahan susunan Direksi dan Komisaris tersebut masih dalam proses pembuatan.

Kami berpendapat bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

6. Pada tanggal Pendapat Hukum ini susunan anggota Komite Audit dan Sekretaris Perusahaan, Piagam Unit Audit Internal, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan adalah sebagai berikut :

Sekretaris Perusahaan :

Deisy Christina diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.302/MNCK-AH/Dirut/VII/2017 tanggal 11 Juli 2017.

Pembentukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

Komite Audit

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 001/BCAP/LGL/III/2017 tanggal 15 Maret 2017, susunan anggota Komite Audit adalah:

Ketua	:	Wina Armada Sukardi
Anggota	:	Jenny Tajuw
		Rosaline Sri Asri

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite.

Susunan anggota Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite yaitu bahwa anggota Komite Audit adalah pihak independen dari luar Emiten/Perseroan.

Piagam Unit Audit Internal

Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Piagam Audit Internal/*Internal Audit Charter* yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 2 Desember 2013, dan disahkan oleh Dewan Komisaris pada tanggal yang sama. Berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan No.754/DIR/MNCKI/XII/2013 tanggal 20 Desember 2013 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Direksi Perseroan dengan persetujuan dari Dewan Komisaris telah menunjuk dan mengangkat **Chandra Helena Marpaung** sebagai Kepala Unit Audit Internal.

Piagam Unit Audit Internal dan Pembentukan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal

Komite Nominasi dan Remunerasi

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 4 September 2017, anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang menjabat saat ini sebagai berikut :

- Ketua : Wina Armada Sukardi
- Anggota : Darma Putra Wati
Susanty Tjandra Sanusi

Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

7. Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya dari instansi yang berwenang dan izin-izin tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku.
8. Aspek ketenagakerjaan Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana dibidang ketenagakerjaan Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang berlaku selama 2 (tahun), mengikutsertakan karyawannya dalam program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Kesehatan, mengikutsertakan Karyawan pada Program Asuransi Kesehatan dan Program Dana Pensiun telah melaksanakan ketentuan mengenai Upah Minimum

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Propinsi (UMP) Tahun 2018 yang berlaku di daerah dimana Kantor Pusat Perseroan berada.

9. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan memiliki obligasi yang telah diterbitkan dan terutang kepada masyarakat yaitu Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2013 Dengan Tingkat Bunga Tetap.
10. Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan dan mengikat Perseroan serta sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku, dan tidak terdapat *negative covenant*/pembatasan untuk mendapatkan Persetujuan dari kreditur dan/atau Pemberitahuan Tertulis kepada kreditur dalam hal Perseroan menerima pinjaman baru dan juga tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi, menghalangi hak-hak pemegang obligasi, maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Perseroan dengan Pihak Terafiliasi sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari pemenuhan kewajiban yang dikenakan kepada Perusahaan yang melakukan Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.E.1.

11. Berdasarkan hasil Uji Tuntas kami, baik Perseroan maupun masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi, tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.
12. Perseroan telah melaksanakan kewajibannya sebagai perusahaan publik dalam menyampaikan laporan-laporan berkala kepada instansi terkait maupun kepada OJK, khususnya untuk jenis-jenis laporan yang disebutkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.6/SEOJK.04/2014 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Secara Elektronik oleh Emiten atau Perusahaan Publik.
13. Pada tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan tidak memiliki harta tetap berupa tanah dan/atau bangunan. Pemilikan harta kekayaan Perseroan berupa harta bergerak (kendaraan bermotor) telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum, tidak sedang dalam sengketa serta tidak sedang dijaminkan kepada pihak ketiga dan telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.
14. Pada tanggal Pendapat Hukum ini Perseroan memiliki penyertaan saham yang dilakukan secara sah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada (i) PT MNC Asset Management (“**MNCAM**”) dengan presentase sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan

persen); (ii) PT MNC Sekuritas (“**MNCS**”) dengan presentase sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen); (iii) PT MNC Finance (“**MNCF**”) dengan presentase sebesar 99,999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan persen); (iv) PT MNC Life Assurance (“**MNCLA**”) dengan presentase sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen); (v) PT MNC Asuransi Indonesia (“**MNCAI**”) dengan presentase sebesar 99,98% (sembilan puluh sembilan koma sembilan delapan persen); (vi) PT MNC Guna Usaha Indonesia (“**MNCGUI**”) dengan presentase sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen) dan (vii) PT Bank MNC Internasional Tbk (“**Bank MNC**”) dengan presentase sebesar 41,43% (empat puluh satu koma empat tiga persen); (viii) PT Medan Nusantara Propertindo (“**MDNP**”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (ix) PT Riau Nusantara Propertindo (“**RINP**”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (x) PT Bandung Nusantara Propertindo (“**BDNP**”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xi) PT Semarang Nusantara Propertindo (“**SGNP**”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xii) PT Makassar Nusantara Propertindo (“**MKNP**”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xiii) PT Jakarta Nusantara Propertindo (“**JKNP**”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xiv) PT Surabaya Nusantara Propertindo (“**SBNP**”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xv) PT Palembang Nusantara Propertindo (“**PLNP**”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen); (xvi) PT Yogyakarta Nusantara Propertindo (“**YKNP**”) dengan presentase sebesar 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan dua persen);

PT MNC Asset Management (“**MNCAM**”)

MNCAM yang didirikan dengan nama “PT Bhakti Asset Management” yang kemudian berubah menjadi PT MNC Asset Management berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham di Luar Rapat No.48 tanggal 30 November 2010, dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCAM telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diluar Rapat No.07 tanggal 30 Desember 2015, dibuat dihadapan Sendy Yudhawan, S.H., M.Kn Notaris di Tangerang yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan

No.AHU-0002123.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Januari 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAM adalah sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 (SERIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	100.000.000	100.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	26.260.000	26.260.000.000,00
Modal Disetor	26.260.000	26.260.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	73.740.000	73.740.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia	26.257.500	26.257.500.000,00	99,99
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk.	2.500	2.500.000,00	0,01
Jumlah	26.260.000	26.260.000.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan MNCAM baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perseroan telah melakukan penyertaan di MNCAM sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat No.20 tanggal 26 September 2017, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0174960 Tanggal 27 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor.AHU-0120021.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 September 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM adalah sebagai berikut :

Direksi:

Direktur Utama : Frery Kojongian
 Direktur : Yong Julia
 Direktur : Suwito Haryatno
 Direktur : Febriyani Sjoftan

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Wito Mailoa
 Komisaris : Totok Sugiharto
 Komisaris : Stien Maria Schouten

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCAM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No.44 tanggal 7 Agustus 2008, dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-05450.AH.01.02.TH.2009 tanggal 27 Februari 2009, maksud dan tujuan MNCAM ialah berusaha dan bergerak dalam bidang pengelolaan investasi bagi nasabah perorangan maupun instansi dalam arti yang seluas-luasnya.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCAM tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan. MNCAM memiliki kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset material MNCAM telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCAM tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAM dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MNCAM dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usaha MNCAM telah ditandatangani secara sah oleh MNCAM dan mengikat MNCAM dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT MNC Sekuritas (“MNCS”)

MNCS yang didirikan dengan nama “PT Bhakti Securities” yang telah berganti nama menjadi PT MNC Securities berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.4 tanggal 5 Agustus 2008, dibuat dihadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian diubah namanya menjadi **PT MNC Sekuritas (“MNCS”)** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Securities No. 17 tanggal 22 Maret 2017, dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCS telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT MNC Securities No. 8 tanggal 17 November 2016 (**"Akta No. 08 tanggal 17 November 2016"**), dibuat dihadapan Sendy Yudhawan, S.H., Mkn, Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0100208 Tahun 2016, tanggal 18 November 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0137719.AH.01.11 Tahun 2016, tanggal 18 November 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCS adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	1.000.000.000	100.000.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	350.000.000	350.000.000.000,-
Modal Disetor	350.000.000	350.000.000.000,-
Sisa Saham Dalam Portepel	Rp. 650.000.000	Rp. 650.000.000.000

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000 (seribu rupiah) per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT. MNC Kapital Indonesia Tbk	349.998.000	349.998.000.000	99,99
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	2.000	2.000.000,-	0.01
Total	350.000.000	350.000.000.000	100

Riwayat struktur permodalan MNCS baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT MNC Sekuritas No. 3 tanggal 1 Maret 2018 (**"Akta No. 3 tanggal 1 Maret 2018"**), dibuat dihadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan tentang perubahan data perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0090261 Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029617.AH.01.11 Tahun 2018, tanggal 01 Maret 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Susy Meilina
 Direktur : Dadang Suryanto

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Direktur : Fifi Virgantria
Direktur : Marlina

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Hary Tanoesoedibjo
Komisaris : Agustinus Wishnu Handoyono
Komisaris Independen : Christ Soepontjo

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCS tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No.4 tanggal 5 Agustus 2008, dibuat dihadapan Wahyu Nurani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-76905.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 23 Oktober 2008, maksud dan tujuan MNCS ialah bergerak dalam bidang Perusahaan Efek.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCS tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, MNCS memiliki kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset material MNCS telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCS telah memiliki perizinan yang masih berlaku untuk melaksanakan kegiatan usahanya termasuk dibidang ketenagakerjaan, MNCS belum memberikan bukti telah mendaftarkan karyawannya pada BPJS Ketenagakerjaan beserta dengan bukti-bukti pembayaran iurannya. Terhadap belum adanya pendaftaran BPJS Kesehatan maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 15 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang tidak melaksanakan ketentuan akan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, atau tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu. MNCS juga belum memiliki Peraturan Perusahaan yang baru dan masih memakai Peraturan Perusahaan yang lama.

MNCS tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCS dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MNCS dengan pihak ketiga baik sehubungan dengan kegiatan usaha ataupun perjanjian kredit dengan Bank telah ditandatangani secara sah oleh MNCS dan mengikat MNCS dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT MNC Finance (“MNCF”)

MNCF yang didirikan dengan nama “PT Citra International Finance & Investment Corporation” yang telah melakukan perubahan nama menjadi PT Bhakti Finance berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No 48 tanggal 10 November 2003, dibuat dihadapan Aulia Taufani, SH sebagai pengganti dari Sutjipto, SH., Notaris di Jakarta Selatan dan berganti menjadi **PT MNC Finance** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham (Di Luar Rapat) No.5 tanggal 10 Desember 2010, dibuat dihadapan Meiyane Halimatussyadiah, S.H., Notaris di Jakarta adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku, kecuali untuk Surat Keterangan Domisili/SITU/HO Cabang baik yang telah habis masa berlakunya maupun yang belum diberikan kepada kami yaitu untuk kantor cabang Tangerang City, Bekasi II Cikarang, Cirebon, Malang, Yogyakarta, Pekanbaru, Metro Lampung, Potianak, Banjarmasin, Palangkaraya, Singkawang, Manado dan Tanda Daftar Perusahaan untuk kantor cabang Jakarta, Bogor, Bandung, Purwokerto, Serang, Yogyakarta, Karawang, Metro Lampung, Pringsewu, Tulang Bawang, Pontianak, Palangkaraya, Singkawang.

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCF telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT MNC Finance No. 36 tanggal 23 Desember 2015, dibuat dihadapan Gamal Wahidin, S.H., Notaris di Jakarta yang telah, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. AHU-0949023.AH.01.02.Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0991957 tanggal 29 Desember 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3599301.AH.01.11 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCF adalah sebagai berikut:

Permodalan	Nilai Nominal Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah) per Saham	
	Saham	Rupiah
Modal Dasar	1.900.000	1.900.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	476.000	476.000.000.000,-
Modal Disetor	476.000	476.000.000.000,-
Sisa Saham Dalam Portepel	Rp. 1.424.000	Rp. 1.424.000.000.000

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per Saham		
	Saham	Rupiah	%
PT. MNC Kapital Indonesia Tbk	475.993	475.993.000.000,-	99.999%
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	7	7.000.000,-	0.001 %
Total	476.000	476.000.000.000,-	100%

Riwayat struktur permodalan MNCF baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT MNC Finance No. 15 tanggal 18 Desember 2017, dibuat dihadapan Indrasari Kresnadjadja, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0202415 tanggal 19 Desember 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0161361.AH.01.11 Tahun 2017, tanggal 19 Desember 2017, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCF adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur Utama : Suhendra Lie
 Direktur : Erwin Sugianto
 Direktur : Tjahjo Watjono
 Direktur : Suryadi

Dewan Komisaris

Komisaris : Totok Sugiharto
 Komisaris Independen : Alex Tangyong

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCF tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCF dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat PT MNC Finance No. 37 tanggal 17 November 2015, dibuat dihadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., MK.n, Notaris di Jakarta Utara yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Keputusan Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia No. AHU.0946231.AH.01.02 Tahun 2015 tanggal 18 November 2015, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0981258 tanggal 18 November 2015, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-3581448.AH.01.11 Tahun 2015, tanggal 18 November 2015, maksud dan tujuan MNCF adalah berusaha dalam bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (Lembaga Pembiayaan).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCF memiliki harta kekayaan berupa tanah dan memiliki dan menguasai kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset material MNCF telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCF telah memenuhi ketentuan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan termasuk diantaranya BPJS Ketenagakerjaan akan tetapi terdapat kewajiban kantor cabang terkait pelaporan Wajib Lapor Ketegakerjaan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih belum diberikan yaitu untuk kantor cabang Tangerang City, Palangkaraya dan Singkawang.

MNCF tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja kecuali untuk (i) Perkara No. 21/SK/PTUN-SRG tanggal gugatan 19 Desember 2016 di PTUN Serang antara Diddy Hermawan selaku Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan dan MNCF sebagai Pihak Intervensi selaku Tergugat; (ii) Perkara Nomor 53/Pdt.G/2017.PN. Kwg tanggal gugatan 25 September 2017 di Pengadilan Negeri Karawang antara Olah selaku Penggugat dan MNCF selaku Tergugat; (iii) Perkara Nomor 310/PDT.G/2018/PA.Krw tanggal gugatan 22 Januari 2018 di Pengadilan Agama Karawang antara Ade Komar selaku Penggugat melawan MNCF selaku Tergugat; (iv) Perkara No.121/Pdt.G/2017/PN.8jm tanggal 18 Desember 2017 di Pengadilan Negeri Banjarmasin antara Muhammad Husni Mubarak selaku Penggugat melawan MNCF selaku Tergugat.

Kami berpendapat bahwa perkara yang sedang dihadapi MNCF tersebut berdasarkan substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha MNCF.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCF dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara,

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MNCF dengan pihak ketiga baik sehubungan dengan kegiatan usaha dan perjanjian kredit dengan Bank telah ditandatangani secara sah oleh MNCF dan mengikat MNCF dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT MNC Life Assurance (“MNCLA”)

MNCLA yang didirikan dengan nama “PT Sugih Citra” yang kemudian pada tahun 2010 diubah namanya menjadi **PT MNC Life Assurance (“MNCLA”)** berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 81 tanggal 5 November 2010, yang dibuat dihadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku kecuali untuk bidang ketenagakerjaan, MNCLA belum melaksanakan perpanjangan Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang wajib didaftarkan kembali pada tanggal 25 Juni 2016 dan MNCLA belum memberikan bukti pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Terkait dengan kantor pemasaran MNCLA juga terdapat izin domisili yang belum diperpanjang yaitu Tangerang, Solo dan Tabanan.

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCLA telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCLA No. 31 tanggal 29 Desember 2017, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0036540 tanggal 25 Januari 2018, Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0010584.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 25 Januari 2018, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCLA adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 (SERIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	486.108.108	486.108.108.000,00
Modal Ditempatkan	267.197.027	267.197.027.000,00
Modal Disetor	267.197.027	267.197.027.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	218.911.081	218.911.081.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000,00 PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	267.146.500	267.146.500.000,00	99,98
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	50.527	50.527.000,00	0,02
Jumlah	267.197.027	267.197.027.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan MNCLA baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCLA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCLA No. 30 tanggal 29 Maret 2018, yang dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0134452 tanggal 04 April 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047296.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 04 April 2018, sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCLA adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direksi Utama : Ogan Irfan Darmawulan
Direktur : Aldi Rinaldi
Direktur : Lilis Syamsudin

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris : Bima Aranta
Komisaris : Totok Sugiharto
Komisaris Independen : Bambang Prayogo

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCLA tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCLA dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.76 tanggal 14 Maret 2008, dibuat dihadapan Siti Pertiwi Henny Singgih, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-19558.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 April 2008, maksud dan tujuan MNCLA ialah berusaha dalam bidang asuransi jiwa.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCLA tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, MNCLA memiliki kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset

material MNCLA telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCLA tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCLA dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MNCLA dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh MNCLA dan mengikat MNCLA dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT MNC Asuransi Indonesia (“MNCAI”)

MNCAI yang didirikan pada tahun 1987 dengan nama “PT Asuransi Jamindo Pusaka” yang kemudian merubah nama menjadi PT Jamindo General Insurance berdasarkan Akta Berita Acara Rapat PT. Asuransi Jamindo Pusaka No.31 tanggal 26 Oktober 2004, dibuat oleh Rose Takarina, S.H., Notaris di Jakarta yang kemudian merubah nama menjadi PT MNC Asuransi Indonesia berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Jamindo General Insurance No.195 tanggal 20 Desember 2011, dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh izin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCAI telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCAI No.18 tanggal 28 Februari 2017 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCAI No. 10 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MNCAI No.AHU-0019139.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0115924.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAI adalah sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL RP 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	65.200	326.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	34.888	174.440.000.000,00
Modal Disetor	34.888	174.440.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	30.312	151.560.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL RP 5.000.000,00 (LIMA JUTA RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	34.880	174.400.000.000,00	99,98
Koperasi Karyawan PT. Bhakti Investama Tbk	8	40.000.000,00	0,02
Jumlah	34.888	174.440.000.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan MNCAI baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCAI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No.15 tanggal 16 Agustus 2016, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0072582 tanggal 18 Agustus 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0096035.01.11.Tahun 2016 tanggal 18 Agustus 2016 jls. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCAI No. 10 tanggal 14 September 2017, Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat No.20 tanggal 20 April 2018, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0162035 tanggal 24 April 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0058039.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 24 April 2018, ketiganya dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI adalah sebagai berikut:

Direksi :

Direktur Utama : Sylvy Setiawan
 Direktur : Suherman Budi Darmawan
 Direktur : Rinawati
 Direktur : Andre Franklin Sahelangi

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Totok Sugiharto
 Komisaris Independen : Inkes Lukman
 Komisaris Independen : Kushindrarto

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCAI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MNCAI No. 10 tanggal 14 September 2017, dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn, Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar MNCAI No.AHU-0019139.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 18 September 2017, maksud dan tujuan MNCAI adalah berusaha dalam bidang Asuransi Umum.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCAI tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, MNCAI memiliki kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset material MNCAI telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCAI tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCAI dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MNCAI dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh MNCAI dan mengikat MNCAI dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT MNC Guna Usaha Indonesia (“MNCGUI”)

MNCGUI yang didirikan tahun 1993 dengan nama “PT Indo Leasing Perkasa” yang kemudian berganti nama menjadi PT MNC Guna Usaha Indonesia berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat MNCGUI No. 30 tanggal 04 Desember 2014, yang dibuat dihadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku, kecuali Peraturan Perusahaan MNCGUI yang telah berakhir jangka waktunya tetapi secara hukum masih dapat dipergunakan sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Perusahaan yang baru, dan untuk *Point Of Sales* MNCGUI Denpasar dan Medan sampai dengan tanggal LPSH belum diserahkan kepada kami.

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar MNCGUI telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, namun demikian akta-akta perubahan Anggaran Dasar MNCGUI tersebut sampai saat ini belum diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham MNCGUI No. 20 tanggal 30 Oktober 2017, dibuat dihadapan Amastasia Dau, S.H., Notaris di Jakarta Timur, yang telah Mendapatkan persetujuan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0023417.AH.01.02.Tahun 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0141877.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 09 November 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MNCAI adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp1.000.000,00 (SATU JUTA RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	748.000	748.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	187.000	187.000.000.000,00
Modal Disetor	187.000	187.000.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	561.000	561.000.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.1.000.000,00 PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	186.999	186.999.000.000,00	99,99
Kooperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	1.000.000,00	0,01
Jumlah	187.000	187.000.000.000,00	100,00

Riwayat struktur permodalan MNCGUI baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar MNCGUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham MNCGUI No. 25 tanggal 1 Maret 2018, dibuat dihadapan Henry, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0090832 tanggal 02 Maret 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0029816.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 02 Maret 2018, susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGUI adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur : Yusnandi Liauw
 Direktur : Meita Lilisari

Direktur : Ir. Paulus Cholot Janala
Dewan Komisaris
Komisaris : Totok Sugiharto
Komisaris : Erdie Suriaherdadi Manan
Independen

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGUI tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MNCGUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan **Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 42 tanggal 05 Desember 2017**, dibuat dihadapan Henry, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0199720 tanggal 12 Desember 2017, dan Didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0157547.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 12 Desember 2017, maksud dan tujuan MNCGUI adalah berusaha dalam bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank (Lembaga Pembiayaan).

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MNCGUI tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan, MNCGUI memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset material MNCGUI telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

MNCGUI tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MNCGUI dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MNCGUI dengan pihak ketiga baik sehubungan dengan kegiatan usaha dan perjanjian kredit telah ditandatangani secara sah oleh MNCGUI dan mengikat MNCGUI dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan. Akan tetapi Perseroan memberikan Jaminan Korporasi/*Corporate Guarantee* sehubungan dengan Perjanjian Kredit dengan PT Bank Capital Indonesia Tbk. dengan jenis fasilitas pinjaman yaitu Pinjaman Aksep Money Market dengan plafond Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah)

PT Bank MNC Internasional Tbk. (“Bank MNC”)

Bank MNC yang didirikan dengan nama “PT Bank Bumiputera Indonesia” yang kemudian pada tahun 2014 diubah namanya menjadi PT Bank MNC Internasional Tbk (“Bank MNC”) berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar PT ICB Bumiputera Tbk No. 57 tanggal 16 Juli 2014, yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya, yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku kecuali untuk Perjanjian Kerja Bersama yang belum diperbaharui akan tetapi secara hukum peraturan perusahaan yang telah berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai ditandatanganinya perjanjian kerja bersama atau disahkannya peraturan perusahaan yang baru.

Bank MNC juga telah memperoleh ijin-ijin yang terkait dengan Kantor Cabang (KC), Kantor Cabang Pembantu (KCP), Kantor Cabang Pembantu Mikro (KCP Mikro), Kantor Kas (KK), Kantor Kas Mikro (KK Mikro), dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan ijin-ijin yang telah diperoleh tersebut sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini masih berlaku, kecuali beberapa KC, KCP, KCP Mikro, KK, KK Mikro, dan ATM yang sedang dalam proses perpanjangan/permohonan baru, yaitu:

- a. SKD untuk KCP Pluit, KCP Tanjung Duren, KCP Wisma Bumiputera, KK Bekasi SNK, KCP Alam Sutra dan KK Depok.
- b. TDP untuk KCP Glodok Plaza, KCP Pluit, KCP Tanjung Duren, KCP Alam Sutra, KK Depok, KC Balikpapan.

Perubahan-perubahan Anggaran Dasar Bank MNC telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar Bank MNC Nomor 64 tanggal 20 Desember 2017, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH.01.03-0205497 tanggal 27 Desember 2017, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0165465.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 27 Desember 2017, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Bank MNC adalah sebagai berikut :

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp.100,00 (SERATUS RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	60.000.000.000	6.000.000.000.000,00
Modal Ditempatkan	21.261.473.347	2.126.147.334.700,00
Modal Disetor	21.261.473.347	2.126.147.334.700,00
Sisa Saham Dalam Portepel	38.738.526.653	3.873.852.665.300,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp.100,00 PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk.	8.809.678.241	880.967.824.100,00	41,43
Marco Prince Corp	2.654.374.881	265.437.488.100,00	12,48
Masyarakat (dibawah 5%)	9.797.420.225	979.742.022.500,00	46,09
Jumlah	21.261.473.347	2.126.147.334.700,00	100,00

Riwayat struktur permodalan Bank MNC baik yang mengenai peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor adalah benar dan berkesinambungan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank MNC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 01 tanggal 01 September 2016 , yang dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0077217 tanggal 02 September 2016 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0103051.AH.01.11 Tahun 2016 tanggal 02 September 2016 Jo. Surat Pernyataan Bank MNC No. 392/MNCB/DIR/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank MNC adalah sebagai berikut:

Direksi:

Presiden Direktur : Benny Purnomo
 Direktur : Nerfita Primasari
 Direktur Independen : Raden Widiatma Bunarto
 Direktur Fungsi Kepatuhan : Chisca Mirawati

Komisaris:

Presiden Komisaris merangkap
 Komisaris Independen : Purnadi Harjono
 Komisaris Independen : Eko Budi Supriyanto
 Komisaris Independen : Ir. Rusli Witjahjono

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank MNC tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Bank MNC dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan RUPST No.7 tanggal 17 April 2009 yang dibuat dihadapan Dr. Amrul Partomuan Pohan, SH. LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-22959.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan di bawah No.AHU-0029405.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 26 Mei 2009, maksud dan tujuan Bank MNC adalah berusaha dalam bidang bank umum.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, Bank MNC tidak memiliki dan/atau menguasai harta kekayaan berupa tanah dan/atau bangunan. Bank MNC memiliki kendaraan bermotor yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. Asset material Bank MNC telah diasuransikan dan jumlah pertanggungannya memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungkan.

Bank MNC tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja selain daripada 26 (dua puluh enam) perkara yang dihadapi dan kami berpendapat bahwa perkara yang sedang dihadapi Bank MNC tersebut berdasarkan substansi gugatan tidak mempunyai pengaruh secara signifikan/material terhadap kelangsungan usaha Bank MNC.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank MNC dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh Bank MNC dengan pihak ketiga sehubungan kegiatan usaha Bank MNC telah ditandatangani secara sah oleh Bank MNC dan mengikat Bank MNC dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT Medan Nusantara Propertindo (“MDNP”)

MDNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, MDNP belum mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 03 tanggal 05 Agustus 2016 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0035136.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0091709.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MDNP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000	100,00

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MDNP No. 15 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079208 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025755.AH.01.11.2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDNP adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Totok Sugiharto

Dewan Komisaris

Komisaris : Wito Mailoa

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MDNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian MNDP, maksud dan tujuan MDNP ialah dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MDNP memiliki harta tetap berupa tanah dan bangunan yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses penurunan hak menjadi Hak Guna Bangunan. MDNP tidak memiliki harta bergerak berupa kendaraan bermotor. MNDP tidak memiliki asuransi terhadap harta berupa tanah dan bangunan tersebut.

MDNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MDNP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MDNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh MDNP dan mengikat MDNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT Riau Nusantara Propertindo (“RINP”)

RINP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, RINP belum mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05 tanggal 5 Agustus 2016 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035164.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0091778.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 89 tanggal 8 November 2011, Tambahan No.77947, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RINP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000	100,00

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 05 tanggal 5 Agustus 2016 jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Di Luar Rapat No.16 tanggal 25 Oktober 2016 jo. Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat No.14 tanggal 19 Februari 2018, ketiganya dibuat dihadapan Ivan Gelium Lantu, S.H.,M.Kn., Notaris di Kota Depok yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079202 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025754.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Totok Sugiharto

Dewan Komisaris

Komisaris : Wito Mailoa

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar RINP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian RINP, maksud dan tujuan RINP ialah dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, RINP memiliki harta kekayaan berupa tanah yang telah dilengkapi dengan dokumen kepemilikan yang sah menurut hukum dan kebiasaan hukum serta tidak sedang dalam sengketa. RINP tidak memiliki harta kekayaan berupa kendaraan bermotor. RINP menjaminkan asset tanah dan bangunan yang dimilikinya sehubungan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh PT MNC Finance dari PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No.71 tanggal 12 Oktober 2016, dibuat dihadapan Riri Liestia, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pekanbaru. RINP tidak memiliki asuransi terhadap harta berupa tanah tersebut.

RINP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris RINP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh RINP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh RINP dan mengikat RINP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT Bandung Nusantara Propertindo (“BDNP”)

BDNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, BDNP belum mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 06 tanggal 5 Agustus 2016 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No No.AHU-0035171.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0091796.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKNP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000,00	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000,00	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000	100,00

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat BDNP No. 16 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079212 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025756.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Oktober 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BDNP adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Totok Sugiharto

Dewan Komisaris

Komisaris : Wito Mailoa

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris BDNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar BDNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian BDNP, maksud dan tujuan BDNP ialah dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, BDNP tidak memiliki harta baik bergerak maupun tetap berupa tanah dan bangunan.

BDNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris BDNP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh BDNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh BDNP dan mengikat BDNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT Semarang Nusantara Propertindo (“SGNP”)

SGNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SGNP belum mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 07 tanggal 5 Agustus 2016 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0035177.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0091809.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SGNP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000	100,00

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat SGNP No. 12 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0079190 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0025748.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SGNP adalah sebagai berikut :

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Direksi

Direktur : Totok Sugiharto

Dewan Komisaris

Komisaris : Wito Mailoa

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SGNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar SGNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian SGNP, maksud dan tujuan SGNP ialah dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SGNP tidak memiliki harta baik bergerak maupun tetap berupa tanah dan bangunan.

SGNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris SGNP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

PT Makassar Nusantara Propertindo (“MKNP”)

MKNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, MKNP belum mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 04 tanggal 5 Agustus 2016 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0035158.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 8 Agustus 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0091759.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 08 Agustus 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MKNP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000	100,00

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat MKNP No. 20 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079240 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025765.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKNP adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Totok Sugiharto

Dewan Komisaris

Komisaris : Wito Mailoa

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar MKNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian MKNP, maksud dan tujuan MDNP ialah dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, MKNP tidak memiliki harta baik bergerak maupun tetap berupa tanah dan bangunan.

MKNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris MKNP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh MKNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh MKNP dan mengikat MKNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT Jakarta Nusantara Propertindo (“JKNP”)

JKNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, JKNP belum mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 10 tanggal 19 September 2016 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0041614.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0109779.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham JKNP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000,00	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000,00	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000	100,00

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat JKNP No. 19 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di

hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079236 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025763.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris JKNP adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Wito Mailoa

Dewan Komisaris

Komisaris : Darma Putra Wati

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris JKNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar JKNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian JKNP, maksud dan tujuan JKNP ialah dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, JKNP tidak memiliki harta baik bergerak maupun tetap berupa tanah dan bangunan.

JKNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris JKNP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh JKNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh JKNP dan mengikat JKNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT Surabaya Nusantara Propertindo (“SBNP”)

SBNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, SBNP belum mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 11 tanggal 19 September 2016 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0041622.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0109799.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 20 September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBNP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000	100,00

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat SBNP No. 18 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079232 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025759.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBNP adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Wito Mailoa

Dewan Komisaris

Komisaris : Darma Putra Wati

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar SBNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian SBNP, maksud dan tujuan SBNP ialah dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, SBNP tidak memiliki harta baik bergerak maupun tetap berupa tanah dan bangunan.

SBNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris SBNP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh SBNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh SBNP dan mengikat SBNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

PT Palembang Nusantara Propertindo (“PLNP”)

PLNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, PLNP belum mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 15 tanggal 21 September 2016 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0042734.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 27 September 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0113078.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 September 2016, struktur permodalan dan susunan pemegang saham SBNP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000,00	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000,00	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000	100,00

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat PLNP No. 13 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079192 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025751.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PLNP adalah sebagai berikut :

Direksi

Direktur : Wito Mailoa

Dewan Komisaris

Komisaris : Darma Putra Wati

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris PLNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar PLNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian PLNP, maksud dan tujuan PLNP ialah dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, PLNP tidak memiliki harta baik bergerak maupun tetap berupa tanah dan bangunan.

PLNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris PLNP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh PLNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh PLNP dan mengikat PLNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang pemegang obligasi maupun membatasi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

PT Yogyakarta Nusantara Propertindo (“YKNP”)

YKNP adalah suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas yang telah didirikan pada tahun 2016 secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan telah memperoleh ijin-ijin pokok yang diperlukan untuk menyelenggarakan kegiatan usahanya yang sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini perijinan tersebut masih berlaku.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, YKNP belum mengalami perubahan Anggaran Dasar.

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 16 tanggal 21 September 2016 (“**Akta Pendirian**”) dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0042744.AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 27 September 2016, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113118.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 27 September 2016 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 5, struktur permodalan dan susunan pemegang saham YKNP adalah sebagai berikut:

PERMODALAN	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM	
	SAHAM	RUPIAH
Modal Dasar	5.000	500.000.000,00
Modal Ditempatkan	1.250	125.000.000,00
Modal Disetor	1.250	125.000.000,00
Sisa Saham Dalam Portepel	3.750	375.000.000,00

PEMEGANG SAHAM	NILAI NOMINAL Rp. 100.000,- (SERATUS RIBU RUPIAH) PER SAHAM		
	SAHAM	RUPIAH	%
PT MNC Kapital Indonesia Tbk	1.249	124.900.000,00	99,92
Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk	1	100.000,00	0,08
Jumlah	1.250	125.000.000	100,00

Pada tanggal Pendapat Hukum ini, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat YKNP No. 17 tanggal 19 Februari 2018, dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn. Notaris di Depok, yang telah Diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.03-0079213 tanggal 22 Februari 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0025757.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 22 Februari 2018, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris YKNP adalah sebagai berikut :

028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

Direksi

Direktur : Wito Mailoa

Dewan Komisaris

Komisaris : Darma Putra Wati

Masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris YKNP tersebut diatas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar YKNP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pendirian YKDP, maksud dan tujuan MDNP ialah dalam bidang perdagangan, pembangunan, konstruksi, jasa dan real estat.

Sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini, YKNP tidak memiliki harta baik bergerak maupun tetap berupa tanah dan bangunan.

YKNP tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris YKNP dalam jabatannya sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris maupun dalam kedudukannya sebagai pribadi tidak sedang terlibat sebagai pihak dalam perkara perdata, pidana, tata usaha negara, arbitrase, pajak, perkara kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), perselisihan hubungan industrial maupun pemutusan hubungan kerja.

Perjanjian yang dibuat oleh YKNP dengan pihak ketiga telah ditandatangani secara sah oleh YKNP dan mengikat YKNP dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dapat menghalangi penerbitan obligasi Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang saham Perseroan, menghalangi hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

15. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018” ini Perseroan telah memperoleh persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris PT MNC Kapital Indonesia Tbk. tanggal 12 Februari 2018.
16. Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik PT MNC Investama Tbk. yang ada di dalam Perseroan dengan nilai 150% dari nilai dana Obligasi.

Hak Pemegang Obligasi ini adalah paripassu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

17. Sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia”, seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini

setelah dikurangi biaya-biaya emisi Obligasi dan Sukuk Ijarah, akan dipergunakan untuk:

1. Sejumlah Rp225.000.000.000,- (dua ratus dua puluh lima miliar rupiah) akan dipergunakan untuk pelunasan (*refinancing*) pinjaman rupiah yang dimiliki oleh Perseroan, yaitu pinjaman Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia Tahun 2013 dengan nilai fasilitas pinjaman yang akan jatuh tempo pada 5 Juli 2018.
2. Sisa dana akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan berkewajiban menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai seluruh dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018” telah direalisasikan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Wali Amanat setelah disetujui RUPO.

18. Dalam rangka Penawaran Umum “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018” telah dibuat dan ditandatangani secara sah :
 - a. Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di KSEI No.SP-021/PO/KSEI/0218 tanggal 3 April 2018, oleh dan antara MNCKI selaku Perusahaan Terdaftar dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dibawah tangan;
 - b. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahun 2018 No. 1 tanggal 3 April 2018 jo. Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahun 2018 No. 64 tanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan;
 - c. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No.2 tanggal 3 April 2018 jo. Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 65 tanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara MNCKI selaku Emiten dan PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. selaku Wali Amanat;
 - d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No.3 tanggal 3 April 2018 jo. Akta Addendum

dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No.66 tanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan antara MNCKI selaku Emiten dan PT MNC Sekuritas (“MNC Sekuritas”) sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi;

- e. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No.4 tanggal 3 April 2018 jo. Akta Addendum dan Pernyataan Kembali Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018 No. 67 tanggal 30 Mei 2018, keduanya dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang dibuat oleh MNCKI selaku Emiten yang mengakui bahwa Emiten benar dan secara sah berutang kepada pemegang obligasi yang dalam hal ini diwakili oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. selaku Wali Amanat dan berjanji untuk membayar lunas jumlah yang terutang kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran dalam jumlah sebanyak-banyaknya Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi.
- f. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No.5 tanggal 3 April 2017, oleh dan antara MNCKI selaku Penerbit Efek dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
- g. Perjanjian Pendahuluan Pencatatan Efek No.SP-00003/BEI.PP2/04-2018 tanggal 23 April 2018 oleh dan antara Perseroan dan PT Bursa Efek Indonesia, yang dibuat dibawah tangan.

Kami berpendapat bahwa perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan “Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018”, telah dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan bahwa Perjanjian Perwaliamanatan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bapepam-LK No.VI.C.4, Lampiran Keputusan Bapepam dan LK No.Kep-412/BL/2010 tanggal 6 September 2010 tentang Ketentuan Umum dan Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang.

- 19. Perseroan dan Wali Amanat, sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”) dan hubungan kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 Ayat (3) UUPM.
- 20. Perseroan telah mendapatkan Sertifikat Peningkatan atas Obligasi Berkelanjutan II Tahun 2018 periode 12 Maret 2018 sampai dengan 1 Maret 2019 yaitu idBBB (Triple B) yang dikeluarkan oleh PT Peningkat Efek Indonesia (Pefindo). Perseroan dan PT Peningkat Efek Indonesia (Pefindo), sampai dengan tanggal Pendapat Hukum ini tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

JUSUF INDRADEWA & PARTNERS
Legal Consultants

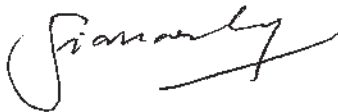
028/CS-DS-YR-HN/II-G/VI/18

21. Sampai dengan tanggal pendapat hukum ini antara Perseroan dengan PT MNC Securities selaku Penjamin Pelaksana Emisi dan Penjamin Emisi memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
22. Bahwa informasi yang disajikan dalam Prospektus dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018" yang berkaitan dengan aspek hukum telah sesuai dengan hasil Uji Tuntas yang kami lakukan.

Demikian Pendapat Hukum ini kami buat sesuai dengan prinsip keterbukaan dan berdasarkan data-data, dokumen-dokumen dan informasi-informasi yang kami peroleh, sebagaimana layaknya konsultan hukum yang bebas dan tidak mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan, serta ditujukan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018" dan kami bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

KONSULTAN HUKUM JUSUF INDRADEWA & PARTNERS



Cecilia T.A. Sianawati, S.H.
STTD No.STTD.KH-21/PM.22/2018
Anggota HKHPM No.92036

Tembusan:

Yang Terhormat PT Bursa Efek Indonesia
Yang Terhormat Otoritas Jasa Keuangan

XVI. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Berikut ini adalah Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan pendapat tanpa modifikasi serta pada tanggal 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2016 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan pendapat tanpa modifikasi. Audit dilaksanakan sesuai dengan Standard Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Laporan audit tersebut ditandatangani oleh Florus Daeli, MM., CPA. (Rekan pada KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan Ijin AP No. 0126) untuk tahun 2017 dan oleh Muhammad Irfan (Rekan pada KAP Satrio, Bing, Eny dan Rekan dengan Ijin AP No. 0565) untuk tahun 2016.

Halaman ini sengaja dikosongkan

No. 038/MNCKI/DIR/IV/18

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN
KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2017 DAN 2016
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS
ANAK**

***DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2017
AND 2016
PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk AND
SUBSIDIARIES***

Kami yang bertanda tangan dibawah ini

We the undersigned

- | | | |
|-----------------|--|------------------|
| 1. Nama | Wito Mailoa | Name |
| Alamat kantor | MNC Financial Center Lt.21
Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta | Office address |
| Alamat domisili | Grand ITC Permata Apt. Tower B2302 RT 011 RW 010
Grogol Utara – Kebayoran Lama, Jakarta Selatan | Domicile address |
| Nomor telepon | 021-29709700 | Phone number |
| Jabatan | Plh. Direktur Utama / <i>President Director ad interim</i> | Position |
| 2. Nama | Totok Sugiharto | Name |
| Alamat kantor | MNC Financial Center Lt.21
Jl. Kebon Sirih No.21-27, Jakarta | Office address |
| Alamat domisili | Jl. Tanjung Duren Utara IX/713 RT 002 RW 003
Tanjung Duren Utara – Grogol Petamburan, Jakarta Barat | Domicile address |
| Nomor telepon | 021-29709700 | Phone number |
| Jabatan | Direktur Keuangan / <i>Finance Director</i> | Position |

Menyatakan bahwa

Declared that

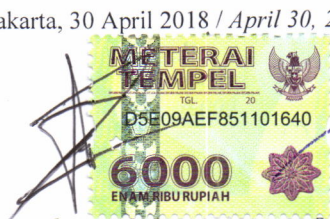
- | | |
|--|---|
| 1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan perusahaan; | 1. <i>Responsible for the preparation and presentation of the company's financial statements;</i> |
| 2. Laporan keuangan perusahaan telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia | 2. <i>The company's financial statements have been prepared and presented in accordance with the financial accounting standard in Indonesia</i> |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan perusahaan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. a. <i>All information presented in the company's financial statements is complete and correct;</i> |
| b. Laporan keuangan perusahaan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The company's financial statements do not contain any incorrect material information or fact nor omit any material information or fact;</i> |
| 4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan. | 4. <i>Responsible for the company's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

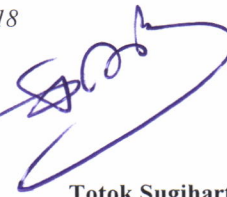
This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 30 April 2018 / *April 30, 2018*

Wito Mailoa
Plh. Direktur Utama / *President Director ad interim*



Totok Sugiharto
Direktur Keuangan / *Finance Director*



A blue ink signature of Totok Sugiharto.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Laporan No. R-462/MNCKI-KPS/FD01/IV/2018

Report No. R-462/MNCKI-KPS/FD01/IV/2018

Laporan Auditor Independen***Independent Auditors' Report*****Para Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK*****The Shareholders, Commissioners and Directors of
PT MNC KAPITAL INDONESIA TBK***

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan entitas anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT MNC Kapital Indonesia Tbk and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2017 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, Consolidated changes in equity and Consolidated cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian***Management's responsibility for the consolidated financial statements***

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such Consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Consolidated Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of Consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Tanggung jawab auditor***Auditors' responsibility***

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

Our responsibility is to express an opinion on such Consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the Consolidated financial statements are free from material misstatement.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the Consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the Consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the Consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the Consolidated financial statements.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian **PT MNC Kapital Indonesia, Tbk dan entitas anak** tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hal Lain

Laporan keuangan konsolidasian ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan Penawaran umum Berkelanjutan Obligasi II Tahap I di Bursa Efek Indonesia.

Sebelum laporan konsolidasian ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No.R-034/MNCKI-KPS/FD01/II/2018 tanggal 27 Februari 2018 atas laporan keuangan konsolidasian **PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan entitas anak** dengan opini tanpa modifikasi. Dalam rangka penawaran umum sebagaimana yang dijelaskan dalam catatan 50 atas laporan keuangan konsolidasian dan untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Entitas telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian untuk periode 31 Desember 2017 dengan beberapa tambahan pengungkapan pada catatan atas laporan konsolidasian terdahulu.

Laporan keuangan konsolidasian **PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan entitas anak** yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang menyatakan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian tersebut pada tanggal 24 Maret 2017.

Opinion

*In our opinion, the accompanying Consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the Consolidated financial position of **PT MNC Kapital Indonesia and subsidiaries** as of December 31, 2017, and its Consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Other's

These Consolidated financial statements are issued for the purpose of posting in the prospectus in connection with the Second bond II Phase Public Offering on the Indonesia Stock Exchange.

*Prior to this Consolidated report, we have issued independent auditor's report No.R-034/MNCKI-KPS/FD01/II/2018 dated February 27, 2018 to the Consolidated financial statements of **PT MNC Kapital Indonesia Tbk and subsidiaries** with unmodified opinions. In the framework of the public offering as described in Note 50 to the financial statements and to comply with the provisions of the Consolidated Financial Services Authority, the Company has reissued its financial statements for the periods of 31 December 2017 and 2016 with some additional disclosures in the notes to the consolidated statements.*

*The Consolidated financial statements of **PT MNC Kapital Indonesia Tbk and subsidiaries** which expire on December 31, 2016 and for the year then ended, audited by another independent auditor expressing unmodified opinion on those Consolidated financial statements on March 24, 2017.*

KANAKA PURADIREJA, SUHARTONO**Florus Daeti, MM., CPA.**Nomor Izin Akuntan Publik No. AP. 0126
License of Public Accountant No. AP.0126

Jakarta, 30 April 2018/ April 30, 2018

Laporan No. R-462/MNCKI-KPS/FD01/IV/2018

Laporan keuangan konsolidasian tidak dimaksudkan untuk menyajikan posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip dan praktek akuntansi yang berlaku umum di negara dan wilayah hukum selain Indonesia. Standar, prosedur dan praktek digunakan untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian tersebut mungkin berbeda dari yang berlaku umum di negara dan wilayah hukum selain Indonesia. Oleh karena itu laporan keuangan konsolidasian beserta laporan auditor tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh mereka yang tidak diberitahu tentang standar akuntansi keuangan di Indonesia dan standar auditing dan penerapannya dalam praktek.

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilised to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly the accompanying consolidated financial statements and the auditor's report thereon are not intended for use by those who are not informed about the financial accounting standards in Indonesia and auditing standards, and their application in practice.

ASET	Catatan/ Notes	2017	2016	ASSETS
Kas dan setara kas	5	1.780.674	3.245.481	Cash and cash equivalents
Deposito yang dijadikan jaminan pada lembaga kliring dan penjaminan efek Indonesia	6	7.012	6.659	Deposits used as collateral with Institute of clearing and settlement guarantee for securities company in Indonesia
Piutang pada lembaga kliring dan penjaminan efek Indonesia	6	237.072	143.543	Receivables from Institute of clearing and settlement guarantee for securities company in Indonesia
Piutang nasabah - pihak ketiga	7	811.042	1.213.479	Receivables from customers - third parties
Efek-efek	8			Securities
Pihak berelasi		269.888	291.312	Related parties
Pihak ketiga		3.998.739	4.205.519	Third parties
Piutang pembiayaan	9			Financing receivables
Pihak berelasi		184.885	197.755	Related parties
Pihak ketiga		2.640.852	2.562.779	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(22.184)	(21.552)	Allowance for impairment losses
Kredit	10			Loans
Pihak ketiga		7.056.054	7.915.557	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(331.116)	(52.521)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan Murabahah	11			Murabahah financing receivables
Pihak berelasi		555	319	Related parties
Pihak ketiga		305.296	487.687	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(2.714)	(4.429)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan Musyarakah	12			Musyarakah Mutanaqisah financing receivables
Mutanaqisah				
Pihak ketiga		169.120	85.982	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(247)	(360)	Allowance for impairment losses
Premi dan aset reasuransi	13			Premiums and reinsurance assets
Pihak berelasi		34.993	9.680	Related parties
Pihak ketiga		424.687	372.789	Third parties
Cadangan kerugian penurunan nilai		(10.577)	(9.378)	Allowance for impairment losses
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 253.947 juta pada 31 Desember 2017 dan Rp. 220.152 juta pada 31 Desember 2016	14	263.440	224.300	Property and equipment – net of accumulated depreciation of Rp. 253,947 million as of December 31, 2017 and Rp. 220,152 million as of December 31, 2016
Aset Al – Ijarah – setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp. 207.814 juta pada 31 Desember 2017 dan Rp. 213.269 juta pada 31 Desember 2016	15	59.230	77.967	Al – Ijarah assets – net of accumulated depreciation of Rp. 207,814 million as of December 31, 2017 and Rp. 213,269 million as of December 31, 2016
Goodwill	16	364.163	364.163	Goodwill
Aset pajak Tangguhan	40	397.604	140.635	Deferred tax assets
Aset lain-lain	17	1.244.795	758.653	Other Assets
JUMLAH ASET		19.883.263	22.216.019	TOTAL ASSETS

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

	Catatan/ Notes	2017	2016	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS				LIABILITIES
Simpanan	18			Deposits
Pihak berelasi		533.534	665.458	Related parties
Pihak ketiga		8.443.515	9.510.366	Third parties
Simpanan dari bank lain	19	197.257	507.316	Deposits from other banks
Liabilitas segera		39.585	33.266	Liabilities immediately payable
Utang kepada Lembaga kliring dan penjaminan perusahaan efek Indonesia	6	172.534	121.023	Payables to Institute of Clearing and settlement guarantee for securities company in Indonesia
Utang nasabah	20	782.331	1.148.686	Customers payables
Utang reasuransi	21	114.733	71.332	Reinsurance and other payables
Utang pajak	40	27.056	28.362	Taxes payable
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi	22	512.277	458.138	Insurances and investment contract liability
Liabilitas Institusi Keuangan- bank	23	1.972.323	1.685.695	Financial Institutions Liabilities- bank
Liabilitas Institusi Keuangan- non bank	24	30.406	43.190	Financial Institutions Liabilities- Non bank
Utang Al-Musyarakah	25	556.018	674.472	Al-Musyarakah loan
Utang Al-Mudharabah	26	105.067	140.454	Al-Mudharabah loan
Utang obligasi	27	224.502	223.311	Bonds payable
Medium term notes	28	69.706	30.771	Medium term notes
Utang sewa pembiayaan	29	47.394	17.664	Obligations under finance lease
Liabilitas imbalan pasca kerja	30	73.595	65.911	Employee benefits obligation
Liabilitas lain-lain	31	353.910	385.325	Other liabilities
JUMLAH LIABILITAS		14.255.743	15.810.740	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham				Capital stock - Rp 100 per value per share
Modal dasar - 15.000.000.000 saham pada 31 Desember 2017 dan 2016				Authorized - 15,000,000,000 shares as of December 31, 2017 and 2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.472.838.318 saham pada 31 Desember 2017 dan 2016	32	547.284	547.284	Issued and fully paid - 5,472,838,318 shares in December 31, 2017 and 2016
Tambahan modal disetor	33	4.390.461	4.390.461	Additional paid-in capital
Modal lain-lain - opsi saham karyawan	34	26.532	17.004	Other capital - employee stock options
Komponen ekuitas lainnya	35	(131.113)	(78.467)	Other equity components
Saldo laba :				Retained earnings:
Ditentukan penggunaannya		3.500	3.500	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		66.178	400.832	Unappropriated
Dikurangi biaya perolehan saham yang diperoleh kembali sebesar 9.390.800 saham pada 31 Desember 2017 dan 2016	36	(17.559)	(17.559)	Less cost of treasury stock 9,390,800 shares in December 31, 2017 and 2016
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		4.885.283	5.263.055	Equity attributable to the owners of the Company
Kepentingan nonpengendali	37	742.237	1.142.224	Non-controlling interests
JUMLAH EKUITAS		5.627.520	6.405.279	TOTAL EQUITY
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		19.883.263	22.216.019	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2017
(Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017	2016	
PENDAPATAN				REVENUES
Pendapatan bunga	38a,44	1.149.796	1.171.190	Interest income
Pendapatan dividen	38b,44	1.206	2.051	Dividends income
Pendapatan pembiayaan dan sewa operasi	38c,44	647.020	465.543	Financing income and operating lease
Pendapatan premi bersih	38d,42	306.505	314.785	Net premium income
Pendapatan manajemen investasi	36e	95.368	104.558	Investment banking income
Pendapatan murabahah dan musyarakah	38f,44	103.054	130.284	Murabahah and musyarakah income
Komisi perantara pedagang efek	38g,44	48.762	46.266	Brokerage commissions
Jasa manager investasi		25.284	22.128	Investment management fees
Pendapatan sewa Al-ijarah – bersih		3.518	20.056	Al-ijarah lease income – net
Pendapatan bunga		5.732	10.483	Interest income
Jumlah Pendapatan		2.386.245	2.287.344	Total Revenues
BEBAN				EXPENSES
Beban umum dan administrasi	39	1.158.072	997.940	General and administrative expenses
Beban bunga	40	963.534	859.693	Interest expenses
Penurunan nilai	10	890.291	84.067	Impairment losses
Klaim dan manfaat		226.179	196.103	Claims and benefits
Beban bagi hasil syariah		81.925	108.819	Syariah profit sharing expenses
Komisi neto		19.598	39.767	Net commission
Beban administrasi		12.395	10.158	Bank charges
Lain-lain – bersih	41	14.970	48.592	Others – net
Jumlah Beban		3.366.964	2.345.139	Total expenses
RUGI SEBELUM PAJAK		(980.719)	(57.795)	LOSS BEFORE TAX
MANFAAT PAJAK – BERSIH	42	243.090	18.854	INCOME TAX BENEFIT – NET
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN		(737.629)	(38.941)	NET LOSS FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN, SETELAH PAJAK				OTHER COMPREHENSIVE INCOME, NET OF TAX
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	30	(117)	(1.595)	Item that will not be reclassified subsequently to profit or loss- Remeasurement of defined benefits obligation
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi - Perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual		(41.361)	(60.007)	Item that may be reclassified to profit or loss- Changes in fair value of available for sale (AFS) securities
Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		(41.478)	(61.602)	Total other comprehensive income for the year, net of tax
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN		(779.107)	(100.543)	TOTAL COMPREHENSIVE LOSS FOR THE YEAR
RUGI BERSIH YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				NET LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		(334.654)	(45.713)	Owners of the company
Kepentingan nonpengendali		(402.975)	6.772	Non-controlling interests
JUMLAH		(737.629)	(38.941)	TOTAL
JUMLAH RUGI KOMPREHENSIF YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				TOTAL COMPREHENSIVE LOSS ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		(381.776)	(107.639)	Owners of the company
Kepentingan nonpengendali	37	(397.331)	7.096	Non-controlling interests
JUMLAH		(779.107)	(100.543)	TOTAL

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2017
(Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017	2016	
RUGI PER SAHAM	43			LOSS PER SHARE
(Rupiah penuh)				(Full rupiah amount)
Dasar		(61,25)	(9,22)	Basic
Dilusian		(61,25)	(9,22)	Diluted

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2017

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2017

(Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)

Komponen ekuitas lainnya / Other equity components															Saldo laba/ Retained earnings	

Balance as of January 1, 2016
Net loss for the year
Other comprehensive income
Exercise of employee stock options
Stock issuance without preemptive rights
Issuance of shares through exercise of warrants
Purchase of treasury stock by subsidiary
Sale of treasury stock by subsidiary
Changes in equity of subsidiaries
Balance as of December 31, 2016
Net loss for the year
Other comprehensive income
Changes in equity of subsidiaries
Exercise of employee stock options

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT MNC KAPITAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2017

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MNC KAPITAL Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2017

(Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Bunga, provisi dan komisi kredit yang diterima	36	1.045.748	1.051.539	Interest, loan commissions and fees received
Penerimaan dari penjualan portofolio efek	36	125.770	714.932	Proceeds from sale of securities owned
Penerimaan dari nasabah	36	189.946	141.772	Receipts from customers
Penerimaan dari premi dan klaim reasuransi	36	174.516	76.199	Receipts from premium and reinsurance claims
Penerimaan komisi perantara perdagangan efek	36	48.762	46.266	Receipts from brokerage commissions
Penerimaan pendapatan manager investasi	36	27.808	21.675	Receipts from management investment fee
Penerimaan dari jasa penasehat keuangan	36	24.845	4.452	Receipts from financial advisory services
Pembayaran kepada Karyawan	28	(491.382)	(457.591)	Payments to employees
Bunga, hadiah, provisi dan komisi dana yang dibayar	38	(671.613)	(696.759)	Interest, prizes, fund commissions and fees paid
Perolehan portofolio efek	8	(107.288)	(724.939)	Acquisitions of securities owned
Pembayaran kepada pemasok		(243.694)	(820.559)	Payments to suppliers
Pembayaran pajak penghasilan	40	(24.248)	(14.995)	Payments of income taxes
Arus kas operasi sebelum perubahan dalam aset dan liabilitas operasi		99.170	(658.008)	Operating cash flows before changes in operating assets and liabilities
Penurunan (kenaikan) aset operasi				Decrease (increase) in operating assets
Efek-efek	8	(96.598)	180.963	Securities
Tagihan derivative	29	4.822	3.399	Derivative receivable
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain	17	(390.614)	(173.935)	Placement with Bank Indonesia and other banks
Aset lain-lain	17	(53.427)	(28.951)	Other assets
Kredit		331.791	(934.372)	Loans
Kenaikan (penurunan) liabilitas operasi				Increase (decrease) in operating liabilities
Simpanan	18,19	(1.148.240)	409.296	Deposits
Liabilitas lain-lain	29	(177.144)	159.008	Other liabilities
Liabilitas segera		7.569	17.896	Liabilities payable immediately
Simpanan dari bank lain	18	(310.059)	6.611	Deposits from other banks
Liabilitas derivative	29	(3.481)	(138)	Derivative liabilities
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Operasi		(1.736.211)	(1.018.231)	Net Cash Used in Operating Activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

PT MNC KAPITAL Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL
31 DESEMBER 2017

(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MNC KAPITAL Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2017

(Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2017	2016	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Penerimaan dari penjualan aset tetap	14	7.571	9.310	Proceeds from sale of property and equipment
Penerimaan dari penjualan aset Al-Ijarah	15	4.142	4.318	Proceeds from sale of Al-Ijarah assets
Penerimaan dividen		1.206	2.051	Dividends received
Perolehan aset tetap	14	(70.968)	(67.100)	Acquisitions of property and equipment
Penambahan aset Al-Ijarah	15	-	(1.292)	Acquisitions of Al-Ijarah assets
Pencairan (Penempatan) investasi	36	286.457	(1.121.470)	Redemptions (Placements) of investments
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi		228.408	(1.174.183)	Net Cash Provided by (Used in) Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan pinjaman	23 – 24	3.558.163	3.054.141	Proceeds from borrowings
Penerimaan setoran modal saham	30	-	1.211.322	Proceeds from issuance of capital stock
Pelunasan utang obligasi dan <i>medium term notes</i>	26	(31.000)	(59.000)	Redemptions of bonds payable and medium term notes
Pembayaran pinjaman pada pihak ketiga	25	(3.195.743)	(2.297.923)	Payments of loans to third parties
Penerbitan <i>medium term notes</i>	26	71.000	-	Issuance of medium term notes
Pembayaran bunga	38	(359.424)	(169.600)	Payments of interest
Penerimaan dari penjualan saham yang diperoleh kembali		-	16.347	Proceeds from sale of treasury stock
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan		42.996	1.755.287	Net Cash Flow Provided by Financing Activities
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS		(1.464.807)	(437.127)	NET DECREASE IN CASH AND CASH EQUIVALENTS
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	5	3.245.481	3.682.608	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	5	1.780.674	3.245.481	CASH AND CASH EQUIVALENTS AT THE END OF THE YEAR

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

1. UMUM

a. Pendirian dan Informasi Umum

PT MNC Kapital Tbk ("Entitas") didirikan dengan nama PT Bhakti Capital Indonesia Tbk berdasarkan Akta Notaris dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, No. 100 tanggal 15 Juli 1999. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusannya No. C-16030.HT.01.01.Th.99 tanggal 6 September 1999 serta diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 27 tanggal 3 April 2001, Tambahan No. 2097.

Berdasarkan akta No. 23 tanggal 7 Nopember 2012 nama Entitas diubah menjadi PT MNC Kapital Indonesia Tbk. Perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berdasarkan surat keputusan No.AHU62954.AH.01.02. 2012 tanggal 7 Desember 2012.

Entitas induk adalah PT MNC Investama Tbk.

Anggaran Dasar Entitas telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir Anggaran Dasar Entitas berdasarkan Akta No. 94 tanggal 20 April 2017 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, SH, SE, MKn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, sehubungan dengan perubahan struktur modal Entitas yang telah diterima dan dicatat dalam sistem pelaporan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0128739 tertanggal 20 April 2017.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Entitas, ruang lingkup kegiatan Entitas meliputi antara lain:

- Menjalankan usaha-usaha bidang jasa pada umumnya, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak;
- Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian;
- Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan;
- Mendirikan dan ikut serta dalam Entitas dan badan hukum/badan usaha lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Entitas berlokasi di kantor pusat MNC Financial Center, lantai 21, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340, Indonesia.

Entitas mulai melakukan kegiatan usaha secara komersial pada tanggal 19 Mei 2000.

1. GENERAL

a. Establishment and General Information

PT MNC Kapital Tbk (Entity) was established under the name PT Bhakti Capital Indonesia Tbk based on the Notarial Deed No. 100 of Rachmat Santoso, S.H., a Notary in Jakarta, dated July 15, 1999. The Deed of Establishment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its Decree No. C-16030.HT.01.01.Th.99 dated September 6, 1999 and was published in the State Gazette No. 27 dated April 3, 2001, Supplement No. 2097.

Based on Notarial Deed No. 23 dated November 7, 2012, the Entity's name was changed to PT MNC Kapital Indonesia Tbk. This change was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-62954.AH.01.02.2012 dated December 7, 2012.

The Entity's parent is PT MNC Investama Tbk.

The Entity's Articles of Association has been amended several times. The latest amendment is based on Notarial Deed No. 94 dated April 20, 2017 of Humbert Lie, SH, SE, MKn., Notary in North Jakarta, regarding the change in the Entity's capital structure which was received and recorded in the system database of the Ministry of Laws and Human Right of the Republic of Indonesia under letter No. AHU-AH.01.03-0128739 dated April 20, 2017.

In accordance with article 3 of the Entity's Article of Association, among others, may carry out the following scope of its activities

- Provide services related to general services, except in legal and tax services;
- Provide services related to industrial services;
- Provide services related to trading sector;
- Establish and participate in companies and corporations/other entities, both domestic and abroad.

The Entity's head office is located at MNC Financial Center, 21st floor, Jalan Kebon Sirih No. 21-27, Jakarta 10340, Indonesia.

The Entity started its commercial operations on May 19, 2000.

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Entitas

Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam (sekarang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) berdasarkan Surat Keputusan No. S-1096/PM/2001 tanggal 18 Mei 2001 untuk melakukan penawaran umum atas 250.000.000 saham Entitas dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp250 per saham kepada masyarakat. Saham Entitas telah dicatat di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya pada tanggal 8 Juni 2001.

Pada tanggal 16 Oktober 2012, Entitas memperoleh persetujuan dari Direktur Bursa Efek Indonesia dengan suratnya No. S-07068/BEI.PPJ/10-2012 terkait pencatatan saham tambahan yang berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 87.500.000 saham.

Pada tanggal 20 Juni 2014, Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No.S-290/D.04/2014 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas I ("PUT I") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") sebanyak-banyaknya 2.615.276.045 saham biasa dengan nilai nominal Rp100 per saham dan harga penawaran Rp900 per saham. Setiap pemegang saham Entitas yang mempunyai 11 saham pada tanggal 2 Juli 2014 mempunyai 21 HMETD untuk membeli 21 saham baru dengan harga penawaran Rp900 per saham.

Pada tanggal 14 April 2015, Entitas telah melakukan pelaksanaan penambahan modal tanpa HMETD sebanyak 128.823.255 saham dengan nilai nominal Rp100 per saham, dan harga pelaksanaan sebesar Rp1.800 per saham. Penambahan saham tanpa HMETD tersebut, sebelumnya telah memperoleh persetujuan RUPS Luar Biasa Perseroan tanggal 28 April 2014 yang Berita Acara Rapatnya termuat dalam Akta Notaris No.94 tanggal 28 April 2014, dibuat dihadapan Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan. Penambahan saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 14 April 2015.

Pada tanggal 25 September 2015, Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisaris Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan suratnya No.S-438/D.04/2015 untuk melakukan Penawaran Umum Terbatas II ("PUT II") dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan rincian sebagai berikut:

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Entity's Shares

The Entity obtained the notice of effectivity from the Chairman of Bapepam (currently The Financial Services Authority) (OJK)) with decree No.S-1096/PM/2001 dated May 18, 2001 for its public offering of 250,000,000 shares with par value of Rp100 per share at the offering price of Rp250 per share to the public. The Entity's shares were listed in the Jakarta and Surabaya Stock Exchanges on June 8, 2001.

On October 16, 2012, the Entity obtained an approval from the Director of Indonesia Stock Exchange in his letter No. S-07068/BEI.PPJ/10-2012 for the listing of additional 87,500,000 shares through Rights Issue without Preemptive Rights to the stockholders.

On June 20, 2014, the Entity obtained the notice of effectivity from the Commissioner of the Capital Markets Supervisory Board (OJK) in his letter No. S-290/D.04/2014 for the Limited Public Offering I (PUT I) through Rights Issue with Preemptive Rights (HMETD) to the stockholders at a maximum of 2,615,276,045 shares with par value of Rp100 per share at an offering price of Rp900 per share. Every shareholder with 11 shares as of July 2, 2014 has 21 preemptive rights to purchase 21 shares at an offering price of Rp900 per share.

On April 14, 2015, the Entity carried-out a share subscription without preemptive rights (HMETD) amounting to 128,823,255 shares with par value of Rp100 per share and exercise price amounting to Rp1,800 per share. The Rights Issue without HMETD was approved during the Extraordinary Meeting of Shareholders on April 28, 2014 for which the Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders is stated in Notarial Deed No. 94 dated April 28, 2014 of Aryanti Artisari, S.H., M.Kn, Notary in South Jakarta. The additional shares have been recorded with the Indonesia Stock Exchange on April 14, 2015.

On September 25, 2015, the Entity obtained the effective statement from the Commissioner of the Indonesian Financial Services Authority (OJK) under letter No. S-438/D.04/2015 for the Limited Public Offering II (PUT II) through Pre-emptive Rights (HMETD) with the following details:

1. UMUM (lanjutan)

b. Penawaran Umum Saham Entitas (lanjutan)

- Jumlah maksimum saham baru yang akan ditawarkan adalah 551.474.960 saham biasa dengan harga pelaksanaan sebesar Rp1.500 per saham, sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp827.212.440.000 dengan ketentuan setiap pemegang 15 (lima belas) saham berhak atas 2 (dua) HMETD, dimana setiap 1 HMETD berhak untuk membeli 1 saham baru.
- Penerbitan sebanyak-banyaknya 551.474.960 Waran Seri I, dimana untuk setiap 1 saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut melekat 1 waran seri I yang akan diberikan secara cuma-cuma dan setiap 1 Waran seri I memiliki hak untuk membeli 1 saham Entitas dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga pelaksanaan Rp1.500 per saham, sehingga sebanyak-banyaknya bernilai Rp827.212.440.000 yang dapat dilaksanakan mulai 11 April 2016 sampai tanggal 7 Oktober 2016. Sampai dengan 31 Desember 2016, jumlah yang telah dilaksanakan Waran Seri I adalah 549.519.579 waran.

Pada tanggal 3 Mei 2016, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham telah disetujui penerbitan saham tambahan hingga 328.256.955 lembar berasal dari Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).

Pada tanggal 17 Mei 2016, Direktur Bursa Efek Indonesia dengan suratnya No. S-03146/BEI.PP2/05-2016, menyetujui pencatatan saham tambahan sebanyak 232.207.479 lembar.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sebanyak 5.472.738.318 lembar saham telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

c. Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Entitas pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017
Dewan Komisaris:	
Komisaris Utama :	Darma Putra
Komisaris :	Tien
Komisaris Independen :	Wina Armada Sukardi

1. GENERAL (continued)

b. Public Offering of the Entity's Shares (continued)

- The maximum number of new shares that will be offered is 551,474,960 ordinary shares at an exercise price of Rp1,500 per share, equal to maximum of Rp827,212,440,000 where each holder of 15 (fifteen) shares are entitled to 2 pre-emptive right, whereby 1 pre-emptive right shall be entitled to purchase 1 new share.
- The issuance of a maximum of 551,474,960 Warrant Series I, wherein for every 1 share, arising from the execution of the pre-emptive rights will be given 1 Warrant Series I free of charge and every 1 Warrant Series I has the right to purchase 1 share of the Entity with par value of Rp100 per share at an exercise price of Rp1,500 per share, equal to maximum of Rp827,212,440,000, which can be exercised starting on April 11, 2016 to October 7, 2016. As of December 31, 2016, the total Warrant Series I exercised was 549,519,579 warrants.

On May 3, 2016, based on the Annual General Meeting of the Stockholders, it was agreed to issue additional shares up to 328,256,955 shares through Rights Issue without Preemptive Rights to the stockholders.

On May 17, 2016, the Director of Indonesian Stock Exchange in his letter No. S-03146/BEI.PP2/05-2016 approved the listing of additional 232,207,479 shares.

As of December 31, 2017 and 2016, 5,472,738,318 shares have been listed on the Indonesian Stock Exchange.

c. Board of Commissioners and Directors and Employees

The composition of the Entity's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

	2016	
Darma Putra :		Board of Commissioners:
Tien :		President Commissioner
Wina Armada Sukardi :		Commissioner
		Independent Commissioner

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

c. Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan (lanjutan)

c. Board of Commissioners and Directors and Employees (continued)

	2017	2016	
Direksi:			Directors:
Direktur Utama :	Gregorius Andrew Andryanto Haswin*)	Gregorius Andrew Andryanto Haswin	President Director
Direktur :	Wito Mailoa	Wito Mailoa	Director
Direktur :	-	Purnadi Harjono	Director
Direktur :	Totok Sugiharto	Totok Sugiharto	Director
Direktur :	Mashudi Hamka	Mashudi Hamka	Director
Direktur Independen :	Mahjudin	Mahjudin	Independent Director
Komite Audit:			Audit Committee:
Ketua :	Wina Armada Sukardi	Wina Armada Sukardi	Chairman
Anggota :	Jenny Tajuw	Pio Paulus Sembiring	Member
Anggota :	Rosaline Sri Asri S	Aziz Aribowo	Member
Sekretaris Entitas :	Deisy Christina	Ria Budhiani	Corporate Secretary
Audit Internal :	Chandra Helena Marpaung	Chandra Helena Marpaung	Internal Audit

*) Telah mengundurkan diri pada tanggal 29 Januari 2018, dan akan berlaku efektif setelah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

*) Resigned on January 29, 2018 and will be effective upon approval at the General Shareholder's Meeting.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 jumlah karyawan tetap Entitas dan Entitas anak adalah 2.726 dan 2.628 orang karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2017 and 2016, the Entity and its subsidiaries have 2,726 and 2,628 employees, respectively (unaudited).

d. Struktur Entitas Anak

d. Structure of the Subsidiaries

Entitas mempunyai pengendalian, baik langsung maupun tidak langsung pada Entitas anak berikut:

The Entity had control directly or indirectly, in the following subsidiaries:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Tahun Berdiri/ Year of Incorporation	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	
			31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016		31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
PT MNC Asset Management (MNCAM)	Jakarta	Jasa pengelolaan investasi/ Fund investment	99,99%	99,99%	1999	52.917	53.215
PT MNC Finance (MNCF)	Jakarta	Lembaga pembiayaan/ Multi finance	99,99%	99,99%	1989	2.980.013	3.092.864
PT MNC Sekuritas (MNCS)	Jakarta	Jasa perantara pedagang efek dan penjamin emisi/ Brokerage and underwriting	99,99%	99,99%	2004	1.453.176	1.685.633
PT MNC Life Assurance (MNCL)	Jakarta	Jasa asuransi jiwa/ Life insurance	99,98%	99,98%	1988	438.446	498.966
PT MNC Asuransi Indonesia (MNCAI)	Jakarta	Jasa asuransi umum/ General insurance	99,98%	99,97%	1987	569.073	419.115

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

d. Structure of the Subsidiaries (continued)

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis Usaha/ Nature of Business	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership		Tahun Berdiri/ Year of Incorporation	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ Total Assets (Before Elimination)	
			31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016		31 Desember/ December 31, 2017	31 Desember/ December 31, 2016
PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGU)	Jakarta	Jasa penyewaan/ Leasing	99,99%	99,99%	1993	704.581	523.690
PT Bank MNC Internasional Tbk (BMNCI)	Jakarta	Bank/ Banking	41,43%	39,50%	1989	10.706.094	13.057.549
PT Medan Nusantara Propertindo (MDNP)	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	99,92%	99,92%	2016	30.867	29.966
PT Riau Nusantara Propertindo (RINP)	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	99,92%	99,92%	2016	8.399	7.932
PT Bandung Nusantara Propertindo (BDNP)	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	99,92%	99,92%	2016	113	113
PT Semarang Nusantara Propertindo (SGNP)	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	99,92%	99,92%	2016	117	114
PT Makassar Nusantara Propertindo (MKNP)	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	99,92%	99,92%	2016	208	338
PT Jakarta Nusantara Propertindo (JKNP)	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	99,92%	99,92%	2016	117	113
PT Surabaya Nusantara Propertindo (SBNP)	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	99,92%	99,92%	2016	117	113
PT Palembang Nusantara Propertindo (PBNP)	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	99,92%	99,92%	2016	117	113
PT Yogyakarta Nusantara Propertindo (YKNP)	Jakarta	Penyewaan properti/ Property leasing	99,92%	99,92%	2016	117	113

Ringkasan informasi keuangan BMNCI, entitas dengan kepentingan non pengendali anak sebelum eliminasi intra Kelompok Usaha, pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut disajikan dibawah ini:

Summarized financial information before intragroup eliminations as of December 31, 2017 and 2016 and for the years then ended in respect of BMNCI, a subsidiary with material non-controlling interest is set out below:

	2017	2016	
Aset	10.706.094	13.057.549	Assets
Liabilitas	9.453.546	11.197.144	Liabilities
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk	510.395	718.277	Equity attributable to owners of the Entity
Kepentingan Non Pengendali	742.153	1.142.128	Non-controlling interest
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	10.706.094	13.057.549	Total Liabilities and Equity

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL (continued)

d. Struktur Entitas Anak (lanjutan)

d. Structure of the Subsidiaries (continued)

	2017	2016	
Pendapatan	476.727	492.911	Revenues
Beban	1.161.920	483.562	Expenses
Keuntungan (kerugian) untuk tahun berjalan	(685.193)	9.349	Profit (loss) for the year
Penghasilan Komprehensif Lain			Other Comprehensive Income
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi			Item that will not be reclassified subsequently to profit and loss
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti-bersih setelah pajak	553	(3.436)	Remeasurement of defined benefits obligation – net of tax
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	8.781	3.933	Item that may be reclassified subsequently to profit and loss
Laba belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual-bersih setelah pajak			Unrealized gain on changes in fair value of available for sale financial asset – net of tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain - bersih setelah pajak	9.334	497	Total Other Comprehensive Income - net of tax
Jumlah Penghasilan Komprehensif	(675.859)	9.846	Total Comprehensive Income
Laba yang dapat diatribusikan kepada:			Profit attributable to:
Pemilik Entitas induk	(282.225)	2.570	Owner of the Entity
Kepentingan non-pengendali	(402.968)	6.779	Non-controlling interests
Jumlah	(685.193)	9.349	Total
Laba komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:			Total comprehensive income attributable to:
Pemilik Entitas induk	(278.537)	2.745	Owner of the Entity
Kepentingan non-pengendali	(397.322)	7.101	Non-controlling interests
Jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun berjalan	(675.859)	9.846	Total comprehensive income for the year

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI

a. Standar yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2017)

Dalam tahun berjalan, Kelompok Usaha telah menerapkan standar akuntansi keuangan ("SAK") dan interpretasi standar akuntansi keuangan ("ISAK") baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia yang dianggap relevan dengan kegiatan operasinya dan mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017.

SAK dan ISAK baru dan revisi termasuk pengesahan amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku efektif dalam tahun berjalan adalah sebagai berikut:

- Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan", Amandemen PSAK No 1 ini memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan.
- PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016), "Laporan Keuangan Interim". PSAK No. 3 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa pengungkapan interim yang dipersyaratkan harus dicantumkan dalam laporan keuangan interim atau melalui referensi silang dari laporan keuangan interim seperti komentar manajemen atau laporan risiko yang tersedia untuk pengguna laporan keuangan interim dan pada saat yang sama. Jika pengguna laporan keuangan tidak dapat mengakses informasi yang ada pada referensi silang dengan persyaratan dan waktu yang sama maka laporan keuangan interim Entitas dianggap tidak lengkap.
- PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja" yang berlaku efektif. PSAK No. 24 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK")

a. Standards Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2017)

In the current year, the Group has adopted all of the new and revised financial accounting standards (SAK) and interpretation to financial accounting standards (ISAK) including amendment and annual improvements issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants that are relevant to their operations and affected to the consolidated financial statements effective for accounting period beginning on or after January 1, 2017.

New and revised SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements effective in the current year are as follows:

- Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements on Initiative Disclosures". This Amendment to PSAK No. 1 provides clarification related to the application of the requirements of materiality, flexibility systematic sequence of notes to financial statements and identification of significant accounting policies.
- PSAK No. 3 (Improvement 2016), "Interim Financial Reporting". This PSAK No. 3 (Improvement 2016) clarifies that interim disclosures are required to be included in the interim financial statements or through cross-references of the interim financial statements as management commentary or risk report that is available to users of the interim financial statements and at the same time. If the users of financial statements can not access the information on the cross-reference to the requirements and the same time the interim financial statements of the entity is considered incomplete.
- PSAK No. 24 (Improvement 2016), "Employee Benefits". This PSAK No. 24 (Improvement 2016) clarifies that the high-quality corporate bond market is valued based on currency denominated on such bonds and not based on the country in which the bonds are.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (lanjutan)

a. Standar yang Diterbitkan dan Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2017) (lanjutan)

- PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016), "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki Untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan". PSAK No. 58 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.
- PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan". PSAK No. 60 (Penyesuaian 2016) ini mengklarifikasi bahwa Entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa sebagaimana dalam paragraf PP30 dan paragraf 42C untuk menentukan apakah Entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.
- ISAK No. 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK No. 13: Properti Investasi". ISAK No. 31 ini memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK No. 13, "Properti Investasi". Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasosiasikan dengan suatu bangunan pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

b. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2018)

Berikut ini standar baru dan amandemen yang berlaku untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK No. 2, "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan". Amandemen PSAK No. 2 ini mensyaratkan Entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") (continued)

a. Standards Issued and Effective in the Current Year (on or after January 1, 2017) (continued)

- PSAK No. 58 (Improvement 2016), "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations". This PSAK No. 58 (Improvement 2016) clarifies that the change from one method of disposal to other disposal methods to be regarded as the beginning of a sustainable plan and not as a new disposal plan. This improvement also clarifies that the change in the method of this disposal does not change the date of classification as an asset or disposal group.
- SAK No. 60 (Improvement 2016), "Financial Instruments: Disclosures". This PSAK No. 60 (Improvement 2016) clarifies that an entity must assess the nature of the contract in exchange for services as provided in paragraph PP30 and paragraphs 42C to determine whether the entity has a continuing involvement in financial assets and whether the disclosure requirements related to continuing involvement are met.
- SAK No. 31, "Interpretation to Scope under PSAK No. 13, "Investment Property". This ISAK No. 31 provides an interpretation of the characteristics of the building that is used as part of the definition of investment property under PSAK No. 13, "Investment Property". The building referred to in the definition of investment property refers to structures that have physical characteristics that are generally associated with a building on its walls, floors, and roofs embedded to the asset.

b. Standards Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2018)

Following are the new standards and amendments applicable for the period beginning on or after January 1, 2018, early adoption is permitted.

- Amendment to PSAK No. 2, "Cash Flow Statements on Initiative Disclosures". This Amendment to PSAK No. 2 requires entity to provide disclosures that enable users of financial statements to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including changes arising from cash flow and changes in noncash.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (lanjutan)

b. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2018) (lanjutan)

- Amandemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang belum Direalisasi".

Amandemen PSAK No. 46:

- a. Menambahkan contoh ilustrasi untuk mengklarifikasi bahwa perbedaan temporer dapat dikurangkan timbul ketika jumlah tercatat aset instrumen utang yang diukur pada nilai wajar dan nilai wajar tersebut lebih kecil dari dasar pengenaan pajaknya, tanpa mempertimbangkan apakah Entitas memperkirakan untuk memulihkan jumlah tercatat instrumen utang melalui penjualan atau penggunaan, misalnya dengan memiliki dan menerima arus kas kontraktual, atau gabungan keduanya.
- b. Mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan, maka penilaian perbedaan temporer yang dapat dikurangkan tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan pajak.
- c. Menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan. Lalu Entitas membandingkan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dengan estimasi laba kena pajak masa depan yang tidak mencakup pengurangan pajak yang dihasilkan dari pembalikan aset pajak tangguhan tersebut untuk menilai apakah Entitas memiliki laba kena pajak masa depan yang memadai.
- d. Estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset Entitas melebihi jumlah tercatatnya jika terdapat bukti yang memadai bahwa kemungkinan besar Entitas akan mencapai hal tersebut.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") (continued)

b. Standards Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2018) (continued)

- Amendment to PSAK No. 46, "Income Tax on the Recognition of deferred tax assets for unrealized losses.

Amendments to PSAK No. 46:

- a. Adding illustrative examples to clarify that the temporary differences are deductible arise when the carrying amount of assets debt instruments measured at fair value and the fair value is less than the taxable base, regardless of whether the entity estimates to recover the carrying amount of a debt instrument through sale or use of, for example, to have and receive contractual cash flows, or a combination of both.
- b. Clarifying that to determine whether the taxable income will be available so that the deductible temporary differences can be utilized, the valuation deductible temporary differences would be in line with tax regulations.
- c. Adding that the tax reduction from the reversal of deferred tax assets is excluded from the estimate of future taxable income. Then the entity compares deductible temporary differences to the estimated future taxable income that does not include tax reduction resulting from the reversal of deferred tax assets to assess whether the entity has a sufficient future taxable income.
- d. Estimate of the most likely future taxable income can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount if there is sufficient evidence that it is likely that the entity will achieve.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("PSAK") DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ("ISAK") BARU DAN REVISI (lanjutan)

c. Standar yang Diterbitkan Namun Belum Berlaku Efektif Dalam Tahun Berjalan (pada atau setelah 1 Januari 2020)

Berikut ini standar baru dan amandemen yang berlaku pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, penerapan dini diperkenankan.

- Amandemen PSAK No. 62, "Kontrak Asuransi - Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi".

Amandemen ini memberikan 2 (dua) pendekatan yang bersifat opsional bagi Entitas asuransi, yakni:

- a. Deferral approach: pengecualian temporer dari penerapan PSAK 71 bagi Entitas yang aktivitas utamanya adalah menerbitkan kontrak asuransi sebagaimana dalam ruang lingkup PSAK 62 (yang diterapkan pada level Entitas pelapor); dan
 - b. Overlay approach: memperkenalkan Entitas untuk mereklasifikasi beberapa penghasilan atau beban yang timbul dari aset keuangan yang ditetapkan dari laba rugi ke penghasilan komprehensif lain.
- PSAK No.71, "Instrumen Keuangan". PSAK 71 mengatur perubahan persyaratan terkait instrumen keuangan seperti klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai, dan akuntansi lindung nilai.
 - PSAK No.72, "Pendapatan Dari Kontrak Dengan Pelanggan". PSAK 72 mengatur model pengakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, sehingga Entitas diharapkan dapat melakukan analisis sebelum mengakui pendapatan.

Beberapa dari SAK dan ISAK termasuk amandemen dan penyesuaian tahunan yang berlaku dalam tahun berjalan dan relevan dengan kegiatan Kelompok Usaha telah diterapkan sebagaimana dijelaskan dalam "Ikhtisar Kebijakan Akuntansi yang Penting".

Beberapa SAK dan ISAK lainnya yang tidak relevan dengan kegiatan Kelompok Usaha atau mungkin akan mempengaruhi kebijakan akuntansinya dimasa depan sedang dievaluasi oleh manajemen potensi dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan konsolidasian.

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATION TO FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") (continued)

c. Standards Issued but not Effective in the Current Year (on or after January 1, 2020)

Following are the new standards and amendments applicable on or after January 1, 2020, early adoption is permitted.

- Amendments to PSAK No. 62, "Insurance Contract - Implementing PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contract".

This Amendment provides 2 (two) approaches that are optional for the insurer, namely:

- a. Deferral approach: temporary exemption from the application of PSAK 71 to an entity whose principal activity is to issue an insurance contract as within the scope of PSAK 62 (which applies at the level of the reporting entity); and
 - b. Overlay approach: allows an entity to reclassify multiple income or expenses arising from a defined financial asset from profit or loss to another comprehensive income.
- PSAK No.71, "Financial Instruments". PSAK 71 provides for changes in terms of financial instruments such as classification and measurement, impairment, and hedge accounting.
 - PSAK No.72, "Revenue From Contract With Customers". PSAK 72 sets the revenue recognition model of the contract with the customer, so the entity is expected to conduct an analysis before acknowledging the revenue.

Several SAKs and ISAKs including amendments and annual improvements that became effective in the current year and are relevant to the Group's operation have been adopted as disclosed in the "Summary of Significant Accounting Policies".

Other SAKs and ISAKs that are not relevant to the Group's operation or might affect the accounting policies in the future are being evaluated by the management the potential impact that might arise from the adoption of these standards to the consolidated financial statements.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING

Kebijakan akuntansi diterapkan secara konsisten dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017, yaitu sebagai berikut:

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan SAK, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, termasuk standar baru dan yang direvisi, amandemen dan penyesuaian tahunan, yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017, serta Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (sekarang menjadi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK) No. Kep-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yaitu Peraturan No.VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Entitas Publik yang berlaku untuk laporan keuangan yang berakhir pada atau setelah tanggal 31 Desember 2012. Dan penerapan SE17/BL/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang penggunaan Check list dan pelaporan keuangan untuk semua industry di pasar modal Indonesia.

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2013), "Penyajian Laporan Keuangan", termasuk PSAK No.1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan tentang Prakarsa Pengungkapan". PSAK revisi ini mengubah pengelompokan item-item yang disajikan dalam penghasilan komprehensif lain (OCI). Item-item yang akan direklasifikasi ke laba rugi akan disajikan terpisah dari item-item yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Penerapan PSAK ini hanya berakibat pada penyajian saja dan tidak berdampak pada posisi keuangan dan kinerja Kelompok Usaha.

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian yang menggunakan dasar kas.

Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana yang diungkapkan pada kebijakan akuntansi dalam masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Kelompok Usaha.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The accounting policies have been applied consistently in the preparation of consolidated financial statements except for the adoption of several new and revised SAKs and ISAKs that effective on or after January 1, 2017, as follows:

a. Compliance Statement

The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with SAK, which comprises the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants, including applicable new and revised standards, amendments and annual improvements, effective on or after January 1, 2017, and Attachment to the Decision of the Chairman of Bapepam – LK (now becoming Financial Services Authority or OJK) No. Kep-347/BL/2012 dated June 25, 2012 that is Regulation No.VIII.G.7 regarding Presentation and Disclosures of the Financial Statements of the Public Entity that effective for the financial statements that ended on or after December 31, 2012. And the implementation in SE17/BL/2012 dated December 31, 2012 on the use of checklist for the disclosure of financial statement for all industry in the corporate market of Indonesia.

b. Basis for the Preparation of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statements are prepared in accordance with PSAK No. 1 (Revised 2013), "Presentation of Financial Statements", including PSAK No. 1 (Amendment 2015), "Presentation of Financial Statements on Initiative Disclosures". This revised PSAK changes the grouping of items presented in OCI. Items that could be reclassified to profit or loss would be presented separately from items that will never be reclassified. The adoption of this PSAK affects presentation only and has no impact on the Group's financial position or performance.

The consolidated financial statements have been prepared on the assumption of going concern and accrual basis except for consolidated statements of cash flows using cash basis.

The measurement in the preparation of consolidated financial statements is historical cost concept, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies of respective account.

The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present cash receipts and payments classified into operating, investing and financing activities.

The reporting currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah (Rp) which also represents functional currency of the Group.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

b. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Ketika Entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara restrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika Entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka Entitas menyajikan kembali laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan.

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 65, "Laporan Keuangan Konsolidasian" secara retrospektif. PSAK No. 65 menggantikan persyaratan laporan keuangan konsolidasian dalam PSAK No. 4 (Revisi 2009), "Laporan Keuangan Konsolidasian dan Laporan Keuangan Tersendiri" dan menggantikan ISAK No. 7, "Konsolidasi Entitas Bertujuan Khusus".

PSAK ini mensyaratkan Entitas induk (Entitas yang mengendalikan satu atau lebih Entitas lain) untuk menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor menentukan apakah investor merupakan Entitas induk dengan menilai apakah investor mengendalikan satu atau lebih investee. Investor mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan ketika menilai apakah investor mengendalikan investee.

Investor mengendalikan investee ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investee.

Dengan demikian, investor mengendalikan investee jika dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas investee (misalnya hak yang ada saat ini yang memberi investor tersebut kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan investee);
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

Pada umumnya, mayoritas hak suara menghasilkan pengendalian. Ketika Entitas memiliki kurang dari mayoritas hak suara, atau serupa atas investee, investor mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas investee, termasuk:

- pengaturan kontraktual dengan pemegang suara lainnya dari investee;
- hak-hak yang timbul dari pengaturan kontraktual;
- hak suara dan hak suara potential investor.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

b. Basis for the Preparation of Consolidated Financial Statements (continued)

When the Entity adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the entity reclassifies the items in its financial statements, the statement of financial position at the beginning of comparative period is presented.

c. Principles of Consolidation

The Group applied PSAK No. 65, "Consolidated Financial Statements" retrospectively. PSAK No. 65 superseded the requirements related consolidated financial statements in PSAK No. 4 (Revised 2009), "Consolidated and Separate Financial Statements" and superseded ISAK No. 7, "Special Purpose Entity Consolidation".

This PSAK requires a parent entity (an entity that controls one or more other entities) to present consolidated financial statements. An investor determines whether it is a parent by assessing whether it controls one or more investees. An investor considers all relevant facts and circumstances when assessing whether it controls an investee.

Control is achieved when the investor is exposed or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee.

Specifically, the investor controls the investee if, and only if, the investor has the following elements:

- power over the investee (i.e. existing rights to give it the current ability to direct the relevant activities of the investee);
- exposures or rights to variable returns from its involvement with the investee; and
- the ability to use its power over the investee to affect the investor's returns.

Generally, a majority of voting rights result in control. When the Entity has less than a majority of the voting, or similar, rights of an investee, it considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- the contractual arrangement(s) with the other vote holders of investee;
- rights arising from other contractual arrangement(s);
- the Entity's voting rights and potential voting rights.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

Prosedur Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian:

- menggabungkan item sejenis seperti aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dari Entitas induk dengan Entitas anaknya;
- menghapus (mengeliminasi) jumlah tercatat dari investasi Entitas induk di setiap Entitas anak dan bagian Entitas induk pada ekuitas setiap Entitas anak;
- mengeliminasi secara penuh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha yang berkaitan dengan transaksi antara Entitas-Entitas dalam Kelompok Usaha.

Entitas memasukkan penghasilan dan beban Entitas anak dalam laporan keuangan konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian sampai dengan tanggal ketika entitas kehilangan pengendalian atas entitas anak. Penghasilan dan beban entitas anak didasarkan pada jumlah aset dan liabilitas yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian pada tanggal akuisisi.

Entitas dan entitas anaknya disyaratkan untuk mempunyai kebijakan akuntansi dan tanggal pelaporan yang sama, atau konsolidasian berdasarkan informasi keuangan tambahan yang dibuat Entitas anak.

Kepentingan Nonpengendali (NCI)

Entitas induk menyajikan NCI di laporan posisi keuangan konsolidasiannya dalam ekuitas, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas.

Entitas mengatribusikan laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain kepada pemilik Entitas induk dari Kelompok Usaha dan NCI, meskipun hal tersebut mengakibatkan NCI memiliki saldo defisit atas dasar kepentingan kepemilikan sekarang.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

Investor reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three element of control.

Consolidation Procedures

Consolidated financial statements:

- Combine like items of assets, liabilities, equity, income, expenses and cash flows of the parent with those of its subsidiaries;
- Offset (eliminate) the carrying amount of the parent's investment in each subsidiary and the parent's portion of equity of each subsidiary;
- Eliminate in full intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between entities of the Group.

A reporting entity includes the income and expenses of a subsidiary in the consolidated financial statements from the date it gains control until the date when the reporting entity ceases to control the subsidiary. Income and expenses of the subsidiary are based on the amounts of the assets and liabilities recognized in the consolidated financial statements at the acquisition date.

The parent and subsidiaries are required to have the same accounting policies and reporting dates, or consolidation based on additional financial information prepared by subsidiary.

Non Controlling Interest (NCI)

A parent presents NCIs in its consolidated statement of financial position within equity, separately from the equity of the owners of the parent.

Profit or loss and each component of OCI are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the NCI, even if this results in the NCI having a deficit balance on the basis of present ownership interests.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Perubahan Proporsi Kepemilikan

Perubahan kepemilikan Entitas dalam Entitas anak yang tidak menghasilkan kehilangan pengendalian di Entitas anak adalah transaksi ekuitas (yaitu transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik). Ketika proporsi ekuitas yang dimiliki oleh NCI berubah, entitas menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan NCI untuk mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak.

Entitas tersebut mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat NCI yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk.

Kehilangan Pengendalian

Jika entitas induk kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka entitas induk:

- a. menghentikan pengakuan aset dan liabilitas Entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian;
- b. mengakui sisa investasi apapun pada Entitas anak terdahulu pada saat hilangnya pengendalian dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada Entitas anak terdahulu sesuai dengan PSAK lain yang relevan. Sisa investasi tersebut diukur kembali dan pengukuran kembali tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada Entitas asosiasi atau ventura bersama;
- c. mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

Entitas Investasi – Pengecualian Konsolidasi

Entitas investasi tidak mengonsolidasi entitas anaknya atau menerapkan PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis" ketika entitas tersebut memperoleh pengendalian atas entitas lain. Ketika entitas menjadi, atau berhenti, menjadi entitas investasi, entitas menerapkan secara prospektif perubahan statusnya dari tanggal terjadinya perubahan status tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

Changes in Ownership Interests

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in the parent losing control of the subsidiary are equity transactions (i.e. transactions with owners in their capacity as owners). When the proportion of the equity held by NCI's changes, the carrying amounts of the controlling and NCI's are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary.

Any difference between the amount by which the NCI's are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

Loss of Control

If loss control over subsidiary, the parent entity:

- a. derecognizes the assets and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statement of financial position;
- b. recognizes any investment retained in the former subsidiary when control is lost and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary in accordance with relevant PSAKs. The retained interest is remeasured and the remeasured value is regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", or, when appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture;
- c. recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.

Investment Entity Consolidation Exemption

Investment entity does not consolidate its subsidiaries, or apply PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combinations" when it obtains control of another Entity. When an Entity becomes, or ceases to be, an investment Entity, it applies its status change prospectively from the date of change.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Entitas Investasi - Pengecualian Konsolidasi (lanjutan)

Entitas investasi adalah entitas yang:

- Memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
- Menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- Mengukur dan mengevaluasi kinerja dari seluruh investasinya yang substansial berdasarkan pada nilai wajar.

Entitas disyaratkan untuk mempertimbangkan semua fakta dan keadaan apakah entitas merupakan entitas investasi, termasuk tujuan dan desainnya seperti:

- Memiliki lebih dari satu investasi;
- Memiliki lebih dari satu investor;
- Memiliki investor yang bukan merupakan pihak-pihak berelasi dari entitas;
- Memiliki bagian kepemilikan dalam bentuk kepentingan ekuitas atau kepentingan serupa.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Jika tidak terdapat karakteristik khusus tersebut tidak berarti mendiskualifikasikan entitas dari pengklasifikasian sebagai entitas investasi. Entitas investasi yang tidak memiliki seluruh karakteristik khusus tersebut memberikan pengungkapan tambahan yang disyaratkan oleh PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Entitas investasi disyaratkan untuk mengukur investasi dalam entitas anak pada nilai wajar melalui laba rugi sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Karena entitas investasi tidak disyaratkan untuk mengonsolidasi entitas anaknya, transaksi pihak berelasi intra Kelompok Usaha dan saldo tidak dieliminasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

Investment Entity Consolidation Exemption (continued)

An Investment Entity is an entity that:

- Obtains funds from one or more investors for the purpose of providing those investor(s) with investment management services;
- Commits to its investor(s) that its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and
- Measures and evaluates the performance of substantially all of its investments on a fair value basis.

An entity is required to consider all facts and circumstances when determining whether it is an investment entity, including its purpose and design such as:

- It has more than one investment;
- It has more than one investor;
- It has investors that are not related parties of the entity;
- It has ownership interests in the form of equity or similar interests.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiary to bring their accounting policies in line with the Group's accounting policies

The absence of any of these typical characteristics does not necessarily disqualify an entity from being classified as an investment entity. Investment entity that does not have all those typical characteristics provide additional information as required by PSAK No. 67, "Disclosures of Interests in Other Entities".

An investment entity is required to measure an investment in a subsidiary at fair value through profit or loss in accordance with PSAK No.55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement".

Because an investment entity is not required to consolidate its subsidiaries, intragroup related party transactions and outstanding balances are not eliminated.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Entitas Investasi - Pengecualian Konsolidasi (lanjutan)

Pengecualian terhadap konsolidasi hanya diterapkan pada entitas investasi tersebut. Oleh karenanya entitas induk dari entitas investasi mengkonsolidasi seluruh entitas yang dikendalikannya, termasuk entitas yang dikendalikan melalui entitas anak yang merupakan entitas investasi, kecuali entitas induk itu sendiri merupakan entitas investasi.

Persyaratan pengungkapan untuk laporan keuangan konsolidasian diatur dalam PSAK No. 67, "Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain".

Sebagaimana diatur dalam PSAK No. 4 (Revisi 2013), "Laporan Keuangan Tersendiri", laporan keuangan tersendiri (Entitas induk) dapat disajikan hanya jika laporan tersebut merupakan informasi tambahan pada laporan keuangan konsolidasian dan disajikan sebagai lampiran dalam laporan keuangan konsolidasian. Metode yang digunakan untuk mencatat investasi di Entitas anak, asosiasi dan ventura bersama adalah metode biaya perolehan atau sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran". Laporan keuangan tersendiri terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas.

d. Kombinasi Bisnis dan Goodwill

Kombinasi bisnis diterapkan dengan metode akuisisi. Harga perolehan suatu akuisisi diukur sebagai imbalan agregat yang dialihkan, diukur dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi, dan jumlah setiap NCI pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Entitas memilih apakah mengukur NCI pada pihak yang diakuisisi baik nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan NCI atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul sehubungan dengan akuisisi dibebankan langsung dalam "Beban Umum dan Administrasi".

Ketika Entitas mengakuisisi sebuah bisnis, Entitas menilai aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil-alih untuk klasifikasi dan penetapan yang sesuai dengan persyaratan kontraktual, keadaan ekonomi dan keadaan terkait lainnya yang ada pada tanggal akuisisi.

Jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, kepentingan ekuitas yang dimiliki Entitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi diukur kembali pada nilai wajar tanggal akuisisi dan keuntungan dan kerugian yang dihasilkan, jika ada, diakui dalam laporan laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

c. Principles of Consolidation (continued)

Investment Entity Consolidation Exemption (continued)

The exemption from consolidation only applies to the investment entity itself. Accordingly, a parent of an investment Entity is required to consolidate all entities that it controls, including those controlled through an investment entity subsidiary, unless the parent itself is an investment entity.

The disclosure requirements for consolidated financial statements are specified in PSAK No. 67, "Disclosure of Interests in Other Entities".

As regulated in PSAK No.4 (Revised 2013), "Separate Financial Statements", separate financial statements (parent entity) can be served only when those statements are additional information on the consolidated financial statements and are presented as an attachment to the consolidated financial statements. The method used to record investments in subsidiaries, associations and joint ventures are cost method or in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement". Separate financial statements consist of the statement of financial position, statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows.

d. Business Combination and Goodwill

Business combination is accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Entity selects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or proportionate shares of the acquiree's identifiable net assets. All other costs incurred associated with an acquisition are directly expensed and included in "General and Administrative Expenses".

When the entity acquires a business, it assesses the identifiable assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic condition and other pertinent circumstances as at the acquisition date.

If the business combination is achieved in stages, the entity's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date and recognized gain (loss), if any, in the statement of profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

d. Kombinasi Bisnis dan Goodwill (lanjutan)

Imbalan kontinjensi yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Perubahan nilai wajar imbalan kontinjensi setelah tanggal akuisisi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas akan diakui sesuai dengan PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", baik dalam laba rugi ataupun sebagai OCI. Jika diklasifikasi sebagai ekuitas, imbalan kontinjensi tidak diukur kembali sampai penyelesaian akhir dalam ekuitas.

Pada tanggal akuisisi, pengakuan awal goodwill pada awalnya diukur adalah biaya perolehan yang merupakan selisih lebih (a) atas (b) dibawah ini:

- (a) nilai agregat dari:
 - (i) imbalan yang dialihkan yang diukur pada nilai wajar;
 - (ii) jumlah setiap NCI pada pihak yang diakuisisi; dan
 - (iii) untuk kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, nilai wajar kepentingan ekuitas yang dimiliki Entitas sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada tanggal akuisisi.
- (b) Selisih jumlah net aset yang teridentifikasi dan liabilitas yang diambil-alih pada tanggal akuisisi.

Jika nilai agregat dari jumlah (b) melebihi nilai agregat dari jumlah (a), maka perbedaannya diakui dalam laporan laba atau rugi sebagai keuntungan pembelian dengan diskon setelah penilaian sebelumnya atas pengidentifikasian dan pengukuran nilai wajar aset teridentifikasi yang diakuisisi dan liabilities yang diambil-alih dan dicatat dalam laporan laba rugi konsolidasi dan OCI.

Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 22 (Revisi 2010), "Kombinasi Bisnis", jika akuntansi awal untuk kombinasi bisnis belum selesai pada akhir periode pelaporan pada saat kombinasi bisnis terjadi, Entitas melaporkan jumlah provisi item-item yang proses akuntansinya belum selesai dalam laporan keuangan konsolidasian. Selama periode pengukuran, Entitas menyesuaikan secara retrospektif jumlah provisi yang diakui pada tanggal akuisisi untuk mencerminkan informasi baru yang diperoleh tentang fakta dan keadaan yang ada pada tanggal akuisisi dan, jika diketahui, akan berdampak pada pengukuran jumlah yang diakui pada tanggal tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Business Combination and Goodwill (continued)

Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Subsequent changes to the fair value of the contingent consideration which is deemed to be an asset or liability will be recognized in accordance with PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instrument: Recognition and Measurement", either in profit or loss or as OCI. If the contingent consideration is classified as equity, it should not be remeasured until it is finally settled within equity.

At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of (a) over (b) below:

- (a) The aggregate of:
 - (i) the consideration transferred which is measured at fair value;
 - (ii) The amount recognized for NCI in the acquire; and
 - (iii) or the business combination that is achieved in stages, the fair value of the Entity's previously held equity interest in the at the acquisition date.
- (b) the difference net identifiable assets acquired and liabilities assumed at the acquisition date.

If the aggregate amount of (b) exceeds the aggregate of amount (a), the difference is recognized in the statement of profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities and recorded in the consolidated statement profit or loss and OCI.

In accordance with the provision of PSAK No. 22 (Revised 2010), "Business Combinations", if the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting period in which the combination occurs, the entity shall report in its consolidated financial statements provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete. During the measurement period, the entity shall retrospectively adjust the provisional amounts recognized at acquisition date to reflect new information obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have affected the measurement of the amounts recognized as of that date.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

e. Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 15 (Revisi 2013), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama", termasuk PSAK No.15 (Amandemen 2015), "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura bersama tentang Investasi Entitas Asosiasi: Penerapan Pengecualian Konsolidasi".

PSAK ini menentukan penerapan metode ekuitas atas investasi pada Entitas asosiasi dan ventura bersama. Amandemen PSAK No. 15 memberikan klarifikasi pada paragraph 36A tentang pengecualian konsolidasi untuk investasi ketika kriteria tertentu terpenuhi.

Dampak penerapan PSAK ini bersama-sama dengan PSAK No. 66, "Pengaturan Bersama", dijelaskan dalam catatan 3ae.

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Kelompok Usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi sebagaimana didefinisikan dalam PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi" dan PSAK No. 7 (Penyesuaian 2015), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

PSAK ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi dan saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan konsolidasian dan laporan keuangan tersendiri Entitas induk dan juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual.

PSAK ini juga memberikan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah dan Entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah (Entitas berelasi dengan Pemerintah).

Pihak berelasi adalah orang atau Entitas yang terkait dengan Entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (Entitas pelapor).

a. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Entitas pelapor jika orang tersebut:

- (i) memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Entitas pelapor;
- (ii) memiliki pengaruh signifikan atas Entitas pelapor; atau
- (iii) personil manajemen kunci Entitas pelapor atau Entitas induk Entitas pelapor.

3 SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

e. Investments in Associates and Joint Ventures

The Group applied PSAK No. 15 (Revised 2013), "Investment in Associates and Joint Ventures", including PSAK No.15 (Amendment 2015), "Investment in Associated and Joint Ventures on Investment in Associated: Application Consolidation Exception".

This PSAK prescribes the application of the equity method to investments in associates and joint ventures. The Amendment to PSAK No. 15 provides clarification on the consolidation of paragraph 36A of exceptions for certain investments when certain criteria are met.

The impact on the adoption of this PSAK along with PSAK No. 66, "Joint Arrangements", is explained in note 3 ae .

f. Transactions with Related Parties

The Group deals transactions with related parties as defined in PSAK No. 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures" and PSAK No. 7 (Improvement 2015), "Related Party Disclosures".

This PSAK requires disclosure of relationships, transactions and balances related parties, including commitments in the consolidated financial statements and separate financial statements of the parent entity also applies to individual financial statements.

This PSAK also introduces an exemption from the general related party disclosure requirements for transactions with government and entities that are controlled, jointly controlled or significantly influenced by the same Government as the reporting entity (Government related entities).

Related party is a person or an entity related to the entity who prepares financial statements (the reporting entity).

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

- (i) has control or joint control over the reporting entity;
- (ii) has significant influence over the reporting entity; or
- (iii) is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

f. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi (lanjutan)

- b. Suatu Entitas mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
- (i) Entitas dan Entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya Entitas induk, Entitas anak, dan Entitas anak berikutnya terkait dengan Entitas lain).
 - (ii) satu Entitas adalah Entitas asosiasi atau ventura bersama dari Entitas lain (atau Entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana Entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - (iii) kedua Entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - (iv) suatu Entitas adalah ventura bersama dari Entitas ketiga dan Entitas yang lain adalah Entitas asosiasi dari Entitas ketiga.
 - (v) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan paska kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Entitas pelapor atau Entitas lain yang terkait dengan Entitas pelapor. Jika Entitas pelapor adalah Entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka Entitas sponsor juga berelasi dengan Entitas pelapor.
 - (vi) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
 - (vii) orang yang diidentifikasi dalam huruf (a.i) memiliki pengaruh signifikan atas Entitas atau personil manajemen kunci Entitas (atau Entitas induk dari Entitas).

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan persyaratan dan kondisi sebagaimana yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan pihak-pihak berelasi, telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan dan sesuai dengan Peraturan No IX E1 tentang transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

g. Pelaporan Segmen

Kelompok Usaha melaporkan informasi segmen yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis yang mana Entitas terlibat dan lingkungan ekonomi dimana Entitas beroperasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

f. Transactions with Related Parties (continued)

- b. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
- (i) the entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - (ii) one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - (iii) both entities are joint ventures of the same third party.
 - (iv) one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
 - (v) the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity in itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
 - (vi) the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
 - (vii) a person identified in (a.i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).

The transaction was conducted on terms agreed by both parties, which terms may not be the same as other transactions conducted by parties who are not related.

All transactions and balances with significant related parties, whether or not conducted with the terms and conditions, as were done with the parties that have no relation to related parties, have been disclosed in the relevant notes to the consolidated financial statements and in accordance with Rule No IX E1 regarding affiliate transactions and conflict of interest.

g. Segment Reporting

The Group discloses segment information that will enable users of financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities in which the entity engages and economic environments in which it operates.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

g. Pelaporan Segmen (lanjutan)

Sebuah segmen operasi adalah sebuah komponen dari Entitas yang:

- terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari Entitas yang sama);
- hasil operasinya dikaji ulang secara reguler oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Kelompok usaha melakukan segmentasi pelaporan berdasarkan informasi keuangan yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam mengevaluasi kinerja segmen dan menentukan alokasi sumber daya yang dimilikinya. Segmentasi berdasarkan aktivitas dari setiap kegiatan operasi Entitas legal di dalam Kelompok usaha.

Seluruh transaksi antar segmen telah dieliminasi.

h. Instrumen Keuangan

Kelompok Usaha menerapkan PSAK No. 50 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Penyajian", PSAK No. 55 (Revisi 2014), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" dan PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", termasuk Penyesuaian 2016 PSAK No. 60. Selain itu, Kelompok Usaha juga menerapkan ISAK No. 13, "Lindung Nilai Investasi Neto Dalam Kegiatan Usaha Luar Negeri" dan ISAK No. 26 (2014), "Penilaian Ulang Derivatif Melekat".

PSAK 50 (Revisi 2014) menguraikan persyaratan akuntansi penyajian dari instrumen keuangan, terutama untuk klasifikasi instrumen tersebut dalam aset keuangan, liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas. Standar ini juga memberikan panduan pada klasifikasi terkait dengan suku bunga, dividen dan keuntungan/kerugian, dan ketika aset keuangan dan liabilitas keuangan dapat di saling hapus.

Prinsip-prinsip dalam standar ini melengkapi prinsip untuk pengakuan dan pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan dalam PSAK No. 55 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran", dan untuk mengungkapkan informasi tentang instrumen keuangan di PSAK No. 60 (Revisi 2014), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".

PSAK No. 55 (Revisi 2014) berkaitan dengan, antara lain, pengakuan awal dari aset dan liabilitas keuangan, pengukuran setelah pengakuan awal, penurunan nilai, penghentian pengakuan, dan akuntansi lindung nilai.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

g. Segment Reporting (continued)

An operating segment is a component of an entity:

- that engages in business activities which it may earn revenue and incur expenses (including revenue and expenses relating to the transaction with other components of the same entity);
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and
- for which discrete financial information is available.

Segment reporting made by the group is based on the financial information used by operating decision makers in evaluating operating segment performance and determining the allocation of its resources. Segmentation based on the activity of each legal entity operating activities in the group.

All transactions between segments are eliminated.

h. Financial Instruments

The Group adopted PSAK No. 50 (Revised 2014), "Financial Instruments: Presentation", PSAK No. 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and Measurement", and PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures", including Improvement 2016 to PSAK No. 60. In addition, the Group also adopted ISAK No. 13, "Hedges of a Net Investment in a Foreign Operation" and ISAK No. 26 (Revised 2014), "Reassessment of Embedded Derivatives".

PSAK 50 (Revised 2014) outlines the accounting requirements for the presentation of financial instruments, particularly as to the classification of such instruments into financial assets, financial liabilities and equity instruments. The standard also provides guidance on the classification of related interest, dividends and gains/losses, and when financial assets and financial liabilities can be offset.

The principles in this standard complement the principles for recognizing and measuring financial assets and financial liabilities in PSAK No. 55 (Revised 2014), Financial Instruments: Recognition and Measurement", and for disclosing information about them in PSAK No. 60 (Revised 2014), "Financial Instruments: Disclosures".

PSAK No. 55 (Revised 2014) deals with, among other things, initial recognition of financial assets and liabilities, measurement subsequent to initial recognition, impairment, derecognition, and hedge accounting.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan) 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

PSAK No. 60 (Revisi 2014) mensyaratkan pengungkapan kuantitatif dan kualitatif dalam laporan keuangan yang memungkinkan para pengguna untuk mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan atas posisi dan kinerja keuangan, dan sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang mana entitas adalah terekspos selama periode dan pada akhir periode pelaporan dan bagaimana entitas mengelola risiko-risiko tersebut. Selain itu, standar ini menjelaskan persyaratan untuk pengungkapan risiko likuiditas.

ISAK No. 26 (Revisi 2014) yang menggantikan ISAK No. 26 (Revisi 2009) menegaskan perlakuan di PSAK No. 55 (Revisi 2014) bahwa entitas harus menilai apakah derivatif melekat disyaratkan untuk dipisahkan dari kontrak utama dan dicatat sebagai derivatif ketika entitas menjadi pihak dalam kontrak tersebut.

(1) Aset Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Aset keuangan diakui pada posisi keuangan ketika Entitas menjadi pihak dalam provisi kontrak instrumen.

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL), investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM), pinjaman yang diberikan dan piutang, atau aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS). Kelompok Usaha menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan dievaluasi kembali klasifikasi aset pada setiap tanggal pelaporan.

Aset keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar, dalam hal investasi tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan.

h. Financial Instruments (continued)

PSAK No. 60 (Revised 2014) requires quantitative and qualitative disclosures in the financial statements that enable users to evaluate the significance of financial instruments on the financial position and performance, and the nature and extent of risks arising from financial instruments to which the entity is exposed during the period and at the end of the reporting period and how the entity manages such risks. In addition, this standard describes the requirement for disclosure of liquidity risk.

ISAK No. 26 (Revised 2014) confirms the treatment in PSAK No. 55 (Revised 2014) that an entity should assess whether an embedded derivative is required to be separated from the host contract and accounted for as a derivative when the entity first becomes a party to the contract.

(1) Financial Assets

Initial Recognition and Measurement

Financial assets are recognized on the financial position when the entity becomes a party to the contractual provision of the instrument.

Financial assets within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial assets at fair value through profit or loss (FVTPL), held-to-maturity investments (HTM), loans and receivables, or available-for-sale (AFS) financial assets. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates the classification of the assets at each reporting date.

Financial assets are initially measured at fair value, in the case of investments not classified as FVTPL, fair value plus transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issuance of financial assets.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Laba atau Rugi (FVTPL)

Aset keuangan diklasifikasikan sebagai FVTPL pada saat aset keuangan diperoleh untuk diperdagangkan atau ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL. Aset keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Aset derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali aset derivatif tersebut ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

Aset keuangan FVTPL termasuk aset keuangan untuk diperdagangkan dan aset keuangan yang ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain termasuk dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi pada saat penjualan atau pelepasan lainnya.

- Investasi yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM)

Aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo (HTM) ketika kelompok usaha mempunyai maksud positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan hingga jatuh tempo.

Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR).

Metode ini menggunakan EIR untuk estimasi penerimaan kas di masa datang yang didiskontokan selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih dari aset keuangan.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement

Subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Financial Assets at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial assets are classified as FVTPL when the financial assets acquired for trading or designated upon initial recognition as FVTPL. Financial assets are classified as held for trading if acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near future. Derivative assets are also classified as held for trading unless they are designated as derivative assets effective hedging instruments.

Financial assets at FVTPL include financial assets held for trading and financial assets designated upon initial recognition as FVTPL are presented in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or losses from changes in fair value recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income include dividends or interest earned on financial assets without deducting transaction costs that may occur upon the sale or other disposal.

- Held-to-Maturity Investments (HTM)

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and maturity are classified as HTM investments when the group has the positive intention and ability to hold them until maturity.

After initial measurement, investments HTM are measured at amortized cost using the effective interest method (EIR).

This method uses the EIR for discounted estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to the net carrying amount of the financial asset.

Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the investments are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

• Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif.

Setelah pengakuan awal, aset keuangan dalam kelompok ini diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan EIR.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, maupun melalui proses amortisasi.

• Aset Keuangan Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Aset keuangan AFS adalah aset keuangan non-derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam tiga kategori sebelumnya. Aset keuangan ini diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar kecuali aset keuangan tersebut ditujukan untuk dilepaskan dalam waktu dua belas bulan dari tanggal laporan posisi keuangan.

Setelah pengukuran awal, aset keuangan AFS diukur pada nilai wajar tanpa dikurangi biaya transaksi yang mungkin terjadi saat penjualan atau pelepasan lain, dengan keuntungan atau kerugian yang belum terealisasi diakui sebagai OCI dalam komponen ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

Subsequent Measurement (continued)

• Loans and Receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and have no quotations in an active market.

After initial recognition, the financial assets are measured at amortized cost using the EIR.

Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

• Available-for-Sales (AFS) Financial Assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as AFS or are not classified into the three preceding categories. Financial assets are classified as non-current assets unless the asset is intended to be released within twelve months from the date of the consolidated financial position.

After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value without deducting transaction costs that may occur when a sale or other disposal, with unrealized gains or losses recognized as OCI in equity component until the investment is derecognized.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan (lanjutan)

Pada saat pengukuran awal, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam komponen ekuitas sampai pengakuannya aset keuangan tersebut dihentikan atau sampai ditetapkan ada penurunan nilainya dan pada saat yang sama keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian sebagai penyesuaian reklasifikasi.

(2) Liabilitas Keuangan

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diakui pada posisi keuangan ketika entitas menjadi pihak dalam provisi kontrak instrumen.

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No.55 (Revisi 2014) diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL), liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (hutang lain-lain dan derivatif yang ditentukan sebagai instrumen lindung nilai efektif, mana yang sesuai). Entitas menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar dan dalam hal liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai FVTPL, nilai wajar ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan liabilitas keuangan tersebut.

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal

Pengukuran liabilitas keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Liabilitas Keuangan pada Nilai Wajar Melalui Laba Rugi (FVTPL)

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan jika mereka diperoleh untuk tujuan dijual atau dibeli kembali dalam waktu dekat. Derivatif juga diklasifikasikan sebagai kelompok diperdagangkan kecuali mereka ditetapkan sebagai derivative liabilitas instrumen lindung nilai efektif. Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

(1) Financial Assets (continued)

At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in equity component until the financial asset is derecognized or until to be determined impaired and at the same time the cumulative gain or loss previously recognized in equity should be recognized to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as a reclassification adjustment.

(2) Financial Liabilities

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized on the financial position when the entity becomes a party to the contractual provision of the instrument.

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 (Revised 2014) are classified as financial liabilities measured at fair value through profit or loss (FVTPL), financial liabilities that are measured at amortized cost (other payables and derivatives designated as effective hedging instruments, which appropriate). The entity determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at fair value and in the case of financial liabilities not classified as at FVTPL, fair value plus transaction costs that are directly attributable to the issuance of financial liabilities.

Subsequent Measurement

Subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as follows:

- Financial Liabilities at Fair Value Through Profit or Loss (FVTPL)

Financial liabilities are classified as held for trading if they are acquired for the purpose of selling or repurchasing in the near future. Derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as derivative liabilities effective hedging instruments. Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(2) Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Pengukuran Setelah Pengakuan Awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan yang ditetapkan sebagai liabilitas keuangan FVTPL termasuk liabilitas keuangan untuk diperdagangkan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal sebagai FVTPL disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

• Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Setelah pengakuan awal, selanjutnya liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode EIR.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metode EIR dikurangi dengan penyisihan penurunan nilai dan pembiayaan atau pengurangan pokok. Perhitungan tersebut memperhitungkan premium atau diskonto pada saat akuisisi dan mencakup biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi.

(3) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus buku dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus buku atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat maksud untuk menyelesaikan secara bersih, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

(4) Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di pasar keuangan yang terorganisasi ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga di pasar aktif pada penutupan bisnis pada akhir periode pelaporan tanpa pengurangan untuk biaya transaksi. Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

(2) Financial Liabilities (continued)

Subsequent Measurement (continued)

Financial liabilities that are designated as financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and designated upon initial recognition as FVTPL are presented in the consolidated statement of financial position at fair value with gains or losses from changes in fair value recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

• Liabilitas Keuangan pada Biaya Perolehan Diamortisasi

After initial recognition, financial liabilities are measured at amortized cost using the EIR.

Amortized cost is calculated by using the EIR method less any allowance for impairment and financing or principal reduction. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Gains and losses are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the amortization process.

(3) Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a legal right to offset the carrying amount of financial assets and financial liabilities and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

(4) Fair Value of Financial Instruments

The fair value of financial instruments that are actively traded in organized financial markets is determined by reference to their quoted prices in an active market at the close of business on the financial position date without any deduction for transaction costs. For financial instruments with no active market, fair value is determined using valuation techniques.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(4) Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Teknik penilaian tersebut mencakup penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan, mengacu pada nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisis arus kas yang didiskontokan, atau model penilaian lain sebagaimana disyaratkan di PSAK No. 68, "Pengukuran Nilai Wajar"

Penyesuaian Risiko Kredit

Kelompok usaha menyesuaikan harga di pasar yang lebih menguntungkan untuk mencerminkan adanya perbedaan risiko kredit pihak lawan (*counterparty*) antara instrumen yang diperdagangkan di pasar tersebut dengan instrumen yang dinilai untuk posisi aset keuangan. Dalam menentukan nilai wajar posisi liabilitas keuangan, risiko kredit kelompok usaha terkait dengan instrumen harus diperhitungkan.

(5) Penurunan Nilai Aset Keuangan

Kelompok usaha pada setiap akhir periode pelaporan mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan.

- Aset Keuangan Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi, Kelompok usaha menentukan penurunan nilai berdasarkan bukti obyektif secara individual atas penurunan nilai.

Nilai tercatat aset tersebut berkurang melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian. Penghasilan bunga selanjutnya diakui sebesar nilai tercatat yang diturunkan nilainya, berdasarkan tingkat EIR awal dari aset tersebut. Pinjaman yang diberikan dan piutang, beserta dengan penyisihan terkait, dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan pemulihan dimasa depan yang realistis dan semua jaminan telah terealisasi atau telah dialihkan kepada kelompok usaha.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

(4) Fair Value of Financial Instruments (continued)

Such techniques may include the use of fair market transactions between the parties who understand and are willing to (arm's length transactions), referring to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis or other valuation models as required in PSAK No. 68 "Fair Value Measurement"

Credit Risk Adjustment

The Group adjusts the price in the more advantageous market to reflect any differences in counterparty credit risk between instruments traded in that market and the instruments being valued for financial asset positions. In determining the fair value of financial liabilities position, the group's credit risk associated with the instrument should be taken into account.

(5) Impairment of Financial Assets

The Group evaluates at the end of each reporting period whether there is objective evidence that a financial asset or Group of financial assets has been impaired.

- Financial Assets Measured at Amortized Cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group determines individually for impairment based on objective evidence of impairment exists.

The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance account and the amount of the loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Interest income is recognized further at the carrying reduced value, based on the beginning EIR of the asset. Loans and receivables, together with the associated allowance are written-off when there is no realistic possibility of future recovery and all collateral has been realized or has been transferred to the Group.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(5) Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

- Aset Keuangan Dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi (lanjutan)

Jika, pada periode berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambah atau dikurangi dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jika dimasa mendatang penghapusan tersebut dapat dipulihkan, maka jumlah pemulihan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- Aset Keuangan yang Tersedia Untuk Dijual

Dalam hal ini instrumen ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual (AFS), bukti obyektif terjadinya penurunan nilai, termasuk penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

(6) Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih sesuai, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya pada saat:

- (1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut telah berakhir; atau
- (2) Kelompok usaha telah mentransfer hak kontraktual mereka untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau berkewajiban untuk membayar arus kas yang diterima secara penuh tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga dalam perjanjian pass-through; dan baik
 - (a) Kelompok usaha telah secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat dari aset, atau
 - (c) Kelompok usaha secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat suatu aset, namun telah mentransfer kendali atas aset tersebut.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

(5) Impairment of Financial Assets (continued)

- Financial Assets Measured at Amortized Cost (continued)

If, in a subsequent period, the estimated value of the financial asset impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the impairment loss previously recognized increased or reduced by adjusting the allowance account. If future removal can be recovered, the recovery amount is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

- Available-for-Sales (AFS) Financial Assets

In this case the equity instruments are classified as AFS financial assets, objective evidence of impairment, including the significant or long-term decline in the fair value of the investment below its acquisition cost.

(6) Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities

Financial Assets

Financial assets (or whichever is appropriate, part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) are derecognized when:

- (1) *the contractual rights to receive the cash flows from the asset have ceased to exist; or*
- (2) *the group has transferred their contractual rights to receive the cash flows from the financial asset or an obligation to pay the received cash flows in full without significant delay to a third party in the pass-through; and either*
 - (a) *the group has transferred substantially all the risks and rewards of the assets, or*
 - (b) *the group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(6) Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat liabilitas tersebut dihentikan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Ketika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan oleh liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial persyaratan dari suatu liabilitas yang saat ini ada, pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan suatu liabilitas baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(7) Instrumen Derivatif

Instrumen keuangan derivatif pada awalnya diakui berdasarkan nilai wajar pada tanggal kontrak derivatif itu dimulai dan selanjutnya dinilai kembali berdasarkan nilai wajarnya. Metode untuk mengakui adanya keuntungan atau kerugian yang terjadi tergantung apakah derivatif itu ditujukan untuk instrumen derivatif, dan sifat dari objek yang dilindungi nilainya.

Kelompok usaha mengelompokkan tujuan dari derivatif sebagai berikut :

- (1) suatu lindung nilai terhadap eksposur perubahan nilai wajar atas aset atau liabilitas yang telah diakui atau komitmen pasti yang belum diakui, atau bagian yang telah diidentifikasi dari aset, liabilitas atau komitmen pasti tersebut, yang diatribusikan pada risiko tertentu dan dapat mempengaruhi laba-rugi (lindung nilai atas nilai wajar); atau
- (2) suatu lindung nilai terhadap eksposur variabilitas arus kas yang:
 - (i) dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan aset atau liabilitas yang telah diakui atau yang dapat diatribusikan pada risiko tertentu yang terkait dengan prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi, dan
 - (ii) dapat mempengaruhi laba-rugi (lindung nilai arus kas).

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

(6) Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities (continued)

Financial Liabilities

Financial liabilities are derecognized when the liability is terminated or canceled or expired. When an existing financial liability is replaced by another financial liabilities from the same lender on substantially different terms, or substantially modify the terms of a liability that currently exists, an exchange or modification is treated as a derecognition of the initial liability and the recognition of a new liability, and the difference between the carrying amount of each liability recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

(7) Derivative Instruments

Derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date a derivative contract is initiated and subsequently remeasured at fair value. The method of recognizing the resulting gain or loss is dependent whether the derivative is intended for derivative instruments and the nature of the item being hedged.

The Group classifies the objectives of the derivative as

- (1) a hedge against exposure to changes in fair value of assets or liabilities that have been recognized or unrecognized definite commitment, or an identified portion of an asset, liability or definite commitment, which is attributable to the particular risk and could affect profit or loss (fair value hedge); or
- (2) a hedge of the exposure to variability in cash flows that:
 - (i) are attributable to a particular risk associated with a recognized asset or liability or are attributable to a particular risk associated with the forecast transactions likely to occur, and
 - (ii) could affect profit or loss (cash flow hedge).

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(7) Instrumen Derivatif (lanjutan)

Pada saat terjadinya transaksi, Kelompok usaha mendokumentasi hubungan antara instrumen lindung nilai dan item yang dilindung nilai, juga tujuan manajemen risiko dan strategi yang diterapkan dalam melakukan berbagai macam transaksi lindung nilai. Kelompok usaha juga mendokumentasikan penilaiannya, pada saat terjadinya dan secara berkesinambungan, apakah derivatif yang digunakan untuk transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam rangka saling menghapuskan perubahan nilai wajar atau arus kas dari item yang dilindung nilai.

Nilai penuh dari derivatif lindung nilai dikelompokkan sebagai aset atau liabilitas tidak lancar apabila jatuh tempo item yang dilindung nilai tersebut melebihi 12 (dua belas) bulan dan sebagai aset atau liabilitas lancar apabila jatuh tempo item lindung nilai tersebut kurang dari 12 (dua belas) bulan.

(i) lindung nilai atas nilai wajar

Perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan dikualifikasikan sebagai lindung nilai atas nilai wajar, dicatat didalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, bersamaan dengan perubahan yang terjadi pada nilai wajar aset atau liabilitas yang dilindung nilai yang dapat diatribusikan pada risiko yang dilindung nilai.

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai atas nilai wajar diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, di baris yang sama dengan perubahan nilai wajar item yang dilindung nilai.

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain - bersih".

(ii) lindung nilai arus kas

Bagian efektif dari perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan dikualifikasikan sebagai lindung nilai arus kas, diakui dalam bagian ekuitas, didalam akun "Perubahan Bersih Nilai Wajar – Lindung Nilai Arus Kas".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

(7) Derivative Instruments (continued)

At the time of the transaction, the Group documents the relationship between hedging instruments and hedged items, as well as the risk management objective and strategy for undertaking various hedge transactions. The group also documents its judgment, at the time of occurrence and continuously, whether the derivatives used to hedge transactions have a high effectiveness in order to mutually eliminate changes in fair value or cash flows of hedged items.

The full value of the hedging derivative is classified as non-current asset or liability if the maturity of the hedged item is more than 12 (twelve) months and as a current asset or liability if the maturity of the hedged item is less than 12 (twelve) months.

(i) fair value of hedges

Changes in fair value of derivatives that are designated and qualify as fair value hedges are recorded in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, along with changes in the fair value of the hedged asset or liability value attributable to the hedged risk.

Gains or losses related to the effective portion of fair value hedges are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the same line with changes in the fair value of the hedged item.

Gains or losses related to the ineffective portion are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other – net".

(ii) cash flow hedges

The effective portion of changes in fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges is recognized in equity, in the account "Net Changes in Fair Value of Cash Flow Hedges".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

(7) Instrumen Derivatif (lanjutan)

(ii) lindung nilai arus kas (lanjutan)

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian yang tidak efektif diakui segera di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain-bersih". Akan tetapi, ketika prakiraan transaksi yang dilindungi nilai menimbulkan aset non-keuangan, keuntungan dan kerugian yang sebelumnya ditangguhkan di ekuitas akan dialihkan dari ekuitas dan dimasukkan di dalam pengukuran awal biaya perolehan aset tersebut.

Jumlah yang diakumulasikan di ekuitas direklasifikasi ke laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat item yang dilindung nilai mempengaruhi laba atau rugi.

Keuntungan atau kerugian yang terkait dengan bagian efektif dari lindung nilai arus kas diakui di dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, di baris yang sama dengan item yang dilindung nilai.

Ketika instrumen lindung nilai kadaluarsa atau dijual, atau ketika lindung nilai tidak lagi memenuhi kriteria akuntansi lindung nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang ada di ekuitas saat itu tetap berada di bagian ekuitas dan akan diakui pada saat prakiraan transaksi yang pada akhirnya diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Apabila prakiraan transaksi tidak lagi diharapkan akan terjadi, keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah dicatat di bagian ekuitas segera dialihkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain-bersih".

Perubahan nilai wajar atas instrumen derivatif apapun yang tidak ditujukan atau tidak dikualifikasikan sebagai akuntansi lindung nilai diakui segera dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dalam akun "Keuntungan/(Kerugian) Lain-lain-bersih".

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

h. Financial Instruments (continued)

(7) Derivative Instruments (continued)

(ii) cash flow hedges (continued)

Gains or losses related to the ineffective portion are recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other-Net". However, when the forecast transaction that is hedged raises non-financial assets, gains and losses previously deferred in equity are transferred from equity and included in the initial measurement of the cost of that asset.

Accumulated amounts in equity are reclassified to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the hedged item affects profit or loss.

Gains or losses related to the effective portion of cash flow hedges are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the same line as the hedged item.

When a hedging instrument is expired or sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, the cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognized when the forecast transaction ultimately is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

If the forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in equity is immediately transferred to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other-net".

Changes in the fair value of any derivative instruments that are not designated or do not qualify for hedge accounting are recognized immediately in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, in the account "Gain/(Loss) Other-net".

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

i. Kas dan Setara Kas

Untuk tujuan penyajian arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, giro pada Bank Indonesia dan bank lain dan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain dan semua investasi yang jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan yang tidak dijaminan serta tidak dibatasi penggunaannya.

j. Giro pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Giro pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan giro pada Bank Indonesia dan bank lain terkait instrumen keuangan.

k. Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain

Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain mengacu pada Catatan 3h terkait Instrumen keuangan.

l. Efek-efek

Efek-efek diklasifikasikan dalam kategori diperdagangkan, tersedia untuk dijual dan dimiliki hingga jatuh tempo.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek-efek mengacu pada Catatan 3h terkait instrumen keuangan.

Transaksi pembelian dan penjualan efek, baik untuk nasabah maupun untuk Kelompok Usaha sendiri diakui pada saat timbulnya perikatan atas transaksi efek saham. Pembelian efek saham untuk nasabah dicatat sebagai piutang nasabah dan utang Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia (KPEI), sedangkan penjualan untuk nasabah dicatat sebagai piutang KPEI dan "utang nasabah".

Pembelian efek saham untuk Kelompok Usaha sendiri dicatat sebagai "portofolio efek" dan "utang KPEI", sedangkan penjualan efek saham dicatat sebagai "piutang KPEI" dan mengurangi jumlah portofolio efek yang dimiliki Kelompok Usaha secara *first in first out* (FIFO) serta mengakui keuntungan atau kerugian atas penjualan efek tersebut dalam laba rugi tahun berjalan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Cash and Cash Equivalents

For cash flow presentation purposes, cash and cash equivalents consist of cash on hand, demand deposits with Bank Indonesia and other banks and placements with Bank Indonesia and other banks and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

j. Demand Deposits with Bank Indonesia and Other Banks

Demand deposits with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of demand deposits with Bank Indonesia and other banks related to financial Instruments.

k. Placements with Bank Indonesia and Other Banks

Placements with Bank Indonesia and other banks are classified as loans and receivables. Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of placements with Bank Indonesia and other banks are discussed in Notes 3h related to financial instrument.

l. Securities

Securities are classified as held-for-trading, available-for-sale and held-to-maturity.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of securities are discussed in Notes 3h and 3j related to financial instruments.

Purchases of equity securities for the interest of customers or for the Group are recorded as receivable from customers and payable to institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia (KPEI), while sales of equity securities for the interest of customers are recorded as receivable from KPEI and payable to customers.

Purchase of equity securities for the Group is recorded as "securities owned-trading" and "accounts payable to KPEI", on the other hand, sale of equity securities is recorded as "Receivables from KPEI" and deduction on the number of equity securities owned by the Group is based on first in first out (FIFO) method and any resulting gain or loss is reflected in the current operations.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

m. Tagihan dan Liabilitas Derivatif

Tagihan dan liabilitas derivatif diklasifikasikan dalam kategori diukur pada nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas derivatif mengacu pada Catatan 3h terkait instrumen keuangan.

n. Kredit

Kredit diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengukuran awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan efek-efek mengacu pada Catatan 3h terkait instrumen keuangan.

o. Restrukturisasi Kredit Bermasalah

Kerugian yang timbul dari restrukturisasi kredit yang berkaitan dengan modifikasi persyaratan kredit diakui bila nilai sekarang dari jumlah penerimaan kas yang akan datang yang telah ditentukan dalam persyaratan kredit yang baru, termasuk penerimaan yang diperuntukkan sebagai bunga maupun pokok, adalah lebih kecil dari nilai kredit yang diberikan yang tercatat sebelum restrukturisasi.

p. Piutang Sewa Pembiayaan

Dalam investasi neto sewa pembiayaan, Kelompok Usaha mengakui aset berupa piutang sewa pembiayaan sebesar jumlah investasi neto sewa pembiayaan Kelompok Usaha.

Investasi neto sewa pembiayaan terdiri dari jumlah piutang sewa pembiayaan ditambah nilai residu yang dijamin (harga opsi) yang akan diterima pada akhir masa sewa dikurangi dengan penghasilan pembiayaan tangguhan (*unearned lease income*), simpanan jaminan (*security deposit*) dan penyisihan penurunan nilai.

Selisih antara piutang sewa pembiayaan ditambah nilai residu yang dijamin dengan biaya perolehan aset sewaan dicatat sebagai penghasilan pembiayaan tangguhan dan dialokasikan sebagai pendapatan selama masa sewa berdasarkan suatu tingkat pengembalian berkala yang tetap dari investasi neto sewa pembiayaan. Kelompok Usaha tidak mengakui pendapatan bunga dari piutang sewa pembiayaan yang telah menunggak pembayaran lebih dari 90 hari. Pendapatan tersebut diakui pada saat pendapatan tersebut telah diterima.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

m. Derivative Receivables and Payables

Derivative receivables and payables are classified as fair value through profit or loss (FVTPL).

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of derivative receivables and payables are discussed through financial assets and financial liabilities.

n. Loans

Loans are classified as loans and receivables.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of securities are discussed in Notes 3h related to financial instrument.

o. Troubled Debt Restructuring

Losses resulting from loan restructuring related to modification of credit terms are recognized if the present value of future cash receipts which have been determined in new loan terms, including receipts designated as interest or principal, is less than the amount of the outstanding loan before the restructuring.

p. Finance Lease Receivable

Amounts due from lessees under finance leases are recorded as receivables at the amount of the Group's net investment in the finance lease.

Net investments in finance lease consist of the total lease receivables plus the guaranteed residual value (option price) to be received at the end of the lease period, less unearned lease income, security deposits, and allowance for impairment losses.

The difference between the finance lease receivables plus the guaranteed residual value and the acquisition cost of the leased assets is recorded as unearned lease income. This is recognized as finance lease income over the lease period at a periodic rate of return on net investments in finance lease. The Group does not recognize interest income from finance lease receivables which are overdue for more than 90 days. Such interest income is recognized as income when already received.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

p. Piutang Sewa Pembiayaan (lanjutan)

Pada saat perjanjian sewa pembiayaan ditandatangani, apabila aset sewaan memiliki nilai residu pada akhir periode sewa, lessee diwajibkan untuk memberikan simpanan jaminan yang akan diperhitungkan dengan nilai jual aset sewaan pada akhir masa sewa, bila hak opsi dilaksanakan oleh lessee. Apabila hak opsi tidak dilaksanakan, simpanan jaminan tersebut akan dikembalikan kepada lessee pada akhir masa sewa.

Apabila aset sewaan dijual kepada lessee sebelum masa sewa berakhir, maka perbedaan antara harga jual dengan investasi neto sewa pembiayaan dicatat sebagai keuntungan atau kerugian pada saat terjadinya.

q. Tagihan dan Liabilitas Akseptasi

Tagihan akseptasi diklasifikasikan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang. Liabilitas akseptasi dikategorikan sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar, penurunan nilai dan penghentian pengakuan tagihan dan liabilitas akseptasi mengacu pada Catatan 3h, 3i dan 3j terkait aset keuangan dan liabilitas keuangan.

r. Akuntansi Pembiayaan Konsumen

Piutang pembiayaan konsumen merupakan piutang setelah dikurangi dengan pendapatan belum diakui dan kerugian penurunan nilai.

Piutang yang tidak tertagih dihapuskan pada saat dinyatakan tidak tertagih oleh manajemen Entitas. Penerimaan dari piutang yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain pada saat diterima.

Pendapatan pembiayaan konsumen belum diakui merupakan perbedaan antara jumlah angsuran yang akan diterima dan jumlah pokok pembiayaan. Pendapatan belum diakui diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu perjanjian dengan menggunakan tingkat pengembalian berkala konstan dari piutang pembiayaan konsumen.

Pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui tersebut, diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif dari piutang pembiayaan konsumen.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

p. Finance Lease Receivable (continued)

At the inception of the lease, if the leased asset has residual value at the end of the lease period, the lessee is required to make a security deposit which will be applied as payment to the purchase option price of the leased asset at the end of the lease period if the option to purchase is exercised by the lessee. Otherwise, the security deposit will be returned to the lessee at the end of the lease period.

If the leased assets are sold to the lessee before the end of the lease period, the difference between the sales price and the net investments in finance lease is recorded as gain or loss at the time of sale.

q. Acceptances Receivable and Liabilities

Acceptances receivable are classified as loan and receivables. Acceptances liabilities are classified as financial liabilities at amortized costs.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value, impairment and derecognition of acceptances receivable and payable are discussed in Notes 3h, 3i and 3j related to financial assets and financial liabilities.

r. Accounting for Consumer Financing

Consumer financing are stated at the amount of installment receivable net of unearned income and impairment losses.

Receivables are written off when they are deemed to be uncollectible based on Entity's management evaluation. Recoveries from written-off receivables are recognized as other income upon receipt.

Unearned income on consumer financing represents the difference between the total installments to be received and the principal amount financed. Unearned income is amortized and recognized as income over the term of the financing agreement using a constant rate of return on the financing receivables.

Unearned income on consumer financing receivables is recognized as income over the term of existing contract based on the effective interest rate of consumer finance receivables.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

r. Akuntansi Pembiayaan Konsumen (lanjutan)

Selisih bersih antara pendapatan administrasi yang diperoleh dari konsumen pada saat pertama kali perjanjian, ditangguhkan dan diakui sebagai penyesuaian atas imbal hasil selama periode pembiayaan konsumen berdasarkan tingkat suku bunga efektif dan disajikan sebagai bagian dari "Pendapatan Pembiayaan Konsumen - Bersih" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

s. Anjak Piutang

Anjak piutang dengan perlindungan (*with recourse*) dinyatakan sebesar nilai bersih dari retensi dan pendapatan bunga yang ditangguhkan dan cadangan penurunan nilai. Selisih dari tagihan anjak piutang, termasuk retensi, dengan biaya anjak piutang merupakan pendapatan bunga yang ditangguhkan, yang akan diakui sebagai pendapatan berdasarkan proporsi waktu dengan menggunakan tingkat bunga efektif selama periode kontrak.

t. Pembiayaan

adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan Kelompok Usaha harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada konsumen.

Pada saat akad penjualan, piutang pembiayaan diakui sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan (*margin*).

Keuntungan dari penjualan diakui selama periode akad berdasarkan pengakuan *margin* dari piutang pembiayaan.

u. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah

Pada akhir periode pelaporan, piutang pembiayaan disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi *margin* yang ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Musyarakah Mutanaqishah adalah akad kerja sama antara Kelompok Usaha dan konsumen. Ekuitas dari Kelompok Usaha akan dibagi menjadi unit musyarakah dan konsumen akan membeli unit yang dimiliki Kelompok Usaha melalui pembayaran cicilan.

Keuntungan Musyarakah Mutanaqishah akan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama dari kedua belah pihak, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan ekuitas masing-masing pihak berdasarkan perjanjian Musyarakah.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Accounting for Consumer Financing (continued)

The difference between administration revenue from finance arrangements at inception of the agreement is deferred and recognized as yield adjustment over the contract terms based on effective interest rates and presented as part of the "Consumer Financing Income - Net" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

s. Factoring Receivables

Factoring receivables entered into with recourse are stated at net realizable value reduced by retention, unearned factoring income and allowance for impairment. The excess of factoring receivables over the total amount to be paid by the customer, including retention, represents unearned factoring income which will be recognized as income over the terms of the factoring agreement using a constant periodic rate of return.

t. Financing

is a sale and purchase agreement with the selling price of goods at cost plus an agreed profit and the Group must disclose the cost of the goods to the consumer.

At the time of sale, financing receivables are recognized at cost plus profit (*margin*).

Profit from sale is recognized over the period of the contract based on the recognition of margin on financing receivables.

u. Musyarakah Mutanaqisah Financing

At the end of reporting period, financing receivables are stated at their net realizable value, i.e. the outstanding amounts of deferred reduced by margins and allowance for impairment losses.

Musyarakah Mutanaqishah is a joint ownership agreement between the Group and the consumer. The equity of the Group will be divided into musyarakah units and the consumer will purchase the Group's units through installment payments.

Profit from Musyarakah Mutanaqishah will be shared as mutually agreed by the parties, and losses will be borne based on the percentage of equity of each party in the Musyarakah agreement.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

u. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah (lanjutan)

Pada akhir periode pelaporan, piutang pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah disajikan sebesar nilai neto yang dapat direalisasikan, yaitu saldo piutang Musyarakah Mutanaqishah dikurangi margin yang ditanggguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

v. Kontrak Asuransi

Aset reasuransi adalah milik hak kontraktual neto *cedant* (pemegang polis atas kontrak reasuransi) dalam perjanjian asuransi.

Aset reasuransi terdiri dari piutang reasuransi dan porsi reasuransi dan premi yang belum merupakan merupakan pendapatan dan estimasi klaim.

Aset reasuransi ditelaah untuk penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan, atau lebih sering, ketika sebuah indikasi penurunan nilai selama tahun pelaporan. Penurunan nilai terjadi ketika terdapat bukti obyektif sebagai akibat dari suatu peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset reasuransi bahwa Kelompok Usaha tidak dapat menerima seluruh jumlah terutang karena berdasarkan ketentuan kontrak dan peristiwa tersebut memiliki dampak yang dapat diukur dengan handal yang akan mempengaruhi jumlah yang akan diterima oleh Kelompok Usaha dari reasuradur. Kerugian penurunan nilai dicatat dalam laba rugi.

PSAK 62 tidak mengijinkan saling hapus antara:

- i) Aset reasuransi dengan liabilitas asuransi terkait atau
- ii) pendapatan atau beban dari kontrak reasuransi dan beban atau pendapatan dari kontrak asuransi.

Transaksi reasuransi

Untuk mengurangi risiko penutupan polis asuransi, Kelompok Usaha mereasuransikan polis-polis yang nilai pertanggungannya melebihi retensi sendiri kepada entitas-entitas reasuradur dan tidak mengakui ganti rugi atas klaim asuransi yang menjadi tanggungan reasuradur.

Kontrak reasuransi adalah kontrak yang mana satu pihak (asuradur) menerima risiko asuransi signifikan dari pihak lain (pemegang polis) dengan menyetujui untuk mengompensasi pemegang polis jika kejadian masa depan tidak pasti tertentu (kejadian yang diasuransikan) berdampak merugikan pemegang polis.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

u. Musyarakah Mutanaqishah Financing (continued)

At the end of the reporting period, Musyarakah Mutanaqishah financing receivables are stated at their net realizable value, i.e. the outstanding amounts of deferred Musyarakah Mutanaqishah is reduced by margins and allowance for impairment losses.

v. Insurance Contract

Reinsurance asset is the value of the cedant's net contractual rights (policy holders for the reinsurance contract) in the reinsurance agreement.

Reinsurance assets consist of reinsurance receivables and reinsurance portion from unearned premiums and estimated claims.

Reinsurance assets are reviewed for impairment at each reporting date, or more frequently, when an indication of impairment arises during the reporting year. Impairment occurs when there is objective evidence as a result of an event that occurred after initial recognition of the reinsurance assets that the Group may not receive all outstanding amounts due under terms of the contract and the event has a reliably measureable impact on the amounts that the Group will receive from the reinsurer. The impairment loss is recorded in the profit or loss.

PSAK 62 does not allow to offset between:

- i) Reinsurance assets and the related insurance liabilities or
- ii) income or expense from reinsurance contract and expense or income from the related insurance contract.

Reinsurance transaction

The Group reinsures risks with other insurance companies and do not recognize insurance claim which is borne by the reinsurance companies, to reduce its underwriting risk.

Reinsurance contract is a contract where one party (insurer) accepts significant insurance risk from another party (the policyholder) by agreeing to compensate the policyholder if the events specified uncertain future (the insured event) adversely affects the policyholder.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

v. Kontrak Asuransi (lanjutan)

Liabilitas kontrak asuransi

Adalah nilai kewajiban kontraktual neto asuradur dalam suatu kontrak asuransi.

Kontrak investasi diklasifikasikan antara kontrak dengan atau tanpa FPT (Fitur Partisipasi Tidak mengikat). Kebijakan akuntansi untuk kewajiban kontrak investasi dengan FPT adalah sama dengan yang untuk kewajiban kontrak asuransi jiwa.

Liabilitas kontrak investasi

Kewajiban kontrak investasi tanpa FPT diakui pada saat kontrak tersebut dilakukan dan premi yang dibebankan. Hutang ini awalnya diakui pada nilai wajar, ini menjadi harga transaksi termasuk transaksi biaya secara langsung terkait dengan penerbitan kontrak. Setelah pengakuan awal investasi, kewajiban kontrak diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

w. Biaya Dibayar Dimuka

Biaya dibayar dimuka diamortisasi selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

x. Aset Tetap

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Tahun/ Years	Persentase/ Percentage	
Bangunan dan prasarana	20	5%	Buildings and improvements
Kendaraan	4-5	25%-20%	Vehicles
Perlengkapan kantor	4-5	25%-20%	Office furniture and fixtures
Peralatan kantor	4	25%	Office equipment
Partisi	5	20%	Partition

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

v. Insurance Contract (continued)

Insurance contracts liability

Insurance contracts liability is the value of net contractual obligations under an insurance contract of the insurer.

Investment contracts are classified between contracts with or without DPF (Discretionary Participation Features). The accounting policies for investment contract liabilities with DPF are the same as those for life insurance contract liabilities.

Investment contracts liability

Investment contracts liability without DPF are recognized when contracts are entered into and premiums are charged. These liabilities are initially recognized at fair value, this being the transaction price excluding any transaction costs directly attributable to the issue of the contract. Subsequent to initial recognition investment, contract liabilities are measured at fair value through profit or loss.

w. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

x. Property and Equipment

Property and equipment held for use in the production or supply of goods or services, or for administrative purposes, are stated at cost, less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

x. Aset Tetap (lanjutan)

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Tanah dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dan tidak disusutkan.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Aset tetap yang sudah tidak digunakan lagi atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap dan keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut tercermin dalam laba atau rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

y. Aset Al-Ijarah

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu aset dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujrah) tanpa diikuti dengan pemindahan aset itu sendiri. Ijarah muntahiyah bittamlik adalah ijarah dengan wa'ad perpindahan kepemilikan obyek ijarah pada saat tertentu. Aset ijarah dicatat sebesar nilai perolehannya dan disusutkan sesuai dengan jangka waktu sewa yang telah disepakati. Pendapatan sewa selama masa akad diakui pada saat manfaat atas sewa telah diserahkan kepada penyewa.

z. Properti Investasi

Properti investasi dicatat sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai. Biaya perolehan juga termasuk biaya penggantian bagian properti investasi, jika memenuhi kriteria pengakuan. Seluruh biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laba rugi pada saat terjadinya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

x. Property and Equipment (continued)

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Land is stated at cost and is not depreciated.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

When assets are retired or otherwise disposed of, their carrying amounts are removed from the accounts and any resulting gain or loss is reflected in profit or loss.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

y. Al-Ijarah Assets

Ijarah is an agreement of transfer of rights to benefit from the use of an asset with a certain time period in exchange for the lease payment (ujrah) without transferring the ownership of the asset. Ijarah muntahiyah bittamlik is an ijarah with transfer of ownership of the asset at any given moment. Al-ijarah assets are initially recorded at cost and are depreciated over the agreed term of lease. Rental income is recognized when the rights of the asset has been transferred to the lessee.

z. Investment Properties

Investment property is stated at cost, including transaction costs less accumulated depreciation and impairment losses. Such cost includes the cost of replacing part of the investment property, if the recognition criteria are met. All other repairs and maintenance are charged to profit or loss during the financial year in which these are incurred.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

z. Properti Investasi (lanjutan)

Properti investasi didepresiasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaat sebagai berikut:

	Tahun/ Years
Bangunan	20

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

Perpindahan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, adanya perubahan dalam penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya penggunaan oleh pemilik dan dimulainya sewa operasi kepada pihak lain. Perpindahan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, adanya perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan yang ditujukan untuk dijual.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui di laporan laba rugi pada tahun terjadinya penghentian atau pelepasan.

aa. Aset Tak Berwujud

Goodwill

Goodwill yang timbul dari kombinasi bisnis diakui sebagai aset pada tanggal diperolehnya pengendalian (tanggal akuisisi). Untuk tujuan uji penurunan nilai, goodwill dialokasikan pada setiap unit penghasil kas dari Kelompok Usaha yang diharapkan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi bisnis tersebut. Unit penghasil kas yang telah memperoleh alokasi goodwill diuji penurunan nilainya secara tahunan atau pada saat terdapat indikasi bahwa unit tersebut mengalami penurunan nilai. Jika jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai dialokasikan terlebih dahulu untuk mengurangi jumlah tercatat aset atas setiap goodwill yang dialokasikan pada unit dan selanjutnya ke aset lainnya dari unit dibagi prorata atas dasar jumlah tercatat setiap aset dalam unit tersebut. Rugi penurunan nilai yang diakui atas goodwill tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

z. Investment Properties (continued)

Investment properties are depreciated using straight line method based on their estimated useful life as follows:

	Persentase/ Percentage	
Bangunan	5%	Buildings

The estimated useful lives, residual values and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in estimate accounted for on a prospective basis.

Transfers are made to investment property when, and only when, there is a change in use, evidenced by ending of owner-occupation and commencement of an operating lease to another party. Transfers are made from investment property when, and only when, there is a change in use, evidenced by commencement of owner occupation or commencement of development with a view to sale.

Investment property is derecognized when either it is disposed of or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from its disposal. Any gain or loss on the retirement or disposal of an investment property is recognized in the statements of profit or loss in the year of retirement or disposal.

aa. Intangible Assets

Goodwill

Goodwill arising in a business combination is recognised as an asset at the date that control is acquired (the acquisition date). For the purpose of impairment testing, goodwill is allocated to each of the Group's cash-generating units expected to benefit from the synergies of the combination. Cash-generating units to which goodwill has been allocated are tested for impairment annually, or more frequently when there is an indication that the unit may be impaired. If the recoverable amount of the cash-generating unit is less than its carrying amount, the impairment loss is allocated first to reduce the carrying amount of any goodwill allocated to the unit and then to the other assets of the unit pro-rata on the basis of the carrying amount of each asset in the unit. An impairment loss recognized for goodwill is not reversed in a subsequent period.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

aa. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Pada pelepasan unit penghasil kas yang relevan, jumlah yang dapat diatribusikan dari goodwill termasuk dalam penentuan laba atau rugi atas pelepasan.

Perangkat lunak

Perangkat lunak yang dibeli oleh Kelompok Usaha dan dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi.

Amortisasi diakui dalam laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 5 tahun.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode amortisasi direviu setiap akhir tahun.

Biaya pengurusan tanah

Biaya perolehan pengurusan legal hak atas tanah ditangguhkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus sepanjang umur hukum hak atas tanah karena umur hukum hak atas tanah lebih pendek dari umur ekonominya.

bb. Penurunan Nilai Aset Non-Kuangan Selain Goodwill

Pada setiap tanggal pelaporan, Kelompok Usaha menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Kelompok Usaha mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

Perkiraan jumlah terpulihkan adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) kurang dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) dikurangi menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali dan rugi penurunan nilai diakui langsung ke laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

aa. Intangible Assets (continued)

On disposal of the relevant cash-generating unit, the attributable amount of goodwill is included in the determination of the profit or loss on disposal.

Software

Software acquired by the Group are stated at cost less accumulated amortization.

Amortization is recognized in profit or loss using the straight line method based on its estimated useful lives of 5 years.

The estimated useful lives, residual values and amortization method are reviewed at each year end.

Land processing cost

Costs for the legal processing and renewal of landrights, are deferred and are amortized using the straight-line method over the legal term of the landright since the legal term of the right is shorter than its economic life.

bb. Impairment of Non-Financial Asset Other than Goodwill

At the end of each reporting period, the Group reviews the carrying amount of non-financial assets to determine whether there is any indication that those assets are impaired. If any such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine the extent of the impairment loss (if any). Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable amount of the cash generating unit to which the asset belongs.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less cost to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset for which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately against earnings.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

cc. Agunan yang Diambil Alih

Agunan yang diambil alih dinyatakan sebesar nilai realisasi bersih pada saat agunan yang diambil alih. Pada akhir tahun, agunan yang diambil alih ditelaah kembali, apabila terdapat penurunan nilai dari agunan yang diambil alih, maka nilai agunan yang diambil alih tersebut akan disesuaikan. Pada saat agunan yang diambil alih dijual, nilai tercatatnya dihapuskan dan keuntungan atau kerugian diakui sebagai laba atau rugi.

Manajemen mengevaluasi nilai agunan yang diambil alih secara berkala. Cadangan kerugian penurunan nilai agunan yang diambil alih dibentuk atas penurunan nilai agunan yang diambil alih.

Bila terjadi penurunan nilai yang bersifat permanen, maka nilai tercatatnya dikurangi untuk mengakui penurunan tersebut dan kerugiannya dibebankan pada laba rugi.

dd. Utang Al-Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama diantara para pemilik modal yang menggabungkan modal mereka untuk tujuan mencari keuntungan. Dalam Al-Musyarakah Kelompok Usaha dan bank menyediakan modal untuk membiayai usaha tertentu, baik yang sudah berjalan maupun yang baru. Selanjutnya Kelompok Usaha dapat mengembalikan modal tersebut berikut bagi hasil yang telah di sepakati secara bertahap atau sekaligus kepada bank.

ee. Utang Al-Mudharabah

Al-Mudharabah adalah suatu bentuk kerjasama dua pihak atau lebih dimana satu pihak sebagai penyandang dana dan pihak yang lain sebagai pengelola dana, dimana dana itu digunakan oleh pengelola untuk usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi hasil sesuai kesepakatan.

ff. Liabilitas Segera

Liabilitas segera merupakan liabilitas Bank kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan liabilitas segera terkait liabilitas keuangan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

cc. Foreclosed Collateral

Foreclosed collateral is stated at net realizable value at the time of foreclosure. At the end of the year, foreclosed collateral are reviewed and any impairment in value of the foreclosed collateral will be adjusted. When the foreclosed collateral are disposed of, their carrying amount are removed from the accounts and any resulting gains or losses are recognized in profit or loss.

Management evaluates the value of foreclosed properties periodically. Allowance for impairment losses on foreclosed properties is reserved on reduction of foreclosed properties value.

The carrying amount of foreclosed properties is written down to recognize a permanent decline in the value of the foreclosed properties, which is charged to current operations.

dd. Al-Musyarakah Loan

Al-Musyarakah is a partnership agreement between the owners of capital who combine their capital for the purpose of profit. In Al-Musyarakah, the Group and the bank alike provide capital to finance a certain business, both existing and new. Furthermore, the Group can recover the capital following the results of which have been agreed in stages or all at once to the bank.

ee. Al-Mudharabah Loan

Al-Mudharabah is a form of cooperation between two or more parties in which one party acts as the lender and other party acts as fund manager, wherein the funds are used by the managers for business. The profit of the business is divided according to the agreement.

ff. Liabilities Immediately Payable

Liabilities immediately payable represent obligation to third parties, based on contract or orders by those having authority that should be settled immediately.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of liabilities immediately payable are discussed in related to financial liabilities.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

gg. Simpanan

Simpanan diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan terkait liabilitas keuangan.

hh. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Simpanan dari bank lain terdiri dari liabilitas terhadap bank lain, baik local maupun luar negeri, dalam bentuk giro, inter-bank call money dengan periode jatuh tempo menurut perjanjian kurang dari atau 90 hari, tabungan dan deposito berjangka.

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan simpanan dari bank lain mengacu pada Catatan 3i dan 3j terkait liabilitas keuangan.

ii. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui sebagai berikut:

- 1) Pendapatan pembiayaan diakui dengan basis tingkat suku bunga efektif seperti dijelaskan pada Catatan 3h, 3s, 3q, 3s, 3t dan 3u.
- 2) Pendapatan dari jasa pengelolaan investasi dan jasa penasihat investasi diakui pada saat jasa diberikan sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
- 3) Keuntungan atau kerugian dari perdagangan efek meliputi keuntungan atau kerugian yang timbul dari penjualan efek dan keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan (penurunan) nilai wajar portofolio efek.
- 4) Jasa penjamin emisi efek diakui pada saat aktivitas penjaminan emisi secara substansial telah selesai dan jumlah pendapatan telah dapat ditentukan.
- 5) Pendapatan dividen dari portofolio efek diakui pada saat deklarasi efek ekuitas oleh penerbit.
- 6) Pendapatan ijarah diakui selama masa akad. Pendapatan ijarah disajikan secara neto setelah dikurangi beban penyusutan aset ijarah.
- 7) Pendapatan dan Beban Asuransi Pendapatan premi bruto diakui secara tahunan sejak tanggal berlakunya kontrak asuransi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

gg. Deposits

Deposits are classified as financial liabilities at amortized costs

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of deposits are discussed in related to financial liabilities.

hh. Deposits from Other Banks

Deposits from other banks are classified as financial liabilities at amortized costs.

Deposits from other banks represent liabilities to domestic and overseas banks, in the form of demand deposits, inter-bank call money deposits with original maturities of 90 days or less, saving deposits and time deposits.

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of deposits from other banks are discussed in Notes 3i and 3j related to financial liabilities.

ii. Recognition of Revenues and Expenses

Revenues are recognized as follows:

- 1) Financing income is recognized on an effective interest basis as explained in Note 3h, 3s, 3q, 3s, 3t and 3u.
- 2) Fees from investment management and advisory services are recognized when the services are rendered based on the terms of the contracts.
- 3) Gain or losses on trading of securities consist of gains or losses arising from the sale of securities and unrealized gains or losses resulting from increases (decreases) in the fair value of securities owned.
- 4) Underwriting fees are recognized when underwriting activities are substantially completed and the amount of income has been determined.
- 5) Dividend income from securities is recognized upon declaration by the issuer of equity securities.
- 6) Revenue from ijarah is recognized over contract term. Revenue from ijarah is presented net of depreciation expense of asset for ijarah.
- 7) Insurance Income and Expenses Gross premium income is recognized on a yearly basis at the inception date of the insurance contract.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

ii. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Pendapatan premi bruto asuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diakui sebagai pendapatan premi ditangguhkan pada saat diterima dan diakui sebagai pendapatan secara tahunan pada setiap tanggal ulang tahun polis selama periode berlakunya kontrak asuransi.

Premi bruto mencakup premi koasuransi sebesar bagian pertanggungan Kelompok Usaha.

Pendapatan underwriting neto ditentukan setelah memperhitungkan cadangan untuk premi yang belum merupakan pendapatan, beban klaim, beban akuisisi, dan tes kecukupan liabilitas. Metode yang digunakan untuk menentukan cadangan tersebut adalah sebagai berikut:

Premi yang Belum Merupakan Pendapatan

PSAK 36 (Revisi 2010), "Akuntansi Asuransi Jiwa" mengatur liabilitas asuransi kontrak asuransi yang berjangka waktu lebih dari satu tahun diukur dengan menggunakan salah satu dari:

Konsep nilai kini estimasi pembayaran seluruh manfaat yang diperjanjikan termasuk seluruh opsi yang disediakan ditambah dengan nilai kini estimasi seluruh biaya yang akan dikeluarkan dan juga mempertimbangkan penerimaan premi di masa depan.

Sesuai dengan PSAK 62, "Kontrak Asuransi", aset reasuransi atas premi yang belum merupakan pendapatan dicatat secara terpisah sebagai aset reasuransi.

Premi yang belum merupakan pendapatan dihitung dengan menggunakan metode yang lebih relevan dan handal yaitu individual harian. Metode individual harian menghitung premi yang belum merupakan pendapatan secara proporsional sesuai dengan jumlah proteksi yang diberikan selama periode kontrak atau risiko untuk setiap kontrak.

Perubahan premi yang belum merupakan pendapatan dan aset reasuransi dari premi yang belum merupakan pendapatan diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ii. Recognition of Revenues and Expenses (continued)

Gross premium income with a term of more than one year is recognized as deferred premium income when received and is recognized as income on a yearly basis at each policy anniversary date over the period of the insurance contract.

Gross premium includes the Group's share of coinsurance policy premiums.

Net underwriting income is determined net after making provisions for unearned premium reserves, claim expense, acquisition expense, and liability adequacy test. The methods used to determine these provisions are as follows:

Unearned Premiums

PSAK 36 (Revised 2010), "Accounting for Life Insurance Contract governs insurance liabilities for insurance contract with a term of more than one year is measured by using one of the following:

Present value of estimated payment of all benefits promised including all options available plus present value of all expenses incurred and considering the future receipt of premium.

In accordance with PSAK 62, "Insurance Contract", the reinsurance assets of unearned premium reserve are separately presented as reinsurance assets.

Unearned premium reserve is calculated based on the method considered to be more relevant and reliable which is the daily individual method. The daily individual method calculates the unearned premium reserve proportionally based on the amount of the protection given during the period of contract or risk for each individual contract.

Changes in unearned premium reserves and reinsurance assets of unearned premium reserve are recognized in profit or loss in the year when the changes occur.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

ii. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Beban Klaim

Beban klaim dicatat pada saat terjadinya kerugian. Beban klaim meliputi klaim yang telah disetujui, estimasi klaim yang masih dalam proses dan estimasi klaim yang terjadi namun belum dilaporkan ("IBNR"). Dalam laporan posisi keuangan, estimasi klaim yang masih dalam proses dan IBNR disajikan dalam akun estimasi klaim.

Sesuai dengan PSAK 62, "Kontrak Asuransi", estimasi pemulihan klaim reasuransi dicatat secara terpisah dalam akun aset reasuransi. Selanjutnya, pengakuan estimasi klaim juga memasukkan komponen estimasi biaya penanganan klaim dan margin atas kesalahan pengukuran. Pengakuan komponen tersebut mencerminkan pengukuran yang lebih relevan dan handal.

Perubahan jumlah estimasi klaim, sebagai akibat proses penelaahan lebih lanjut dan perbedaan antara jumlah estimasi klaim dengan klaim yang dibayarkan, diakui dalam laba rugi pada tahun terjadinya perubahan.

Penerimaan dari hak subrogasi dan pendapatan residu dicatat sebagai pengurang beban klaim pada saat jumlahnya telah diketahui dengan pasti.

Beban Akuisisi

Beban akuisisi polis, seperti komisi, ditangguhkan dan diamortisasi dengan menggunakan metode yang konsisten dengan metode yang digunakan untuk amortisasi premi yang belum merupakan pendapatan.

Tes Kecukupan Liabilitas

Pada setiap akhir periode pelaporan, Kelompok Usaha menilai apakah premi yang belum merupakan pendapatan dan estimasi klaim yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi telah mencukupi, dengan membandingkan nilai tercatat tersebut dengan estimasi arus kas masa depan sesuai dengan kontrak asuransi.

Jika perbandingan tersebut menunjukkan bahwa nilai tercatat atas liabilitas asuransi (dikurangi dengan biaya akuisisi tangguhan dan asset tak berwujud terkait) lebih rendah dibandingkan dengan estimasi nilai kini atas arus kas masa depan, maka kekurangan tersebut diakui dalam laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ii. Recognition of Revenues and Expenses (continued)

Claims Expense

Claims expense are recognized as insured loss as incurred. Claims expense include claims approved, estimated for claims reported but not yet approved and estimated of incurred-but-not-reported ("IBNR") claims. In the consolidated statements of financial position, the estimated claim for claims reported but not yet approved and IBNR claims are presented under estimated claim account.

In accordance with PSAK 62, "Insurance Contract", estimated reinsurance claim recoveries are presented separately as reinsurance asset account. Further, the recognition of estimated claim also included an estimate of claim, handling expenses and margin for adverse deviation. The recognition of those components reflect more relevant and reliable measurement.

Changes in the amount of estimated claims as a result of further review and differences between estimated claim and claims paid, are recognized in profit or loss in the year when the changes occur.

Recoveries under subrogation right and salvage are recorded as a reduction of claims expense when the amount can be determined.

Acquisition Cost

Policy acquisition costs, such as commissions are deferred and amortized using an amortization method which is consistent with the method used to amortize the unearned premium reserve.

Liability Adequacy Test

At end of each reporting period, the Group evaluates whether the unearned premium reserves and estimated claim as recognized in the consolidated statements of financial position have been adequately recognized by comparing the carrying amount with the estimated future cash outflows in accordance with the insurance contracts.

If the valuation indicates that the carrying value of insurance liabilities (net of deferred acquisition costs and relevant intangible assets) is lower compared to the estimated present value of future cash outflows, then such deficiency is recognized in the profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

ii. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

Reasuransi

Beban premi reasuransi dicatat sebagai pengurang dari pendapatan premi bruto. Apabila reasurador gagal memenuhi kewajibannya kepada Kelompok Usaha, Kelompok Usaha tetap memiliki kewajiban kepada pemegang polis atas kerugian yang telah direasuransikan.

jj. Sewa

Sewa merupakan suatu perjanjian yang mana lessor memberikan kepada lessee hak untuk menggunakan aset selama periode waktu yang disepakati. Sebagai imbalannya, lessee melakukan pembayaran atau serangkaian pembayaran kepada lessor.

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial semua risiko dan manfaat yang terkait dengan insidental kepemilikan aset kepada lessee. Sewa lainnya yang tidak memenuhi kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Sebagai Lessee

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Rental kontijen yang timbul dari sewa operasi diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

Sebagai Lessor

Pendapatan sewa dari sewa operasi diakui sebagai pendapatan dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

kk. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

Program pensiun iuran pasti

BMNCI, Entitas anak, menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawantetapnya. Iuran yang ditanggung BMNCI diakui sebagai beban pada laba rugi.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

ii. Recognition of Revenues and Expenses (continued)

Reinsurance

Reinsurance premium cost is recorded as a reduction of gross premium income. The Group remains liable to the policy holders for reinsured losses in the event the reinsurers are unable to meet their obligations.

jj. Leases

A lease is an agreement whereby the lessor conveys to the lessee in return for a payment or series of payments the right to use an asset for an agreed period of time.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the assets to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

As Lessee

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

As Lessor

Rental income from operating leases is recognized on a straight-line basis over the term of the relevant lease.

kk. Post-Employment Benefits Obligation

Defined contribution pension plan

BMNCI, a subsidiary, established a defined contributory plan covering all of its permanent employees. Contributions funded by BMNCI were charged to profit or loss.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

kk. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Imbalan pasca kerja imbalan pasti

Kelompok Usaha menghitung imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Entitas anak sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini.

Imbalan pasca-kerja yang dicatat sebagai imbalan manfaat pasti ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* dengan penilaian aktuarial yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Pengukuran kembali, yang terdiri keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak dari perubahan plafon aset (jika ada) dan pengembalian aset program (tidak termasuk bunga), tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian dengan beban atau kredit yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain pada periode terjadinya.

Pengukuran kembali yang diakui dalam pendapatan komprehensif lain tercermin sebagai bagian terpisah pada penghasilan komprehensif lain dalam ekuitas dan tidak akan direklasifikasi ke laporan laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laporan laba rugi pada periode amandemen program. Bunga bersih dihitung dengan menggunakan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut: (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); (ii) beban bunga bersih atau pendapatan; dan (iii) pengukuran kembali.

Kelompok Usaha menyajikan dua komponen awal biaya imbalan pasti di laporan laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit aktual dalam program imbalan pasti Kelompok Usaha.

Liabilitas untuk pesangon diakui pada lebih awal ketika Entitas tidak dapat lagi menarik tawaran imbalan tersebut dan ketika Entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

kk. Post-Employment Benefits Obligation (continued)

Defined post-employment benefits

The Group calculates defined post-employment benefits to their employees in accordance with Labor Law No.13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan.

Post-employment benefits accounted for as defined benefit plan are determined using the Projected Unit Credit Method with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurement, comprising actuarial gains and losses the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur.

Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected as a separate item under other comprehensive income in equity and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognized in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows: (i) service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements); (ii) net interest expense or income; and (iii) remeasurement.

The Group presents the first two components of defined benefit cost in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

The retirement benefit obligation recognised in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit in the Group's defined benefit plans.

A liability for a termination benefit is recognised at the earlier of when the entity can no longer withdraw the offer of the termination benefit and when the entity recognises any related restructuring costs.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

kk. Liabilitas Imbalan Pasca Kerja (lanjutan)

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

BMNCI memberikan penghargaan masa kerja kepada karyawan yang memenuhi persyaratan.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah diakui sebagai provisi untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini liabilitas imbalan pasti.

ll. Pajak Penghasilan

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (bukan kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi. Selain itu, liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal goodwill.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

kk. Post-Employment Benefits Obligation (continued)

Other long-term benefits

BMNCI also provides long service award for all qualified employees.

The cost of providing other long-term benefits is determined using the Projected Unit Credit Method. The provision for long-term employee benefits recognized in the consolidated statements of financial position represents the present value of the defined benefits obligation.

ll. Income Tax

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the consolidated financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit. In addition, deferred tax liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition of goodwill.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

II. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Kelompok Usaha ekspektasikan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba atau rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laba atau rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba atau rugi atau yang timbul dari akuntansi awal atau kombinasi bisnis. Dalam kasus kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika Entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas Entitas kena pajak yang sama atau Entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

mm. Provisi

Provisi diakui ketika Kelompok Usaha memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Kelompok Usaha diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

II. Income Tax (continued)

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Group expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

mm. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

mm. Provisi (lanjutan)

mm. Provision (continued)

Jumlah yang diakui sebagai provisi merupakan estimasi terbaik dari pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

nn. Pengaturan Pembayaran Berbasis Saham

nn. Share-based Payment Arrangements

Pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas kepada karyawan dan pihak lain yang memberikan jasa serupa yang diukur pada nilai wajar instrumen ekuitas pada tanggal pemberian kompensasi. Rincian sehubungan dengan penetapan nilai wajar dari transaksi pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas ditetapkan dalam Catatan 32.

Equity-settled share-based payments to employees and others providing similar services are measured at the fair value of the equity instruments at the grant date. Details regarding the determination of the fair value of equity-settled share-based transactions are set out in Note 32.

Nilai wajar yang ditentukan pada tanggal pemberian dari pembayaran berbasis saham yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas dibebankan secara garis lurus sepanjang periode *vesting*, berdasarkan estimasi Entitas dari instrumen ekuitas yang pada akhirnya *vest*, dengan peningkatan yang sesuai ekuitas. Pada setiap akhir periode pelaporan, Entitas merevisi estimasi jumlah instrumen ekuitas yang diekspektasi akan *vest* dan dampaknya, jika ada, diakui dalam laba rugi sehingga biaya kumulatif mencerminkan estimasi yang direvisi, dengan penyesuaian yang terkait dengan cadangan ekuitas-menetap imbalan kerja.

The fair value determined at the grant date of the equity-settled share-based payments is expensed on a straight-line basis over the vesting period, based on the Entity's estimate of equity instruments that will eventually vest, with a corresponding increase in equity. At the end of each reporting period, the Entity revises its estimate of the number of equity instruments expected to vest and the impact, if any, is recognised in profit or loss such that the cumulative expense reflects the revised estimate, with a corresponding adjustment to the equity-settled employee benefits reserve.

oo. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali

oo. Securities Sold with Agreements to Repurchase

Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) diklasifikasikan dalam kategori liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Securities sold with agreements to repurchase (repo) are classified as financial liabilities at amortized costs.

Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) disajikan sebagai liabilitas sebesar harga pembelian kembali yang disepakati dikurangi selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati. Selisih antara harga jual dan harga pembelian kembali yang disepakati tersebut diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif sebagai beban bunga selama jangka waktu sejak efek-efek tersebut dijual hingga saat dibeli kembali.

Securities sold under repurchase agreements (repo) are presented as liabilities and stated at the agreed repurchase price less the difference between the selling price and agreed repurchase price. The difference between the selling price and agreed repurchase price is amortized using effective interest method as interest expense over the year commencing from the selling date to the repurchase date.

3. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN (lanjutan)

oo. Efek yang Dijual dengan Janji Dibeli Kembali (lanjutan)

Pengakuan, pengukuran awal, pengukuran setelah pengakuan awal, reklasifikasi, penentuan nilai wajar dan penghentian pengakuan efek yang dijual dengan janji dibeli kembali.

pp. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba per saham dilusian dihitung dengan membagi laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik Entitas induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang telah disesuaikan dengan dampak dari semua efek berpotensi saham biasa yang dilutif.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING

Pertimbangan, Estimasi dan Asumsi

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian mengharuskan manajemen Kelompok Usaha untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontijensi, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai pertimbangan, estimasi dan asumsi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat pada saat dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk periode berikutnya diungkapkan dibawah ini.

Kelompok Usaha mendasarkan estimasi dan asumsi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Kelompok Usaha. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Pertimbangan, estimasi dan asumsi berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)

oo. Securities Sold with Agreements to Repurchase (continued)

Recognition, initial measurement, subsequent measurement, reclassification, fair value and derecognition of securities sold with agreements to repurchase.

pp. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net income attributable to owners of the Entity by the weighted average number of shares outstanding during the year.

Diluted earnings per share is computed by dividing net income attributable to the owners of the Entity by the weighted average number of shares outstanding as adjusted for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING

Judgments, Estimates and Assumptions

The preparation of consolidated financial statements requires management of the Group to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities and disclosure of contingent liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about the judgment, estimates and assumptions could result in material adjustments to the carrying value of assets and liabilities in future period.

The key assumptions of the future and the other key source of uncertainty in estimation at the reporting date that have a significant risk of material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities for the future period described below.

The Group bases its estimates and assumptions on the parameters available at the time the consolidated financial statements are prepared. Assumptions and situation concerning the future development may change due to market changes or circumstances beyond the control of the Group. The changes are reflected in the related assumptions as incurred.

The following judgments, estimates and assumptions made by management in implementing accounting policies of the Group has the most significant effect on the amount recognized in the consolidated financial statements:

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Alokasi Harga Pembelian dan Penurunan Nilai Goodwill

Goodwill harus dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun dan bilamana ada indikasi bahwa goodwill tersebut mungkin menurun nilainya. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi nilai yang dapat dipulihkan dan dapat menyebabkan beban penurunan nilai masa depan dalam PSAK No. 48 (Revisi 2013), "Penurunan Nilai Aset".

Menentukan Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional adalah mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana Kelompok Usaha beroperasi. Manajemen mempertimbangkan mata uang yang paling mempengaruhi pendapatan dan harga pokok penjualan dan indikator lainnya dalam menentukan mata uang yang paling sesuai mewakili dampak ekonomi yang mendasari transaksi, peristiwa dan kondisi.

Menentukan Klasifikasi Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Kelompok Usaha menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Kelompok Usaha.

Menentukan Nilai Wajar dan Perhitungan Amortisasi Biaya Perolehan dari Instrumen Keuangan

Kelompok Usaha mencatat aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan yang diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan amortisasi biaya perolehan ditentukan menggunakan bukti obyektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Kelompok Usaha menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi secara langsung laba atau rugi Kelompok Usaha.

Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Keuangan

Kelompok Usaha mengevaluasi akun tertentu yang diketahui bahwa pelanggan tertentu tidak dapat memenuhi liabilitas keuangannya. Dalam hal tersebut, Kelompok Usaha menggunakan pertimbangan berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu dan hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga yang tersedia dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas pelanggan terhadap jumlah terutang guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Kelompok Usaha. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Purchase Price Allocation and Goodwill Impairment

Goodwill is subject to annual impairment test and whenever there is an indication that such goodwill may be impaired. Management uses its judgment in estimating the recoverable value and may lead to future impairment charges under PSAK No. 48 (Revised 2013), "Impairment of Assets".

Determining of Functional Currency

The functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Group operates. The management considers the currency that mainly influences the revenue and cost of sales and other indicators in determining the currency that most faithfully represents the economic effects of the underlying transactions, events and conditions.

Determining Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Group determines classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by considering the definitions set forth in PSAK No. 55 (Revised 2014) are met. Accordingly, financial assets and financial liabilities are recognized in accordance with the Group's accounting policies.

Determining Fair Value and Calculation of Cost Amortization of Financial Instruments

The Group records certain financial assets and financial liabilities at fair value and at amortized cost, which requires the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization is determined using verifiable objective evidence, the amount of the fair value or amortized cost may differ if the Group uses different valuation methodologies or assumptions. These changes directly affect the Group's profit or loss.

Determining Recoverable Amount of Financial Assets

The Group evaluates specific accounts where it has information that a particular customer cannot meet its financial liabilities. In this case, the Group uses judgment based on available facts and circumstances, including but not limited to, terms and relationships with customers and the credit status of customers based on available credit records from third parties and known market factors, to record specific allowance for the customer against the amount owed in order to reduce the amount of the receivables that the Group expects to collect. Specific allowance is re-evaluated and adjusted if additional information received affects the amount of allowance for impairment of receivables.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Menentukan Jumlah Terpulihkan dari Aset Non-Keuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan.

Provisi dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

Jumlah pemulihan atas aset tetap, properti investasi dan aset Al-Ijyah didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam asumsi-asumsi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Menentukan Metode Penyusutan dan Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap, Properti Investasi dan aset Al Ijyah

Kelompok Usaha mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar.

Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan properti investasi adalah berdasarkan penelaahan Kelompok Usaha terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara.

Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir tahun pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset serta perkembangan teknologi.

Namun demikian, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor-faktor yang disebutkan di atas, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Biaya perolehan aset tetap, properti investasi dan aset Al Ijyah disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan properti investasi antara 4 sampai dengan 20 tahun. Ini adalah umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Kelompok Usaha menjalankan bisnisnya.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Determining Recoverable Amount of Non-Financial Assets

Provision for decline in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the physical condition of inventory on hand, the selling price of the market, estimated costs of completion and the estimated costs incurred for the sale.

Provision re-evaluated and adjusted if additional information that affect the estimated amounts.

The recovery amounts of property, plant, equipment, investment properties and Al Ijyah Assets are based on estimates and assumptions especially about market prospects and cash flows associated with the asset. Estimates of future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these assumptions may have a material impact on the measurement of recoverable amount and could result in adjustments to the allowance for impairment already booked.

Determining Depreciation Method and Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment, Investment Property and Al Ijyah Assets.

The Group estimates the useful lives of property, plant and equipment and investment property based on the expected utilization of assets and supported by plans and business strategy and market behavior.

Estimation of useful lives of property, plant and equipment and investment property are provided based on the Group's evaluation on industry practice, internal technical evaluation and experience for assets equivalent.

The estimated useful lives are reviewed at least at each year end reporting and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other restrictions on the use of assets as well as technological developments.

However, it is possible, future results of operations could be materially affected by changes in the estimates due to changes in the factors mentioned above, and therefore the future depreciation charges may be revised.

The costs of property, plant and equipment, investment property and Al Ijyah Assets are depreciated using the straight-line method over the estimated economic useful lives. Management estimates the useful lives of property, plant and equipment and investment property between 4 to 20 years. This is the age that is generally expected in the industry in which the Group does business.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Menentukan Pajak Penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Kelompok Usaha mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan.

Dalam situasi tertentu, Kelompok Usaha tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan interpretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks serta jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di masa depan.

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Kelompok Usaha menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Kelompok Usaha membuat analisis untuk semua posisi pajak terkait dengan pajak penghasilan untuk menentukan jika liabilitas pajak untuk manfaat pajak yang belum diakui harus diakui.

Kelompok Usaha menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi nilai tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Kelompok Usaha juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pemulihan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai.

Estimasi Beban Pensiun dan Imbalan Kerja

Penentuan liabilitas atas pensiun dan kewajiban imbalan kerja Kelompok Usaha bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut.

Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian dan tingkat pengembalian aset program yang diharapkan.

Sementara Kelompok Usaha berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Kelompok Usaha dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam catatan 26.

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Determining Income Taxes

Significant judgments made in determining the provision for income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business activities. The Group recognizes a liability for corporate income tax based on estimates of whether there will be an additional income tax.

In certain situations, the Group cannot determine the exact amount of their current or future tax liability due to on going investigation, or the negotiations with tax authorities. Uncertainties arise concerning the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of the taxable income in the future.

In determining the amount to be recognized related to uncertain tax liabilities, the Group applies the similar consideration that they will use in determining the amount of provision that must be recognized in accordance with PSAK No. 57 (Revised 2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets". The Group makes the analysis to all tax positions related to income taxes to determine if tax liability for unrecognized tax benefits should be recognized.

The Group reviews the deferred tax assets at each reporting date and reduces the carrying amount to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow for part or all of the deferred tax assets to be utilized. The Group also reviews the expected timing and tax rates on the reversal of temporary differences and adjusts the impact of deferred tax accordingly.

Estimated Pension Costs and Employee Benefits

The determination of liability for pension and employee benefits obligation and net employee benefits expense is subject to the selection of certain assumptions used by independent actuaries in calculating such amounts.

Those assumptions include, among others, the discount rate, annual salary increase, the annual rate of resignation of employees, level of disability, retirement age and mortality and the expected rate of return of plan assets.

While the Group believes that the assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual results or significant changes in assumptions defined by the Group can materially affect the estimated liability for employee benefits and pensions and net employee benefits expense. More detailed information disclosed in the note 26.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (lanjutan)

Mengevaluasi Provisi dan Kontijensi

Kelompok Usaha terlibat dalam berbagai proses hukum dan pajak. Manajemen melakukan penilaian untuk membedakan antara provisi dan kontijensi terutama melalui konsultasi dengan penasehat hukum Kelompok Usaha yang menangani proses hukum dan pajak tersebut. Kelompok Usaha mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum saat ini atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya. Dalam pengakuan dan pengukuran provisi, manajemen mengambil risiko dan ketidakpastian.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Kelompok Usaha tidak yakin bahwa proses-proses tersebut akan berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian.

Pengukuran Nilai Wajar dan Proses Penilaian

Beberapa aset dan kewajiban Kelompok Usaha diukur pada nilai wajar untuk tujuan pelaporan keuangan. Dewan Direksi Kelompok Usaha telah membentuk sebuah komite penilaian, yang dipimpin oleh Direktur Keuangan dari Kelompok Usaha, untuk menentukan teknik penilaian yang sesuai dan input untuk pengukuran nilai wajar.

Dalam mengestimasi nilai wajar aset atau liabilitas, Kelompok Usaha menggunakan pendekatan pasar - data yang dapat diobservasi sepanjang tersedia. Dimana input level 1 tidak tersedia, Kelompok Usaha terlibat dengan penilai pihak ketiga yang memenuhi syarat untuk melakukan penilaian. Komite penilaian bekerja sama dengan penilai eksternal yang memenuhi syarat untuk menetapkan model teknik penilaian dan input yang sesuai. Direktur Keuangan melaporkan temuan komite penilaian kepada Direksi Kelompok Usaha setiap kuartal untuk menjelaskan penyebab fluktuasi nilai wajar aset dan liabilitas.

5. KAS DAN SETARA KAS

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
<u>Kas</u>		
Pihak Ketiga		
Rupiah	123.784	146.374
Dolar Amerika Serikat	1.809	2.358
Dolar Singapura	430	644
Jumlah	126.023	149.376

4. ESTIMATES AND JUDGMENTS OF SIGNIFICANT ACCOUNTING (continued)

Evaluating Provisions and Contingencies

The Group is involved in various legal and tax proceedings. The Management makes assessment to distinguish between provisions and contingencies primarily through consultation with legal counsel handling those proceedings. The Group sets up an appropriate provision for current legal proceedings or constructive obligation, if any, in accordance with the provision policy. In recognition and measurement of provisions, the management took a risk and uncertainties.

As at December 31, 2017 and 2016, the Group does not believe that these processes will significantly influence the consolidated financial statements.

Fair Value Measurements and Valuation Processes

Some of the Group's assets and liabilities are measured at fair value for financial reporting purposes. The Board of Directors of the Group has set up a valuation committee, which is headed up by the Financial Director of the Group, to determine the appropriate valuation techniques and inputs for fair value measurements.

In estimating the fair value of an asset or a liability, the Group uses market approach - observable data to the extent it is available. Where level 1 inputs are not available, the Group engages third party qualified valuers to perform the valuation. The valuation committee works closely with the qualified external valuers to establish the appropriate valuation techniques and inputs to the model. The Financial Director reports the valuation committee's findings to the Board of Directors of the Group every quarter to explain the cause of fluctuations in the fair value of the assets and liabilities.

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

This account consist of:

<u>Cash on hand</u>
Third parties
Rupiah
United States Dollar
Singapore Dollar
Total

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

	2017	2016	
Bank			<u>Cash in banks</u>
Pihak ketiga			Third parties
Bank Rupiah:			Bank on Rupiah:
PT Bank Central Asia Tbk	56.312	36.705	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	18.725	16.239	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	8.110	5.573	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank KEB Hana Tbk	3.888	1.804	PT Bank KEB Hana Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	19.276	17.423	Others (each below Rp1.000)
Sub jumlah	106.311	77.744	Subtotal
Bank Dolar Amerika Serikat:			Bank on United States Dollar America:
Standard Chartered Bank, New York	134.537	219.160	Standard Chartered Bank, New York
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	10.990	22.330	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	13.727	19.933	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	440	3.559	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	1.953	6.649	Others (each below Rp1.000)
Sub jumlah	161.647	271.631	Subtotal
Mata uang lain			Other Currencies
Dolar Singapura	4.203	5.616	Singapore Dollar
Euro	1.454	2.471	Euro
Dolar Australia	781	1.723	Australia Dollar
Dolar Hongkong	1.228	1.325	Hongkong Dollar
Yuan China	138	-	China Yuan
Yen Jepang	1.512	255	Japan Yen
Sub jumlah	9.316	11.390	Subtotal
Jumlah	277.274	360.765	Total
Setara kas			<u>Cash Equivalents</u>
Deposito berjangka			Time Deposits
Pihak ketiga			Third Parties
Rupiah			Rupiah
PT Bank BRI Agro Tbk	83.400	-	PT Bank BRI Agro Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	21.000	21.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	19.900	17.400	PT Bank Bukopin Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	12.000	10.400	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	10.000	20.000	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Bukopin Syariah	10.000	5.000	PT Bank Bukopin Syariah
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	8.000	19.600	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank BRI Syariah	8.000	-	PT Bank BRI Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah	7.500	-	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Syariah
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	3.000	-	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank Mitraniaga Tbk	1.000	5.200	PT Bank Mitraniaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	18.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	7.000	PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	6.000	PT Bank QNB Indonesia Tbk
PT Bank Pembangunan Jambi Tbk	-	4.500	PT Bank Pembangunan Jambi Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000)	1.900	1.000	Others (each below Rp1.000)
Sub jumlah	185.700	135.100	Subtotal

5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)

	2017	2016
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk	6.503	-
Jumlah	192.203	135.100
<u>Call Money</u>		
Pihak Ketiga		
Rupiah	150.000	470.000
Valuta Asing	-	175.143
Jumlah	150.000	645.143
<u>Giro pada Bank Indonesia</u>		
Rupiah	523.792	593.233
Dolar Amerika Serikat	80.048	168.406
Jumlah	603.840	761.639
<u>Penempatan pada Bank Indonesia</u>		
Rupiah	159.984	789.283
Dolar Amerika Serikat	271.350	404.175
Jumlah	431.334	1.193.458
Jumlah Kas dan Setara Kas	1.780.674	3.245.481

Tingkat suku bunga pertahun		
Rupiah	3,00% - 8,50%	3,75% - 9,75%
Dolar Amerika Serikat	1,50% - 1,75%	1,75% - 2,75%

Tidak ada jumlah saldo kas dan setara kas signifikan yang tidak dapat digunakan oleh kelompok usaha.

6. DEPOSITO DAN PIUTANG DARI (UTANG KEPADA) LEMBAGA KLIRING DAN PIUTANG PENJAMINAN EFEK INDONESIA

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
Deposito	7.012	6.659
Piutang dari KPEI	237.072	143.543
Jumlah	244.084	150.202
Utang kepada KPEI	172.534	121.023

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)

<u>United States Dollar</u>	
PT Bank Pembangunan Jawa Barat dan Banten Tbk	
Total	
<u>Call Money</u>	
Third Parties	
Rupiah	
Foreign Currencies	
Total	
<u>Demand deposits with Bank Indonesia</u>	
Rupiah	
United States Dollar	
Total	
<u>Placements with Bank Indonesia</u>	
Rupiah	
United States Dollar	
Total	
Total Cash and Cash Equivalents	

Interest rates per annum	
Rupiah	
United States Dollar	

There is no significant amount of cash and cash equivalents that can not be used by business groups.

6. DEPOSITS AND RECEIVABLES FROM (PAYABLES TO) INSTITUTE OF CLEARING AND SETTLEMENT GUARANTEE FOR SECURITIES ENTITY IN INDONESIA

This account consist of:

Deposits	
Receivables from KPEI	
Total	
Payables to KPEI	

6. DEPOSITO DAN PIUTANG DARI (UTANG KEPADA) LEMBAGA KLIRING DAN PIUTANG PENJAMINAN EFEK INDONESIA (lanjutan)

Akun ini merupakan deposito MNCS, yang terdapat pada Bank yang ditentukan oleh Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) sebagai jaminan untuk transaksi yang dilakukan oleh MNCS. Deposito ini dapat digunakan untuk melakukan pembayaran kepada KPEI atas transaksi yang dilakukan MNCS, bila tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan.

Tingkat suku bunga per tahun berkisar antara 5,50% sampai dengan 7,50% pada tahun 2017 dan 6,75% sampai dengan 9,25% pada tahun 2016.

Piutang dan utang dari dan kepada KPEI yang timbul dari penyelesaian transaksi perdagangan efek-bersih (*net settlement*) dan dana kliring.

6. DEPOSITS AND RECEIVABLES FROM (PAYABLES TO) INSTITUTE OF CLEARING AND SETTLEMENT GUARANTEE FOR SECURITIES ENTITY IN INDONESIA (continued)

Deposits represent MNCS's, deposit in a bank assigned by the Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia (KPEI) to hold MNCS's guarantee deposit for its trading transactions. This deposit can be used to pay KPEI for the trading transactions made by MNCS in case it fails to pay on due date.

Annual interest rates on the deposits range from 5.50% to 7.50% in 2017 and 6.75% to 9.25% in 2016.

The receivables from and payables to KPEI arose from the net settlement of securities trading transactions and clearing deposits.

7. PIUTANG NASABAH

Akun ini merupakan piutang yang timbul dari transaksi perdagangan efek dan imbalan jasa pengelolaan dana nasabah dan reksa dana dengan pihak ketiga sebagai berikut:

	2017	2016
Pihak ketiga		
Transaksi perdagangan efek	661.510	1.168.162
Margin	147.214	42.972
Imbalan jasa pengelolaan dana	2.318	2.345
Jumlah	811.042	1.213.479

Third parties
Brokerage
Margin
Fund management services
Total

Rincian saldo piutang nasabah berdasarkan umur piutang adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pihak ketiga		
Kurang dari 3 hari	643.384	425.562
Lebih dari 3 hari	167.658	787.917
Jumlah	811.042	1.213.479

Third parties
Less than 3 days
More than 3 days
Total

Berdasarkan mata uang:

	2017	2016
Rupiah	811.026	1.213.403
Dolar Amerika Serikat	16	76
Jumlah	811.042	1.213.479

Rupiah
United States Dollar
Total

Manajemen tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai karena manajemen berpendapat piutang ini hanya berumur 3 hari saja dan semua piutang nasabah dapat tertagih.

Based on currency:

Management did not provide any allowance for impairment losses since the customer receivables only has short aging only 3 days and management believe that the receivable are collectible.

8. EFEK – EFEK

Berdasarkan jenis dan tujuan investasi, efek-efek adalah sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Pihak berelasi (Catatan 42g)</u>		
<u>Diperdagangkan</u>		
Reksadana	9.778	77.445
Efek ekuitas	6.072	8.555
Obligasi	60.000	3.805
<u>Tersedia untuk dijual</u>		
Efek ekuitas	168.044	201.507
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
Obligasi	25.994	-
Subjumlah	269.888	291.312
 <u>Pihak ketiga</u>		
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>		
Obligasi pemerintah Indonesia	476.251	476.251
Obligasi	19.611	-
Subjumlah	495.862	476.251
 <u>Tersedia untuk dijual</u>		
Obligasi pemerintah Indonesia	306.005	437.825
Obligasi	102.799	349.597
Reksadana	81.336	50.223
Medium term notes	-	30.000
Efek ekuitas	16.635	22.755
Subjumlah	506.775	890.400
 <u>Diperdagangkan</u>		
Dana kelolaan	2.628.668	2.539.763
Reksadana	164.072	188.103
Obligasi	40.729	58.522
Efek ekuitas	20.244	20.559
Obligasi Pemerintah Indonesia	142.389	31.921
Subjumlah	2.996.102	2.838.868
Subjumlah	3.998.739	4.205.519
Jumlah Efek- Efek	4.268.627	4.496.831

Rincian efek-efek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Pihak berelasi</u>		
Rupiah	265.894	287.507
Dolar Amerika Serikat	3.994	3.805
 <u>Pihak ketiga</u>		
Rupiah	3.995.265	4.201.519
Dolar Amerika Serikat	3.474	4.000
Jumlah Efek-Efek	4.268.627	4.496.831

8. SECURITIES

Securities are classified according to type and purpose as follows:

<u>Related parties (Notes 42g)</u>
<u>Trading</u>
Mutual funds
Equity securities
Bonds
<u>Available for sale</u>
Equity securities
<u>Held to maturity</u>
Bonds
Subtotal
 <u>Third parties</u>
<u>Held to maturity</u>
Indonesian government bonds
Bonds
Subtotal
 <u>Available for sale</u>
Indonesian Government bonds
Bonds
Mutual funds
Medium term notes
Equity securities
Subtotal
 <u>Trading</u>
Managed funds
Mutual funds
Bonds
Equity securities
Indonesian government bonds
Subtotal
Subtotal
Total Securities

Securities classified according to currencies are as follows:

<u>Related parties</u>
Rupiah
United States Dollar
 <u>Third parties</u>
Rupiah
United States Dollar
Total Securities

8. EFEK – EFEK (lanjutan)

Tingkat bunga rata-rata per tahun atas efek adalah sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Rupiah</u>		
Obligasi Pemerintah Indonesia	6,38%	5,93%
Obligasi	8,12%	8,34%
Medium term notes	-	11,75%

Reksadana di MNC Dana Lancar, MNC Dana Syariah Kombinasi, MNC Dana Terproteksi, MNC Dana Multisektor, MNC Dana Saham II, dan MNC Dana Saham dikelola oleh PT MNC Asset Management, Entitas Anak.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat efek-efek yang dijadikan agunan oleh Kelompok Usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2017, Kelompok Usaha mempunyai 3.213.587 unit MNC Dana Lancar, 5.000.000 unit MNC Dana Multisektor, dan 241.671 unit MNC Dana Saham.

Pada tanggal 31 Desember 2016, Kelompok Usaha mempunyai 22.829.619 unit MNC Dana Lancar, 2.616.354 unit MNC Dana Terproteksi, 2.041.212 unit MNC Dana Syariah Kombinasi, 5.000.000 unit MNC Dana Multisektor I, 254.594 unit MNC Dana Saham dan 257.895 unit MNC Dana Saham II.

Dana Kelolaan

Kelompok Usaha mengadakan perjanjian pengelolaan dana dengan manajer investasi di atas untuk melakukan investasi dalam bentuk investasi pada saham entitas publik dan non publik dan/atau pada surat berharga. Perjanjian dilakukan dengan jangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang sampai satu tahun mendatang sesuai persetujuan tertulis dari kedua belah pihak. Nilai wajar dari dana kelolaan berdasarkan nilai aset bersih pada tanggal pelaporan.

8. SECURITIES (continued)

Average annual interest rates of securities are as follows:

	<u>Rupiah</u>
Indonesian Government Bonds	
Bonds	
Medium term notes	

The mutual funds in MNC Dana Lancar, MNC Dana Syariah Kombinasi, MNC Dana Terproteksi, MNC Dana Multisektor, MNC Dana Saham II, and MNC Dana Saham used and managed by PT MNC Asset Management, a Subsidiary.

As of December 31, 2017 and 2016, there are no securities that were used as collateral by the Group.

As of December 31, 2017, the Group has 3,213,587 units of MNC Dana Lancar, 5,000,000 units of MNC Dana Multisektor, and 241,671 Unit of MNC Dana Saham

As of December 31, 2016, the Group has 22,829,619 units of MNC Dana Lancar, 2,616,354 units of MNC Dana Terproteksi, 2,041,212 units of MNC Dana Syariah Kombinasi, 5,000,000 units of MNC Dana Multisektor I, 254,594 units of MNC Dana Saham and 257,895 units of MNC Dana Saham II.

Managed Funds

The Group entered into fund management agreement with several investment managers to manage investment in shares of public or private companies and/or other security instruments. These contracts have a term of one year and can be extended for another year as agreed by both parties in writing. The fair value of managed funds are based on respective net asset value as of the reporting date.

9. PIUTANG PEMBIAYAAN

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
<u>Pihak berelasi (Catatan 42h)</u>		
Pembiayaan konsumen	171.513	182.219
Anjak piutang	13.124	12.331
Piutang sewa pembiayaan	248	3.205
Subjumlah	184.885	197.755
<u>Pihak ketiga</u>		
Pembiayaan konsumen	1.760.473	1.794.969
Anjak piutang	510.701	438.020
Piutang sewa pembiayaan	369.678	329.790
Subjumlah	2.640.852	2.562.779
Jumlah	2.825.737	2.760.534
Cadangan kerugian penurunan nilai	(22.184)	(21.552)
Bersih	2.803.553	2.738.982

9. FINANCING RECEIVABLES

This account consist of:

<u>Related parties (Notes 42h)</u>	
Consumer financing	
Factoring receivables	
Finance lease receivables	
Subtotal	
<u>Third parties</u>	
Consumer financing	
Factoring receivables	
Finance lease receivables	
Subtotal	
Total	
Allowance for impairment losses	
Net	

a. Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas pembiayaan konsumen dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Pihak berelasi</u>		
Rupiah		
Jumlah piutang pembiayaan konsumen	236.612	259.581
Pendapatan yang belum diakui	(65.099)	(77.362)
Subjumlah	171.513	182.219
<u>Pihak ketiga</u>		
Rupiah		
Jumlah piutang pembiayaan konsumen	2.254.969	2.282.174
Pendapatan yang belum diakui	(494.496)	(487.205)
Subjumlah	1.760.473	1.794.969
Jumlah	1.931.986	1.977.188
Cadangan kerugian penurunan nilai	(16.497)	(18.034)
Piutang Pembiayaan Konsumen – bersih	1.915.489	1.959.154

a. Consumer Financing Receivables – Net

This account represents consumer financing receivables with details as follows:

<u>Related parties</u>	
Rupiah	
Consumer financing receivables	
Unearned consumer financing income	
Subtotal	
<u>Third parties</u>	
Rupiah	
Consumer financing receivables	
Unearned consumer financing income	
Subtotal	
Total	
Allowance for impairment losses	
Consumer Financing Receivables – Net	

Tingkat bunga per tahun adalah sebagai berikut:

Pihak ketiga	14,50% - 28,00%	14,50% - 21,00%
Pihak berelasi	14,00% - 21,00%	14,00% - 21,00%

Interest rates per annum are as follows:

Third parties
Related parties

Jumlah piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

The details of consumer financing receivables based on maturity date are as follows:

	2017	2016	
Telah jatuh tempo	114.172	87.634	Overdue
Akan jatuh tempo dalam:			Will be due within:
1 tahun	663.426	541.619	1 year
1-2 tahun	526.142	790.880	1 -2 years
Lebih dari 2 tahun	628.246	557.055	Over 2 years
Jumlah	1.931.986	1.977.188	Total

9. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

a. Piutang Pembiayaan Konsumen – Bersih (lanjutan)

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal	18.034	11.031
Penyisihan tahun berjalan	30.077	43.274
Penghapusan	(31.614)	(36.271)
Saldo akhir	16.497	18.034

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

b. Tagihan Anjak Piutang – Bersih

Akun ini merupakan tagihan anjak piutang dengan dasar "with recourse" dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Pihak berelasi</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tagihan anjak piutang	13.922	13.735
Pendapatan yang belum diakui	(798)	(1.404)
Subjumlah	13.124	12.331
Cadangan kerugian penurunan nilai	(18)	(24)
Subjumlah	13.106	12.307
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Tagihan anjak piutang	768.134	517.850
Tagihan anjak piutang – Haw alah bil	18.301	35.450
Ujrah		
Pendapatan yang belum diakui	(275.734)	(115.280)
Subjumlah	510.701	438.020
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.463)	(906)
Subjumlah	509.238	437.114
Tagihan Anjak Piutang – Bersih	522.344	449.421

Tingkat bunga per tahun adalah sebagai berikut:

Pihak ketiga	13% - 18%	13% - 18%
Pihak berelasi	12% - 18%	11,5% - 18%

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal	930	710
Penyisihan tahun berjalan	551	220
Saldo akhir	1.481	930

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

9. FINANCING RECEIVABLES (continued)

a. Consumer Financing Receivables – Net (continued)

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2017	2016
Saldo awal	11.031	11.031
Provisions during the year	43.274	43.274
Write-offs	(36.271)	(36.271)
Ending balance	18.034	18.034

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

b. Factoring Receivables – Net

This account represents factoring receivables with recourse with details as follows:

<u>Related parties</u>	
<u>Rupiah</u>	
Factoring receivables	
Unearned factoring income	
Subtotal	
Allowance for impairment losses	
Subtotal	
<u>Third parties</u>	
<u>Rupiah</u>	
Factoring receivables	
Factoring receivables- Haw alah bil	
Ujrah	
Unearned factoring income	
Subtotal	
Allowance for impairment losses	
Subtotal	
Factoring Receivables – Net	

Interest rates per annum are as follows:

Third parties	13% - 18%
Related parties	11,5% - 18%

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2017	2016
Saldo awal	710	710
Provisions during the year	220	220
Ending balance	930	930

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

9. PIUTANG PEMBIAYAAN (lanjutan)

9. FINANCING RECEIVABLES (continued)

c. Piutang Sewa Pembiayaan – Bersih

c. Finance Lease Receivables – Net

Akun ini merupakan piutang dari pelanggan atas transaksi sewa pembiayaan (*finance lease*) dengan detail sebagai berikut:

This account represents receivables from customers arising from finance lease transaction with details as follows:

	2017	2016	
<u>Pihak berelasi</u>			<u>Related parties</u>
Rupiah			Rupiah
Piutang sewa pembiayaan	251	3.715	Finance lease receivables
Nilai sisa jaminan	1.508	1.496	Deposit
Pendapatan yang belum diakui	(3)	(510)	Unearned lease income
Nilai simpanan jaminan	(1.508)	(1.496)	Deposit
Subjumlah	248	3.205	Subtotal
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Rupiah			Rupiah
Piutang sewa pembiayaan	432.915	394.848	Finance lease receivables
Nilai sisa jaminan	24.804	34.229	Deposit
Pendapatan yang belum diakui	(63.237)	(65.058)	Unearned lease income
Nilai simpanan jaminan	(24.804)	(34.229)	Deposit
Subjumlah	369.678	329.790	Subtotal
Jumlah	369.926	332.995	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(4.206)	(2.588)	Allowance for impairment losses
Bersih	365.720	330.407	Net
Tingkat bunga per tahun adalah sebagai berikut:			Interest rates per annum are as follows:
Pihak ketiga	15% - 20%	15% - 16%	Third parties
Pihak berelasi	15% - 20%	15% - 16%	Related parties
Akan jatuh tempo dalam:			Will be due within:
1 tahun	44.019	64.155	1 year
Lebih dari 1 tahun	389.147	334.408	Over 1 year
Jumlah	433.166	398.563	Total
Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:			The movements in the allowance for impairment losses are as follows:
	2017	2016	
Saldo awal	2.588	2.082	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan	1.618	506	Provisions during the year
Saldo akhir	4.206	2.588	Ending balance

Piutang bersih sewa pembiayaan dijamin untuk pinjaman kepada PT Bank Capital Indonesia Tbk dan PT Bank CTBC Indonesia Tbk atas pembiayaan alat berat baru dan bekas.

Finance lease receivables were pledged as collateral for loans from, PT Bank Capital Indonesia Tbk and PT Bank CTBC Indonesia Tbk for financing new and used equipment.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Management believes that the allowance provided is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

10. KREDIT

Rincian kredit adalah sebagai berikut:

a. Jenis Pinjaman

	2017	2016
<u>Pihak ketiga</u>		
<u>Rupiah</u>		
Kredit konsumsi	2.905.601	1.592.823
Kredit modal kerja	2.631.827	3.626.573
Kredit investasi	1.185.460	1.132.564
Pinjaman karyawan	40.798	40.860
Pinjaman sindikasi	-	1.061.859
Subjumlah	6.763.686	7.454.679
<u>Mata uang asing</u>		
Kredit modal kerja	239.800	363.840
Kredit investasi	52.568	97.038
Subjumlah	292.368	460.878
Jumlah	7.056.054	7.915.557
Cadangan kerugian penurunan nilai	(331.116)	(52.521)
Jumlah Kredit – Bersih	6.724.938	7.863.036

b. Sektor Ekonomi

	2017	2016
<u>Rupiah</u>		
Rumah tangga	2.513.788	2.451.736
Jasa - jasa dunia usaha	2.326.275	2.569.640
Perdagangan, restoran dan hotel	652.467	818.520
Perindustrian	611.105	771.549
Konstruksi	214.360	386.254
Angkutan, gudang dan komunikasi	63.476	223.078
Jasa sosial / masyarakat	13.066	26.855
Pertambangan	5.436	-
Pertanian dan perhutanan	2.693	2.555
Listrik, gas dan air	893	50.278
Lain-lain	360.127	154.214
Subjumlah	6.763.686	7.454.679
<u>Mata Uang Asing</u>		
Perindustrian	236.565	306.313
Angkatan, gudang dan komunikasi	55.084	65.217
Konstruksi	-	33.623
Jasa-jasa dunia usaha	-	22.864
Pertambangan	-	15.662
Jasa sosial/ masyarakat	-	14.331
Perdagangan, restoran dan hotel	-	1.957
Listrik, gas dan air	719	911
Subjumlah	292.368	460.878
Jumlah	7.056.054	7.915.557
Cadangan kerugian penurunan nilai	(331.116)	(52.521)
Jumlah kredit – Bersih	6.724.938	7.863.036

10. LOANS

Details of loans are as follows:

a. By Type of Loan

<u>Third parties</u>	
<u>Rupiah</u>	
Consumer loans	
Working capital loans	
Investment loans	
Employee loans	
Syndicated loans	
Subtotal	
<u>Foreign currencies</u>	
Working capital loans	
Investment loans	
Subtotal	
Total	
Allowance for impairment losses	
Total Loans – Net	

b. By Economic Sector

<u>Rupiah</u>	
Household	
Business services	
Trading, restaurant, hotel	
Manufacturing	
Construction	
Transportation, warehouses and communication	
Social / public services	
Mining	
Agriculture and forestry	
Electricity, gas and water	
Others	
Subtotal	
<u>Foreign currencies</u>	
Manufacturing	
Transportation, warehouse and communication	
Construction	
Business services	
Mining	
Social/ public services	
Trading, restaurant and hotel	
Electricity, gas and water	
Subtotal	
Total	
Allowance for impairment losses	
Total loans- Net	

10. KREDIT (lanjutan)

c. Kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan (Bank Indonesia)

	2017	2016
Lancar	5.895.143	6.935.597
Dalam perhatian khusus	646.319	758.670
Kurang lancar	90.968	12.286
Diragukan	110.573	23.546
Macet	313.051	185.458
Jumlah	7.056.054	7.915.557
Cadangan kerugian penurunan nilai	(331.116)	(52.521)
Jumlah Kredit – Bersih	6.724.938	7.863.036

d. Berdasarkan penilaian internal Bank

	2017	2016
Kredit yang dinilai secara individual		
Baki debit	520.807	563.345
Cadangan kerugian penurunan nilai	(297.234)	(24.921)
Jumlah	223.573	538.424
Kredit yang dinilai secara kolektif		
Baki debit	6.535.247	7.352.212
Cadangan kerugian penurunan nilai	(33.882)	(27.600)
Jumlah	6.501.365	7.324.612
Jumlah Kredit – Bersih	6.724.938	7.863.036

e. Jangka Waktu

Jangka waktu pinjaman diklasifikasikan berdasarkan periode pinjaman dalam perjanjian kredit adalah sebagai berikut:

	2017	2016
≤ 1 tahun	1.489.641	1.428.959
> 1 – 2 tahun	656.492	976.943
> 2 – 5 tahun	2.126.120	3.068.694
> 5 tahun	2.783.801	2.440.961
Jumlah	7.056.054	7.915.557
Cadangan kerugian penurunan nilai	(331.116)	(52.521)
Jumlah Kredit – Bersih	6.724.938	7.863.036

f. Tingkat Bunga Efektif Rata- Rata per Tahun

	2017	2016
<u>Rupiah</u>		
Kredit investasi	18,19%	19,31%
Kredit modal kerja	13,73%	13,93%
Kredit konsumsi	13,22%	13,49%
Kartu kredit	30,25%	33,55%
Pinjaman sindikasi	12,61%	12,76%
<u>Dolar Amerika Serikat</u>		
Kredit investasi	7,39%	7,03%
Kredit modal kerja	7,07%	7,02%
<u>Dolar Singapura</u>		
Kredit modal kerja	-	6,90%

10. LOANS (continued)

c. Financial Service Authority's (Bank Indonesia)
Collectability

Current
Special mention
Standard
Doubtful
Loss
Total
Allowance for impairment losses
Total Loans – Net

d. Based on Bank's internal assessment

Loans assessed individually
Outstanding
Allowance for impairment losses
Total
Loans assessed collectively
Outstanding
Allowance for impairment losses
Total
Total Loans- Net

e. By Maturity

Loans classified based on the term of the loan agreements are as follows:

≤ 1 year
> 1 – 2 years
> 2 – 5 years
> 5 years
Total
Allowance for impairment losses
Total Loans – Net

f. Average Annual Effective Interest Rates

Rupiah
Investment loans
Working capital loans
Consumer loans
Credit card
Syndicated loans
United States Dollar
Investment loans
Working capital loans
Singapore Dollar
Working capital loans

10. KREDIT (lanjutan)

f. Tingkat Bunga Efektif Rata- Rata per Tahun (lanjutan)

Berikut adalah informasi pokok lainnya sehubungan dengan kredit :

- 1) Kredit dijamin dengan agunan yang diikat dengan hak tanggungan atau surat kuasa untuk menjual dan jaminan lain yang umumnya diterima oleh perbankan. Kredit juga dijamin dengan jaminan tunai berupa giro, tabungan dan deposito berjangka. Manajemen berkeyakinan agunan yang diterima tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.
- 2) Kredit untuk modal kerja dan investasi terdiri dari pinjaman jangka panjang, tetap, berulang dan diskonto, sedangkan kredit konsumsi terdiri dari kredit pemilikan rumah, kredit kendaraan bermotor dan kredit konsumsi lain.
- 3) Kredit dalam Rupiah berjangka waktu 1 bulan sampai 26 tahun, sedangkan kredit dalam valuta asing berjangka waktu antara 1 bulan sampai 6 tahun. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama dalam Rupiah berjangka waktu 1 sampai dengan 6 tahun.
- 4) Keikutsertaan BMNCI sebagai anggota sindikasi dengan persentase penyertaan berkisar antara 4% sampai 50% pada tanggal 31 Desember 2016.
- 5) Kredit yang diberikan kepada karyawan BMNCI merupakan kredit yang diberikan untuk membeli rumah, kendaraan dan keperluan lainnya dengan jangka waktu 1 sampai 20 tahun dan dibayar kembali melalui pemotongan gaji setiap bulan. Kredit yang diberikan kepada karyawan dibebani tingkat bunga efektif rata-rata per tahun sebesar 5,49% dan 5,54% pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.
- 6) Rasio kredit usaha mikro dan kecil terhadap kredit yang diberikan adalah sebesar 5,88% dan 0,59% masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.
- 7) Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, tidak terdapat kredit yang dijadikan agunan oleh BMNCI.

10. LOANS (continued)

f. Average Annual Effective Interest Rates (continued)

Other major information on loans are as follows:

- 1) Loans are secured by collateral, which are legalized by deed of encumbrance, power of attorney to sell and other collaterals that are generally accepted in the banking industry. Loans are also secured by cash collateral, in the form of demand deposits, savings deposits and time deposits. Management believes that collateral received from debtor is adequate to cover possible losses on uncollectible loan.
- 2) Loans for working capital and investments include long-term, fixed, revolving and discounted loans, while consumer loans include housing, car and other consumer loans.
- 3) Loans in Rupiah have terms ranging from 1 month to 26 years, while those in foreign currencies have terms ranging from 1 month to 6 years. Syndicated loans have terms of 1 to 6 years for Rupiah.
- 4) BMNCI's participation as a member in syndicated loans ranges from 4% to 50% as of December 31, 2016.
- 5) Employee loans for the purchase of houses, cars and other necessities with terms of 1 to 20 years are payable through salary deduction. Employee loans earn average annual effective interest rate of 5.49% and 5.54% as of December 31, 2017 and 2016, respectively.
- 6) The ratio of micro and of small business loans to total loans as of December 31, 2017 and 2016 is 5.88% and 0.59%, respectively
- 7) As of December 31, 2017 and 2016, there are no loans pledged as collateral by BMNCI.

10. KREDIT (lanjutan)

f. Tingkat Bunga Efektif Rata- Rata per Tahun (lanjutan)

- 8) Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, rincian kredit yang direstrukturisasi menurut jenis pinjaman sebelum cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Rupiah</u>		
Kredit modal kerja	250.716	510.052
Kredit Investasi	82.101	136.387
Kredit Konsumsi	2.624	1.296
Pinjaman Sindikasi	-	35.597
Jumlah - rupiah	335.441	683.332
<u>Valuta asing</u>		
Kredit modal kerja	26.067	55.105
Kredit investasi	-	1.495
Jumlah - valuta asing	26.067	56.600
Jumlah kredit	361.508	739.932

Selama tahun 2017 dan 2016, BMNCI telah melakukan penyelamatan kembali atas kredit untuk beberapa debitur masing-masing sebesar Rp184.390 juta dan Rp606.115 juta

- 9) Pada tahun 2017 dan 2016, rincian kredit yang direstrukturisasi berdasarkan kolektibilitas Otoritas Jasa Keuangan (Bank Indonesia) sebelum cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Lancar	162.538	232.914
Dalam perhatian khusus	30.443	482.009
Kurang lancar	64.083	5.474
Diragukan	81.190	300
Macet	23.254	19.235
Jumlah	361.508	739.932

- 10) Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, fasilitas kredit yang disalurkan dengan sistem pembiayaan bersama (*joint financing*) dan penyaluran kredit melalui lembaga pembiayaan untuk menyalurkan kredit kendaraan motor, mobil dan rumah masing-masing sebesar Rp 632.933 juta dan Rp1.027.854 juta.

- 11) Rasio *non-performing loan* (NPL) yang dihitung berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 43/SE0JK.03/2016 tanggal 28 September 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
NPL bruto	7,23%	2,77 %
NPL neto	2,82%	2,38 %

10. LOANS (continued)

f. Average Annual Effective Interest Rates (continued)

- 8) As of December 31, 2017 and December 31, 2016, the details of restructured loans classified based on types of loans, gross of allowance of impairment losses are as follows:

<u>Rupiah</u>	
Working capital loans	
Investment loans	
Consumer loans	
Syndicated loans	
Total - rupiah	
<u>Foreign currencies</u>	
Working capital loans	
Investment loans	
Total - foreign currencies	
Total loans	

In 2017 and 2016, the BMNCI has restructured loans for some debtors amounting to Rp184,390 million and Rp606,115 million, respectively.

- 9) In 2017 and 2016, the details of restructured loans based on Financial Services Authority's (Bank Indonesia) collectibility gross of allowance of impairment losses are as follows:

Current	
Special mention	
Substandard	
Doubtful	
Loss	
Total	

- 10) As of December 31, 2017 and 2016, loan facilities with joint financing arrangements and credits channelled through financing companies in granting motorcycle, car and housing loan amounted to Rp632,933 million and Rp1,027,854 million, respectively.

- 11) Non-performing loan (NPL) ratio calculated based on Circular Letter of Financial Services Authority No. 43/SE0JK.03/2016 dated September 28, 2016 are as follows:

Gross NPL	
Net NPL	

10. KREDIT (lanjutan)

f. Tingkat Bunga Efektif Rata- Rata per Tahun (lanjutan)

- 12) Pada tanggal 31 Desember 2017, BMNCI mengalami pelampauan dan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) yang disebabkan karena penurunan modal Bank sebagai dampak dari kenaikan signifikan cadangan kerugian penurunan nilai kredit pada akhir tahun 2017. Sehubungan dengan pelampauan dan pelanggaran BMPK tersebut, BMNCI akan melakukan langkah-langkah penyelesaian, antara lain menjamin penyediaan dana kepada debitur dengan agunan tunai sebesar nilai nominal pelanggaran dan melakukan penambahan modal pada tahun 2018.

Dalam laporan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) kepada Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2016 tidak terdapat kredit yang tidak memenuhi ketentuan BMPK.

- 13) Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rincian kredit bermasalah menurut sektor ekonomi adalah sebagai berikut:

	2017		2016		
	Kredit Bermasalah/ Non-performing Loans	Penyisihan Penurunan Nilai/Allowance for Impairment losses	Kredit Bermasalah/ Non-performing Loans	Penyisihan Penurunan Nilai/Allowance for Impairment losses	
<u>Rupiah</u>					<u>Rupiah</u>
Perdagangan, restoran dan hotel	111.390	84.268	109.805	10.295	Trading, restaurant and hotel
Perindustrian	52.738	23.249	21.202	6.385	Manufacturing
Jasa-jasa dunia usaha	74.963	73.494	15.092	2.172	Business services
Jasa sosial/masyarakat	4.565	708	10.686	1.050	Social/ public services
Konstruksi	75.334	69.864	6.543	696	Construction
Angkutan, gudang dan komunikasi	4.855	2.504	5.183	1.962	Transportation, warehouse and communication
Pertanian dan perhutanan	1.805	588	1.675	561	Agriculture and forestry
Lainnya	127.295	52.984	51.104	7.824	others
Jumlah – Rupiah	452.945	307.659	221.290	30.945	Total – Rupiah
Valas					Foreign Currencies
Perindustrian	60.928	5.791	-	-	Manufacturing
Listrik, air dan gas	719	719	-	-	Electricity, gas, and water
Jumlah Valas	61.647	6.510	-	-	Total foreign currencies
Jumlah	514.592	314.169	221.290	30.945	Total

10. LOANS (continued)

f. Average Annual Effective Interest Rates (continued)

- 12) As of Desember 31, 2017, there are loans that exceeded the legal lending limit (BMPK) due to the decrease on BMNCI's capital as a result of a significant increase in allowance for impairment losses in loans at the end of 2017. To address this, BMNCI will require cash collateral equal to the amount of the loans that exceeded BMPK and increase its capital in 2018 through limited public offering.

As of Desember 31, 2016, there is no loan exceeding the legal lending limit (BMPK) as stated in the legal lending limit report to Bank Indonesia.

- 13) As of Desember 31, 2017 and 2016, the details of non-performing loans based on economic sector are as follows:

10. KREDIT (lanjutan)

f. Tingkat Bunga Efektif Rata- Rata per Tahun (lanjutan)

14) Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	2017		
	Rupiah	Valuta Asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	52.008	513	52.521
Penyisihan (pemulihan) tahun berjalan			
Individual	757.066	17.208	774.274
Kolektif	51.945	(39)	51.906
Penghapusan	(536.443)	(11.161)	(547.604)
Selisih kurs	-	19	19
Saldo akhir tahun	324.576	6.540	331.116

Nilai baki debit atas debitur-debitur yang cadangan kerugian penurunan nilai dihitung secara individual sebesar Rp520.807 juta dan Rp563.346 juta masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016. Debitur-debitur tersebut termasuk dalam sektor ekonomi perindustrian, konstruksi, perdagangan, restoran dan hotel, angkutan, gudang dan komunikasi, jasa-jasa dunia usaha, jasa sosial/masyarakat dan lainnya.

Manajemen berpendapat bahwa cadangan kerugian penurunan nilai kredit adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit.

15) Mutasi kredit yang dihapus buku adalah sebagai berikut:

	2017		
	Rupiah	Valuta Asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	362.101	87.428	449.529
Penambahan dalam tahun berjalan	536.443	11.161	547.604
Penerimaan kembali	(3.183)	-	(3.183)
Hapus tagih	(1.562)	-	(1.562)
Saldo akhir tahun	893.799	98.589	992.388

10. LOANS (continued)

f. Average Annual Effective Interest Rates (continued)

14) The changes in allowance for impairment losses are as follows:

	2016		
	Rupiah	Valuta Asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	37.009	953	37.962
Provision (reversal) of provision during the year			
Individual	20.811	(11)	20.800
Collective	19.471	(391)	19.080
Write-off	(25.283)	-	(25.283)
Exchange rate differences	-	(38)	(38)
Balance at end of year	52.008	513	52.521

The outstanding amount of debtors whose allowance for impairment losses are calculated individually amounted to Rp520,807 million and Rp563,346 million as of December, 31 2017 and 2016, respectively. The economic sector in which the debtors belong to include manufacturing, construction, trading, restaurant and hotel, transportation, warehouses and communication, business services, social/public services and others.

Management believes that the allowance for impairment losses on loans is adequate to cover the losses which might arise from uncollectible loans.

15) The changes in the loans written-off are as follows:

	2016		
	Rupiah	Valuta Asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total
Saldo awal tahun	596.540	87.428	683.968
Additions during the year	25.283	-	25.283
Recovery	(32.465)	-	(32.465)
Write-off	(227.257)	-	(227.257)
Balance at end of year	362.101	87.428	449.529

10. KREDIT (lanjutan)

f. Tingkat Bunga Efektif Rata- Rata per Tahun (lanjutan)

16) Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari kredit yang diberikan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kredit	7.056.054	7.915.557
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	38.426	57.550
Cadangan kerugian penurunan nilai	(331.116)	(52.521)
Jumlah	6.763.364	7.920.586

10. LOANS (continued)

f. Average Annual Effective Interest Rates (continued)

16) The carrying amount of loans at amortised cost is as follows:

Loans
Accrued interest receivable
Allowance for impairment losses
Total

11. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAHAH

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas pembiayaan dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Pihak berelasi (Catatan 42i)</u>		
Jumlah piutang pembiayaan	708	701
Pendapatan yang belum diakui	(153)	(382)
Subjumlah	555	319
<u>Pihak ketiga</u>		
Jumlah piutang pembiayaan	382.093	620.280
Pendapatan yang belum diakui	(76.797)	(132.593)
Subjumlah	305.296	487.687
Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.714)	(4.429)
Subjumlah	302.582	483.258
Jumlah	303.137	483.577

11. FINANCING RECEIVABLES MURABAHAH

This account represents financing receivables with details as follows:

<u>Related parties (Note 42i)</u>
financing receivable
Unearned financing margin
Subtotal
<u>Third parties</u>
financing receivable
Unearned financing margin
Subtotal
Allowance for impairment losses
Subtotal
Total

Berikut adalah saldo tagihan piutang pembiayaan (bruto) sesuai dengan masa jatuh temponya, yaitu:

	2017	2016
Telah jatuh tempo	25.452	24.079
Akan jatuh tempo dalam:		
1 tahun	179.384	270.667
1-2 tahun	120.499	170.583
Lebih dari 2 tahun	57.466	155.652
Jumlah	382.801	620.981

Details by maturity of financing receivables (at gross) are as follows:

Overdue
Will be due within:
1 year
1-2 years
Over 2 years
Total

11. PIUTANG PEMBIAYAAN MURABAH (lanjutan)

Analisis umur piutang berdasarkan tingkat kolektibilitas atas pembiayaan (bruto), adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kurang dari 30 hari	329.972	491.361
1-30 hari	42.203	116.162
31-90 hari	3.860	4.642
91-150 hari	2.857	2.882
151-180 hari	3.909	5.934
Jumlah	382.801	620.981

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal	4.429	8.085
Penyisihan tahun berjalan	5.758	8.345
Penghapusan	(7.473)	(12.001)
Saldo akhir	2.714	4.429

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Piutang Murabahah dijamin 100% dari *outstanding* fasilitas nasabah yang ada.

11. FINANCING RECEIVABLES MURABAH (continued)

The aging analysis of financing receivables (at gross), are as follows:

	2017	2016
Less than 30 days	329.972	491.361
1-30 days	42.203	116.162
31-90 days	3.860	4.642
91-150 days	2.857	2.882
151-180 days	3.909	5.934
Total	382.801	620.981

The movements in the allowance for impairment losses are as follows:

	2017	2016
Beggining balance	4.429	8.085
Provision during the year	5.758	8.345
Write-off	(7.473)	(12.001)
Ending balance	2.714	4.429

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Murabahah are secured 100% of the existing outstanding customer facilities.

12. PIUTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH BERSIH

Akun ini merupakan piutang yang timbul atas pembiayaan musyarakah mutanaqisah dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Pihak ketiga</u>		
Jumlah piutang pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah	222.022	132.330
Pendapatan yang belum diakui	(52.902)	(46.348)
Subjumlah	169.120	85.982
Cadangan kerugian penurunan nilai	(247)	(360)
Jumlah	168.873	85.622

Berikut adalah saldo tagihan piutang pembiayaan musyarakah mutanaqisah (bruto) sesuai dengan masa jatuh temponya, yaitu:

	2017	2016
Telah jatuh tempo	4.366	278
Akan jatuh tempo dalam:		
1 tahun	53.281	32.840
1-2 tahun	70.751	31.110
Lebih dari 2 tahun	93.624	68.102
Jumlah	222.022	132.330

12. MUSYARAKAH MUTANAQISAH FINANCING RECEIVABLES - NET

This account represents musyarakah mutanaqisah financing receivables with details as follows:

	2017	2016
<u>Third parties</u>		
Musyarakah Mutanaqisah financing receivables	222.022	132.330
Unearned financing margin	(52.902)	(46.348)
Subtotal	169.120	85.982
Allowance for impairment losses	(247)	(360)
Total	168.873	85.622

Details by maturity of musyarakah mutanaqisah financing receivables (at gross) are as follows:

	2017	2016
Overdue	4.366	278
Will be due within:		
1 year	53.281	32.840
1-2 years	70.751	31.110
Over 2 years	93.624	68.102
Total	222.022	132.330

12. PIUTANG PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH BERSIH (lanjutan)

Analisis umur piutang berdasarkan tingkat kolektibilitas atas pembiayaan musyarakah mutanaqisah (bruto), adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kurang dari 30 hari	195.640	117.947
1-30 hari	17.641	8.949
31-90 hari	4.482	4.445
91-150 hari	2.649	989
151-180 hari	1.439	-
Lebih dari 180 hari	171	-
Jumlah	222.022	132.330

Pada 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen telah membentuk cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing Rp247 juta dan Rp360 juta atas saldo piutang musyarakah mutanaqisah.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah cadangan kerugian penurunan nilai cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

12. MUSYARAKAH MUTANAQISAH FINANCING RECEIVABLES – NET (continued)

The aging analysis of musyarakah mutanaqisah financing receivables (at gross), are as follows:

	2017	2016
Less than 30 days	195.640	117.947
1-30 days	17.641	8.949
31-90 days	4.482	4.445
91-150 days	2.649	989
151 - 180 days	1.439	-
Over 180 days	171	-
Total	222.022	132.330

As of December 31, 2017 and 2016, management recognized Rp247 million and Rp360 million provision for impairment loss on its total outstanding musyarakah mutanaqisah receivables, respectively.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

13. PREMI DAN ASET REASURANSI

	2017	2016
Pihak berelasi (Catatan 42k)		
Piutang premium dan reasuransi	34.993	9.680
Pihak ketiga		
Piutang premium dan reasuransi	264.405	238.471
Aset reasuransi	160.282	134.318
Subjumlah	424.687	372.789
Cadangan penurunan nilai	(10.577)	(9.378)
Bersih	414.110	363.411
Jumlah	449.103	373.091

a. Piutang premi dan reasuransi

	2017	2016
Asuransi jiwa	96.449	143.554
Asuransi kerugian	202.949	104.597
Subjumlah	299.398	248.151
Cadangan penurunan nilai	(10.577)	(9.378)
Jumlah	288.821	238.773

13. PREMIUMS AND REINSURANCE ASSETS

Related parties (Note 42k)	
Premium and reinsurance receivables	
Third parties	
Premium and reinsurance receivables	
Reinsurance assets	
Subtotal	
Allowance for impairment losses	
Net	
Total	

a. Premiums and reinsurance receivables

Life assurance	
General insurance	
Subtotal	
Allowance for impairment losses	
Total	

13. PREMI DAN ASET REASURANSI (lanjutan)

b. Aset reasuransi

Merupakan aset reasuransi yang dimiliki melalui entitas anak, berikut :

	2017	2016
PT MNC Asuransi Indonesia	119.691	97.707
PT MNC Life Assurance	40.591	36.611
Jumlah	160.282	134.318

Piutang premi merupakan tagihan premi kepada tertanggung, agen asuransi dan broker asuransi.

Piutang reasuransi merupakan tagihan kepada reasurador sesudah memperhitungkan komisi dan klaim reasuransi atas penyerahan sebagian risiko berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kedua belah pihak atau lebih.

Piutang premi dan reasuransi berdasarkan klasifikasi umur adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Kurang dari 60 hari	228.026	148.197
Lewat jatuh waktu 60-90 hari	13.410	15.990
Lewat jatuh waktu lebih dari 90 hari	57.962	83.964
Jumlah	299.398	248.151

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan, piutang premi dan reasuransi yang diakui sebagai aset yang diperkenankan menjadi bagian dalam menghitung solvabilitas adalah piutang premi dan reasuransi yang berumur kurang dari 60 hari. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, piutang premi bersih diperkenankan masing-masing sebesar Rp220.411 juta dan Rp142.387 juta. Piutang reasuransi pada tanggal, 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp7.615 juta dan Rp5.810 juta.

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pencadangan cukup untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya piutang.

Rincian aset reasuransi PT MNC Asuransi Indonesia adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Premi yang belum merupakan pendapatan bagian reasuransi	81.785	50.519
Cadangan premi bagian asuransi	836	3.723
Estimasi klaim bagian reasuransi	37.070	43.465
Jumlah	119.691	97.707

13. PREMIUMS AND REINSURANCE ASSETS (continued)

b. Reinsurance assets

This reinsurance asset owned by a subsidiaries, the following:

PT MNC Asuransi Indonesia
PT MNC Life Assurance
Total

Premium receivables represent receivables from policy holders, insurance agents and insurance brokers.

Reinsurance receivables represent billings to reinsurers after calculating reinsurance commissions and claims upon apportioned risks based on reinsurance agreement.

Premium and reinsurance receivables classified by age are as follows:

Less than 60 days
Overdue for 60-90 days
Overdue for more than 90 days
Total

In accordance with the Minister of Finance Decree, premium and reinsurance receivables recognized as assets are allowed to be included in solvency calculation provided that they are less than 60 days outstanding. As of December 31, 2017 and 2016, allowed premium receivables amounted to Rp220,411 million and Rp142,387 million, respectively. Reinsurance receivables as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp7,615 million and Rp5,810 million, respectively.

Management believes that the allowance provided is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Details of the reinsurance assets of PT MNC Asuransi Indonesia are as follows:

Reinsurance share of unearned premiums
Reinsurance share of premium reserve
Reinsurance share of estimated claim
Total

13. PREMI DAN ASET REASURANSI (lanjutan)

b. Aset reasuransi (lanjutan)

a) Premi yang belum merupakan pendapatan bagian reasuransi

	2017	2016
Harta benda	35.439	28.122
Rekayasa	4.239	4.056
Satelit	2.197	3.208
Penerbangan	2.165	3.089
Pengangkutan	220	173
Kendaraan bermotor	30	46
Aneka	37.495	11.825
Jumlah	81.785	50.519

b) Cadangan premi bagian reasuransi

	2017	2016
Harta benda	209	2.608
Rekayasa	591	1.029
Kendaraan	13	-
Pengangkutan	9	-
Aneka	14	86
Jumlah	836	3.723

c) Estimasi klaim bagian reasuransi

	2017	2016
Harta benda	12.620	18.705
Rekayasa	21.425	14.107
Pengangkutan	848	9.984
Kendaraan	2	-
Lain-Lain	2.175	669
Jumlah	37.070	43.465

Aset reasuransi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, masing-masing dicatat berdasarkan hasil perhitungan PT Gema Mulia Inditama dan PT Katsir Imam Sapto Sejahtera, aktuaris independen.

Rincian aset reasuransi PT MNC Life Assurance adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Estimasi klaim bagian reasuransi	30.500	29.878
Premi yang belum merupakan pendapatan bagian reasuransi	10.091	6.733
Jumlah	40.591	36.611

13. PREMIUMS AND REINSURANCE ASSETS (continued)

b. Reinsurance assets (continued)

a) Reinsurance share of unearned premiums

Property
 Engineering
 Satellite
 Flight
 Transportations
 Vehicle
 Miscellaneous
 Total

b) Reinsurance share of premium reserve

Property
 Engineering
 Vehicle
 Cargo
 Miscellaneous
 Total

c) Reinsurance share of estimated claim

Reinsurance assets recognized as of December 31, 2017 and 2016 were based on calculations performed by PT Gema Mulia Inditama and PT Katsir Imam Sapto Sejahtera, independent actuaries.

Details of the reinsurance asset of PT MNC Life Assurance are as follows:

Reinsurance share of estimated claims
 Reinsurance share of unearned premiums
 Total

13. PREMI DAN ASET REASURANSI (lanjutan)

b. Aset reasuransi (lanjutan)

a) Estimasi klaim bagian reasuransi

	2017	2016	
Kesehatan	27.970	26.448	Health
Kematian	2.530	3.430	Death
Jumlah	30.500	29.878	Total

b) Premi yang belum merupakan pendapatan bagian reasuransi

	2017	2016	
Kesehatan	9.492	5.891	Health
Kematian	599	842	Death
Jumlah	10.091	6.733	Total

Aset reasuransi pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dicatat berdasarkan hasil perhitungan PT Gema Mulia Inditama dan PT Binaputera Jaga Hikmah, aktuaris independen.

13. PREMIUMS AND REINSURANCE ASSETS (continued)

b. Reinsurance assets (continued)

a) Reinsurance share of estimated claims

b) Reinsurance share of unearned premiums

Reinsurance assets recognized as of December 31, 2017 and 2016 were based on calculations performed by PT Gema Mulia Inditama and PT Binaputera Jaga Hikmah, independent actuaries, respectively.

14. ASET TETAP

14. PROPERTY AND EQUIPMENT

	1 Januari/ January 1, 2017	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2017	
<u>Biaya perolehan</u>						<u>At cost</u>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Tanah	31.751	698	-	-	32.449	Land
Bangunan dan prasarana	89.151	5.127	-	(50)	94.228	Building and improvements
Peralatan kantor	132.645	15.580	1.827	711	147.109	Office equipment
Partisi	32.590	3.076	-	-	35.666	Partition
Kendaraan	88.736	26.204	11.506	205	103.639	Vehicles
Perlengkapan kantor	43.126	17.336	6.757	2.021	55.726	Office furniture and fixtures
Aset tetap dalam penyelesaian	7.144	2.946	418	(3.628)	6.044	Construction in progress
Subjumlah	425.143	70.967	20.508	(741)	474.861	Subtotal
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease</u>
Kendaraan	19.309	30.243	7.026	-	42.526	Vehicles
Subjumlah	19.309	30.243	7.026	-	42.526	Subtotal
Jumlah	444.452	101.210	27.534	(741)	517.387	Total
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
<u>Pemilikan langsung</u>						<u>Direct acquisition</u>
Bangunan dan prasarana	53.440	762	-	-	54.202	Building and improvements
Peralatan kantor	84.138	21.717	5.101	-	100.754	Office equipment
Partisi	14.971	6.049	-	-	21.020	Partition
Kendaraan	40.478	13.446	10.656	-	43.268	Vehicles
Perlengkapan kantor	20.123	9.605	2.924	-	26.804	Office furniture and fixtures
Subjumlah	213.150	51.579	18.681	-	246.048	Subtotal
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Finance lease</u>
Kendaraan	7.002	3.675	2.778	-	7.899	Vehicles
Subjumlah	7.002	3.675	2.778	-	7.899	Subtotal
Jumlah	220.152	55.254	21.459	-	253.947	Total
Jumlah – Bersih	224.300				263.440	Net Carrying Amount

14. ASET TETAP (lanjutan)

	1 Januari/ January 1, 2016	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	31 Desember/ December 31, 2016
<u>Biaya perolehan</u>					
<u>Pemilikan langsung</u>					
Tanah	34.154	-	-	(2.403)	31.751
Bangunan dan prasarana	81.277	7.506	1.860	2.228	89.151
Peralatan kantor	111.342	24.063	3.659	899	132.645
Partisi	23.553	5.520	52	3.569	32.590
Kendaraan	78.775	15.844	12.941	7.058	88.736
Perlengkapan kantor	40.516	4.161	1.683	132	43.126
Aset tetap dalam penyelesaian	4.063	10.006	-	(6.925)	7.144
Subjumlah	373.680	67.100	20.195	4.558	425.143
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	19.774	6.642	2.549	(4.558)	19.309
Subjumlah	19.774	6.642	2.549	(4.558)	19.309
Jumlah	393.454	73.742	22.744	-	444.452
<u>Akumulasi penyusutan</u>					
<u>Pemilikan langsung</u>					
Bangunan dan prasarana	47.925	7.366	1.851	-	53.440
Peralatan kantor	72.843	14.895	3.600	-	84.138
Partisi	9.202	5.791	22	-	14.971
Kendaraan	37.657	12.355	11.822	2.288	40.478
Perlengkapan kantor	17.690	4.115	1.682	-	20.123
Subjumlah	185.317	44.522	18.977	2.288	213.150
<u>Sewa pembiayaan</u>					
Kendaraan	7.394	3.604	1.708	(2.288)	7.002
Subjumlah	7.394	3.604	1.708	(2.288)	7.002
Jumlah	192.711	48.126	20.685	-	220.152
Jumlah – Bersih	200.743				224.300

Aset tetap dalam penyelesaian merupakan prasarana kantor dan peralatan kantor yang masing-masing diperkirakan akan selesai pada tahun 2017 dan 2018.

Terkait dengan aset dalam penyelesaian, agar diungkapkan antara lain:

MNCF

- persentase jumlah tercatat terhadap nilai kontrak 63%
- estimasi saat penyelesaian tanggal 15 Desember 2021

MNCB

- Persentase jumlah tercatat sebesar 28% dari total seluruh nilai kontrak pekerjaan pada ADP Perangkat Lunak
- Estimasi penyelesaian diharapkan pada Akhir 2018

jumlah pengeluaran yang diakui dalam jumlah tercatat aset tetap dalam pembangunan adalah Rp6.044

14. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

<u>At cost</u>
<u>Direct acquisition</u>
Land
Building and improvements
Office equipment
Partition
Vehicles
Office furniture and fixtures
Construction in progress
Subtotal
<u>Finance lease</u>
Vehicles
Subtotal
Total
<u>Accumulated depreciation</u>
<u>Direct acquisition</u>
Building and improvements
Office equipment
Partition
Vehicles
Office furniture and fixtures
Subtotal
<u>Finance lease</u>
Vehicles
Subtotal
Total
Net Carrying Amount

Construction in progress represents leasehold improvements and office equipment which are estimated to be completed in 2017 and 2018, respectively.

Associated with construction in progress, to be disclosed among others:

MNCF

- the percentage of the carrying amount against the contract value 63%
- the estimated settlement date of December 15, 2021.

MNCB

- The percentage of the carrying amount is 28% of the total value of the contract of employment in the ADP of the Software
- Estimated completion is expected the end of 2018

the amount of expenditure recognized in the carrying amount of property, plant and equipment under construction Rp 6.044

14. ASET TETAP (lanjutan)

Aset tetap kecuali hak atas tanah, diasuransikan terhadap risiko kecelakaan, kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp257.609 juta dan Rp180.250 juta pada 31 Desember 2017 dan 2016 pada entitas asuransi pihak berelasi yaitu PT MNC Asuransi Indonesia (Entitas anak), PT Asuransi Sinarmas Syariah, PT Asuransi Central Asia, dan PT Asuransi Bumiputera Muda 1967.

Manajemen berkeyakinan telah memenuhi kecukupan pertanggungan asuransi atas aset tetap.

Jumlah tercatat bruto aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan oleh Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp214.207 Juta dan Rp192.915 juta.

Bangunan dan kendaraan motor dijadikan jaminan atas pinjaman yang diperoleh oleh Kelompok Usaha (Catatan 23).

Rincian keuntungan pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Harga perolehan	27.533	22.744
Akumulasi penyusutan	(21.459)	(20.685)
Jumlah – bersih	6.074	2.059
Harga jual	7.571	9.310
Keuntungan pelepasan aset tetap	1.497	7.251

Tidak terdapat komitmen kontraktual untuk perolehan aset tetap pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah tercatat dari seluruh aset tetap tersebut dapat dipulihkan dan tidak terdapat kejadian atau perubahan atas keadaan yang menunjukkan adanya penurunan nilai aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sehingga tidak diperlukan adanya penyisihan penurunan nilai atas aset tetap.

Tidak terdaftar aset yang dijaminkan pada utang bank

14. PROPERTY AND EQUIPMENT (continued)

Property and equipment except for landrights, are covered by insurance against accident, fire and other risks under blanket policies for the sum insured amounting to Rp 257,609 million, and Rp180,250 million as of December 31, 2017 and 2016, respectively, which were obtained from PT MNC Asuransi Indonesia (a subsidiary), PT Asuransi Sinarmas Syariah, PT Asuransi Central Asia, and PT Asuransi Bumiputera Muda 1967.

Management believes that it has met the adequacy of insurance coverage for fixed assets.

Gross carrying amount of property and equipment that are fully depreciated but still used by the Group as of December 31, 2017 and 2016 amounted to Rp214,207 million and Rp192,915 million, respectively.

Buildings and vehicles are used as collateral for the credit facilities obtained by the Group (Note 23).

Details of gain from the disposal of property and equipment are as follows:

	Cost
	Accumulated depreciation
	Net carrying amount
	Proceeds
	Gain on disposal of property and equipment

There are no contractual commitment for the acquisition of property and equipment as of December 31, 2017 and 2016.

Management believe that carry value of all property and equipment can be recovery and no events or changes on conditions indicated the impairment of property and equipment as of December 31, 2017 and 2016, no necessary provide a provision of impairment losses on those property and equipment .

No property and equipment are as loan collateral

15. ASET AL-IJARAH

15. AL-IJARAH ASSETS

	1 Januari/ January 1, 2017	Penambah/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2017	
Biaya perolehan	291.236	-	24.192	267.044	At cost
Akumulasi penyusutan	213.269	11.909	17.364	207.814	Accumulated depreciation
Jumlah – bersih	77.967			59.230	Net carrying amount

	1 Januari/ January 1, 2016	Penambah/ Additions	Pengurangan/ Deductions	31 Desember/ December 31, 2016	
Biaya perolehan	298.380	1.292	8.436	291.236	At cost
Akumulasi penyusutan	177.086	40.301	4.118	213.269	Accumulated depreciation
Jumlah – bersih	121.294			77.967	Net carrying amount

Rincian keuntungan penjualan aset Al-Ijarah adalah sebagai berikut:

Details of gain from the sale of Al-Ijarah assets are as follows:

	2017	2016	
Biaya perolehan	24.192	8.436	Cost
Akumulasi penyusutan	(17.364)	(4.118)	Accumulated depreciation
Jumlah – bersih	6.828	4.318	Net carrying amount
Harga jual	4.142	4.318	Proceeds
Kerugian penjualan	(2.686)	-	Loss on sale

Aset Al-Ijarah tidak diasuransikan.

Al-Ijarah assets not insurance covered.

16. GOODWILL

16. GOODWILL

Goodwill merupakan selisih lebih antara biaya perolehan dan bagian Entitas atas nilai wajar aset bersih Entitas anak adalah sebagai berikut:

Goodwill represents the excess of acquisition cost over the Entity's interest in the fair value of the net assets of entity acquired as follows:

	2017	2016	
PT Bank MNC Internasional Tbk	293.390	293.390	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT MNC Guna Usaha	65.279	65.279	PT MNC Guna Usaha
PT MNC Life Assurance	3.838	3.838	PT MNC Life Assurance
PT MNC Asuransi Indonesia	1.656	1.656	PT MNC Asuransi Indonesia
Jumlah	364.163	364.163	Total

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, manajemen berkeyakinan bahwa goodwill tidak mengalami penurunan nilai.

As of December 31, 2017 and 2016, management believes that goodwill is not impaired.

17. ASET LAIN-LAIN

17. OTHER ASSETS

	2017	2016	
Penempatan pada Bank Indonesia dan Bank lain	536.538	145.924	Placements with Bank Indonesia and other Bank
Agunan yang diambil alih	129.323	59.025	Foreclosed collateral
Biaya akuisisi kartu kredit dibayar dimuka	104.350	53.933	Prepaid credit and acquisitions
Pendapatan bunga yang masih akan diterima	67.899	68.531	Accrued interest receivable
Biaya yang ditangguhkan	46.843	34.570	Deferred charges
Jaminan sewa dan telepon	45.287	23.315	Rental and telephone deposits
Sewa dibayar dimuka	55.125	72.832	Prepaid rent
Properti investasi - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp648 juta pada 31 Desember 2017 dan Rp77 juta pada 31 Desember 2016	36.306	36.877	Investment properties - net of accumulated depreciation of Rp648 million as of December, 31, 2017 and Rp77 million as of December 31, 2016
Aset tak berwujud - setelah dikurangi akumulasi amortisasi sebesar Rp82.041 juta pada 31 Desember 2017 dan Rp80.167 juta pada 31 Desember 2016	31.382	26.057	Intangible assets - net of accumulated amortization of Rp82,041 million as of December 31, 2017 and Rp80,167 million as of December 31, 2016
Deposito MNCS yang dibatasi penggunaannya	25.475	-	Account represent MNC's restricted time deposit
Asuransi dibayar dimuka	71.300	13.895	Prepaid insurance
Uang muka	20.033	49.763	Advances
Piutang pendapatan sewa Al-Ijarah	11.377	5.783	Al-Ijarah rental income receivable
Pajak dibayar dimuka	5.083	3.066	Prepaid taxes
Tagihan akseptasi	1.522	89.276	Acceptance receivables
Penyertaan saham	625	625	Investment in shares at cost
Tagihan derivative	20	4.842	Derivative receivables
Provisi & administrasi dibayar di muka	4.829	1.537	Prepaid Provision & administration
Lain-lain	51.478	68.802	Others
Jumlah	1.244.795	758.653	Total

Deposito MNCS yang dibatasi penggunaannya yang digunakan sebesar Rp25.475 juta adalah merupakan deposito atas jaminan pinjaman jangka pendek dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk.

The restricted use of MNCS used amounting to Rp25,475 million represents deposits on short-term loan collateral from PT Bank J Trust Indonesia Tbk.

Properti investasi merupakan bangunan ruko yang disewakan ke entitas anak.

These investment property assets are buildings that are leased to a subsidiary.

18. SIMPANAN

Simpanan terdiri dari:

	31 Desember/December 31, 2017			
	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Giro	321.750	490.174	811.924	Demand deposit
Tabungan	15.881	591.080	606.961	Savings deposit
Deposito berjangka	195.903	7.362.261	7.558.164	Time deposits
Jumlah	533.534	8.443.515	8.977.049	Total

	31 Desember/December 31, 2016			
	Pihak berelasi/ <i>Related parties</i>	Pihak ketiga/ <i>Third parties</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Giro	356.641	571.392	928.033	Demand deposit
Tabungan	42.712	605.074	647.786	Savings deposit
Deposito berjangka	266.105	8.333.900	8.600.005	Time deposits
Jumlah	665.458	9.510.366	10.175.824	Total

Nilai tercatat biaya perolehan diamortisasi dari simpanan adalah sebagai berikut:

The carrying amount of deposits at amortized cost are as follows:

	2017	2016	
<u>Simpanan</u>			<u>Deposits</u>
Giro	811.924	928.033	Demand deposit
Tabungan	606.961	647.786	Savings deposit
Deposito berjangka	7.558.164	8.600.005	Time deposits
Jumlah	8.977.049	10.175.824	Total
Beban bunga yang masih harus dibayar (Catatan 31)	33.275	32.304	Accrued interest payables (Note 31)
Jumlah	9.010.324	10.208.128	Total

a. Giro terdiri atas:

a. Demand deposits consist of:

	2017	2016	
<u>Pihak berelasi (Catatan 42L)</u>			<u>Related parties (Note 42L)</u>
Rupiah	265.326	328.948	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	56.402	27.678	United States Dollar
Lainnya	22	15	Others
Subjumlah	321.750	356.641	Subtotal
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
Rupiah	418.560	483.276	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	64.967	79.318	United States Dollar
Dolar Singapura	3.271	-	Singapore Dollar
Euro	1.953	-	Euro
Lainnya	1.423	8.798	Others
Subjumlah	490.174	571.392	Subtotal
Jumlah	811.924	928.033	Total

18. SIMPANAN (lanjutan)

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun
Rupiah 2,74%
Valuta asing 0,88%

Jumlah giro yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp32.262 juta dan Rp28.392 juta.

b. Tabungan terdiri atas:

	2017	2016
<u>Rupiah</u>		
Tabungan MNC	434.709	428.056
Tabungan MNC Bisnis	34.666	70.328
Tabungan MNC Junior	20.690	23.611
Tabungan Rencana MNC	19.685	28.297
TabunganKu	13.813	8.200
Tabungan MNC Program Hadiah	9.799	10.864
Tabungan MNC Bunga Khusus	1.936	2.651
Lainnya	71.663	75.779
Jumlah	606.961	647.786

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun 2,00%

Jumlah tabungan yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp141.342 juta dan Rp133.057 juta.

c. Deposito berjangka terdiri atas:

	2017	2016
<u>Pihak berelasi (Catatan 42L)</u>		
Rupiah	192.431	263.188
Dolar Amerika Serikat	3.472	2.917
Subjumlah	195.903	266.105
<u>Pihak ketiga</u>		
Rupiah	6.720.582	6.516.935
Dolar Amerika Serikat	639.301	1.814.523
Lainnya	2.378	2.442
Subjumlah	7.362.261	8.333.900
Jumlah	7.558.164	8.600.005

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun

Rupiah 7,61%
Mata uang asing 2,24%

18. DEPOSITS (continued)

Average annual effective interest rate
Rupiah
Foreign currencies

As of December 31, 2017 and 2016, demand deposits which are earmarked and pledged as loan collateral amounted to Rp32,262 million and Rp28,392 million, respectively.

b. Savings deposits consist of:

<u>Rupiah</u>	
Tabungan MNC	
Tabungan MNC Bisnis	
Tabungan MNC Junior	
Tabungan Rencana MNC	
TabunganKu	
Tabungan MNC Program Hadiah	
Tabungan MNC Bunga Khusus	
Others	
Total	

Average annual effective interest rate

As of December 31, 2017 and 2016, savings deposits which are earmarked and pledged as loan collateral amounted to Rp141,342 million and Rp133,057 million, respectively.

c. Savings deposits consist of:

<u>Related parties (Note 42L)</u>	
Rupiah	
United States Dollar	
Subtotal	
<u>Third parties</u>	
Rupiah	
United States Dollar	
Others	
Subtotal	
Total	

Average annual effective interest rate

Rupiah
Foreign currencies

18. SIMPANAN (lanjutan)

Klasifikasi deposito berjangka berdasarkan periode adalah sebagai berikut:

	2017		
	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total
1 bulan	973.447	270.119	1.243.566
3 bulan	2.057.607	48.009	2.105.616
6 bulan	1.355.494	189.553	1.545.047
12 bulan	836.201	32.470	868.671
Lebih dari 12 bulan	1.690.264	105.000	1.795.264
Jumlah	6.913.013	645.151	7.558.164

Jumlah deposito berjangka yang diblokir dan dijadikan jaminan kredit pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp62.604 juta dan Rp232.609 juta.

18. DEPOSITS (continued)

Time deposits classified based on the original term are as follows:

	2016			
	Rupiah	Mata uang asing/ Foreign currencies	Jumlah/ Total	
1 bulan	1.356.273	176.220	1.532.493	1 month
3 bulan	1.879.857	1.055.110	2.934.967	3 months
6 bulan	952.745	149.591	1.102.336	6 months
12 bulan	1.173.531	121.613	1.295.144	12 months
More than 12 years	1.417.717	317.348	1.735.065	More than 12 years
Total	6.780.123	1.819.882	8.600.005	Total

As of December 31, 2017 and 2016, time deposits which are earmarked and pledged as loan collateral amounted to Rp62,604 million and Rp232,609 million, respectively.

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN

Simpanan dari bank lain terdiri dari:

	2017	2016
<u>Pihak ketiga – Rupiah</u>		
Giro	120.208	287.417
Tabungan	51.999	53.893
Deposito berjangka	25.050	51.006
Call Money	-	115.000
Jumlah	197.257	507.316

Tingkat bunga efektif rata-rata per tahun

	2017	2016
Giro	2,04%	2,13%
Tabungan	2,40%	2,30%
Deposito berjangka	4,92%	5,41%
Call Money	5,36%	5,87%

Nilai tercatat pada biaya perolehan dari simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Simpanan dari bank	197.257	507.316
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 21)	6	60
Jumlah	197.263	507.376

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS

Deposits from other banks consist of:

<u>Third parties – Rupiah</u>
Demand deposits
Savings deposits
Time deposits
Call Money
Total

Average annual effective interest rate

Demand deposits
Savings deposits
Time deposits
Call Money

Carrying amount at amortized cost of the deposit from other banks are as follows:

Deposits from other banks
Accrued interest payable (Note 21)
Total

19. SIMPANAN DARI BANK LAIN (lanjutan)

Deposito Berjangka

Nilai tercatat pada biaya perolehan dari simpanan dari bank lain adalah sebagai berikut:

	2017	2016
1 bulan	3.000	7.500
3 bulan	5.262	9.053
6 bulan	15.087	3.500
12 bulan	-	18.275
Lebih dari 12 bulan	1.701	12.678
Jumlah	25.050	51.006

Call Money

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 jangka waktu call money Rupiah masing-masing 4 sampai dengan 7 hari.

Tidak terdapat simpanan dari bank lain yang diblokir

19. DEPOSITS FROM OTHER BANKS (continued)

Time Deposits

Time deposits classified based on the term are as follows:

	2017	2016	
1 bulan	3.000	7.500	1 month
3 bulan	5.262	9.053	3 months
6 bulan	15.087	3.500	6 months
12 bulan	-	18.275	12 months
Lebih dari 12 bulan	1.701	12.678	More than 12 months
Jumlah	25.050	51.006	Total

Call Money

As of December 31, 2017 and 2016, the terms of call money in Rupiah are 4 to 7 days.

No deposit from other banks are blocked.

20. UTANG NASABAH

	2017	2016
Pihak ketiga - Rupiah		
Simpanan dan utang nasabah	704.118	1.025.883
Uang muka dan angsuran	55.951	107.403
Utang dealer	5.094	9.714
Premi diterima dimuka	17.168	5.686
Jumlah	782.331	1.148.686

Third parties – Rupiah
Customer deposits and payables
Advances and installments
Dealers payable
Premium deposits
Total

21. UTANG REASURANSI

	2017	2016
Harta benda	16.150	19.656
Satelite	2.254	3.217
Penerbangan	-	1.205
Kendaraan bermotor	-	728
Rekayasa	1.629	1.305
Jiwa dan kesehatan	18.024	41.077
Aneka	76.676	4.144
Jumlah	114.733	71.332

21. REINSURANCE

Treasure
Satelite
Flights
Vehicles
Engineering
Life and health
Misscelaneous
Total

22. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI DAN INVESTASI

22. INSURANCE AND INVESTMENT CONTRACTS LIABILITY

	2017	2016	
Liabilitas kontrak asuransi			Insurance contracts liability
PT MNC Life Assurance	158.357	167.343	PT MNC Life Assurance
PT MNC Asuransi Indonesia	247.584	186.993	PT MNC Asuransi Indonesia
Subjumlah	405.941	354.336	Subtotal
Liabilitas kontrak investasi Estimasi klaim sendiri	106.336	103.802	Investment contract liability Estimated claims
Jumlah	512.277	458.138	Total

Liabilitas kontrak asuransi untuk PT MNC Life Assurance adalah sebagai berikut: Insurance contracts liability of PT MNC Life Assurance consist of:

	2017	2016	
Estimasi klaim bruto	123.197	134.402	Gross estimated claims
Premi yang belum merupakan pendapatan bruto	35.160	32.941	Gross unearned premiums
Jumlah	158.357	167.343	Total

a) Estimasi klaim bruto a) Gross estimated claims

	2017	2016	
Kematian	58.946	51.723	Death
Jatuh tempo	51.336	70.571	Maturity
Kesehatan	12.915	12.108	Health
Jumlah	123.197	134.402	Total

b) Premi yang belum merupakan pendapatan bruto b) Gross unearned premiums

	2017	2016	
Kesehatan	32.252	29.394	Health
Kematian	2.908	3.547	Death
Jumlah	35.160	32.941	Total

Liabilitas kontrak asuransi PT MNC Life Assurance berdasarkan mata uang sebagai berikut: Insurance contracts liability of PT MNC Life Assurance by currency are as follows:

	2017	2016	
Rupiah	156.637	165.661	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	1.720	1.682	U.S. Dollar
Jumlah	158.357	167.343	Total

Liabilitas kontrak investasi PT MNC Life Assurance berisi produk asuransi Unit Link. Metode yang digunakan dalam perhitungan liabilitas kontrak investasi adalah Nilai Wajar Akumulasi Aset. Rincian liabilitas kontrak investasi pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp106.336 juta dan Rp103.802 juta.

Investment contracts liability of PT MNC Life Assurance contain products of Unit Link. The method used in the calculation of investment contracts liability is Fair Value Asset Accumulation. Investment contracts liability as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp106,336 million and Rp103,802 million, respectively.

22. LIABILITAS KONTRAK ASURANSI DAN INVESTASI
(lanjutan)

Laporan perhitungan liabilitas kontrak asuransi untuk 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing dilakukan oleh PT Gemma Mulia Inditama dan PT Binaputra Jaga Hikmah, aktuaris independen.

Liabilitas kontrak asuransi untuk PT MNC Asuransi Indonesia adalah sebagai berikut:

22. INSURANCE AND INVESTMENT CONTRACTS LIABILITY
(continued)

The report on the calculation of insurance contracts liability as of December 31, 2017 and is carried out by PT Gemma Mulia Inditama and PT Binaputra Jaga Hikmah, independent actuaries.

Insurance contracts liability of PT MNC Asuransi Indonesia consist of:

	2017	2016	
Estimasi klaim bruto	72.899	63.928	Gross estimated claims
Cadangan premi bruto	30.679	27.912	Gross premium reserves
Premi yang belum merupakan pendapatan bruto	144.006	95.153	Gross unearned premiums
Jumlah	247.584	186.993	Total

a) Estimasi klaim bruto

a) Gross estimated claims

	2017	2016	
Rekayasa	34.069	19.480	Engineering
Harta benda	23.035	22.691	Property
Kendaraan	9.499	9.425	Vehicles
Pengangkutan	2.153	11.178	Cargo
Lain-lain	4.143	1.154	Others
Jumlah	72.899	63.928	Total

Berdasarkan mata uang Rupiah

72.899 63.928

By currency Rupiah

b) Cadangan premi bruto

b) Gross premium reserves

	2017	2016	
Kendaraan	27.101	18.895	Vehicle
Rekayasa	2.550	4.742	Engineering
Harta benda	906	4.031	Property
Pengangkutan	21	-	Cargo
Lain-lain	101	244	Others
Jumlah	30.679	27.912	Total

c) Premi yang belum merupakan pendapatan bruto

c) Gross unearned premiums

	2017	2016	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Harta benda	56.808	44.248	Property
Kendaraan	31.534	20.719	Vehicles
Rekayasa	7.658	8.109	Engineering
Satelit	3.798	3.963	Satellite
Pengangkutan	549	369	Cargo
Penerbangan	3.648	4.299	Plane
Lain-lain	40.011	13.446	Others
Jumlah	144.006	95.153	Total

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK

	2017	2016	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	350.571	496.553	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	282.600	376.633	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	257.038	149.323	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	208.454	147.167	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	133.436	166.981	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT Bank Ganesha Tbk	105.478	38.925	PT Bank Ganesha Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	83.888	10.141	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Panin Tbk	79.051	-	PT Bank Panin Tbk
PT Bank ICBC Indonesia Tbk	73.449	74.868	PT Bank ICBC Indonesia Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	72.426	47.478	PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	72.386	-	PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	64.844	35.400	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	54.237	24.455	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	53.466	37.283	PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk
PT Bank CTBC Indonesia Tbk	29.759	44.453	PT Bank CTBC Indonesia Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk	20.000	-	PT Bank Sinarmas Tbk
PT Bank Andara Tbk	15.150	19.242	PT Bank Andara Tbk
PT Bank INA Perdana Tbk	4.685	12.613	PT Bank INA Perdana Tbk
PT Bank Harda Internasional Tbk	-	2.850	PT Bank Harda Internasional Tbk
PT Bank Jasa Jakarta Tbk	-	1.330	PT Bank Jasa Jakarta Tbk
PT Bank Mayora Tbk	11.405	-	PT Bank Mayora Tbk
Jumlah	1.972.323	1.685.695	Total
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	1.054.966	788.444	Current portion 1 year
Bagian jangka panjang – bersih	917.357	897.251	Long-term loan – net
Jumlah	1.972.323	1.685.695	Total
Berdasarkan mata uang Rupiah	1.972.323	1.685.695	By currencies Rupiah
Biaya perolehan diamortisasi atas utang adalah sebagai berikut:			The amortized cost of the loans are as follows:

	2017	2016	
Utang bank	1.972.323	1.685.695	Loans from bank
Bunga yang masih harus dibayar (Catatan 21)	9.443	11.048	Accrued interest (Note 21)
Jumlah	1.981.766	1.696.743	Total

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN – BANK (lanjutan)

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES – BANK (continued)

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja dan pembiayaan konsumen yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, sebagai berikut:

MNCF has several long-term loan facilities which are used for working capital and consumer financing, obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
165.000	-	7.880	31 Mei 2019/ May 31, 2019	12,00% - 14,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105%/ Consumer financing receivables equivalent to 105%
60.000	-	1.489	20 Desember 2019 December 20, 2019	10,50% - 11,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 105% and fixed assets
310.000	660	40.778	2 September 2019/ September 2, 2019	11,00% - 13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 105% and fixed assets
500.000	26.076	219.016	27 Desember 2019/ December 27, 2019	11,00% - 13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 105% and fixed assets
500.000	60.131	143.493	8 Juni 2020/ June 8, 2020	10,00% - 12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 105% and fixed assets
500.000	263.704	83.897	24 Juni 2019/ June 24, 2019	10,00% - 13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 105% and fixed assets
	350.571	496.553			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 10 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2%. Sedangkan pembatasan untuk MNCGU adalah harus mendapat persetujuan untuk;

- (i) rasio utang ke modal maksimal 8 kali dan
- (ii) maksimal NPL lebih dari 90 hari dikenakan 2%.

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 10 times and maximum NPL 90 days is charged 2%. While to MNCGU with negative covenant must have approval are;

- (i) the ratio of debt to capital is up to 8 times and
- (ii) maximal NPL of more than 90 days subject to 2%.

PT Bank Victoria International Tbk

PT Bank Victoria International Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Victoria International Tbk yaitu:

MNCF has several long-term loan facility for working capital, obtained from PT Bank Victoria International Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
50.000	13.686	29.959	22 Desember 2020/ December 22, 2020	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%/ Consumer financing receivables for vehicles and house mortgage of 110% and 100%, respectively
			15 April 2021/ April 15, 2021		Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%/ Consumer financing receivables for vehicles and house mortgage of 110% and 100%, respectively

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK (lanjutan)

PT Bank Victoria International Tbk (lanjutan)

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
100.000	32.513	71.168	April 15, 2021
			15 Desember 2019/
50.000	11.937	26.129	December 15, 2019
			17 Juni 2021/
50.000	11.553	49.765	June 17, 2021
72.000	55.200	71.612	13 Oktober 2021/ October 13, 2021
128.000	127.700	128.000	13 Oktober 2021/ October 13, 2021
50.000	11.553	-	09 September 2021/ September 09, 2021
	<u>264.142</u>	<u>376.633</u>	

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Victoria International, yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
10.000	6.667	-	15 April 2019/ April 15, 2019
3.000	2.125	-	23 Mei 2019/ May 23, 2019
10.000	8.055	-	24 Mei 2019/ May 24, 2019
2.000	1.611	-	30 Mei 2019/ May 30, 2019
	<u>18.458</u>	<u>-</u>	

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK (continued)

PT Bank Victoria International Tbk (continued)

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
13%	Consumer financing receivables for vehicles and house mortgage of 110% and 100%, respectively
13,50%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%/ Consumer financing receivables for vehicles and house mortgage of 110% and 100%, respectively
12%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%/ Consumer financing receivables for vehicles and house mortgage of 110% and 100%, respectively
13%	Piutang pembiayaan konsumen (KPR) sebesar 100%/ Consumer financing receivables for housing equivalent 100%
13%	Piutang pembiayaan konsumen (KPR) sebesar 100%/ Consumer financing receivables for housing equivalent 100%
12%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan bermotor dan hipotek perumahan, masing-masing sebesar 110% dan 100%/ Consumer financing receivables for vehicles and house mortgage of 110% and 100%, respectively

MNCGU has several long-term loan facility for working capital, obtained from PT Bank Victoria International, as follows:

Piutang Pembiayaan Konsumen/
Consumer financing receivable
Piutang Pembiayaan Konsumen/
Consumer financing receivable
Piutang Pembiayaan Konsumen/
Consumer financing receivable
Piutang Pembiayaan Konsumen/
Consumer financing receivable

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			27 Januari 2021/ January 27, 2021	11,50% - 12,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100%/ Financing receivables equivalent to 100%
150.000	67.667	123.099	20 April 2021/ April 20, 2021	11,25%-12,50%	Piutang pembiayaan sebesar 105%/ Financing receivables equivalent to 105%
200.000	160.299	-	14 Oktober 2030/ October 14, 2030	9,00%	Piutang pembiayaan sebesar 100%/ Financing receivables equivalents to 100%
29.280	29.072	26.224			
	257.038	149.323			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF maksimal gearing ratio 8 kali dengan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3%.

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK (continued)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk

MNCF has long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, as follows:

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times with maximum NPL 90 days is charged 3%.

PT Bank J Trust Indonesia Tbk

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk sebagai berikut:

PT Bank J Trust Indonesia Tbk

MNCGU has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank J Trust Indonesia Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
10.032	-	5.352	14 Desember 2017/ December 14, 2017	7,80% - 14%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
4.053	1.536	2.879	17 Desember 2018/ December 17, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
17.151	6.499	12.184	21 Desember 2018/ December 21, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
2.660	1.086	1.958	13 Januari 2019/ January 13, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
7.461	3.046	5.491	19 Januari 2019/ January 19, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
4.135	389	2.546	11 Februari 2019/ February 11, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
3.066	1.341	2.334	11 Februari 2019/ February 11, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
1.329	186	872	8 Maret 2019/ March 8, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
1.544	719	1.214	29 Maret 2019/ March 29, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
1.595	369	1.173	4 Mei 2019/ May 4, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
1.417	797	-	10 Mei 2020/ May 10, 2020	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
1.691	391	1.244	31 Mei 2019/ May 31, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
			25 Juli 2019/ July 25, 2019		Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK
(continued)

PT Bank J Trust Indonesia Tbk (lanjutan)

PT Bank J Trust Indonesia Tbk (continued)

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
2.582	1.491	2.282	July 25, 2019	13,50%	Financing receivable equivalent to 100%
928	-	556	25 Juli 2019/ July 25, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
5.090	3.078	4.620	24 Agustus 2019/ August 24, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
4.235	1.540	3.606	29 Agustus 2019/ August 29, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
3.514	2.125	3.189	30 Agustus 2019/ August 30, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
2.291	932	2.037	5 September 2019/ September 5, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
3.217	1.308	2.860	5 September 2019/ September 5, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
2.202	1.356	-	14 Februari 2020/ February 14, 2020	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
1.417	1.115	-	30 Maret 2020/ March 30, 2020	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
942	463	907	28 November 2019/ November 28, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
6.568	4.495	6.419	28 November 2019/ November 28, 2019	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
2.242	1.824	-	25 Juli 2020/ July 25, 2020	13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 100% / Financing receivable equivalent to 100%
	<u>36.086</u>	<u>63.723</u>			

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk sebagai berikut:

MNCF has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank J Trust Indonesia Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
100.000	72.368	83.444	29 Juni 2022/ June 29, 2022	12%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 105%/ Consumer financing receivables equivalent to 105%

MNCS memiliki fasilitas pinjaman untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk sebagai berikut:

MNCS has facilities for working capital, obtained from PT Bank J Trust Indonesia Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
100.000	100.000	-	29 Mei 2018/ May 29, 2018	9,00% - 10,00%	Penempatan deposito / Placement of time deposit

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

PT Bank J Trust Indonesia Tbk (lanjutan)

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan gearing ratio maksimal 9 kali, maksimal NPL 90 hari 3%. Sedangkan untuk MNCGU, gearing ratio utang terhadap modal adalah maksimal 9 kali dan pembatasan harus mendapatkan persetujuan antara lain;

- (i) penjaminan bagi pihak ketiga;
- (ii) menjadi Hoding atas Perusahaan baru ke dalam Perusahaan lain yang membawa penurunan kondisi keuangan dan kemampuan membayar pada debitur.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
50.000	-	20.288	16 Oktober 2018/ October 16, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
100.000	52.487	68.853	9 September 2019/ September 9, 2019	12,75% - 13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
100.000	69.576	52.920	27 November 2020/ November 27, 2020	12,25% - 12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
	122.063	142.061			

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
5.450	-	1.503	15 Juni 2017/ June 15, 2017	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
8.230	1.612	4.528	15 Juni 2018/ June 15, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
4.640	952	2.674	28 Juni 2018/ June 28, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
2.380	1.241	1.987	9 Mei 2019/ May 9, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
2.060	1.074	1.721	17 Mei 2019/ May 17, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
1.923	1.003	1.606	19 Mei 2019/ May 19, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK (continued)

PT Bank J Trust Indonesia Tbk (continued)

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 9 times, maximum NPL 90 days is charged 3%. While MNCGU with financial covenant debt to equity maximum 9 times and negative covenant must approval are; (i) be a guarantor or a third party;

- (ii) holding a new company into other companies that leads to decrease in the financial condition and ability to pay the debtor.

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

MNCF has several long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
50.000	-	20.288	16 Oktober 2018/ October 16, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
100.000	52.487	68.853	9 September 2019/ September 9, 2019	12,75% - 13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
100.000	69.576	52.920	27 November 2020/ November 27, 2020	12,25% - 12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
	122.063	142.061			

MNCGU has several long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
5.450	-	1.503	15 Juni 2017/ June 15, 2017	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
8.230	1.612	4.528	15 Juni 2018/ June 15, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
4.640	952	2.674	28 Juni 2018/ June 28, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
2.380	1.241	1.987	9 Mei 2019/ May 9, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
2.060	1.074	1.721	17 Mei 2019/ May 17, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
1.923	1.003	1.606	19 Mei 2019/ May 19, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK
(continued)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (continued)

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
1.665	869	1.391	23 Mei 2019/ May 23, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
2.100	484	1.544	24 Mei 2018/ May 24, 2018	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
3.912	902	2.876	31 Mei 2018/ May 31, 2018	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
1.353	706	1.130	31 Mei 2019/ May 31, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
1.643	902	1.412	2 Juni 2019/ June 2, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
2.964	1.628	2.548	21 Juni 2019/ June 21, 2019	13,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 125%/ Consumer financing receivables equivalent to 125%
	<u>11.373</u>	<u>24.920</u>			

Fasilitas diberikan kepada MNCF dengan gearing ratio maksimal 9 kali. Sedangkan untuk MNCGU dengan pembatasan adalah rasio utang terhadap modal maksimal 9 kali, dan kovenan negatif harus mendapatkan persetujuan:
(i) untuk merger dan akuisisi;
(ii) merubah bisnis perusahaan dan
(iii) mengumumkan perusahaan bangkrut.

Facility is provided MNCF with maximum gearing ratio 9 times. While MNCGU with financial covenant 9 times, and negative covenant must have approval are:
(i) conduct mergers and acquisitions ;
(ii) change the company business
(iii) declare a bankrupt company.

PT Bank Ganesha Tbk

PT Bank Ganesha Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari Bank Ganesha sebagai berikut:

MNCF has long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from Bank Ganesha, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
35.000	25.553	30.825	31 Maret 2021/ March 31, 2021	13%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%
15.000	15.000	-	20 Desember 2023/ December 20, 2023	12%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%
	<u>40.553</u>	<u>30.825</u>			

MNCGU memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Ganesha Tbk sebagai berikut:

MNCGU has long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank Ganesha Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
10.000	4.925	8.100	31 Maret 2019/ March 31, 2019	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%
15.000	15.000	-	31 Desember 2020/ December 31, 2020	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%
45.000	45.000	-	18 April 2018/ April 18, 2018	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivables equivalent to 110%
	<u>64.925</u>	<u>8.100</u>			

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN – BANK (lanjutan)

PT Bank Ganesha Tbk (lanjutan)

Fasilitas yang diberikan MNCF dengan maksimal gearing ratio sebesar 10 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 5%. Sedangkan untuk MNCGU dengan pembatasan adalah:
 (i) rasio utang terhadap modal maksimal 9 kali
 (ii) maksimal NPF dari 90 hari dikenakan 5% dan
 (iii) maksimal penghapusan 3%.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Capital Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
100.000	74.288	141	25 Desember 2018/ December 25, 2018

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Capital Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
10.000	-	10.000	22 Januari 2017/ January 22, 2017
5.000	3.400	-	8 Februari 2018/ February 8, 2018
10.000	6.200	-	23 Februari 2018/ February 23, 2018
	9.600	10.000	

Fasilitas diberikan kepada MNCF dengan gearing ratio maksimal 10 kali. Sedangkan untuk MNCGU dengan kovenan negatif harus mendapatkan persetujuan:
 (i) untuk merger dan akuisisi;
 (ii) merubah bisnis perusahaan

PT Bank Panin Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Panin Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
100.000	79.051	-	17 Juli 2020/ July 17, 2020

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan gearing ratio maksimal 8 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2,5%.

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES – BANK (continued)

PT Bank Ganesha Tbk (continued)

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 10 times and maximum NPL 90 days is charged 5%. While to MNCGU with negative covenant must have approval are;
 (i) the debt to equity ratio is 9 times
 (ii) maximum NPF of 90 days is 5% and
 (iii) maximum removal of 3%.

PT Bank Capital Indonesia Tbk

MNCF has several long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank Capital Indonesia Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
14,00%	Piutang pembiayaan sebesar 110%/ Financing receivables equivalent to 110%

MNCGU has several long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank Capital Indonesia Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 110%/ Financing receivables equivalent to 110%
13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 110%/ Financing receivables equivalent to 110%
13,50%	Piutang pembiayaan sebesar 110%/ Financing receivables equivalent to 110%

Facility is provided MNCF with maximum gearing ratio 10 times. While MNCGU with negative covenant must have approval are:
 (i) conduct mergers and acquisitions ;
 (ii) change the company business.

PT Bank Panin Tbk

MNCF has long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank Panin Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
10,5%-11,5%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times and maximum NPL 90 days is charged 2.5%.

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank ICBC Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
100.000	73.449	74.868	23 Desember 2021/ December 23, 2021

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 8 kali.

PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
50.000	39.715	-	21 Februari 2022/ February 21, 2022
50.000	32.711	47.478	25 Agustus 2019/ August 25, 2019
	72.426	47.478	

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 8 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3%.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebagai berikut :

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
30.000	23.857	-	14 Maret 2021/ March 14, 2021
50.000	48.529	-	27 Oktober 2021/ October 27, 2021
	72.386	-	

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 10 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3,5%.

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK (continued)

PT Bank ICBC Indonesia Tbk

MNCF has long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank ICBC Indonesia Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
100.000	73.449	74.868	23 Desember 2021/ December 23, 2021	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan sebesar 120% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%/ Consumer financing vehicle receivables equivalent to 120% and housing loans equivalent to 100%

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times.

PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk

MNCF has long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
50.000	39.715	-	21 Februari 2022/ February 21, 2022	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen kendaraan sebesar 110% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%/ Consumer financing vehicle receivables equivalent to 110% and housing loans equivalent to 100%
50.000	32.711	47.478	25 Agustus 2019/ August 25, 2019	12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 105%/ Consumer financing receivables equivalent to 100% and property financing receivables equivalent to 105%
	72.426	47.478			

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times and maximum NPL 90 days is charged 3%.

PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

MNCF has long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
30.000	23.857	-	14 Maret 2021/ March 14, 2021	12%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
50.000	48.529	-	27 Oktober 2021/ October 27, 2021	11%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%
	72.386	-			

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 10 times and maximum NPL 90 days is charged 3.5%.

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
10.215	5.107	8.513	29 Juni 2019/ June 29, 2019	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
3.055	1.528	2.546	30 Juni 2019/ June 30, 2019	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
5.730	3.024	4.934	28 Juli 2019/ 28 September 2019/	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
1.476	861	1.353	28 September 2019/	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
8.721	5.087	7.994	28 September 29 September 2019/	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
5.148	3.003	4.719	29 September 2019/	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
5.655	3.456	5.341	11 Oktober 2019/ October 11, 2019	13,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
10.000	8.333	-	21 Juni 2020/ June 21, 2020	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
10.000	8.333	-	21 Juni 2020/ June 21, 2020	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
10.000	8.611	-	28 Juli 2020/ July 28, 2020	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
10.000	8.611	-	31 Juli 2020 July 31, 2020	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
5.000	4.445	-	16 Agustus 2020/ August 16, 2020	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
5.000	4.445	-	16 Agustus 2020/ August 16, 2020	12,50%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%
	<u>64.844</u>	<u>35.400</u>			

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK
(continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk

MNCGU have several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, as follows:

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate
	2017	2016		
402	248	381	26 Oktober 2019/ October 26, 2019	12,50%
4.723	2.977	4.489	26 Oktober 2019/ October 26, 2019	12,50%
6.900	4.459	6.724	8 November 2019/ November 8, 2019	12,50%
4.630	3.049	4.516	11 November 2019/ November 11, 2019	12,50%
4.835	3.319	4.835	7 Desember 2019/ December 7, 2019	12,50%
3.510	2.410	3.510	20 Desember, 2019/ December 20, 2019	12,50%
5.000	4.641	-	28 September, 2020/ September 28, 2020	12,50%
7.000	6.481	-	28 September, 2020/ September 28, 2020	12,50%
7.500	7.141	-	28 September, 2020/ September 28, 2020	12,50%
2.000	1.904	-	12 September, 2020/ September 12, 2020	12,50%
3.000	2.855	-	27 September, 2020/ September 27, 2020	12,50%
11.500	10.946	-	30 September, 2020/ September 30, 2020	12,50%
4.000	3.807	-	18 September 2020/ September 18, 2020	12,50%
	54.237	24.455		

Fasilitas diberikan kepada MNCGU dengan pembatasan adalah:

- (i) rasio utang terhadap modal maksimal 8 kali, dan
- (ii) maksimal NPF 90 hari dikenakan 3%.

PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate
	2017	2016		
35.000	2.332	3.093	19 Agustus 2021/ August 19, 2021	15,00%

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK (continued)

PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk

MNCGU has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk, as follows:

Jaminan/ Collateral
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%

Facility is provided MNCGU with:

- (i) debt to equity maximal 8 times,
- (ii) maximal NPF 90 days is charged 3%.

PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk

MNCF has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk, as follows:

Jaminan/ Collateral
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 100%

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk (lanjutan)

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
1.273	181	839	29 Maret 2019/ March 29, 2019	15,00%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
3.787	1.048	2.937	17 Juni 2019/ June 17, 2019	14,00%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
581	-	414	22 Juni 2019/ June 22, 2019	7,8% - 15,00%	Piutang pembiayaan sebesar 110%/ Financing receivables equivalent to 110%
30.000	-	30.000	22 Juni 2019/ June 22, 2019	7,8% - 15,00%	Piutang pembiayaan sebesar 110%/ Financing receivables equivalent to 110%
7.236	7.236	-	19 Januari 2018/ January 19, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
1.294	1.294	-	24 Januari 2018/ January 24, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
4.132	4.132	-	24 Januari 2018/ January 24, 2018	13,75%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
2.595	2.595	-	24 Januari 2018/ January 24, 2018	13,75%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
4.000	4.000	-	24 Januari 2018/ January 24, 2018	13,75%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
1.500	1.500	-	7 Februari 2018/ February 7, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
21.882	21.882	-	19 Maret 2018/ March 19, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
2.366	2.366	-	21 Februari 2018/ February 21, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
4.900	4.900	-	21 Februari 2018/ February 21, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
	51.134	34.190			

Fasilitas diberikan kepada MNCF dengan gearing ratio maksimal 10 kali, maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%, maksimal NPL 60 hari dikenakan 4% dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3%. Sedangkan untuk MNCGU dengan pembatasan adalah:

- (i) rasio utang terhadap modal maksimal 8 kali,
- (ii) maksimal NPF 90 hari dikenakan 3%
- (iii) ROE minimal dikenakan 1% dan kovenan negatif harus mendapatkan persetujuan:
 - (i) untuk merger dan akuisisi;
 - (ii) belanja modal lebih dari 50% dari total aset;
 - (iii) mengumumkan perusahaan bangkrut dan
 - (iv) merubah bisnis perusahaan.

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK (continued)

PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk (continued)

MNCGU has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
1.273	181	839	29 Maret 2019/ March 29, 2019	15,00%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
3.787	1.048	2.937	17 Juni 2019/ June 17, 2019	14,00%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
581	-	414	22 Juni 2019/ June 22, 2019	7,8% - 15,00%	Piutang pembiayaan sebesar 110%/ Financing receivables equivalent to 110%
30.000	-	30.000	22 Juni 2019/ June 22, 2019	7,8% - 15,00%	Piutang pembiayaan sebesar 110%/ Financing receivables equivalent to 110%
7.236	7.236	-	19 Januari 2018/ January 19, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
1.294	1.294	-	24 Januari 2018/ January 24, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
4.132	4.132	-	24 Januari 2018/ January 24, 2018	13,75%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
2.595	2.595	-	24 Januari 2018/ January 24, 2018	13,75%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
4.000	4.000	-	24 Januari 2018/ January 24, 2018	13,75%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
1.500	1.500	-	7 Februari 2018/ February 7, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
21.882	21.882	-	19 Maret 2018/ March 19, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
2.366	2.366	-	21 Februari 2018/ February 21, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
4.900	4.900	-	21 Februari 2018/ February 21, 2018	13,50%	Piutang sewa pembiayaan 110%/ Finance lease receivables 110%
	51.134	34.190			

Facility is provided MNCF with maximum gearing ratio 10 times, maximum NPL 30 days is charged 5%, maximum NPL 60 days is charged 4% and maximum NPL 90 days is charged 3%. While MNCGU with:

- (i) debt to equity maximal 9 times,
- (ii) maximum NPF 90 days is charged 3%
- (iii) ROE minimum 1% and negative covenant must have approval are:
 - (i) conduct mergers and acquisitions;
 - (ii) capital expenditure over 50% from total assets
 - (iii) declare a bankrupt company.
 - (iv) change the company business

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

PT Bank CTBC Indonesia Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang digunakan untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank CTBC Indonesia Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			14 Agustus 2021/ August 14, 2021		Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 110% and fixed asset
45.000	29.759	44.453		10,5%-10,625%	

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 8 kali.

PT Bank Sinarmas Tbk

MNCS memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Sinarmas Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
20.000	20.000	-	31 Januari 2018/ January 31, 2018	9,00% - 10,00%	-

PT Bank Andara Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari Bank Andara sebagai berikut :

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			11 Oktober 2021/ October 11, 2021		Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 110% and housing loans equivalent to 100%
20.000	15.150	19.242		12% - 12,50%	

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 8 kali dan maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%, maksimal NPL 60 hari dikenakan 4%, dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 3%.

PT Bank INA Perdana Tbk

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank INA Perdana Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
230	-	122	11 November 2017/ November 11, 2017	13,75%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
355	-	173	8 Oktober 2017/ October 8, 2017	14,00%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK (continued)

PT Bank CTBC Indonesia Tbk

MNCF has long-term loan facilities which are used for working capital, obtained from PT Bank CTBC Indonesia Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			14 Agustus 2021/ August 14, 2021		Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110% dan aset tetap/ Consumer financing receivables equivalent to 110% and fixed asset
45.000	29.759	44.453		10,5%-10,625%	

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times.

PT Bank Sinarmas Tbk

MNCS has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Sinarmas Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
20.000	20.000	-	31 Januari 2018/ January 31, 2018	9,00% - 10,00%	-

PT Bank Andara Tbk

MNCF has long-term loan facilities for working capital, obtained from Bank Andara, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			11 Oktober 2021/ October 11, 2021		Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110% dan piutang pembiayaan rumah sebesar 100%/ Consumer financing receivables equivalent to 110% and housing loans equivalent to 100%
20.000	15.150	19.242		12% - 12,50%	

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times and maximum NPL 30 days is charged 5%, maximum NPL 60 days is charged 4% and maximum NPL 90 days is charged 3%.

PT Bank INA Perdana Tbk

MNCGU has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank INA Perdana Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
230	-	122	11 November 2017/ November 11, 2017	13,75%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
355	-	173	8 Oktober 2017/ October 8, 2017	14,00%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES – BANK (continued)

PT Bank INA Perdana Tbk

PT Bank INA Perdana Tbk

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
1.650	608	1.187	11 Januari 2018/ January 11, 2018	14,00%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
183	52	122	3 Agustus 2018/ August 3, 2018	14,00%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
2.100	549	1.280	5 Agustus 2018/ August 5, 2018	14,50%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			20 Agustus 2018/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/

Fasilitas diberikan kepada MNCGU dengan pembatasan adalah: rasio utang terhadap modal maksimal 10 kali dan kovenan negatif harus mendapatkan persetujuan:

- (i) perubahan pemegang saham;
- (ii) untuk merger dan akuisisi.

Facility is provided MNCGU with: debt to equity maximal 10 times and negative covenant must have approval are:

- (i) shareholder changes;
- (ii) conduct mergers and acquisitions.

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
715	200	466	August 20, 2018	14,00%	Certificate of Vehicle Ownership
			25 Desember 2018/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
223	67	157	December 25, 2018	14,00%	Certificate of Vehicle Ownership
			20 September 2018/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
1.430	436	949	September 20, 2018	14,00%	Certificate of Vehicle Ownership
			25 September 2018/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
4.934	1.436	3.129	September 25, 2018	14,00%	Certificate of Vehicle Ownership
			1 Oktober 2018/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
681	219	450	October 1, 2018	14,00%	Certificate of Vehicle Ownership
			3 Oktober 2018/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
1.175	396	813	October 3, 2018	14,00%	Certificate of Vehicle Ownership
			8 Oktober 2018/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
1.209	407	837	October 8, 2018	14,00%	Certificate of Vehicle Ownership
			25 Desember 2018/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
789	315	589	December 25, 2018	14,00%	Certificate of Vehicle Ownership
			6 Januari 2017/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
2.230	-	75	January 6, 2017	13,50%	Certificate of Vehicle Ownership
			30 Juni 2017/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
2.500	-	493	June 30, 2017	14,00%	Certificate of Vehicle Ownership
			20 September 2017/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
1.050	-	462	September 20, 2017	13,75%	Certificate of Vehicle Ownership
			22 September 2017/		Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/
3.209	-	1.309	September 22, 2017	13,75%	Certificate of Vehicle Ownership
	4.685	12.613			

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN - BANK(lanjutan)

PT Bank Harda Internasional Tbk

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Harda Internasional Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			1 Agustus 2017/		
1.264	-	1.123	August 1, 2017	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan/ Consumer financing receivables and finance lease receivables
			1 September 2018/		
1.727	-	1.727	September 1, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan/ Consumer financing receivables and finance lease receivables
	-	2.850			

PT Bank Jasa Jakarta Tbk

MNCGU memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Jasa Jakarta Tbk sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			21 Februari 2017/		
268	-	17	February 21, 2017	10,05%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			24 Februari 2017/		
97	-	6	February 24, 2017	10,94%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			26 Mei 2017/		
207	-	33	May 26, 2017	10,94%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			26 Mei 2017/		
3.793	-	599	May 26, 2017	10,94%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			7 Juli 2017/		
330	-	72	July 7, 2017	10,06%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			14 Juli 2017/		
320	-	69	July 14, 2017	10,06%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			19 Juli 2017/		
1.000	-	217	July 19, 2017	10,06%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			15 September 2017/		
1.148	-		September 15, 2017	9,72%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
		317			
	-	1.330			

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES - BANK (continued)

PT Bank Harda Internasional Tbk

MNCGU has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Harda Internasional Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			1 Agustus 2017/		
1.264	-	1.123	August 1, 2017	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan/ Consumer financing receivables and finance lease receivables
			1 September 2018/		
1.727	-	1.727	September 1, 2018	13,50%	Piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan/ Consumer financing receivables and finance lease receivables
	-	2.850			

PT Bank Jasa Jakarta Tbk

MNCGU has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Jasa Jakarta Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			21 Februari 2017/		
268	-	17	February 21, 2017	10,05%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			24 Februari 2017/		
97	-	6	February 24, 2017	10,94%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			26 Mei 2017/		
207	-	33	May 26, 2017	10,94%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			26 Mei 2017/		
3.793	-	599	May 26, 2017	10,94%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			7 Juli 2017/		
330	-	72	July 7, 2017	10,06%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			14 Juli 2017/		
320	-	69	July 14, 2017	10,06%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			19 Juli 2017/		
1.000	-	217	July 19, 2017	10,06%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
			15 September 2017/		
1.148	-		September 15, 2017	9,72%	Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB)/ Certificate of Vehicle Ownership
		317			
	-	1.330			

23. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN – BANK (lanjutan)

23. FINANCIAL INSTITUTIONS LIABILITIES – BANK (continued)

PT Bank Mayora Tbk

PT Bank Mayora Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk modal kerja yang diperoleh dari PT Bank Mayora Tbk sebagai berikut:

MNCF has several long-term loan facilities for working capital, obtained from PT Bank Mayora Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016		
20.000	11.405	-	11,00%	Piutang Pembiayaan konsumen Sebesar 100%/ Consumer financing receivable equivalent to 100%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 8 kali.

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times.

Berikut adalah pembayaran fasilitas utang bank pada tahun 31 Desember 2017 dan 2016:

The following are the payments on bank loan facilities in December 31, 2017 and 2016:

	2017	2016	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	366.812	291.065	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Capital Indonesia Tbk	281.546	1.019.421	PT Bank Capital Indonesia Tbk
PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk	119.827	53.772	PT Bank Sahabat Sampoerna Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	135.521	106.993	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	137.813	32.439	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	69.387	61.192	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk
PT BRI Syariah Tbk	37.500	-	PT BRI Syariah Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	62.353	41.958	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Ganesha Tbk	30.635	76.236	PT Bank Ganesha Tbk
PT Bank ICBC Indonesia Tbk	26.254	5.000	PT Bank ICBC Indonesia Tbk
PT Bank CTBC Indonesia Tbk	23.066	94.968	PT Bank CTBC Indonesia Tbk
PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk	25.046	2.101	PT Bank KEB Hana Indonesia Tbk
PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk	24.007	-	PT Bank Nusantara Parahyanagan Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk	18.325	7.157	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk
PT BPD Banten Tbk	11.646	-	PT BPD Banten Tbk
PT Bank INA Perdana Tbk	7.928	36.421	PT Bank INA Perdana Tbk
PT Bank Andara Tbk	4.162	-	PT Bank Andara Tbk
PT Bank Jasa Jakarta Tbk	1.294	-	PT Bank Jasa Jakarta Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp10 milyar)	1.751.733	18.146	Others (each below Rp10 billion)
Subjumlah	3.134.855	1.846.869	Subtotal
<u>Dolar Amerika Serikat</u>			<u>United States Dollar</u>
Bank Sinarmas	-	1.460	Bank Sinarmas
Jumlah	3.134.855	1.861.609	Total

24. LIABILITAS INSTITUSI KEUANGAN – NON BANK

Berikut adalah pembayaran fasilitas utang bank pada tahun 31 Desember 2017 dan 2016:

PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang untuk pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) yang diperoleh dari Sarana Multigriya Finansial (Persero) sebagai berikut:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
			15 Januari 2018/ January 15, 2018	10,85% - 11,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%/ Consumer financing receivables equivalent to 120%
50.000	6.498	7.238	19 Desember 2020/ December 19, 2020	11% - 11,88%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%/ Consumer financing receivables equivalent to 120%
35.000	15.544	22.369	28 Februari 2020/ February 28, 2020	9,00% - 9,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%/ Consumer financing receivables equivalent to 120%
10.000	-	2.998	31 Mei 2020/ May 31, 2020	9,00% - 9,25%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 120%/ Consumer financing receivables equivalent to 120%
100.000	8.364	10.585			
	30.406	43.190			

	2017	2016	
Bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun	30.406	25.295	Current portion 1 year
Bagian jangka panjang – bersih	-	-	Long-term loan – net
Jumlah	30.406	25.295	Total

Berdasarkan mata uang Rupiah 30.406 25.295 By currencies Rupiah

Biaya perolehan diamortisasi atas utang adalah sebagai berikut: The amortized cost of the loans are as follows:

	2017	2016	
Utang institusi keuangan non-bank	30.406	43.190	Loan non-bank financial institutions
Jumlah	30.406	43.190	Total

25. UTANG AL-MUSYARAKAH

25. AL-MUSYARAKAH LOAN

	2017	2016	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	328.904	277.632	PT Bank Muamalat Indonesia Tbk
PT Bank BNI Syariah Tbk	67.074	57.490	PT Bank BNI Syariah Tbk
PT Bank Syariah Mandiri Tbk	63.562	113.456	PT Bank Syariah Mandiri Tbk
PT Bank BCA Syariah Tbk	44.049	57.839	PT Bank BCA Syariah Tbk
PT Bank BRI Syariah Tbk	23.894	71.883	PT Bank BRI Syariah Tbk
PT Bank Victoria Syariah Tbk	22.450	15.478	PT Bank Victoria Syariah Tbk
PT Maybank Syariah Tbk	6.085	19.882	PT Maybank Syariah Tbk
PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tbk	-	60.812	PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tbk
Jumlah	556.018	674.472	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	(323.084)	(432.970)	Less current portion
Bagian jangka panjang	232.934	241.502	Long-term portion

25. UTANG AL-MUSYARAKAH (lanjutan)

	2017	2016
Berdasarkan mata uang		
Rupiah	556.018	643.108
Dolar Amerika Serikat	-	31.364
Jumlah	556.018	674.472

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
2017	2016			
		4 April 2020/		
93.000	15.925	April 4, 2020	11,50% -13,00%	Piutang pembiayaan AL- atas Motor dan Mobil, serta Alat Berat masing-masing sebesar 110% & 120%/ AL- financing receivable on Motorcycle & Car, also Heavy Equipment equivalent to 110% & 120%, respectively
223.000	-	16 Juli 2018/ July 16, 2018	11,25%	Piutang pembiayaan sebesar 100%/ Financing receivable, equivalent to 100%
178.295	115.079	12 Mei 2021/ May 12, 2021	11,00% - 12,00%	Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%
200.000	197.900	28 September 2021/ September 28, 2021	11,00% - 12,00%	Piutang pembiayaan atas motor dan mobil, serta Alat Berat masing-masing sebesar 110% & 120%/ financing receivable on Motorcycle and Car, also Heavy Equipment equivalent to 110% & 120%, respectively
	328.904			
	277.632			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 8 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2%.

PT Bank BNI Syariah Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank BNI Syariah Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
2017	2016			
		17 November 2019/		
100.000	67.074	November 17, 2019	11,00%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 105%/ AL- financing receivables equivalent to 105%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 10 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2%.

PT Bank Syariah Mandiri Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Syariah Mandiri Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
2017	2016			
		22 Juni 2017/		
19.000	-	June 22, 2017	11,00%	Investasi terkait syariah mandiri sebesar 95%/ "Investasi terkait syariah mandiri" equivalent to 95%
100.000	63.562	11 November 2020/	11,00%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 100%/ AL- financing receivable, equivalent to 100%
	63.562			
	113.456			

25. AL-MUSYARAKAH LOAN (continued)

	2017	2016	By currencies
Rupiah	556.018	643.108	Rupiah
United States Dollar	-	31.364	United States Dollar
Total	556.018	674.472	Total

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

MNCF has several long-term loan facilities obtained from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk, as follows:

Piutang pembiayaan AL- atas Motor dan Mobil, serta Alat Berat masing-masing sebesar 110% & 120%/ AL- financing receivable on Motorcycle & Car, also Heavy Equipment equivalent to 110% & 120%, respectively

Piutang pembiayaan sebesar 100%/ Financing receivable, equivalent to 100%

Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/ Consumer financing receivable, equivalent to 110%

Piutang pembiayaan atas motor dan mobil, serta Alat Berat masing-masing sebesar 110% & 120%/ financing receivable on Motorcycle and Car, also Heavy Equipment equivalent to 110% & 120%, respectively

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times and maximum NPL 90 days is charged 2%.

PT Bank BNI Syariah Tbk

MNCF has a long-term loan facility obtained from PT Bank BNI Syariah Tbk, as follows:

Piutang pembiayaan AL- sebesar 105%/ AL- financing receivables equivalent to 105%

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 10 times and maximum NPL 90 days is charged 2%.

PT Bank Syariah Mandiri Tbk

MNCF has several long-term loan facilities obtained from PT Bank Syariah Mandiri Tbk, as follows:

Investasi terkait syariah mandiri sebesar 95%/ "Investasi terkait syariah mandiri" equivalent to 95%

Piutang pembiayaan AL- sebesar 100%/ AL- financing receivable, equivalent to 100%

25. UTANG AL-MUSYARAKAH (lanjutan)

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 8 kali.

PT Bank BCA Syariah Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank BCA Syariah Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
	20	20	
	17	16	
		57.	24 November 2021/
	44.0	83	November
60.000	49	9	24, 2021

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 10 kali dan maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%.

PT Bank BRI Syariah Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank BRI Syariah Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
			1 Desember 2020/
50.000	4.386	14.980	December 1, 2020
			17 April 2022/
80.000	2.835	-	April 17, 2022
			25 November 2019/
150.000	16.673	56.903	November 25, 2019
	23.894	71.883	

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 10 kali dan maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%.

PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
Rupiah	US\$		
			15 Juli 2018/
-	7.500.000	-	31.155
			July 15, 2018
			15 Juli 2019/

25. AL-MUSYARAKAH LOAN (continued)

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times.

PT Bank BCA Syariah Tbk

MNCF has several long-term loan facilities obtained from PT Bank BCA Syariah Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	Piutang pembiayaan AL- sebesar 110%/
11,50% - 14,50%	AL- financing receivables equivalent to 110%

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 10 times and maximum NPL 30 days is charged 5%.

PT Bank BRI Syariah Tbk

MNCF has several long-term loan facilities obtained from PT Bank BRI Syariah Tbk, as follows:

Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	Fidusia piutang nasabah sebesar minimal 105%/
11,00% - 13,50%	Fiduciary customer receivables at least 105%
	Fidusia piutang nasabah sebesar minimal 105%/
12,00%	Fiduciary customer receivables at least 105%
	Fidusia piutang nasabah sebesar minimal 105%/
12,00% - 13,00%	Fiduciary customer receivables at least 105%

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 10 times and maximum NPL 30 days is charged 5%.

PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tbk

MNCF has several long-term loan facilities obtained from Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, as follows:

Nisbah/ Profit sharing	Jaminan/ Collateral
	Fidusia piutang sewa pembiayaan sebesar minimal 110%/
6,20%	Fiduciary lease receivables at least 110%
	Fidusia piutang sewa pembiayaan sebesar minimal 110%/

25. UTANG AL-MUSYARAKAH (lanjutan)

PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tbk

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date
	2017	2016	
75.000	-	-	18.083
			July 15, 2019
			15 Juli 2019/
100.000	2.500.000	-	11.574
			July 15, 2019
175.000	10.000.000	-	60.812

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF adalah dengan maksimal gearing ratio 6 kali dan maksimal NPL 30 hari dikenakan 5%.

PT Bank Victoria Syariah Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari Bank Victoria Syariah yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate
	2017	2016		
			3 Maret 2020/	
25.000	9.950	13.932	March 3, 2020	12,00%-14,00%
			9 September 2022/	
50.000	-	1.546	September 9, 2022	11,50%
			3 Desember 2023/	
15.000	12.500	-	December 3, 2023	11,50% - 12,00
	22.450	15.478		

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 9 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 5%.

PT Maybank Syariah Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Maybank Syariah Tbk yaitu

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate
	2017	2016		
			25 Desember 2019/	
50.000	6.085	19.882	December 25, 2019	12,00%

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 8 kali dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2,5%.

25. AL-MUSYARAKAH LOAN (continued)

PT Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia Tbk

Nisbah/ Profit sharing	Jaminan/ Collateral
10,00%	Fiduciary lease receivables at least 110%
	Fidusia piutang sewa pembiayaan sebesar minimal 110%/
10,00%	Fiduciary lease receivables at least 110%

Facility is provided to MNCF is with maximum gearing ratio 6 times and maximum NPL 30 days is charged 5%.

PT Bank Victoria Syariah Tbk

MNCF has several long-term loan facilities obtained from Bank Victoria Syariah, as follows:

Jaminan/ Collateral
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/
Consumer financing receivable, equivalent to 110%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 100%/
Consumer financing receivable, equivalent to 100%
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/
Consumer financing receivable, equivalent to 110%

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 9 times and maximum NPL 90 days is charged 5%.

PT Maybank SyariahTbk

MNCF has a long-term loan facility obtained from PT Maybank Syariah Tbk, as follows:

Jaminan/ Collateral
Piutang pembiayaan konsumen sebesar 110%/
Consumer financing receivable, equivalent to 110%

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 8 times and maximum NPL 90 days is charged 2.5%.

26. UTANG AL-MUDHARABAH

26. AL- MUDHARABAH LOAN

	2017	2016	
<u>Pihak ketiga</u>			<u>Third parties</u>
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	56.384	-	PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk
PT Bank Sinarmas Tbk - unit Syariah	33.191	106.876	PT Bank Sinarmas Tbk - unit Syariah
PT Bank Jateng Syariah Tbk	15.492	31.822	PT Bank Jateng Syariah Tbk
PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk	-	1.756	PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk
Jumlah	105.067	140.454	Total
Dikurangi bagian jangka pendek	(47.042)	(73.451)	Less current portion
Bagian jangka panjang	58.025	67.003	Long-term portion

PT Bank Sinarmas Tbk - unit Syariah

PT Bank Sinarmas Tbk - unit Syariah

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PTBank Sinarmas Tbk-unit Syariah yaitu:

MNCF has several long-term loan facilities obtained from PT Bank Sinarmas Tbk - unit Syariah, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
2017	2016			
		11 November 2020/ November 11, 2020	11,50% - 12%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 105%/ AL- financing receivables, equivalent to 105%
100.000	-	22 Mei 2020/ May 22, 2020	11%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 105%/ AL- financing receivables, equivalent to 105%
100.000	-	20 Maret 2021/ March 20, 2021	14,00%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 110%/ AL- financing receivables, equivalent to 110%
50.000	9.851	26 November 2021/ November 26, 2021	13%-13,50%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 110%/ AL- financing receivables, equivalent to 110%
	23.340			
	39.680			
	<u>33.191</u>			
	<u>106.876</u>			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal NPL 90 hari dikenakan 4%.

Facility is provided to MNCF with maximum NPL 90 days is charged 4%.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Panin Dubai Syariah yaitu:

MNCF has several long-term loan facilities obtained from PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
2017	2016			
		15 Maret 2021/ March 15, 2021	11,50%-14,00%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 100%/ AL- financing receivables, equivalent to 100%
100.000	56.384			
	-			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal gearing ratio 10 kali.

Facility is provided to MNCF with maximum gearing ratio 10 times.

PT Bank Jateng Syariah Tbk

PT Bank Jateng Syariah Tbk

MNCF memiliki fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Jateng Syariah Tbk yaitu:

MNCF has a long-term loan facility obtained from PT Bank Jateng Syariah Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan	Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
2017	2016			
		7 April 2021/ April 7, 2021	11,50%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 105%/ AL- financing receivables, equivalent to 105%
40.000	15.492			
	31.822			

Fasilitas yang diberikan kepada MNCF dengan maksimal NPL 30 hari dikenakan 4% dan maksimal NPL 90 hari dikenakan 2%.

Facility is provided to MNCF with maximum NPL 30 days is charged 4% and maximum NPL 90 days is charged 2%.

26. UTANG AL-MUDHARABAH (lanjutan)

PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk

MNCF memiliki beberapa fasilitas pinjaman jangka panjang yang diperoleh dari PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk yaitu:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
100.000	-	1.618	19 April 2019/ April 19, 2019	12,00%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 100%/ AL- financing receivables, equivalent to 100%
85.000	-	138	10 Oktober 2020/ October 10, 2020	11,00%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 100%/ AL- financing receivables, equivalent to 100%
	-	1.756			

26. AL- MUDHARABAH LOAN (continued)

PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk

MNCF has several long-term loan facilities obtained from PT Bank Jabar Banten Syariah Tbk, as follows:

Jumlah fasilitas/ Facility amount	Saldo terutang/ Outstanding loan		Tanggal jatuh tempo/ Due date	Tingkat suku bunga/ Interest rate	Jaminan/ Collateral
	2017	2016			
100.000	-	1.618	19 April 2019/ April 19, 2019	12,00%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 100%/ AL- financing receivables, equivalent to 100%
85.000	-	138	10 Oktober 2020/ October 10, 2020	11,00%	Piutang pembiayaan AL- sebesar 100%/ AL- financing receivables, equivalent to 100%
	-	1.756			

27. UTANG OBLIGASI

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
<u>Utang Obligasi</u>		
Obligasi Berkelanjutan I		
MNC Kapital Indonesia	225.000	225.000
Dikurangi biaya penerbitan obligasi yang belum diamortisasi	(498)	(1.689)
Jumlah	224.502	223.311

27. BONDS PAYABLE

This account consist of:

	2017	2016
<u>Bonds Payable</u>		
Sustainable Bonds I		
MNC Kapital Indonesia	225.000	225.000
Less unamortized cost of bond issuance	(498)	(1.689)
Total	224.502	223.311

Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia

Pada tanggal 28 Juni 2013, Entitas memperoleh pernyataan efektif dari Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dengan suratnya NO. S-203/D.04/2013 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp500.000 juta. Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Entitas menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I MNC kapital indonesia tahap I Tahun 2013 dengan Tingkat Bunga Tetap sebesar 12% per tahun dengan pokok obligasi maksimal sebesar Rp300.000 juta dengan jangka waktu 5 tahun. Obligasi tersebut dicatatkan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 8 Juli 2013, dengan pokok obligasi sebesar Rp225.000 juta.

Sebelum dilunasinya semua jumlah terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Entitas sehubungan dengan penerbitan obligasi, Entitas harus memenuhi beberapa persyaratan, antara lain, (1) memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi 2:1, (2) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman minimal 1,5:1 dan (3) menjaga saham Entitas dikendalikan atau Entitas dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50% oleh PT MNC Investama Tbk (dahulu PT Bhakti Investama Tbk) selama jangka waktu obligasi.

Sustainable Bonds I MNC Kapital Indonesia

On June 28, 2013, the Entity obtained the effective notice from the Commissioner of the Capital Markets Supervisory Board (OJK) in his letter No. S-203/D/04/2013 for the Public Offering of Sustainable Bonds I MNC Kapital Indonesia with fund-raising target of Rp500,000 million. In connection with the Public Offering of Sustainable Bonds, the Entity issued Sustainable Bonds I MNC Kapital Indonesia Phase I Year 2013 with fixed rate of 12% per annum with principal maximum amount of Rp300,000 million with term of 5 years. The bonds were listed on the Indonesia Stock Exchange on July 8, 2013 with nominal amount of Rp225,000 million.

Before repayment of all amounts payable or other expenses that are the responsibility of the Entity in connection with the issuance of bonds, the Entity shall fulfill certain requirements, among others, (1) maintain a debt to equity ratio of less than 2:1, (2) maintain a ratio between EBITDA with loan interest expense at a minimum of 1.5:1 and (3) maintain control of the Entity or the ownership of the Entity, directly or indirectly, of more than 50% by PT MNC Investama Tbk (formerly PT Bhakti Investama Tbk) during the term of the bonds.

28. MEDIUM TERM NOTES

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016	
<i>Medium Term Notes</i>			<i>Medium Term Notes</i>
MTN MNC Securities I – Seri A	-	27.000	MTN MNC Securities I – Series A
MTN MNC Securities I – Seri B	-	4.000	MTN MNC Securities I – Series B
Dikurangi biaya emisi MTN yang belum Diamortisasi		(229)	Less unamortized MTN issuance cost
MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri A	21.000	-	MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri A
Dikurangi biaya emisi MTN yang belum Diamortisasi	(343)		Less unamortized MTN issuance cost
MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri B	50.000	-	MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri B
Dikurangi biaya emisi MTN yang belum Diamortisasi	(951)		Less unamortized MTN issuance cost
Jumlah	69.706	30.771	Total

Medium Term Notes MNC Securities I

Pada 17 Mei 2016, MNCS menerbitkan Medium Term Notes (MTN) I Tahun 2016 Seri A dan B, masing-masing sebesar Rp27.000 juta dan Rp4.000 juta dengan tingkat bunga 12,5% per tahun. Jangka waktu MTN adalah 36 bulan, jatuh tempo 17 Mei 2019, dengan PT Bank Mega Tbk, pihak ketiga, sebagai agen pemantau.

Tidak ada jaminan yang diberikan oleh MNCS sehubungan dengan surat utang MTN.

Medium Term Notes MNC Securities I

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, No. 633/PEF-Dir/IV/2016, peringkat MTN I MNC Securities adalah id.BBB (Triple B, stable outlook) untuk periode 11 April 2016 sampai dengan 1 April 2017.

Pembayaran bunga MTN dilakukan setiap bulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 17 Agustus 2016, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir adalah pada tanggal 17 Mei 2019.

MNCS telah melunasi seluruh utang pokok MTN MNC Securities I Tahun 2016 Seri A dan Seri B pada tanggal 14 Juli 2017.

Medium Term Notes MNC Guna Usaha Indonesia

Pada 24 Agustus 2017, MNCGUI menerbitkan Medium Term Notes (MTN) Seri A dan B, masing-masing sebesar Rp21.000 juta dan Rp50.000 juta dengan tingkat bunga 10,75% dan 11,00% per tahun. Jangka waktu MTN adalah 370 hari dan 18 bulan, jatuh tempo 7 September 2018 dan 28 Februari 2019, dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, pihak ketiga, sebagai agen jaminan dan agen pemantau.

28. MEDIUM TERM NOTES

This account consist of:

	2017	2016	
<i>Medium Term Notes</i>			<i>Medium Term Notes</i>
MTN MNC Securities I – Seri A	-	27.000	MTN MNC Securities I – Series A
MTN MNC Securities I – Seri B	-	4.000	MTN MNC Securities I – Series B
Dikurangi biaya emisi MTN yang belum Diamortisasi		(229)	Less unamortized MTN issuance cost
MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri A	21.000	-	MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri A
Dikurangi biaya emisi MTN yang belum Diamortisasi	(343)		Less unamortized MTN issuance cost
MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri B	50.000	-	MTN Guna Usaha Indonesia I – Seri B
Dikurangi biaya emisi MTN yang belum Diamortisasi	(951)		Less unamortized MTN issuance cost
Jumlah	69.706	30.771	Total

MNC Securities Medium Term Notes I

On May 17, 2016, MNCS issued Medium Term Notes (MTN) I Year 2016 Series A and B amounting to Rp27,000 million and Rp4,000 million, respectively, with interest rate of 12.5% per annum. The MTN has a term of 36 months, due on May 17, 2019, with PT Bank Mega Tbk, third party, as monitoring agent.

There is no collateral given by MNCS related to MTN debt securities.

MNC Securities Medium Term Notes I

Based on the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, No. 633/PEF-Dir/IV/2016, MNCS MTN I rating is id.BBB (Triple B, stable outlook) for the period from April 11, 2016 to April 1, 2017.

Interest is payable every month. First payment of interest was due on August 17, 2016, and the final payment of interest will be due on May 17, 2019.

MNCS has settled the principal amount of MTN MNC Securities I Year 2016 Series A and Series B on July 14, 2017.

MNC Guna Usaha Indonesia Medium Term Notes

On August 24, 2017, MNCGUI issued Medium Term Notes (MTN) Series A dan B amounting to Rp21,000 million and Rp50,000 million, respectively, with interest rate of 10.75% and 11.00% per annum. The MTN has a term of 370 days and 18 months, due on September 7, 2018 and February 28, 2019, with PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, third party, as guarantor agent and monitoring agent.

28. MEDIUM TERM NOTES (lanjutan)

MTN dijamin dengan piutang usaha sebesar 100% dan Jaminan Entitas (*Corporate Guarantee*) dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk sebagai induk entitas.

Berdasarkan hasil pemeringkatan PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak ketiga, No. RC-609/PEF-DIR/VII/2017, peringkat MTN MNCGUI adalah id.BBB (*Triple B, Corporate Guarantee*) untuk periode 13 Juli 2017 sampai dengan 1 Mei 2018.

Pembayaran bunga MTN dilakukan setiap Triwulan. Pembayaran bunga pertama dilakukan pada tanggal 28 November 2017, sedangkan pembayaran bunga MTN terakhir adalah pada tanggal 27 Februari 2019.

29. UTANG SEWA PEMBIAYAAN

PT MNC Finance (MNCF) dan PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGU), Entitas anak, memperoleh pinjaman untuk membeli kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

	2017	2016
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Toyota Astra Finance	44.895	15.478
PT BCA Finance	1.750	2.186
PT Mandiri Tunas Finance	749	-
Jumlah	47.394	17.664

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGU dan MNCF dari PT Toyota Astra Finance berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal 26 Januari 2016 sampai dengan 11 November 2020. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 10,00%-12,00% per tahun. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp44.895 juta dan Rp15.478 juta.

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGU dari PT BCA Finance berjangka waktu 39 bulan sejak tanggal 20 September 2014 sampai dengan 29 Desember 2017. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 13,40% - 14,89% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, saldo pinjaman atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp1.750 juta dan Rp2.186 juta.

Fasilitas pinjaman yang dimiliki MNCGU dari PT Mandiri Tunas Finance berjangka waktu 36 bulan sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan 30 Juni 2020. Tingkat bunga yang dibebankan adalah 10,00% per tahun.

28. MEDIUM TERM NOTES (continued)

MTN guarantee with financing receivables equivalent to 100% and a Corporate Guarantee of MNC Kapital Indonesia Tbk as the holding Entity.

Based on the rating result from PT Pemeringkat Efek Indonesia, third party, No. RC-609/PEF- DIR/VII/2017, MNCGUI MTN rating is id.BBB (*Triple B, Corporate Guarantee*) for the period from July 13, 2017 to May 1, 2018.

Interest is payable three months. First payment of interest was due on November 28, 2017, and the final payment of interest will be due on February 27, 2019.

29. OBLIGATIONS UNDER FINANCE LEASE

PT MNC Finance (MNCF) and PT MNC Guna Usaha Indonesia (MNCGU), subsidiaries, obtained loans to finance their acquisitions of vehicles, with details as follows:

	<u>Third parties</u>
	PT Toyota Astra Finance
	PT BCA Finance
	PT Mandiri Tunas Finance
	Total

The credit facility of MNCGU and MNCF from PT Toyota Astra Finance has a term of 36 months from January 26, 2016 to November 11, 2020. This facility is secured by the financed vehicles with interest at 10.00%-12.00% per annum. As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding loan balance of this facility amounted to Rp44,895 million and Rp15,478 million, respectively.

The credit facility of MNCGU from PT BCA Finance has a term of 39 months from September 20, 2014 to December 29, 2017. This facility is secured by the financed vehicles with interest at 13.40% - 14.89% per annum.

As of December 31, 2017 and 2016, the outstanding loan balance of these facilities amounted to Rp1,750 million and Rp2,186 million, respectively.

The credit facility of MNCGU from PT BCA Finance has a term of 36 months from July 31, 2017 to June 30, 2020. This facility is secured by the financed vehicles with interest at 10.00% per annum.

29. UTANG SEWA PEMBIAYAAN (lanjutan)

Pembayaran sewa pembiayaan minimum dimasa yang akan datang pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Sampai dengan 1 tahun	733	628
Lebih dari 1 tahun – 5 tahun	53.153	20.216
Jumlah	53.886	20.844
Bunga yang belum jatuh tempo	(6.492)	(3.180)
Utang sewa pembiayaan	47.394	17.664
Bagian jatuh tempo dalam 1 tahun	(601)	(305)
Bagian jangka panjang	46.793	17.359

29. OBLIGATIONS UNDER FINANCE LEASE (continued)

Future minimum lease payments as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

Within 1 year
Between 1 and 5 years
Total
Interest
Obligation under capital lease
Current portion
Long term portion

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA

a. Program Pensiun Iuran Pasti

BMNCI menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh DPLK Manulife Indonesia. Iuran ini berasal dari 2,00% gaji pokok yang dibayarkan karyawan, dan 3,50% sampai 10,00% dibayarkan oleh BMNCI per bulan.

b. Imbalan Pasca Kerja - Imbalan Pasti

Kelompok Usaha memberikan imbalan pasca kerja untuk karyawan sesuai dengan Undang Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan sehubungan dengan imbalan pasca kerja ini. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pasti pasca-kerja tersebut masing-masing 2.726 dan 2.628 karyawan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain

BMNCI memberikan imbalan kerja jangka panjang lain berupa cuti besar kepada karyawan yang memenuhi persyaratan ditentukan berdasarkan pada masa kerja.

Program pensiun imbalan pasti memberikan eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko aktuarial seperti risiko tingkat bunga dan risiko gaji.

Risiko Tingkat Bunga

Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program.

30. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION

a. Defined Contribution Pension Plan

BMNCI provides defined contribution pension plan for all of their permanent employees, which is managed by DPLK Manulife Indonesia. Contribution to the pension plan consists of a payment of 2.00% of basic salary paid by the employee and 3.50% up to 10.00% contributed by BMNCI per month.

b. Defined Employment Benefits

The Group provides defined post-employment benefits to its employees in accordance with Labor Law No. 13/2003. No funding has been made to this defined benefit plan. The number of employees entitled to post employment benefits are 2,726 and 2,628 employees as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

c. Other Long-term Employee Benefits

BMNCI provides other long-term benefits such as sabbatical leaves to qualifying employees determined based on years of service.

The defined benefit pension plan typically exposes the Group to actuarial risks such as interest rate risk and salary risk.

Interest rate risk

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability.

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (lanjutan)

Risiko Gaji

Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

Beban imbalan pasca kerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut :

	2017		
	Imbalan pasca- kerja/ Post employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total
Diakui pada laba rugi			
Biaya jasa kini	14.385	1.443	15.828
Biaya jasa lalu	(3.572)	-	(3.572)
Beban bunga neto	5.217	186	5.403
Keuntungan aktuarial – bersih	-	(421)	(421)
Beban terminasi	908	-	908
Penyesuaian	(135)	-	(135)
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	16.803	1.208	18.011
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti- neto			
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	6.848	-	6.848
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(7.004)	-	(7.004)
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(156)	-	(156)
Jumlah	16.647	1.208	17.855

30. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

c. Other Long-term Employee Benefits (continued)

Salary risk

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. As such, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan's liability.

Amounts recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income in respect of the defined benefit plan are as follows:

Recognized in profit or loss
Current service cost
Past service cost
Net interest expense
Actuarial gain – net
Termination cost
Adjustment
Components of defined benefit costs recognized in profit or loss
Remeasurement on the net defined benefit liability
Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Total

	2016		
	Imbalan pasca- kerja/ Post employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total
Diakui pada laba rugi			
Biaya jasa kini	13.765	1.304	15.069
Biaya jasa lalu	(3.719)	(51)	(3.770)
Beban bunga neto	4.709	181	4.890
Keuntungan aktuarial – bersih	-	(168)	(168)
Beban terminasi	593	-	593
Penyesuaian	224	-	224
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	15.572	1.266	16.838

Recognized in profit or loss
Current service cost
Past service cost
Net interest expense
Actuarial gain – net
Termination cost
Adjustment
Components of defined benefit costs recognized in profit or loss

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (lanjutan)

2016			
	Imbalan pasca-kerja/ Post employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti- neto			Remeasurement on the net defined benefit liability
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	6.519	-	6.519 Actuarial gains and losses arising from changes in demographic assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(3.793)	-	(3.793) Actuarial gains and losses arising from changes in financial assumptions
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(599)	-	(599) Actuarial gains and losses arising from experience adjustments
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	2.127	-	2.127 Components of defined benefit costs recognized in other comprehensive income
Jumlah	17.699	1.266	18.965 Total

Jumlah tercatat di laporan posisi keuangan konsolidasian yang timbul dari liabilitas terkait dengan imbalan kerja selain pensiun iuran pasti adalah sebagai berikut:

The amounts included in the consolidated statements of financial position arising from the obligation in respect of the employee benefits other than defined contributions are as follows:

	2017	2016	
Imbalan pasca – kerja	71.748	64.403	Post – employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	1.847	1.508	Other long – term benefits
Jumlah	73.595	65.911	Total

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasca kerja pada periode berjalan adalah sebagai berikut:

Movements in the present values of employee benefits obligation are as follows:

2017			
	Imbalan pasca-kerja/ Post employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total
Kewajiban imbalan pasti – awal	64.403	1.508	65.911
Biaya jasa kini	14.385	1.443	15.828
Biaya bunga	5.217	186	5.403
Keuntungan akturia bersih	-	(421)	(421)
			Opening defined benefit obligation
			Current service cost
			Interest cost
			Actuarial gain – net

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

c. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lain (lanjutan)

	2017		
	Imbalan pasca- kerja/ Post employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total
Pengukuran kembali (keuntungan/ kerugian):			
Keuntungan dan kerugian actuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	6.848	-	6.848
Keuntungan dan kerugian actuarial yang timbul dari penyesuaian atas Pengalaman	(6.582)	-	(6.582)
Biaya jasa lalu, termasuk keuntungan dari kurtailmen	(3.572)	-	(3.572)
Pembayaran manfaat	(8.816)	(869)	(9.685)
Penyesuaian	(135)	-	(135)
Kewajiban imbalan pasti – akhir	71.748	1.847	73.595

	2016		
	Imbalan pasca- kerja/ Post employment benefits	Imbalan kerja jangka panjang lainnya/ Other long term benefits	Jumlah/ Total
Kewajiban imbalan pasti – awal	52.605	1.300	53.905
Biaya jasa kini	13.765	1.304	15.069
Biaya bunga	4.709	181	4.890
Keuntungan akturia bersih	-	(168)	(168)
Pengukuran kembali (keuntungan/ kerugian):			
Keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografik	6.519	-	6.519
Keuntungan dan kerugian actuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(3.793)	-	(3.793)
Keuntungan dan kerugian actuarial yang timbul dari penyesuaian atas pengalaman	(599)	-	(599)
Biaya jasa lalu, termasuk keuntungan dari kurtailmen	(3.719)	(51)	(3.770)
Pembayaran manfaat	(5.308)	(1.058)	(6.366)
Penyesuaian	224	-	224
Kewajiban imbalan pasti - akhir	64.403	1.508	65.911

30. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

c. Other Long-term Employee Benefits (continued)

Remeasurement (gains/ losses):

Actuarial gains and losses
arising from changes in
financial assumptions
Actuarial gains and losses
arising from experience
adjustments
Past service cost, including gains
on curtailments
Benefits paid
Adjustment
Closing defined benefit
obligation

Opening defined benefit
obligation
Current service cost
Interest cost
Actuarial gain – net
Remeasurement (gains/ losses):
Actuarial gains and losses
arising from changes in
demographic assumptions
Actuarial gains and losses
arising from changes in
financial assumptions
Actuarial gains and losses
arising from experience
adjustments
Past service cost, including
gains on curtailments
Benefits paid
Adjustment
Closing defined benefit
obligation

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Perhitungan imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lain tahun 2017 dan 2016 dihitung oleh aktuaris independen, Padma Radya Aktuaria dan Dayamandiri Dharmakonsilindo. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian aktuarial adalah sebagai berikut:

	2017
Tingkat diskonto per tahun	6,75% - 7,35%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00% - 10,00%
Tingkat kematian	100% TMI3

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

- Jika tingkat diskonto lebih tinggi (lebih rendah) 100 basis poin, kewajiban imbalan pasti akan berkurang sebesar Rp65.617 juta (meningkat sebesar Rp76.081 juta).
- Jika pertumbuhan gaji yang diharapkan naik (turun) sebesar 1%, kewajiban imbalan pasti akan naik sebesar Rp76.378 juta turun sebesar Rp63.070 juta).

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari kewajiban imbalan pasca kerja yang tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than a year</i>	1 sampai 5 tahun/ <i>Between 1 to 5 years</i>	5 sampai 10 tahun/ <i>Between 5 to 10 years</i>
Imbalan pasca kerja	757	5.165	16.861
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	673	6.399	4.747

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode projected unit credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

30. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

The cost of providing post-employment and other long-term employee benefits for 2017 and 2016 is calculated by an independent actuaries, Padma Radya Aktuaria and Dayamandiri Dharmakonsilindo. The actuarial valuation was carried out using the following key assumptions:

	2016	
Tingkat diskonto per tahun	8,25% - 9,10%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan gaji per tahun	5,00% - 10,00%	Salary increment rate per annum
Tingkat kematian	100% TMI3	Mortality rate

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined benefits obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

- If the discount rate increases (decrease) by 100 basis point, post-employment benefit obligation will decrease by Rp65,617 million (increase by Rp76,081 million).
- If the expected salary growth increases (decreases) by 1%, the post-employment benefit obligation would increase by Rp76,378 million (decrease by Rp63,070 million).

Expected maturity analysis of post-employment benefits obligation are as follows:

	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than a year</i>	1 sampai 5 tahun/ <i>Between 1 to 5 years</i>	5 sampai 10 tahun/ <i>Between 5 to 10 years</i>	Lebih dari 10 tahun/ <i>Over 10 years</i>	Jumlah/ Total	
Imbalan pasca kerja	757	5.165	16.861	48.302	71.085	Post – employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	673	6.399	4.747	5.527	17.346	Other long – term benefits

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the post-employment benefits obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the post-employment benefits obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the post-employment benefits obligation liability recognized in the consolidated statement of financial position.

30. LIABILITAS IMBALAN PASCA KERJA (lanjutan)

Rata-rata durasi kewajiban imbalan pasti adalah 13 tahun dan 11 tahun masing-masing pada 31 Desember 2017 dan 2016.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

30. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATION (continued)

The weighted average duration of the defined benefits obligation is 13 years and 11 at December 31, 2017 and 2016, respectively.

There was no change in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

31. LIABILITAS LAIN-LAIN

Akun ini terdiri dari:

31. OTHER LIABILITIES

This account consist of:

	2017	2016	
Liabilitas surat berharga repo	140.000	159.941	Securities repo payables
Biaya yang masih harus dibayar	116.107	66.535	Accrued expenses
Bunga yang masih harus dibayar			Accrued interest
Simpanan (Catatan 18)	33.275	32.304	Deposits (Note 18)
Simpanan dari bank lain (Catatan 19)	6	60	Deposits from other banks (Note 19)
Utang bank dan institusi keuangan non-bank (Catatan 23)	9.443	11.048	Loan from bank and non-bank financial institutions (Note 23)
Utang klaim	15.434	2.716	Claim liabilities
Pendapatan diterima dimuka	14.412	17.280	Prepaid income
Liabilitas akseptasi	1.522	89.276	Acceptances payables
Liabilitas derivative	95	3.576	Derivative payables
Liabilitas lainnya	23.615	2.589	Other liabilities
Jumlah	353.910	385.325	Total

Pada tahun 2017, Kelompok Usaha melakukan perjanjian membeli kembali efek dengan rincian sebagai berikut:

In 2017, the Group entered into security repurchase agreements with details as follows:

Tanggal mulai / Starting date	Nilai pokok / Principal amount	Bunga / Interest	Tanggal jatuh tempo / Due date
24 Nopember / November 24, 2016	40.000	16%	19 Februari / February 19, 2018
25 Januari / January 25, 2017	50.000	16%	18 Januari / January 18, 2018
8 November / November 8, 2017	50.000	13%	8 Mei / May 8, 2018
Jumlah	140.000		Total

32. MODAL SAHAM

Akun ini terdiri dari:

32. CAPITAL STOCK

This account consist of:

	2017			
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Stock	Name of Stockholder
PT MNC Investama Tbk	3.824.398.989	69,89%	382.440	PT MNC Investama Tbk
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd	505.900.000	9,24%	50.590	UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd
HT Capital Investment Ltd	389.815.162	7,12%	38.982	HT Capital Investment Ltd
Darma Putra (Komisaris Utama)	2.240.000	0,04%	224	Darma Putra (President Commissioner)
Tien (Komisaris)	992.000	0,02%	99	Tien (Commissioner)
Totok Sugiharto (Direktur)	200.000	0,00%	20	Totok Sugiharto (Director)
Masyarakat lainnya (kepemilikan masing-masing kurang dari 1%)	749.292.167	13,69%	74.929	Public (less than 1% each)
Jumlah	5.472.838.318	100%	547.284	Total

32. MODAL SAHAM (lanjutan)

32. CAPITAL STOCK (continued)

Pemegang Saham	2016			Name of Stockholder
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah Modal Disetor/ Total Paid-up Capital Stock	
PT MNC Investama Tbk	3.764.495.789	68,79%	376.450	PT MNC Investama Tbk
UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd	505.900.000	9,24%	50.590	UOB Kay Hian (Hong Kong) Ltd
HT Capital Investment Ltd	389.815.162	7,12%	38.982	HT Capital Investment Ltd
Darma Putra (Komisaris Utama)	2.240.000	0,04%	224	Darma Putra (President Commissioner)
Tien (Komisaris)	992.000	0,02%	99	Tien (Commissioner)
Purnadi Harjono (Direktur)	804.700	0,01%	80	Purnadi Harjono (Director)
Totok Sugiharto (Direktur)	200.000	0,00%	20	Totok Sugiharto (Director)
Masyarakat lainnya (kepemilikan masing-masing kurang dari 1%)	808.390.667	14,78%	80.839	Public (less than 1% each)
Jumlah	5.472.838.318	100%	547.284	Total

Perubahan jumlah saham beredar adalah sebagai berikut:

The changes in the number of stock are as follows:

	Jumlah saham/ Number of shares	
Saldo per 1 Januari 2016	4.689.385.060	Balance as of January 1, 2016
Penerbitan saham tanpa hak memesan terlebih dahulu (non-HMETD)	232.207.479	Issuance of shares without preemptive rights (non-HMETD)
Penerbitan saham dengan pelaksanaan waran	549.519.579	Issuance of shares through exercise of warrants
Pelaksanaan opsi saham karyawan (Catatan 33)	1.726.200	Exercise of employee stock options (Note 33)
Saldo per 31 Desember 2016	5.472.838.318	Balance as of December 31, 2016

Selama tahun 2017 tidak ada perubahan jumlah saham beredar. PT MNC Investama, Tbk adalah pemegang saham pengendali.

During 2017 there is no change in the number of shares outstanding. PT MNC Investama, Tbk is a controlling shareholder.

33. TAMBAHAN MODAL DISETOR

33. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

Akun ini terdiri dari:

This account consist of:

	2017	2016	
Saldo awal	4.390.461	3.257.687	Beginning balance
Penerbitan saham tanpa hak memesan efek terlebih dahulu	-	361.576	Issuance of stock without preemptive Rights
Pelaksanaan opsi saham karyawan	-	1.871	Exercise of employee stock options
Pelaksanaan waran	-	769.327	Exercise of warrants
Saldo akhir	4.390.461	4.390.461	Ending balance

Sehubungan dengan penerbitan saham pada tahun 2016, akun ini bertambah sebesar Rp1.132.774 juta.

In connection with the Share Issuance in 2016, this account increased by Rp1,132,774 million, respectively.

	2016	
Penerimaan dari penerbitan saham	1.211.322	Proceeds from share issuance
Dikurangi: biaya penerbitan	203	Less: issue costs
Penambahan bersih	1.211.119	Net proceeds
Setoran saham	(78.345)	Paid-up capital stock
Tambahan modal disetor	1.132.774	Additional paid-up capital

34. PROGRAM OPSI SAHAM KARYAWAN

Sehubungan pelaksanaan opsi saham karyawan, akun ini bertambah sebesar Rp1.871 tahun 2016.

a. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa pada tanggal 3 Mei 2016, pemegang saham memutuskan Hak opsi (tahap IVa and IVb) yang akan didistribusikan kepada peserta MESOP dengan jumlah sebanyak 70.340.775 untuk tahap IVa, dan 70.340.776 untuk tahap IVb, pada harga pelaksanaan sebesar Rp1.500 setiap lembar.

b. Berdasarkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa pada tanggal 30 Mei 2017 yang menegaskan asumsi utama untuk menghitung nilai wajar opsi adalah sebagai berikut:

Asumsi utama untuk menghitung nilai wajar opsi adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Harga saham pada tanggal pemberian	1.500	1.500
Opsi gagal diperoleh	67,58%	67%
Tingkat bunga bebas risiko	6,9%	7,5%
Periode opsi	5 tahun/ years	5 tahun/ years
Ketidakstabilan harga saham	16,5%	18,85%
Nilai wajar opsi (Rp)	417,82	522,56
Harga pelaksanaan (Rp)	1.500	1.500

Mutasi opsi yang beredar adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Opsi beredar awal tahun	70.315.775	20.369.075
Opsi diberikan	70.340.776	70.340.775
Opsi kadaluarsa	-	(18.667.875)
Opsi dieksekusi	-	(1.726.200)
Opsi beredar akhir tahun	140.656.551	70.315.775

Mutasi modal lain-lain pelaksanaan opsi saham karyawan adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Saldo awal	17.004	6.472
Beban selama tahun berjalan	9.528	12.403
Pelaksanaan selama tahun berjalan	-	(1.871)
Saldo akhir	26.532	17.004

34. EMPLOYEE STOCK OPTION PLAN

In connection with the exercise of the employee stock options, this account increased by Rp1,871 million in 2016.

a. Based on the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 3, 2016, the shareholders decided that the Option right (phase IVa and IVb) that will be distributed to MESOP participants is a total of 70,340,775 for Phase IVa, and 730,340,776 for phase IVb, at an exercise price of Rp1,500 per share.

b. Based on the results of the Extraordinary General Meeting of Shareholders dated May 30, 2017, the shareholders decided Based on the result of key assumptions used in calculating the fair value of the options are as follows:

Key assumptions used in calculating the fair value of the options are as follows:

Share price at granted date
Options forfeiture
Risk-free interest rate
Option period
Expected stock price volatility
Fair value of options (Rp)
Exercise price (Rp)

The changes in outstanding share options are as follows:

Outstanding options as of beginning of year
Options granted
Options expired
Options exercised
Outstanding options as of end of year

The changes in other capital- employee stock option are as follows:

Beginning balance
Expensed during the year
Exercised during the year
Ending balance

35. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016	
Selisih transaksi perubahan ekuitas Entitas anak	(1.047)	4.477	Difference due to changes in equity of subsidiaries
Selisih transaksi perubahan ekuitas dengan pihak nonpengendali	(56.482)	(56.482)	Difference in value of equity transaction with non-controlling interest
Rugi belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset keuangan tersedia untuk dijual	(81.157)	(34.486)	Unrealized loss on changes in fair value of available for sale financial assets
Pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti	7.573	8.024	Remeasurement of defined benefits obligation
Jumlah	(131.113)	(78.467)	Total

Selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali

Difference in value of equity transaction with non-controlling interest

Pada tanggal 17 Desember 2014, Kelompok Usaha memperoleh 4,81% penambahan kepemilikan di BMNCI senilai Rp115.683 dari kepentingan nonpengendali, yang meningkatkan kepemilikan Kelompok Usaha menjadi 39,88%. Nilai wajar aset bersih teridentifikasi yang dicatat sebagai selisih transaksi ekuitas dengan pihak nonpengendali.

On December 17, 2014, the Group acquired an additional 4.81% ownership in BMNCI for Rp115,683 from non-controlling interest, increasing the Group's ownership to 39.88%. Fair value of identifiable asset acquired was recorded as difference in equity transaction with non-controlling interest.

36. SAHAM YANG DIPEROLEH KEMBALI

Pada 31 Desember 2017 dan 31 Desember 2016, jumlah saham yang diperoleh kembali adalah sebanyak 9.390.800 lembar senilai Rp17.559 juta. Jumlah tersebut termasuk pembelian saham Entitas oleh Entitas anak dari pasar sekunder sebanyak 9.381.800 lembar.

36. TREASURY STOCKS

As of Desember 31, 2017 and December 31, 2016, total number of treasury stocks amounted to Rp17,559 million for 9,390,800 shares. Total number includes the Entity's shares purchased by subsidiaries from the secondary market totally to 9,381,800 shares.

37. KEPENTINGAN NONPENGENDALI

Akun ini merupakan kepentingan nonpengendali atas ekuitas dan bagian atas laba (rugi) bersih Entitas anak yang dikonsolidasikan.

37. NONCONTROLLING INTERESTS

This account represents the noncontrolling interest in the equity and the net earnings (losses) of the consolidated subsidiaries.

	2017	2016	
a. Kepentingan nonpengendali atas aset bersih entitas anak:			a. Noncontrolling interest in net assets of subsidiaries:
PT Bank MNC Internasional Tbk	742.153	1.142.128	PT Bank MNC Internasional Tbk
PT MNC Asuransi Indonesia	46	46	PT MNC Asuransi Indonesia
PT MNC Life Assurance	23	32	PT MNC Life Assurance
PT MNC Finance	9	9	PT MNC Finance
PT MNC Asset Management	4	5	PT MNC Asset Management
PT MNC Sekuritas	2	3	PT MNC Sekuritas
PT MNC Guna Usaha Indonesia	1	1	PT MNC Guna Usaha Indonesia
PT Medan Nusantara Propertindo	(1)	-	PT Medan Nusantara Propertindo
Jumlah	742.237	1.142.224	Total

37. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)

	2017	2016
b. Kepentingan nonpengendali atas jumlah penghasilan komprehensif entitas anak:		
PT Bank MNC Internasional Tbk	(397.322)	7.101
PT MNC Asuransi Indonesia	-	1
PT MNC Life Assurance	(9)	(3)
PT MNC Finance	-	(1)
PT MNC Sekuritas	-	(1)
PT MNC Guna Usaha Indonesia	-	(1)
Jumlah	(397.331)	7.096

38. PENDAPATAN

Akun ini merupakan pendapatan entitas :

a. Pendapatan bunga

	2017	2016
Pendapatan bunga		
Dimiliki hingga jatuh tempo	29.513	29.537
Tersedia untuk dijual	38.811	46.040
Diperdagangkan	13.903	22.867
Pinjaman yang diberikan dan piutang	1.067.569	1.072.746
Subjumlah pendapatan bunga	1.149.796	1.171.190
Pihak ketiga	1.149.309	1.170.791
Pihak berelasi	487	399
Jumlah	1.149.796	1.171.190

b. Pendapatan Dividen

Akun ini merupakan pendapatan dividen entitas.

	2017	2016
Dividen	1.206	2.051
Pihak ketiga	152	986
Pihak berelasi	1.054	1.065
Jumlah	1.206	2.051

c. Pendapatan Pembiayaan dan sewa operasi

Akun ini merupakan pendapatan pembiayaan dan sewa operasi atas peralatan transportasi.

	2017	2016
Sewa pembiayaan dan operasi		
Pihak ketiga	82.081	60.857
Pihak berelasi	8.535	1.731
Subjumlah	90.616	62.588
Pembiayaan Konsumen		
Pihak ketiga	472.982	297.891
Pihak berelasi	23.433	54.579
Subjumlah	496.415	352.470

37. NONCONTROLLING INTERESTS (continued)

b. Noncontrolling interest in total comprehensive income of subsidiaries:	
PT Bank MNC Internasional Tbk	
PT MNC Asuransi Indonesia	
PT MNC Life Assurance	
PT MNC Finance	
PT MNC Sekuritas	
PT MNC Guna Usaha Indonesia	
Total	

38. INCOME

This account represents interest subsidiaries :

a. Interest Income

Interest income	
Held to maturity	
Available for sale	
Trading	
Loans and receivable	
Subtotal	
Third parties	
Related parties	
Total	

b. Divident Income

This account represents dividend income.

Dividend	
Third parties	
Related parties	
Total	

c. Financing Income and Operating lease

This account represents revenue from financing income and operating lease transaction for transportation equipment.

Finance and operating leases	
Third parties	
Related parties	
Subtotal	
Consumer financing	
Third parties	
Related parties	
Subtotal	

38. PENDAPATAN (lanjutan)

c. Pendapatan Pembiayaan dan sewa operasi (lanjutan)

	2017	2016
Anjak piutang		
Pihak ketiga	58.552	49.946
Pihak berelasi	1.437	539
Subjumlah	59.989	50.485
Jumlah	647.020	465.543

Tidak ada pendapatan pembiayaan dan sewa operasi dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

d. Pendapatan premi bersih

Akun ini merupakan pendapatan premi setelah dikurangi premi reasuransi dan dikurangi (ditambah) dengan kenaikan (penurunan) premi yang belum merupakan pendapatan.

	2017	2016
Premi asuransi individu		
Premi tahun pertama	505.300	89.539
Premi lanjutan	15.431	17.110
520.731	106.649	
Premi asuransi kumpulan		
Premi tunggal	113.363	401.152
Jumlah premi bruto	634.094	507.801
Premi reasuransi		
Individu	(530)	(750)
Kumpulan	(294.624)	(194.087)
Jumlah premi reasuransi	(295.154)	(194.837)
Penurunan (kenaikan) premi yang belum merupakan pendapatan	(32.435)	1.821
Jumlah	306.505	314.785
Pihak ketiga	258.182	254.860
Pihak berelasi	48.323	59.925
Jumlah	306.505	314.785

Tidak ada pendapatan premi bersih dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

e. Pendapatan manajemen investasi

	2017	2016
Laba efek ekuitas, efek utang dan kontrak manajemen investasi	70.524	100.106
Jasa penasehat keuangan dan arranger	2.553	1.768
Jasa penjamin emisi dana efek	22.291	2.684
Jumlah	95.368	104.558

38. INCOME (continued)

c. Financing Income and Operating lease (continued)

Factoring
Third parties
Related parties
Subtotal
Total

There is no financing income and operating lease income earned from an individual customer which is more than 10% of total.

d. Net premium income

This account represents premiums income, net of outward reinsurance and increase (decrease) in unearned premiums.

Individual insurance premiums
First year premiums
Renewal premiums
Group insurance premiums
Single premiums
Total gross premiums
Reinsurance premiums
Individual
Group
Total reinsurance premiums
Decrease (increase) in unearned premiums reserves
Total
Third parties
Related parties
Total

There is no net premium income earned from an individual customer which is more than 10% of total.

e. Investment banking income

Gain on equity securities, debt securities and fund
Financial advisory and arranger fee
Underwriting and selling fees
Total

38. PENDAPATAN (lanjutan)

e. Pendapatan manajemen investasi

Sebagian pendapatan investasi sebesar Rp95.368 juta pada tahun 2017 dan Rp104.558 juta pada tahun 2016, dilakukan untuk pihak ketiga.

Tidak ada pendapatan manajemen investasi dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan bersih.

Jasa penasehat keuangan merupakan imbalan atas jasa manajemen yang diberikan Kelompok Usaha kepada nasabahnya berkaitan dengan restrukturisasi keuangan dan kegiatan merger dan akuisisi.

Jasa penjaminan dan penjualan emisi merupakan imbalan jasa sebagai penjamin emisi dan agen penjualan untuk penawaran umum saham dan obligasi serta penawaran umum terbatas dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

f. Pendapatan murabahah dan musyarakah

Akun ini merupakan pendapatan dari syariah.

	2017	2016
Pihak ketiga	102.951	130.195
Pihak berelasi	103	89
Jumlah	103.054	130.284

Tidak ada pendapatan dan musyarakah dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

g. Komisi perantara pedagang efek

Akun ini merupakan komisi yang diperoleh dari aktivitas perantara pedagang efek ekuitas (saham).

	2017	2016
Pihak ketiga	48.762	45.577
Pihak berelasi	-	689
Jumlah	48.762	46.266

Tidak ada pendapatan komisi perantara efek dari pelanggan individu yang melebihi 10% dari jumlah.

38. INCOME (continued)

e. Investment banking income

A portion of investment banking income amounting to Rp95,368 million in 2017 and Rp104,558 million in 2016, respectively, were made to third parties.

There is no investment banking income earned from an individual customer which is more than 10% of the total investment banking income.

Financial advisory fees represent fees from advisory services rendered by the Group to customers in relation to their financial restructuring and merger and acquisition.

Underwriting and selling fees represent fees from underwriting and selling of shares and bonds including public offerings and rights issues.

f. Murabahah and musyarakah income

This account represents income from syariah.

	2017	2016	
	102.951	130.195	Third parties
	103	89	Related parties
Total	103.054	130.284	Total

There is no and musyarakah income earned from an individual customer which is more than 10% of the total.

g. Brokerage commissions

This account represents commission from brokerage services on equity (shares).

	2017	2016	
	48.762	45.577	Third parties
	-	689	Related parties
Total	48.762	46.266	Total

There is no brokerage commissions income earned from an individual customer which is more than 10% of the total.

39. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
Gaji dan kesejahteraan karyawan	497.890	451.899
Insentif dealer	105.773	85.933
Sewa	91.898	85.913
Beban kantor	71.241	70.891
Perbaikan dan pemeliharaan	63.714	48.978
Penyusutan	55.254	48.126
Keanggotaan kartu kredit	54.369	16.190
Perjalanan dinas dan transportasi	39.729	31.170
Iklan dan promosi	34.546	28.843
Jasa professional	28.771	20.140
Urusan nasabah	22.387	19.351
Imbalan kerja	21.697	19.111
Komunikasi dan informasi	16.093	33.094
Amortisasi	8.995	5.452
Komisi penjamin efek	8.451	-
Jamuan dan representasi	2.998	2.293
Lain-lain (dibawah Rp2.000)	34.267	30.556
Jumlah	1.158.072	997.940

40. BEBAN BUNGA

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
Simpanan	652.782	629.838
Pinjaman	234.379	134.903
Simpanan dari bank lain	22.210	35.764
Obligasi	29.516	34.200
Provisi dan komisi kredit	20.795	20.026
Lain-lain	3.852	4.962
Jumlah	963.534	859.693

41. LAIN-LAIN BERSIH

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
Perubahan dalam liabilitas kontrak investasi	2.534	15.763
Rugi penjualan agunan yang dikuasai	-	26.349
Lain-lain bersih	12.436	6.480
Jumlah	14.970	48.592

Lain-lain - bersih terdiri dari laba (rugi) penjualan aset tetap, penjualan aset al ijarah, pembayaran lebih konsumen, beban opsi saham karyawan, selisih kurs, serta pendapatan dan beban lainnya.

39. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

This account consist of:

Salaries and employees benefits
Dealer insentif
Rent
Office supplies
Repairs and maintenance
Depreciation
Credit card membership
Travelling and transportation
Advertising and promotion
Professional fees
Customers affair
Employee benefits
Communication and information
Amotization
The securities commission
Entertainment and representation
Others (Under Rp2.000)
Total

40. INTEREST EXPENSES

This account consist of:

Deposits
Loans
Deposits from other banks
Bonds
Loan commissions and fees
Others
Total

41. OTHERS – NET

This account consist of:

Change in investment contract liabilities
Loss on sale of repossessed assets
Others - net
Total

Others - net consists of the gain (loss) on sale of property, equipment, al ijarah assets, more consumer payments, employee stock options, foreign exchange differences, and other income and expenses.

42. PAJAK PENGHASILAN

a. Utang Pajak

	2017	2016	
Pajak penghasilan			Income taxes
Pasal 21	4.216	3.220	Article 21
Pasal 23	1.280	1.180	Article 23
Pasal 25	569	1.684	Article 25
Pasal 26	88	166	Article 26
Pasal 29	4.134	1.608	Article 29
Pasal 4 ayat 2	10.302	10.814	Article 4 paragraph 2
Transaksi Perdagangan Saham	5.504	8.016	Tax on Securities Trading
Pajak Pertambahan Nilai – bersih	963	1.674	Value Added Tax – net
Jumlah	27.056	28.362	Total

b. Manfaat (beban) pajak Kelompok Usaha terdiri dari:

b. Tax benefit (expense) of the Group consists of the following:

	2017	2016	
Pajak kini			Current tax
Entitas anak	(16.899)	(12.580)	Subsidiaries
Jumlah pajak kini	(16.899)	(12.580)	Total current tax
Pajak tangguhan			Deferred tax
Entitas	21.836	13.399	Entity
Entitas anak	238.153	18.035	Subsidiaries
Jumlah pajak tangguhan	259.989	31.434	Total deferred tax
Jumlah	243.090	18.854	Total

Rekonsiliasi antara rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan rugi fiskal adalah sebagai berikut:

The reconciliation between loss before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and fiscal loss is as follows:

	2017	2016	
Rugi sebelum pajak menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	(980.719)	(57.795)	Loss before tax per consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income
Penyesuaian pada tingkat konsolidasian	-	5.455	Adjustment at consolidation level
Laba (Rugi) komprehensif bersih Entitas anak	900.017	(21.146)	Net comprehensive loss of subsidiaries
Rugi sebelum pajak Entitas	(80.702)	(73.486)	Loss before tax of the Entity
<u>Perbedaan temporer</u>			<u>Temporary differences</u>
Beban imbalan pasca kerja	(62)	580	Post-employment benefits
Penyusutan	(95)	(230)	Depreciation
Aset sewa pembiayaan	(387)	(158)	Leased assets
Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal			Nondeductible expenses (non taxable income)
Rugi (laba) belum direalisasi aset keuangan pada FVTPL	(18.757)	4.523	Unrealized loss (gain) on financial assets at FVTPL

42. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

b. Manfaat (beban) pajak Kelompok Usaha terdiri dari:
(lanjutan)

	2017	2016
Beban ESOP	9.528	12.403
Gaji dan tunjangan	5.577	5.729
Penghasilan bunga yang pajaknya bersifat final	(4.369)	(5.575)
Rugi (laba) penjualan reksadana	(515)	(96)
Sumbangan dan representasi	-	243
Lain - lain	(771)	-
Taksiran rugi fiskal tahun berjalan	(90.553)	(56.067)
Akumulasi kompensasi rugi fiskal		
Tahun berjalan	(90.553)	(56.067)
Tahun sebelumnya	(208.931)	(158.143)
Jumlah taksiran rugi fiskal	(299.484)	(214.210)

Dalam laporan keuangan ini, jumlah penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 didasarkan atas perhitungan yang sama dengan jumlah nya dengan laba kena pajak yang dilaporkan dalam SPT pajak penghasilan Badan 2017.

Sampai dengan tanggal pelaporan, tidak terdapat liabilitas pajak tambahan: jenis ketetapan atau tagihan pajak, jenis pajak, tahun Pajak serta jumlah pokok dan denda atau bunganya

c. Aset dan liabilitas pajak tangguhan

	1 Januari/ January 1, 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan pendapatan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2017
Aset Pajak Tangguhan				
Entitas				
Rugi fiskal	53.553	21.318	-	74.871
Liabilitas imbalan pasca kerja	339	35	27	401
Sewa pembiayaan	(388)	388	-	-
Penyusutan	(386)	95	-	(291)
Subjumlah	53.118	21.836	27	74.981
Entitas Anak				
Rugi fiskal	72.197	156.103	-	228.300
Liabilitas imbalan pasca kerja	16.139	1.948	(120)	17.967
Penyusutan	1.725	610	-	2.335

42. INCOME TAX (continued)

b. Tax benefit (expense) of the Group consists of the
following: (continued)

ESOP expenses
Salaries and employee benefits
Interest income subjected to final tax
Loss (gain) from sale of mutual funds
Representation and donation
Others
Estimated fiscal loss- current year

Accumulated fiscal loss carry forward
Current year
Prior years

Total estimated fiscal loss carry forward

In these financial statements, the amount of taxable income for the year ended December 31, 2017 based on calculations which is this amount same as taxable income as reported in the corporate income tax returns.

Up to the reporting date, there are no additional tax liabilities: type of tax assessment or claim, tax type, years of tax and principal amount and penalty or interest.

c. Deferred tax asset and liabilities

Deferred tax assets

The Entity
Fiscal loss
Employee benefits
obligation
Finance lease
Depreciation
Subtotal
Subsidiaries
Fiscal loss
Employee benefits
obligation
Depreciation

42. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

42. INCOME TAX (continued)

c. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

c. Deferred tax asset and liabilities (continued)

	1 Januari/ January 1, 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan pendapatan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2017	
Aset sewa pembiayaan	6.903	(844)	-	6.059	Leased assets
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	(12.580)	73.372	-	60.792	Allowance for impairment losses on loans
Cadangan kerugian aset keuangan selain kredit yang diberikan	2.295	3.499	-	5.794	Allowance for impairment losses on financial assets other than loans
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	5.129	-	-	5.129	Allowance for impairment losses on receivables
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	2.121	-	(2.927)	(806)	Unrealized loss (gain) on change in fair value of available for sale securities
Unearned premium reserve	2.627	-	-	2.627	Unearned premium reserve
Lain-lain	(9.039)	3.465	-	(5.574)	Others
Subjumlah	87.517	238.153	(3.047)	322.623	Subtotal
Total aset pajak tangguhan	140.635	259.989	(3.020)	397.604	Total deferred assets
Entitas					The Entity
Rugi fiskal	40.106	13.447		53.553	Fiscal loss
Liabilitas imbalan pasca kerja	252	145	(58)	339	Employee benefits obligation
Sewa pembiayaan	(320)	(68)		(388)	Finance lease
Penyusutan	(261)	(125)		(386)	Depreciation
Subjumlah	39.777	13.399	(58)	53.118	Subtotal
Entitas Anak					Subsidiaries
Rugi fiskal	83.088	(10.891)		72.197	Fiscal loss
Liabilitas imbalan pasca kerja	11.846	1.657	652	14.155	Employee benefits obligation
Penyusutan	3.539	(1.436)		2.103	Depreciation
Aset sewa pembiayaan	9.729	(485)		9.244	Leased assets
Cadangan kerugian penurunan nilai kredit	(39.082)	26.502		(12.580)	Allowance for impairment losses on loans
Cadangan kerugian aset keuangan selain kredit yang diberikan	4.795	(2.500)		2.295	Allowance for impairment losses on financial assets other than loans
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	5.152	(23)		5.129	Allowance for impairment losses on receivables
Kerugian (keuntungan) yang belum direalisasi atas perubahan nilai wajar efek tersedia untuk dijual	3.432		(1.311)	2.121	Unrealized loss (gain) on change in fair value of available for sale securities
Unearned premium reserve	-	2.627		2.627	Unearned premium reserve
Lain-lain	(12.150)	1.412		(10.738)	Others
Subjumlah	70.349	16.863	(659)	86.553	Subtotal
Total aset pajak tangguhan	110.126	30.262	(717)	139.671	Total deferred assets

42. PAJAK PENGHASILAN (lanjutan)

c. Aset dan liabilitas pajak tangguhan (lanjutan)

	1 Januari/ January 1, 2017	Dikreditkan (dibebankan) ke laba rugi/ Credited (charged) to profit or loss	Dikreditkan (dibebankan) ke laporan pendapatan komprehensif lain/ Credited (charged) to other comprehensive income	31 Desember/ December 31, 2017	
Aset (liabilitas) pajak tangguhan					Deferred tax assets (liabilities)
Entitas Anak					Subsidiaries
Liabilitas imbalan pasca kerja	1.904	142	(62)	1.984	Employee benefits obligation
Penyusutan	(481)	103	-	(378)	Depreciation
Aset sewa pembiayaan	(2.591)	250	-	(2.341)	Leased assets
Pencadangan nilai agunan yang diambil alih	1.022	677	-	1.699	Allowance for repossessed assets
Total aset (liabilitas) pajak tangguhan	(146)	1.172	(62)	964	Total deferred tax assets (liabilities)

Rugi fiskal dapat dikompensasikan dengan laba kena pajak untuk periode lima tahun berikutnya sejak tahun kerugian fiskal terjadi. Manajemen berpendapat bahwa jumlah laba fiskal di masa mendatang kemungkinan akan tersedia untuk memanfaatkan akumulasi kerugian fiskal.

The fiscal loss can be utilized against the taxable income for a period of five years subsequent to the year the fiscal loss was incurred. Management believes that probable future taxable profits will be available to utilize accumulated fiscal losses.

43. RUGI PER SAHAM

Perhitungan rugi per saham dasar dan dilusian didasarkan pada data berikut:

	2017	2016
Rugi yang diatribusikan kepada pemilik Entitas	(334.654)	(45.713)

Lembar saham

Jumlah rata-rata tertimbang saham beredar (penyebut) untuk tujuan penghitungan rugi per saham dasar dan dilusian adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dasar	5.463.447.518	4.956.761.378
Pengaruh efek berpotensi saham biasa yang dilutif		
Ops saham	4.974.991	10.877.628
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk tujuan perhitungan laba per saham dilusian	5.468.422.509	4.967.639.006
Rugi per saham – dasar (dalam satuan Rupiah)	(61,25)	(9,22)
Rugi per saham – dilusian (dalam satuan Rupiah)	(61,25)	(9,22)

43. LOSS PER SHARE

The calculation of basic and diluted loss per share are based on the following data:

	2017	2016
Loss attributable to the owners of the Entity	(334.654)	(45.713)

Shares

The weighted average number of shares outstanding (denominator) for the computation of basic and diluted loss per share were as follows:

	2017	2016
Weighted average number of shares outstanding for the purpose of calculating basic earnings per share	5.463.447.518	4.956.761.378
Effect of dilutive potential ordinary shares:		
Options	4.974.991	10.877.628
Weighted average number of shares outstanding for the purpose	5.468.422.509	4.967.639.006
Loss per share- basic (full Rupiah)	(61,25)	(9,22)
Loss per share- diluted (full Rupiah)	(61,25)	(9,22)

43. RUGI PER SAHAM (lanjutan)

Rugi bersih pada tahun 2017 dan 2016 yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk untuk tujuan perhitungan rugi per saham dilusian masing-masing adalah sebesar Rp334.654 juta dan Rp45.713 juta.

44. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Sifat Pihak Berelasi

- a. Pihak berelasi yang pemegang saham utamanya sama dengan Group:
 - PT Global Mediacom Tbk
 - PT Media Nusantara Citra Tbk
 - PT MNC Investama Tbk
- b. Pihak berelasi yang merupakan Entitas dalam Group yang sama:
 - Ottawa Holding
- c. Pihak berelasi yang merupakan Entitas yang dikendalikan personil manajemen kunci Entitas:
 - PT MNC Land Tbk
 - PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
 - PT Radio Tridjaja Shakti
 - PT Global Informasi Bermutu
 - PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
 - PT MNC Sky Vision Tbk
 - PT Nuansacipta Coal Investama
 - PT Infokom Elektrindo
 - PT Media Nusantara Informasi
 - PT GLD Property
 - PT Sun Televisi Network
 - PT Bali Nirwana Resort
 - PT MNC Kabel Mediacom

Transaksi- transaksi Pihak Berelasi

Group juga melakukan transaksi tertentu dengan pihak yang berelasi, sebagai berikut:

- a. Kelompok Usaha menyediakan manfaat pada Komisaris dan personel manajemen kunci sebagai berikut:

	2017	
	Direksi/ Directors	Komisaris/ Commissioners
Imbalan kerja jangka pendek	11.971	325
Imbalan pasca kerja	299	-
Jumlah	12.270	325

43. LOSS PER SHARE (continued)

The 2017 and 2016 net loss attributable to the owners of the Entity for the purpose of calculating diluted loss per share is Rp334,654 million and Rp45,713 million, respectively.

44. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Nature of Relationship

- a. Related parties with the same majority stockholder as the Group:
 - PT Global Mediacom Tbk
 - PT Media Nusantara Citra Tbk
 - PT MNC Investama Tbk
- b. Related party which is a members of the the same Group:
 - Ottawa Holding
- c. Related parties which are entities controlled by key management personnel of the Entity:
 - PT MNC Land Tbk
 - PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
 - PT Radio Tridjaja Shakti
 - PT Global Informasi Bermutu
 - PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
 - PT MNC Sky Vision Tbk
 - PT Nuansacipta Coal Investama
 - PT Infokom Elektrindo
 - PT Media Nusantara Informasi
 - PT GLD Property
 - PT Sun Televisi Network
 - PT Bali Nirwana Resort
 - PT MNC Kabel Mediacom

Transactions with Related Parties

The Group entered into certain transactions with related parties as follows:

- a. The Group provides compensation to the Commissioners and key management personnel as follows:

Short-term benefits
 Post-employment benefits
Total

44. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

Transaksi- transaksi Pihak Berelasi (lanjutan)

Transactions with Related Parties (continued)

	2016		
	Direksi/ Directors	Komisaris/ Commissioners	
Imbalan kerja jangka pendek	7.834	300	Short-term benefits
Imbalan pasca kerja	285	-	Post-employment benefits
Pembayaran berbasis saham	81	-	Share based payment
Jumlah	8.200	300	Total
b. Pendapatan pembiayaan	b. Financing income		
	2017	2016	
PT Media Nusantara Citra Tbk	1.629	928	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	3.493	2.823	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
PT Global Informasi Bermutu	2.458	644	PT Global Informasi Bermutu
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	3.410	945	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
PT Media Nusantara Informasi	1.095	479	PT Media Nusantara Informasi
PT MNC Kabel Mediacom	1.164	939	PT MNC Kabel Mediacom
PT MNC Investama Tbk	15.426	48.460	PT MNC Investama Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp200 juta)	4.730	1.631	Others (each below Rp200 million)
Jumlah	33.405	56.849	Total
% terhadap jumlah pendapatan	1,40%	2,49%	% to total revenue
c. Pendapatan dari pihak berelasi sebesar Rp103 juta dan Rp89 juta masing-masing untuk tahun 2017 dan 2016.	c. income from related parties amounted to Rp103 million and Rp89 million in 2017 and 2016, respectively.		
d. Komisi perantara pedagang efek dari pihak berelasi sebesar Rp689 juta pada tahun 2016.	d. Brokerage commission from related parties amounted to Rp689 million in 2016.		
e. Pendapatan bunga dan dividen dari pihak berelasi sebesar Rp1.541 juta dan Rp1.464 juta masing-masing pada tahun 2017 dan 2016.	e. Interest and dividends income from related parties amounted to Rp1,541 million and Rp1,464 million in 2017 and 2016, respectively.		
f. Pendapatan premi bersih	f. Net premium income		
	2017	2016	
PT MNC Investama Tbk	14.414	14.858	PT MNC Investama Tbk
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	10.077	9.533	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	6.696	5.821	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
PT Global Informasi Bermutu	4.530	3.808	PT Global Informasi Bermutu
PT Media Nusantara Citra Tbk	2.379	3.416	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Media Nusantara Informasi	2.318	2.854	PT Media Nusantara Informasi
PT Sun Televisi Network	2.926	2.611	PT Sun Televisi Network
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000 juta)	4.983	17.024	Others (each below Rp1,000 million)
Jumlah	48.323	59.925	Total
% terhadap jumlah pendapatan	2,03%	2,62%	% to total revenue

44. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

44. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

g. Efek – efek

g. Securities

	2017	2016	
<u>Aset keuangan, diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>			<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
<u>Diperdagangkan:</u>			<u>Trading:</u>
<u>Efek ekuitas</u>			<u>Equity securities</u>
PT MNC Land Tbk	5.557	6.537	PT MNC Land Tbk
PT Global Mediacom Tbk	-	1.036	PT Global Mediacom Tbk
PT MNC Sky Vision Tbk	-	690	PT MNC Sky Vision Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000 juta)	515	292	Others (each below Rp1,000 million)
<u>Obligasi</u>			<u>Bonds</u>
PT. Global Mediacom Tbk	60.000	3.805	PT. Global Mediacom Tbk
<u>Dimiliki hingga jatuh tempo</u>			<u>Held to maturity</u>
<u>Obligasi</u>			<u>Bonds</u>
Ottawa Holding	3.994	-	Ottawa Holding
PT Global Mediacom Tbk	22.000	-	PT Global Mediacom Tbk
<u>Reksadana</u>			<u>Mutual fund</u>
PT MNC Asset Management, sebagai manajer investasi	9.778	77.445	PT MNC Asset Management, as investment Manager
<u>Tersedia untuk dijual</u>			<u>Available for sale</u>
<u>Efek ekuitas</u>			<u>Equity Securities</u>
PT MNC Land Tbk	75.597	71.877	PT MNC Land Tbk
PT MNC Investama Tbk	29.872	44.808	PT MNC Investama Tbk
PT Global Mediacom Tbk	22.250	23.193	PT Global Mediacom Tbk
PT MNC Sky Vision Tbk	8.380	18.000	PT MNC Sky Vision Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	31.945	43.629	PT Media Nusantara Citra Tbk
Jumlah	269.888	291.312	Total
% terhadap jumlah aset	1,06%	1,31%	% to total assets

h. Piutang pembiayaan

h. Financing receivables

	2017	2016	
PT MNC Investama Tbk	128.870	128.684	PT MNC Investama Tbk
PT Media Nusantara Informasi	9.811	9.778	PT Media Nusantara Informasi
PT Rajawali Citra Televisi Indonesia	6.492	6.932	PT Rajawali Citra Televisi Indonesia
PT MNC Land Tbk	6.274	5.712	PT MNC Land Tbk
PT Media Nusantara Citra Tbk	5.509	7.737	PT Media Nusantara Citra Tbk
PT Global Informasi Bermutu	5.089	4.430	PT Global Informasi Bermutu
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	4.220	4.595	PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia
PT MNC Sky Vision Tbk	3.736	6.747	PT MNC Sky Vision Tbk
PT Global Mediacom Tbk	3.362	3.671	PT Global Mediacom Tbk
PT MNC Kabel Mediacom Tbk	3.062	3.209	PT MNC Kabel Mediacom Tbk
PT MNC Pictures	1.720	1.438	PT MNC Pictures
PT Lido Nirwana Parahyangan	1.393	994	PT Lido Nirwana Parahyangan
PT Infokom Electrindo	1.307	3.316	PT Infokom Electrindo
PT Sun Televisi Network	1.255	1.264	PT Sun Televisi Network
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp1.000 juta)	2.785	9.248	Others (each below Rp1,000 million)
Jumlah	184.885	197.755	Total
Cadangan kerugian penurunan nilai	(887)	(1.007)	Allowance for impairment losses
Piutang pembiayaan bruto	183.998	196.748	Gross financing receivable
% terhadap jumlah aset	0,93%	0,89%	% to total assets

44. SIFAT DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)

i. Piutang dari pihak berelasi sebesar Rp555 juta dan Rp319 juta masing – masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

j. Biaya dibayar dimuka dan uang muka

	2017	2016
PT MNC Land Tbk	13.059	22.945
% terhadap jumlah aset	0,07%	0,10%

k. Premi dan aset asuransi

	2017	2016
PT Media Nusantara Informasi	4.061	-
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	2.715	-
PT Bali Nirwana Resort	2.342	1.228
PT MNC Land Tbk	1.103	1.138
Lain-lain (dibawah Rp1.000 juta)	24.772	7.314
Jumlah	34.993	9.680
% terhadap jumlah aset	0,18%	0,04%

l. Simpanan

Pada tanggal 31 Desember 2017, BMNCI mempunyai liabilitas tabungan, giro dan deposito dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp15.881 juta, Rp321.750 juta dan Rp195.903 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2016, BMNCI mempunyai liabilitas tabungan, giro dan deposito dengan pihak berelasi masing-masing sebesar Rp42.712 juta, Rp356.641 juta dan Rp266.105 juta.

45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI

Akun ini terdiri dari:

	2017	2016
Komitmen		
Tagihan Komitmen		
Pembelian berjangka valuta asing	181.731	1.100.366
Liabilitas Komitmen		
Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum digunakan	(420.381)	(230.017)
L/C yang <i>irrevocable</i> dan masih berjalan dalam rangka ekspor dan impor	(1.333)	(27.861)
Penjualan valuta asing tunai yang belum diselesaikan	(181.795)	(1.093.203)
Jumlah Liabilitas Komitmen	(603.509)	(1.351.081)
Jumlah Liabilitas Komitmen- bersih	(421.778)	(250.715)
Kontinjensi		
Tagihan Kontinjensi		
Bank garansi	8.141	8.084
Pendapatan bunga dalam penyelesaian	122.308	98.789
Jumlah tagihan kontinjensi	130.449	106.873

44. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES (continued)

i. financing receivables from related parties amounted to Rp555 million and Rp319 million as of December 31, 2017 and 2016, respectively.

j. Prepaid expense and advances

	2017	2016
PT MNC Land Tbk	13.059	22.945
% to total assets	0,07%	0,10%

k. Premiums expense and advances

	2017	2016
PT Media Nusantara Informasi	4.061	-
PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia	2.715	-
PT Bali Nirwana Resort	2.342	1.228
PT MNC Land Tbk	1.103	1.138
Others (each below Rp1,000 million)	24.772	7.314
Total	34.993	9.680
% to total assets	0,18%	0,04%

l. Deposits

As of December 31, 2017, BMNCI has savings, demand and time deposits liabilities with related parties amounting Rp15,881 million, Rp321,750 million, and Rp195,903 million, respectively.

As of December 31, 2016, BMNCI has savings, demand and time deposits liabilities with related parties amounting Rp42,712 million, Rp356,641 million and Rp266,105 million, respectively.

45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES

This account consist of:

	2017	2016
Commitments		
Commitment Receivables		
Forwards foreign currencies purchased	181.731	1.100.366
Commitment Liabilities		
Unused facilities	(420.381)	(230.017)
Outstanding irrevocables Letters of Credit (L/C) for export and import	(1.333)	(27.861)
Unsettled spot foreign currencies sold	(181.795)	(1.093.203)
Total Commitment Liabilities	(603.509)	(1.351.081)
Total Commitment Liabilities- Net	(421.778)	(250.715)
Contingencies		
Contingent Receivables		
Bank guarantee	8.141	8.084
Past due interest revenues	122.308	98.789
Total contingent receivables	130.449	106.873

45. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)

	2017	2016
Liabilitas Kontinjensi		
Bank garansi	(11.533)	(17.353)
Stand-by L/C	(8.141)	(8.084)
Jumlah tagihan kontinjensi	(19.674)	(25.437)
Jumlah Tagihan Kontinjensi – Bersih	110.775	81.436
Lainnya		
Kredit hapus buku	992.388	449.529

Contingent Liabilities
Bank guarantee
Stand-by L/C
Total contingent liabilities
Total Contingent Receivables – Net
Others
Loans written-off

45. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)

46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Kelompok Usaha memiliki aset dan liabilitas dalam mata uang asing dengan rincian sebagai berikut (dalam satuan penuh, kecuali jumlah setara Rupiah):

46. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES

As of December 31, 2017 and 2016, the Group has assets and liabilities denominated in foreign currencies as follows (in full amounts, except Rupiah equivalent):

		2017		2016		
		Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen/ Equivalent in	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen/ Equivalent in	
Aset Moneter						Monetary Assets
Kas dan Setara Kas	US\$	8.089.231	109.593	32.974.025	443.039	Cash and Cash
	Lainnya/ Other		9.746		590.708	Equivalents
Piutang premi	US\$	9.115.168	123.492	3.400.045	45.683	Premium receivable
	Lainnya/ Other		-		322	
Piutang nasabah	US\$	1.199	17	5.656	76	Receivables from customer
Kredit yang diberikan	US\$	21.549.187	291.948	34.301.727	460.878	Loans
Efek-efek	US\$	551.222	7.468	580.902	7.805	Securities
Tagihan akseptasi	US\$	112.173	1.520	6.644.537	89.276	Acceptances receivable
Jumlah		39.418.180	543.784	77.906.892	1.637.787	Total
Liabilitas Moneter						Monetary Liabilities
Liabilitas segera	US\$	58.824	797	50.238	675	Liabilities immediately payable
	Lainnya/ Other		6			
Simpanan	US\$	57.478.720	778.722	143.229.830	1.924.436	Deposits
	Lainnya/ Other		68.360		11.255	
Liabilitas akseptasi	US\$	112.173	1.520	6.644.537	89.276	Acceptance payables
Utang reasuransi dan utang lain-lain	US\$	5.868.495	79.506	1.287.883	17.304	Reinsurance and other payable
	Lainnya/ Other		-		115	
Liabilitas kontrak asuransi	US\$	127.274	1.724	125.186	1.682	Insurance contract liability
Liabilitas lain-lain	US\$	174.522	2.364	234.147	3.146	Other payables
	Lainnya/ Other		1.215		13	
Utang Al-Musyarakah	US\$	-	-	2.334.326	31.364	Al-musyarakah loan
Jumlah		63.820.008	934.214	153.906.147	2.079.266	Total
Aset (liabilitas) dalam Mata Uang Asing-bersih		(24.401.828)	(390.430)	(75.999.255)	(441.479)	Monetary Assets (liabilities) in Foreign Currency- net

**PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk
DAN ENTITAS ANAK**
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Pada dan Untuk Tahun yang Berakhir Tanggal
31 Desember 2017
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT MNC KAPITAL INDONESIA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES**
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of and For The Year Ended
December 31, 2017
(Expressed in Million Rupiah, unless otherwise stated)

46. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kurs konversi yang digunakan Kelompok Usaha serta kurs yang berlaku adalah sebagai berikut:

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Mata uang 1US\$	13.548	13.436

Foreign currency
US\$ 1

47. INFORMASI SEGMENT

Berikut ini adalah informasi segmen berdasarkan divisi-divisi operasi:

46. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES (continued)

The conversion rates used by the Group on December 31, 2017 and 2016 and the prevailing rates are as follows:

47. SEGMENT INFORMATION

The following are segment information based on the operating divisions:

	31 Desember/December 31, 2017									
	Perbankan/ Banking	Investasi/ Investment	Asuransi/ Insurance	Penjamin dan perantara perdagangan efek/ Brokerage and under- writing	Penge- lolaan investasi/ Fund management	Lembaga pembiayaan/ Multifinance	Real estat/ Real estate	Eliminasi/ Eliminations	Jumlah/ Total	
<u>Pendapatan</u>										<u>Revenue</u>
Pendapatan usaha	1.125.327	23.640	344.575	121.577	31.627	756.169	70	16.740	2.386.245	Total revenue
Pendapatan tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unallocated revenues
Jumlah pendapatan	1.125.327	23.640	344.575	121.577	31.627	756.169	70	16.740	2.386.245	Total revenues
HASIL SEGMENT	(213.831)	(28.179)	(59.085)	21.560	427	380.915	(97)	9.605	92.105	SEGMENT RESULTS
Lain-lain									(14.970)	Others- Net
Beban keuangan									(1.057.854)	Interest expense
Pajak penghasilan									243.090	Income tax
Kerugian tahun berjalan									(737.629)	Loss for the year
INFORMASI LAINNYA										OTHER INFORMATION
ASET										ASSETS
Aset segmen	10.429.252	5.218.764	966.025	1.452.203	50.636	3.683.563	40.171	(2.719.118)	19.121.496	Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi									761.767	Unallocated assets
Total aset konsolidasi									<u>19.883.263</u>	Consolidated total assets
LIABILITAS										LIABILITIES
Liabilitas segmen	9.400.191	388.178	681.667	1.011.037	8.102	2.822.141	40.395	(169.563)	14.182.148	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi									73.595	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas	9.400.191	388.178	681.667	1.011.037	8.102	2.822.141	40.395	(169.563)	14.255.743	Consolidated total liabilities
Penyusutan dan amortisasi	15.163	3.375	8.984	9.560	2.306	15.866	-	-	55.254	Depreciation and amortization

47. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)

47. SEGMENT INFORMATION (continued)

	31 Desember/December 31, 2016									
	Perbankan/ Banking	Investasi/ Investment	Asuransi/ Insurance	Penjamin dan perantara perdagangan efek/ Brokerage and under- writing	Penge- lolaan investasi/ Fund management	Lembaga pembiayaan/ Multifinance	Real estat/ Real estate	Eliminasi/ Eliminations	Jumlah/ Total	
Pendapatan										Revenue
Pendapatan usaha	1.059.529	70.537	360.376	140.991	35.804	623.686	536	(4.115)	2.287.344	Total revenue
Pendapatan tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Unallocated revenues
Jumlah pendapatan	1.059.529	70.537	360.376	140.991	35.804	623.686	536	(4.115)	2.287.344	Total revenues
HASIL										SEGMENT RESULTS
SEGMENT Lain-lain	702.069	(20.291)	(63.800)	(39.403)	(19.870)	291.801	393	(409)	850.490	Others- Net
Beban keuangan									(48.592)	Interest expense
Pajak penghasilan									(859.693)	
Kerugian tahun berjalan									18.854	Income tax
INFORMASI LAINNYA									(38.941)	Loss for the year
ASET										OTHER INFORMATION
Aset segmen	12.929.095	5.601.941	892.888	1.685.364	51.427	3.615.364	38.915	(3.103.772)	21.711.222	ASSETS Segment assets
Aset yang tidak dapat dialokasi									504.797	Unallocated assets
Total aset konsolidasi									22.216.019	Consolidated total assets
LIABILITAS										LIABILITIES
Liabilitas segmen	11.149.147	307.004	563.562	1.202.205	8.817	2.785.222	37.628	(308.756)	15.744.829	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dapat dialokasi	-	-	-	-	-	-	-	-	65.911	Unallocated liabilities
Jumlah liabilitas	11.149.147	307.004	563.562	1.202.205	8.817	2.785.222	37.628	(308.756)	15.810.740	Consolidated total liabilities
Penyusutan dan amortisasi	12.912	2.793	8.440	6.966	2.169	14.846	-	-	48.126	Depreciation and amortization

Informasi Wilayah Geografis

Seluruh kegiatan operasional Kelompok Usaha berada di wilayah negara Indonesia.

Geographical Information

The Group conducts its operational activities in Indonesia.

48. DIVIDEN TUNAI DAN PENGGUNAAN LABA

48. CASH DIVIDENDS AND UNAPPROPRIATED RETAINED EARNINGS

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk tahun buku 2016 pada tanggal 30 Mei 2017 dan tahun buku 2015 pada tanggal 3 Mei 2016, RUPS telah menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada pemegang saham Entitas.

Based on the Annual General Meeting of Stockholders (AGMS) for fiscal year 2016 dated May 30, 2017 and fiscal year 2015, dated May 3, 2016, AGMS has approved not to distribute dividends to the Entity's shareholder.

49. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN

a. Manajemen Risiko

Pengelolaan risiko di Kelompok Usaha mencakup seluruh jenis risiko dari semua aktivitas fungsional Kelompok Usaha berdasarkan kebutuhan akan keseimbangan antara pertumbuhan usaha dengan pengelolaan risikonya.

Untuk mengakomodasi pertumbuhan bisnis, Kelompok Usaha secara terus menerus melakukan evaluasi secara berkala, mengembangkan dan meningkatkan kerangka sistem pengelolaan risiko entitas terpadu dan struktur pengendalian internal yang komprehensif, agar dapat memberikan informasi secara dini mengenai terdapatnya potensi risiko kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengambil langkah-langkah yang memadai untuk meminimalisasi dampak risiko tersebut. Kerangka manajemen risiko entitas terpadu tersebut dituangkan dalam kebijakan, prosedur, batas-batas transaksi, kewenangan dan ketentuan lain serta berbagai perangkat manajemen risiko, yang berlaku di seluruh lingkup aktivitas fungsional.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Kelompok Usaha adalah risiko suku bunga, risiko nilai tukar mata uang asing, risiko harga ekuitas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Kepentingan untuk mengelola risiko ini telah meningkat secara signifikan dengan mempertimbangkan perubahan dan volatilitas pasar keuangan di Indonesia.

Direksi Kelompok Usaha menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola risiko-risiko yang dirangkum di bawah ini.

Risiko suku bunga

Eksposur risiko tingkat bunga berhubungan dengan jumlah aset atau liabilitas dimana pergerakan pada tingkat suku bunga dapat mempengaruhi laba setelah pajak. Kelompok Usaha memiliki kebijakan dalam memperoleh pembiayaan dari kreditur yang menawarkan suku bunga yang paling menguntungkan Kelompok Usaha. Persetujuan dari Direksi dan Komisaris harus diperoleh sebelum Kelompok Usaha menggunakan instrumen keuangan tersebut untuk mengelola eksposur risiko suku bunga.

Analisis sensitivitas suku bunga

Analisis sensitivitas di bawah ini telah ditentukan berdasarkan eksposur suku bunga untuk kedua instrumen derivatif dan non-derivatif pada akhir periode pelaporan. Untuk liabilitas tingkat bunga mengambang, analisis tersebut disusun dengan asumsi jumlah liabilitas terutang pada akhir periode pelaporan itu terutang sepanjang tahun. Kenaikan atau penurunan 1% masing-masing tahun 2017 dan 2016 digunakan ketika melaporkan risiko suku bunga secara internal kepada manajemen kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga.

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

a. Risk Management

Risk management within the Group covers all types of risks in all functional activities of the Group, based on demand to stabilize between the growth of the Group's business and risk management.

To accomodate business growth, the Group continually evaluates on a regular basis, develops and also improves the framework of integrated enterprise risk management system and a comprehensive internal control structure, in order to give management a precaution of potential risk and to take an appropriate solution to minimize the impact of the risk. The integrated enterprise risk management framework stated in the policies, procedures, transaction limits, authority and other provisions, and risk management tools, apply within the functional activities.

The main risks arising from financial instruments of the Group are interest rate risk, foreign currency risk, equity price risk, credit risk and liquidity risk. The importance of managing these risks has increased significantly by considering the changes and volatility of financial markets in Indonesia.

The Group's Directors reviewed and approved the policies for managing risks which are summarized below.

Interest rate risk

The interest rate risk exposure relates to the amount of assets or liabilities which is subject to a risk that a movement in interest rates will adversely affect the income after tax. The Group has a policy of obtaining financing from the creditors who offer the most favorable interest rate. Approvals from the Directors and Commissioners must be obtained before committing the Group into any of the financial instruments to manage the interest rate risk exposure.

Interest rate sensitivity analysis

The sensitivity analysis below have been determined based on the exposure to interest rates for both derivatives and non-derivative instruments at the end of the reporting period. For floating rate liabilities, the analysis is prepared assuming the amount of the liability outstanding at the end of the reporting period was outstanding for the whole year. One percent increase or decrease in 2017 and 2016, respectively, is used when reporting interest rate risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in interest rates.

49. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko suku bunga (lanjutan)

Jika suku bunga lebih tinggi/rendah 17 basis poin dan semua variabel lainnya tetap konstan, Laba Kelompok Usaha untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2017 dan 2016 akan turun/naik masing-masing sebesar Rp3.832 juta dan Rp3.589 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh eksposur Kelompok Usaha terhadap pinjaman dengan suku bunga variabel.

Risiko nilai tukar mata uang asing

Kelompok Usaha mengelola eksposur terhadap mata uang asing dengan mencocokkan, sebisa mungkin, penerimaan dan pembayaran dalam masing-masing individu mata uang. Jumlah eksposur mata uang asing bersih Kelompok Usaha pada tanggal pelaporan diungkapkan dalam Catatan 44.

Analisis sensitivitas mata uang asing

Tabel berikut merinci sensitivitas Kelompok Usaha terhadap peningkatan dan penurunan dalam Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Tingkat sensitivitas yang digunakan ketika melaporkan secara internal risiko mata uang asing kepada para manajemen kunci dan merupakan penilaian manajemen terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada nilai tukar valuta asing. Analisis sensitivitas hanya mencakup item mata uang asing moneter yang ada dan menyesuaikan translasinya dalam nilai tukar mata uang asing. Jumlah positif di bawah ini menunjukkan peningkatan laba dimana Rupiah menguat terhadap Dolar Amerika Serikat. Untuk melemahnya Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat, akan ada dampak yang sama pada laba, dan saldo di bawah ini akan menjadi negatif.

	Pengaruh pada laba atau rugi setelah pajak/ Effect on profit or loss net of tax				
	2017	2016	2017	2016	
Dolar Amerika Serikat	±2%	±2%	±5.856	±6.622	United States Dollar

Risiko harga ekuitas

Investasi jangka panjang Kelompok Usaha terutama terdiri dari investasi minoritas dalam ekuitas Entitas swasta Indonesia. Sehubungan dengan Entitas Indonesia dimana Kelompok Usaha memiliki investasi, kinerja keuangan Kelompok Usaha tersebut kemungkinan besar sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi di Indonesia.

Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko rekanan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian bagi Kelompok Usaha.

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

Interest rate risk (continued)

If interest rates had been 17 basis points higher/lower and all other variables were held constant, the Group profit (loss) for the years ended December 31, 2017 and 2016, respectively, would decrease/increase by Rp3,832 million and Rp3,589 million, respectively. This is mainly attributable to the Group's exposure to loans with variable interest rates.

Foreign currency risk

The Group manages the foreign currency exposure by matching, as far as possible, receipts and payments in each individual currency. The Group's net open foreign currency exposure as of reporting dates is disclosed in Note 44.

Foreign currency sensitivity analysis

The following table details the Group's sensitivity to increase and decrease in Rupiah against United States Dollar. The sensitivity rate is used when reporting foreign currency risk internally to key management personnel and represents management's assessment of the reasonably possible change in foreign exchange rates. The sensitivity analysis includes only outstanding foreign currency denominated monetary items and adjusts their translation with the change in foreign currency rates. A positive number below indicates an increase in profit where Rupiah strengthens against the United States Dollar. For weakening of Rupiah against the United States Dollar, there would be a comparable impact on the profit, and the balances below would be negative.

Equity price risk

The Group's long-term investments primarily consist of minority investments in the equity of private Indonesian companies. In connection with Indonesian companies in which the Group have investments, the Group's financial performance is likely to be greatly influenced by economic conditions in Indonesia.

Credit risk

Credit risk refers to the risk that counterparty will default on its contractual obligation resulting in a loss to the Group.

49. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Risiko kredit Kelompok Usaha terutama melekat pada rekening bank, setara kas, piutang nasabah, deposito yang dijadikan sebagai jaminan pada Lembaga Kliring dan Penjamin Efek Indonesia, piutang pembiayaan, kredit, piutang pembiayaan, premi dan aset reasuransi. Kelompok Usaha menempatkan saldo bank pada institusi keuangan yang layak serta terpercaya, sedangkan piutang usaha dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi. Eksposur Kelompok Usaha dan pihak lawan dimonitor secara terus menerus dan nilai agregat transaksi terkait tersebar di antara pihak lawan yang telah disetujui. Eksposur kredit dikendalikan oleh batasan (limit) pihak lawan yang direviu dan disetujui oleh manajemen secara tahunan.

Risiko kredit adalah risiko bahwa Kelompok Usaha akan mengalami kerugian yang timbul dari pelanggan, klien atau pihak lawan yang gagal memenuhi kewajiban kontraktual mereka. Tidak ada risiko kredit yang terpusat secara signifikan. Kelompok Usaha mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko yang dapat diterima untuk pelanggan individu dan memantau exposure terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Agunan dan peningkatan kredit lainnya

Kelompok Usaha memiliki agunan berupa simpanan, tanah, gedung, kendaraan dan alat berat. Jumlah dan jenis agunan yang diperlukan bergantung pada risiko kredit. Pedoman pelaksanaan mengenai penerimaan jenis agunan dan parameter penilaian, sudah merupakan kewajiban Kelompok Usaha untuk menghapus properti secara teratur. Secara umum, penambahan yang digunakan untuk mengurangi atau membayar klaim yang masih beredar dan tidak ditempati untuk penggunaan bisnis.

Tabel di bawah menunjukkan maksimum eksposur risiko kredit Kelompok Usaha pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

	2017	2016
Kas dan setara kas	1.780.674	3.245.481
Deposito dan piutang pada LKPEI	244.084	150.202
Piutang nasabah	811.042	1.213.479
Piutang pembiayaan	2.803.553	2.738.982
Kredit	6.724.938	7.863.036
Piutang pembiayaan	303.137	483.577
Piutang pembiayaan Musyarakah		
Mutanaqisah	168.873	85.622
Premi dan aset reasuransi	449.103	373.091
Piutang lain-lain	132.191	332.513
Jumlah	13.417.595	16.485.983

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

Credit risk (continued)

The Group's credit risk is primarily attributed to its cash in banks, cash equivalents, receivables from customers, deposits used as collateral with Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia, financing receivables, loans, financing receivables, premiums and reinsurance assets. The Group places its bank balances with credit worthy financial institutions, while receivable are entered with respected and credit worthy third and related parties. The Group's exposure and its counterparties are continuously monitored and the aggregate value of transactions concluded is spread amongst approved counterparties. Credit exposure is controlled by counterparty limits that are reviewed and approved by the management annually.

Credit risk is the risk that the Group may incur losses arising from customer, client or other party who failed to meet their contractual obligations. There is no significant concentration of credit risk. The Group manages and controls credit risk by setting limits of acceptable risk for individual customers and monitor the exposure associated with these restrictions.

Collateral and other credit enhancements

The Group holds collaterals in the form of deposits, land, buildings, vehicle and heavy equipment. The amount and type of collateral required depends on an assessment of credit risk. Guidelines are implemented regarding the acceptability of types of collateral and valuation parameters. It is the Group's policy to dispose of repossessed properties in an orderly fashion. In general, the proceeds are used to reduce or repay the outstanding claim, and are not occupied for business use.

The table below shows the Group's maximum exposure to credit risk of December 31, 2017 and 2016.

Cash and cash equivalents
Deposits and receivable from LKPEI
Receivables from customers
Financing receivables
Loans
financing receivables
Musyarakah Mutanaqisah financing
receivables
Premiums and reinsurance assets
Other receivables
Total

49. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

Kelompok Usaha melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Kelompok Usaha memiliki kebijakan untuk semua pihak ketiga yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi terlebih dahulu. Sebagai tambahan, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang ragu-ragu.

Nilai tercatat aset keuangan yang dicatat pada laporan keuangan konsolidasian setelah dikurangi dengan cadangan kerugian penurunan nilai dan peningkatan kredit mencerminkan eksposur Kelompok Usaha terhadap risiko kredit.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas didefinisikan sebagai risiko saat posisi arus kas Kelompok Usaha menunjukkan bahwa pendapatan jangka pendek tidak cukup menutupi pengeluaran jangka pendek. Kelompok Usaha pada tanggal laporan ini memiliki likuiditas yang cukup untuk menutupi liabilitas jangka pendek.

Dalam mengelola risiko likuiditas, Kelompok Usaha memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional Kelompok Usaha dan untuk mengatasi dampak dari fluktuasi arus kas. Kelompok Usaha juga secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual, termasuk jadwal jatuh tempo hutang jangka panjang mereka.

Tabel di bawah ini merupakan jadwal jatuh tempo liabilitas keuangan Kelompok Usaha per 31 Desember 2017 dan 2016 berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan.

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

Credit risk (continued)

The Group conducts business relationships only with third parties who are recognized and credible. The Group has a policy for all third parties who will make trading on credit has to go through verification procedures first. In addition, the amounts of receivables are monitored continuously to reduce the risk for doubtful accounts.

The carrying amount of the financial assets recorded in the consolidated financial statements, net of any allowance for impairment losses and credit enhancements represents the Group's exposure to credit risk.

Liquidity risk

Liquidity risk is defined as the risk of current cash flow position of the Group shown that short-term revenues are not sufficient to cover short term expenditure. The Group on the date of this report has sufficient liquidity to cover short-term liabilities.

In managing liquidity risk, the Group monitors and maintains levels of cash and cash equivalents deemed adequate to finance the operations of the Group and to overcome the impact of fluctuations in cash flow. The Group also regularly evaluate cash flow projections and actual cash flows, including the schedule of long-term debt maturity.

The table below is a schedule of maturities of financial liabilities of the Group as of December 31, 2017 and 2016, based on contractual undiscounted payments.

49. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

Credit risk (continued)

31 Desember/December 31, 2017						
	Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>Three months to one year</i>	Satu tahun sampai dengan lima tahun/ <i>One to five years</i>	Lebih dari lima tahun/ <i>More than Five years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Liabilitas						Liabilities
Tanpa bunga						<i>Non interest bearing</i>
Liabilitas akseptasi	1.522	-	-	-	1.522	Acceptance payables
Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	172.534	-	-	-	172.534	Payable to LKPEI
Utang nasabah	782.331	-	-	-	782.331	Payables to customers
Utang reasuransi	2.928	110.850	955	-	114.733	Reinsurance payable
Biaya yang masih harus dibayar	-	142.436	16.394	-	158.830	Accrued expenses
Utang klaim	70	14.324	1.041	-	15.435	Claim liabilities
Instrumen tingkat bunga tetap						<i>Fixed interest rate instrument</i>
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	101.892	818.254	751.236	37.681	1.709.063	Loans from bank and non- bank financial institutions
Utang Obligasi-bersih	-	-	224.502	-	224.502	Bonds payable-net
Medium term notes	-	-	69.706	-	69.706	Medium term notes
Utang sewa pembiayaan	890	11.402	35.103	-	47.395	Obligations under finance lease
Utang Al-Musyarakah	79.596	238.787	213.467	24.168	556.018	Al-Musyarakah loan
Utang Al-Mudharabah	7.840	39.202	55.324	2.701	105.067	Al-Mudharabah loan
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	-	-	140.000	-	140.000	Securities for sale with purchase option
Simpanan	7.028.510	556.775	14.100	1.720	7.601.105	Deposits
Simpanan dari bank lain	52.156	-	892	-	53.048	Deposit from other banks
Instrumen dengan tingkat bunga variabel						<i>Variable interest rate instrument</i>
Simpanan	1.375.605	19	-	320	1.375.944	Deposit
Simpanan dari bank lain	144.209	-	-	-	144.209	Deposit from other banks
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	46.566	155.228	89.146	2.726	293.666	Loans from bank and non- bank financial institutions
Jumlah	9.796.649	2.087.277	1.611.866	69.316	13.565.108	Total

49. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

a. Manajemen Risiko (lanjutan)

Risiko kredit (lanjutan)

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

a. Risk Management (continued)

Credit risk (continued)

31 Desember/December 31, 2016						
Kurang dari tiga bulan/ <i>Less than three months</i>	Tiga bulan sampai dengan satu tahun/ <i>Three months to one year</i>	Satu tahun sampai dengan lima tahun/ <i>One to five years</i>	Lebih dari lima tahun/ <i>More than Five years</i>	Jumlah/ <i>Total</i>		
Liabilitas						Liabilities
Tanpa bunga						Non interest bearing
Liabilitas akseptasi	1.686	87.590	-	-	89.276	Acceptance payables Payable to LKPEI
Utang Lembaga Kliring dan Penjaminan Efek Indonesia	121.023	-	-	-	121.023	
Utang nasabah	1.148.686	-	-	-	1.148.686	Payables to customers
Utang reasuransi	1.820	68.918	594	-	71.332	Reinsurance payable
Biaya yang masih harus dibayar	38.879	23.073	4.583	-	66.535	Accrued expenses
Utang klaim	12	2.521	183	-	2.716	Claim liabilities
Instrumen tingkat bunga tetap						Fixed interest rate instrument
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	199.378	510.216	836.874	-	1.546.468	Loans from bank and non- bank financial institutions
Utang Obligasi-bersih	-	-	251.225	-	251.225	Bonds payable-net
Medium term notes	-	-	34.550	-	34.550	Medium term notes
Utang sewa pembiayaan	330	298	20.216	-	20.844	Obligations under finance lease
Utang Al-Musyarakah	212.727	201.243	241.502	-	655.472	Al-Musyarakah loan
Utang Al-Mudharabah	22.406	51.044	67.004	4.349	144.803	Al-Mudharabah loan
Efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	85.302	100.230	-	-	185.532	Securities for sale with purchase option
Simpanan	1.504.196	-	7.359.560	-	8.863.756	Deposits
Simpanan dari bank lain	185.798	19.118	505	-	205.421	Deposit from other banks
Instrumen dengan tingkat bunga variabel						Variable interest rate instrument
Simpanan	426.322	86.244	963.085	-	1.475.651	Deposit
Simpanan dari bank lain	308.236	-	-	-	308.236	Deposit from other banks
Utang bank dan institusi keuangan non-bank	39.150	-	359.378	-	398.528	Loans from bank and non- bank financial institutions
Jumlah	4.295.951	1.150.495	10.139.259	4.349	15.590.054	Total

49. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Manajemen Modal

Kelompok Usaha berupaya untuk mencapai struktur modal yang optimal dalam mencapai tujuan usaha mereka, termasuk mempertahankan rasio modal yang sehat dan peringkat kredit yang kuat, dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

Beberapa instrumen utang Kelompok Usaha memiliki pembatasan tertentu yang menentukan rasio leverage maksimum (*maximum leverage ratios*). Kelompok Usaha telah memenuhi semua persyaratan modal yang ditentukan secara eksternal.

Pihak manajemen melakukan pengawasan modal dengan menggunakan beberapa pengukuran leverage keuangan seperti rasio hutang terhadap ekuitas.

Kelompok Usaha terus mengelola pembatasan utang mereka dan struktur modal. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, rasio utang terhadap ekuitas konsolidasi Kelompok Usaha adalah sebagai berikut:

	2017	2016
Pinjaman	12.179.722	13.498.697
Kas dan setara kas	1.780.674	3.245.481
Pinjaman bersih	10.399.048	10.253.216
Ekuitas	5.627.520	6.405.279
Rasio pinjaman terhadap ekuitas	185%	160%

Bank Indonesia mewajibkan bank untuk memenuhi tingkat rasio kecukupan modal. Rasio kewajiban penyediaan modal BMNCI dengan memperhitungkan risiko kredit, risiko operasional dan risiko pasar pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing adalah 12,58% dan 19,54%.

MNCS diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum modal kerja bersih seperti yang disebutkan dalam peraturan Bapepam-LK No.V.D.5 dan peraturan Bapepam-LK No.X.E.1, yang antara lain, menentukan Modal Kerja Bersih Disesuaikan untuk entitas efek yang beroperasi sebagai perantara perdagangan efek, manajer investasi dan penjamin emisi. Jika hal ini tidak dipantau dan disesuaikan, tingkat modal kerja sesuai dengan peraturan dapat berada di bawah jumlah minimum yang ditetapkan oleh regulator, yang dapat mengakibatkan berbagai sanksi mulai dari denda sampai dengan penghentian sebagian atau seluruh kegiatan usaha.

Untuk mengatasi risiko ini, MNCS, mengevaluasi tingkat kebutuhan modal kerja berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang modal kerja bersih yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Capital Management

The Group strives to achieve the optimal capital structure to achieve its business objectives, including maintaining a healthy capital ratios and strong credit ratings, and maximizing shareholder value.

Some of the debt instruments of the Group have certain restrictions that determine the maximum leverage ratio (*maximum leverage ratios*). The Group has complied with all requirements specified in external capital.

The management monitors capital by using some measure of financial leverage as the ratio of debt to equity.

The Group continues to manage its debt and restrictions on capital structure. As of December 31, 2017 and 2016, the ratio of consolidated debt to equity of the Group are as follows:

	Debt
Cash and cash equivalents	
Net debt	
Equity	
Debt to equity ratio	

Bank Indonesia requires banks to maintain a certain level of capital adequacy ratio. BMNCI's capital adequacy ratio with consideration for credit, operational and market risks as of December 31, 2017 and 2016 are 12.58% and 19.54%, respectively.

MNCS is also required to maintain minimum net working capital requirements as specified in the Bapepam regulations and No.V.D.5 and Bapepam-LK regulations No.X.E.1, which among others, determine the Net Working Capital Adjusted for securities firms that operate as a securities broker, investment manager and underwriter. If this is not monitored and adjusted, the level of working capital as per the rules can be below the minimum amount set by the regulator, which can lead to various sanctions ranging from fines to termination of part or all of the business.

To manage this risk, MNCS, continues to evaluate the level of working capital requirements under the rules and regulations to monitor the development of net working capital as required and prepare the necessary increase in the minimum limits as per the rules that may occur from time to time in the future.

49. KEBIJAKAN DAN TUJUAN PENGELOLAAN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

b. Manajemen Modal (lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 MNCS, Entitas anak, telah memenuhi persyaratan Modal Kerja Bersih Disesuaikan dan mempunyai modal disetor di atas ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan No.179/KMK.010/2003 tentang kepemilikan saham dan permodalan entitas efek.

Sehubungan dengan permodalan asuransi jiwa dan asuransi umum kerugian sebagaimana diwajibkan oleh POJK Nomor 67 tahun 2016 BAB II pasal 6, entitas asuransi diharuskan memiliki modal disetor minimum Rp150.000 juta. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, MNCL dan MNCAI telah memenuhi persyaratan.

50. INSTRUMEN KEUANGAN

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

31 Desember/December 31, 2017						
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan pada FVTPL/ Financial asset At FVTPL	Kelompok Diperdagangkan/ Held for trading	Dimiliki hingga jatuh tempo/ Held to maturity	Tersedia untuk dijual/ Available for sale	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans dan receivables	Jumlah/ Total
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	-	-	-	-	1.780.674	1.780.674
Deposito yang dijadikan jaminan pada lembaga kliring dan penjaminan efek Indonesia Deposits used as collateral with Institute of clearing and settlement guarantee for securities company in Indonesia	-	-	-	-	7.012	7.012
Piutang pada Lembaga Kliring dan Penjamin Efek Indonesia/ Receivables from Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia	-	-	-	-	237.072	237.072
Efek-efek/ Securities	-	3.071.952	521.856	674.819	-	4.268.627
Piutang nasabah/ Receivables from customers	-	-	-	-	811.042	811.042
Piutang / receivables	-	-	-	-	303.137	303.137
Piutang Musyarakah Mutanaqisah/ Musyarakah Mutanaqisah receivables	-	-	-	-	168.873	168.873
Piutang pembiayaan/ Financing receivables	-	-	-	-	2.803.553	2.803.553
Premi dan piutang reasuransi/ Premium and reinsurance receivables	-	-	-	-	288.821	288.821
Kredit/ Loans	-	-	-	-	6.724.938	6.724.938
Aset lain-lain/ Other assets	20	-	-	-	390.100	390.120
Jumlah Aset/ Total Assets	20	3.071.952	521.856	674.819	13.515.222	17.783.869

49. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)

b. Capital Management (continued)

As of December 31, 2017 and 2016, MNCS has met the requirements of Adjusted Net Working Capital and has a paid up capital above the required capital established by Decree of the Ministry of Finance No.179/KMK.010/2003 about ownership shares and securities companies.

In connection with the capital of life insurance and general insurance, as required by POJK No. 67 of 2016 Chapter II Article 6 companies are required to have a minimum paid up capital of Rp150,000 million. As of December 31, 2017 and 2016, MNCL and MNCAI have complied with the requirements.

50. FINANCIAL INSTRUMENTS

a. Classification of Financial Instruments

Classification of financial assets as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

50. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

50. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

a. Classification of Financial Instruments (continued)

	31 Desember/December 31, 2016					
Aset keuangan/ Financial assets	Aset keuangan pada FVTPL/ Financial asset At FVTPL	Kelompok Diperdagangkan/ Held for trading	Dimiliki hingga jatuh tempo/ Held to Maturity	Tersedia untuk dijual/ Available for Sale	Pinjaman yang diberikan dan piutang/ Loans dan Receivables	Jumlah/ Total
Kas dan setara kas/ Cash and cash equivalents	-	-	-	-	3.245.481	3.245.481
Deposito yang dijadikan jaminan pada lembaga kliring dan penjaminan efek Indonesia Deposits used as collateral with Institute of clearing and settlement guarantee for securities company in Indonesia	-	-	-	-	6.659	6.659
Piutang pada Lembaga Kliring dan Penjamin Efek Indonesia/ Receivables from Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia	-	-	-	-	143.543	143.543
Efek-efek/ Securities	-	2.928.673	476.251	1.091.907	-	4.496.831
Piutang nasabah/ Receivables from customers	-	-	-	-	1.213.479	1.213.479
Piutang / receivables	-	-	-	-	483.577	483.577
Piutang Musyarakah Mutanaqisah Musyarakah Mutanaqisah receivables	-	-	-	-	85.622	85.622
Piutang pembiayaan/ Financing receivables	-	-	-	-	2.738.982	2.738.982
Premi dan piutang reasuransi/ Premium and reinsurance receivables	-	-	-	-	238.773	238.773
Kredit/ Loans	-	-	-	-	7.863.036	7.863.036
Aset lain-lain/ Other assets	4.842	-	-	-	327.671	332.513
Jumlah Aset/ Total Assets	4.842	2.928.673	476.251	1.091.907	16.346.823	20.848.496

50. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

a. Klasifikasi Instrumen Keuangan (lanjutan)

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Liabilitas pada biaya perolehan diamortisasi/ Liability at amortized cost

Simpanan/Deposits	8.977.049	10.175.824
Simpanan dari bank lainnya/Deposits from other banks	197.257	507.316
Liabilitas segera/Liabilities immediately payable	39.585	33.266
Utang lembaga keliring dan penjamin efek Indonesia/ Payable to Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia	0	0
Utang nasabah/Payables to customers	172.534	121.023
Utang reasuransi/Reinsurance payable	782.331	1.148.686
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi/Insurance and investment contracts liability	114.733	183.995
Utang bank/Bank loans	512.277	458.138
Utang lembaga keuangan lainnya/	1.972.323	1.685.695
Utang Al-Musyarakah/Al-Musyarakah loan	30.406	43.190
Utang Al-Mudharabah/Al-Mudharabah loan	556.018	674.472
Utang obligasi/Bonds payable	105.067	140.454
Medium term notes	224.502	223.311
Utang sewa pembiayaan/Obligation under financial lease	69.706	30.711
Liabilitas lain-lain/Other liabilities	47.394	17.664
Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	353.911	385.325
	14.155.093	15.829.070

Tidak ada liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi selain liabilitas derivatif yang masih terutang pada 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebesar Rp95 juta dan Rp3.576 juta.

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Kecuali disebutkan pada tabel berikut ini, manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat aset dan liabilitas keuangan yang dicatat sebesar biaya perolehan diamortisasi dalam laporan keuangan konsolidasian mendekati nilai wajarnya:

	31 Desember/December 31, 2017	
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value
Aset keuangan		
Kredit	6.724.938	6.724.938
Dimiliki hingga jatuh tempo efek-efek	521.856	521.856
Liabilitas keuangan		
Utang obligasi	224.502	224.502
Medium term notes	69.706	69.706
Simpanan	8.977.049	8.977.049
Simpanan dari bank lain	197.256	197.256

50. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

a. Classification of Financial Instruments (continued)

Financial liabilities classified as financial liabilities at amortized cost as of December 31, 2017 and 2016 is as follows:

	2017	2016
Simpanan/Deposits	8.977.049	10.175.824
Simpanan dari bank lainnya/Deposits from other banks	197.257	507.316
Liabilitas segera/Liabilities immediately payable	39.585	33.266
Utang lembaga keliring dan penjamin efek Indonesia/ Payable to Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia	0	0
Utang nasabah/Payables to customers	172.534	121.023
Utang reasuransi/Reinsurance payable	782.331	1.148.686
Liabilitas kontrak asuransi dan investasi/Insurance and investment contracts liability	114.733	183.995
Utang bank/Bank loans	512.277	458.138
Utang lembaga keuangan lainnya/	1.972.323	1.685.695
Utang Al-Musyarakah/Al-Musyarakah loan	30.406	43.190
Utang Al-Mudharabah/Al-Mudharabah loan	556.018	674.472
Utang obligasi/Bonds payable	105.067	140.454
Medium term notes	224.502	223.311
Utang sewa pembiayaan/Obligation under financial lease	69.706	30.711
Liabilitas lain-lain/Other liabilities	47.394	17.664
Jumlah Liabilitas/ Total Liabilities	353.911	385.325
	14.155.093	15.829.070

There are no financial liabilities at fair value through profit or loss except for outstanding derivative liabilities as of December 31, 2017 and 2016 amounting to Rp95 million and Rp3,576 million, respectively.

b. Fair Value of Financial Instruments

Except as shown in the following table, the management considers that the carrying amounts of financial assets and financial liabilities recorded at amortized cost in the consolidated financial statements approximate their fair values:

Financial asset
Loans
Held-to-maturity securities
Financial liability
Bonds payable
Medium terms notes
Deposits
Deposits from other banks

50. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

50. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	31 Desember/December 31, 2016		
	Nilai tercatat/ Carrying amount	Estimasi nilai wajar/ Estimated fair value	
Aset keuangan			Financial asset
Kredit	7.863.036	7.920.587	Loans
Dimiliki hingga jatuh tempo efek- efek	476.251	374.693	Held-to-maturity securities
Liabilitas keuangan			Financial liability
Utang obligasi	223.311	223.311	Bonds payable
Medium term notes	30.771	30.771	Medium terms notes
Simpanan	10.175.824	10.208.127	Deposits
Simpanan dari bank lain	507.316	507.376	Deposits from other banks

Teknik penilaian dan asumsi yang diterapkan untuk
tujuan pengukuran nilai wajar

Valuation techniques and assumptions applied for the
purposes of measuring fair value

Nilai wajar aset keuangan dan non keuangan dan liabilitas keuangan ditentukan sebagai berikut:

The fair value of financial assets and non financial asset and financial liabilities are determined as follows:

- Manajemen menganggap bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, deposito dan piutang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Entitas Efek Indonesia, piutang nasabah, piutang, piutang musyarakah mutanaqisah, premi dan aset reasuransi, simpanan, simpanan dari bank lain, Utang kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan Entitas Efek Indonesia, utang kepada nasabah, liabilitas lain-lain, utang reasuransi dan utang lain-lain, utang Al-Musyarakah, utang Al-Mudharabah, asuransi dan likuiditas kontrak investasi, dan kewajiban sewa pembiayaan mendekati nilai wajarnya karena jatuh tempo dalam jangka pendek atau yang memiliki tingkat suku bunga pasar.
- Nilai wajar efek-efek dengan syarat dan kondisi standar dan diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar.
- Nilai wajar tagihan dan liabilitas derivatif diukur dengan menggunakan kurs kuotasi dan kurva yield yang berasal dari suku bunga kuotasi mencocokkan jatuh tempo kontrak.
- Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya (tidak termasuk yang dijelaskan di atas) ditentukan sesuai dengan model penentuan harga yang berlaku umum berdasarkan analisis discounted cash flow.
- Management considers that the carrying amount of cash and cash equivalent, deposit and receivable from Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia, receivable from customers, financing receivables, financing receivables, musyarakah mutanaqisah financing receivables, premiums and reinsurance assets, deposits, deposits from other banks, payable to Institute of Clearing and Settlement Guarantee for Securities Entity in Indonesia, payable to customers, other liabilities, reinsurance and other payables, al-musyarakah and al-mudharabah loan, and insurance and investment contract liquidity, and obligation under finance lease approximate their fair values either because of their short-term maturities or they carry market rates of interest.
- Fair value of securities with standard terms and conditions and traded on active markets are determined with reference to quoted market prices.
- Fair value of derivative receivables and payables are measured using quoted forward exchange rates and yield curves derived from quoted interest rates matching maturities of the contracts.
- Fair value of other financial assets and financial liabilities (excluding those described above) are determined in accordance with generally accepted pricing models on discounted cash flow analysis.

50. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

50. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Fair Value of Financial Instruments (continued)

Tabel berikut ini memberikan kondisi dari nilai wajar dari aset dan liabilitas yang dikelompokkan ke Tingkat 1 sampai 3 didasarkan pada sejauh mana nilai wajar diamati.

The following tables provide an analysis of fair value of assets and liabilities, grouped into Levels 1 to 3 based on the degree to which the fair value is observable.

	2017				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan					Financial assets
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Efek-efek	184.679	-	-	184.679	Equity securities
Obligasi pemerintah Indonesia	306.005	-	-	306.005	Indonesian government bonds
Reksa dana	81.336	-	-	81.336	Mutual funds
Obligasi lainnya	102.799	-	-	102.799	Other bonds
Subjumlah	674.819	-	-	674.819	Subtotal
Diperdagangkan					Trading
Efek-efek	26.316	-	-	26.316	Equity securities
Obligasi pemerintah Indonesia	142.389	-	-	142.389	Indonesian government bonds
Reksa dana	173.850	-	-	173.850	Mutual funds
Dana kelolaan	2.628.668	-	-	2.628.668	Manage funds
Obligasi	100.729	-	-	100.729	Bonds
Tagihan derivatif	-	20	-	20	Derivative receivable
Subjumlah	3.071.952	20	-	3.071.972	Subtotal
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held-to-maturity
Obligasi Pemerintah Indonesia	476.251	-	-	476.251	Indonesia Government Bonds
Obligasi	45.605	-	-	45.605	Bonds
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivable
Kredit-Bersih	-	-	6.724.938	6.724.938	Loans-Net
Jumlah Aset	4.268.627	20	6.724.938	10.993.585	Total Assets
Liabilitas diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Diperdagangkan					Trading
Liabilitas derivatif	-	95	-	95	Derivative payables
Liabilitas dimana nilai wajar diungkapkan					Liabilities to which fair value are disclosed
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Utang obligasi	224.502	-	-	224.502	Bonds payable
Medium term notes	-	69.706	-	69.706	Medium term notes
Simpanan	-	-	8.977.049	8.977.049	Deposits
	-	-	197.257	197.257	Deposits from other banks
Simpanan dari bank lain					
Jumlah Liabilitas	224.502	69.801	9.174.306	9.468.609	Total Liabilities
Selisih	4.044.125	(69.781)	(2.449.368)	1.524.976	Difference

50. INSTRUMEN KEUANGAN (lanjutan)

50. FINANCIAL INSTRUMENTS (continued)

b. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

b. Fair Value of Financial Instruments (continued)

	2016				
	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Jumlah/ Total	
Aset diukur pada nilai wajar					Assets measured at fair value
Aset keuangan					Financial assets
Tersedia untuk dijual					Available-for-sale
Efek-efek	224.262	-	-	224.262	Equity securities
Obligasi pemerintah Indonesia	437.825	-	-	437.825	Indonesian government bonds
Reksa dana	50.223	-	-	50.223	Mutual funds
Medium term notes	30.000	-	-	30.000	Medium term notes
Obligasi lainnya	349.597	-	-	349.597	Other bonds
Subjumlah	1.091.907	-	-	1.091.907	Subtotal
Diperdagangkan					Trading
Efek-efek	29.114	-	-	29.114	Equity securities
Obligasi pemerintah Indonesia	31.921	-	-	31.921	Indonesian government bonds
Reksa dana	265.548	-	-	265.548	Mutual funds
Dana kelolaan	2.539.763	-	-	2.539.763	Manage funds
Obligasi	62.327	-	-	62.327	Bonds
Tagihan derivatif	-	4.842	-	4.842	Derivative receivable
Subjumlah	2.928.673	4.842	-	2.933.515	Subtotal
Aset yang nilai wajarnya diungkapkan					Assets for which fair values are disclosed
Dimiliki hingga jatuh tempo					Held-to-maturity
Efek-efek	374.693	-	-	374.693	Securities
Pinjaman yang diberikan dan piutang					Loans and receivable
Kredit-Bersih	-	-	7.920.587	7.920.587	Loans-Net
Jumlah Aset	4.395.273	4.842	7.920.587	12.320.702	Total Assets
Liabilitas diukur pada nilai wajar					Liabilities measured at fair value
Liabilitas keuangan					Financial liabilities
Diperdagangkan					Trading
Liabilitas derivatif	-	3.576	-	3.576	Derivative payables
Liabilitas dimana nilai wajar diungkapkan					Liabilities to which fair value are disclosed
Biaya perolehan diamortisasi					Amortized cost
Utang obligasi	211.027	-	-	211.027	Bonds payable
Medium term notes	-	29.078	-	29.078	Medium term notes
Simpanan	-	-	10.208.127	10.208.127	Deposits
	-	-	507.376	507.376	Deposits from other banks
Simpanan dari bank lain					
Jumlah Liabilitas	211.027	32.654	10.715.503	10.959.184	Total Liabilities
Selisih	4.184.246	(27.812)	2.794.916	1.361.518	Difference

Pada tahun 2017 dan 2016 tidak terdapat perpindahan metode pengukuran nilai wajar dari tingkat 1 menjadi tingkat 2, dan sebaliknya.

In 2017 and 2016, there is no movement in fair value measurement method from level 1 to level 2, and vice versa.

51. PENGUNGKAPAN TAMBAHAN ATAS AKTIVITAS INVESTASI DAN PENDANAAN NONKAS

	2017
Perolehan aset tetap melalui utang sewa pembiayaan	30.243

52. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II Tahap 1, Perusahaan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2017 dan tahun yang berakhir pada tanggal tersebut dengan angka komparatif 31 Desember 2016 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. Laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono dengan laporan auditor independen No.R-034/MNCKI-KPS/FD01/II/2018 tanggal 27 Februari 2018

Laporan keuangan Konsolidasian tersebut diterbitkan kembali disertai dengan beberapa perubahan dalam laporan keuangan konsolidasian dan catatan 1c, 3a, 3c, 3x, 3z, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 40, 42 atas laporan keuangan konsolidasian untuk untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi II tahap 1 Perusahaan.

53. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Manajemen Entitas bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah diotorisasi oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 30 April 2018.

51. SUPPLEMENTAL DISCLOSURE ON NONCASH INVESTING AND FINANCING ACTIVITY

	2016	
	6.642	Acquisition of fixed assets through financial lease

52. RE-ISSUE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

In relation to the Company's plan to conduct a Phase II Bonds II Public Offering, the Company has re-issued the consolidated financial statements as of December 31, 2017 and the year then ended with comparative figures of December 31, 2016 and the year ended December 31, 2016. Report the consolidated statements has been audited by the Public Audit Firm Kanaka Puradiredja, Suhartono with independent auditor report No.R-034/MNCKI-KPS/FD01/II/2018 dated February 27, 2018.

The consolidated financial statements are reissue hereafter accompanied by several changes in the consolidated financial statements no. 1c, 3a, 3c, 3x, 3z, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 29, 30, 31, 37, 40, 42 notes to the consolidated financial statements to comply with the requirements of the Financial Services Authority in connection with the Company's Phase 1 Bonds II Public Offering.

53. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

The Entity's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements that have been authorized for issue by the Directors on April 30, 2018.

